

ISSN 2085-9937

E-ISSN 2598 - 1242

Terakreditasi: 148/M/KPT/2020

PATANJALA

Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya
Vol. 13 No. 2 Oktober 2021



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI JAWA BARAT**

PATANJALA Vol. 13 No. 2 Oktober 2021: 141 - 246

Patanjala

Volume 13 Nomor 2 Oktober 2021

Patanjala bermakna air sungai yang tiada hentinya mengalir mengikuti alur yang dilaluinya hingga ke muara. Seperti halnya karakteristik air sungai, manusia harus bekerja dan beramal baik, serta fokus pada cita-citanya. **Patanjala** adalah majalah ilmiah yang memuat hasil-hasil penelitian tentang nilai budaya, seni, dan film serta kesejarahan yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat di wilayah kerja Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung. Redaksi juga menerima artikel hasil penelitian di Indonesia pada umumnya. Mulai 2020, **Patanjala** hanya diterbitkan dua kali dalam setahun, yaitu pada April dan Oktober. Siapa pun dapat mengutip sebagian isi dari jurnal penelitian ini dengan ketentuan menuliskan sumbernya.

Pelindung

Direktur Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Penanggung Jawab

Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat

Dewan Redaksi

Ketua : Iim Imadudin, S.S., M.Hum (Sejarah)
Anggota : 1. Dra. Ria Intani T. (Antropologi)
2. Dra. Lina Herlinawati (Sastra Indonesia)
3. Dra. Lasmiyati (Sejarah)
4. Hary Ganjar Budiman, S.S. (Sejarah)
5. Desmond Satria Andrian, S.S., M.Si.
(Editor Bahasa Inggris)

Redaktur Pelaksana

Titan Firman, S.Kom.

Mitra Bestari

Dr. Ade Makmur Kartawinata (Antropologi, UNPAD)
Dr. Ading Kusdiana (Sejarah Peradaban Islam, UIN Sunan Gunung Djati)
Dr. Bambang Rudito (SBM, ITB)
Dr. Dade Mahzuni, M.Si. (Kajian Budaya, UNPAD)
Dr. Didik Pradjoko, M.Hum (Ilmu Sejarah, UI)
Dr. Gani Ahmad Jaelani, DEA, (Ilmu Sejarah, UNPAD)

Diterbitkan oleh

Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Jl. Cinambo No. 136 Ujungberung – Bandung 40294
Telp./Faks. (022) 7804942
e-mail: mail.patanjala@gmail.com
<http://ejournalpatanjala.kemdikbud.go.id>
<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar>

Penata Sampul: Titan Firman

Gambar: Pasar dan perdagangan di Banten, Romeyn de Hooghe, 1682 - 1733
Sumber: <https://www.rijksmuseum.nl/>

Dicetak oleh

CV. MAWAR PUTRA PERDANA
Kebon Jati 79 Bandung
Telp/Fax : (022) 4266016 - 082128240114, e-mail: mawarpp@yahoo.com

Isi di luar tanggung jawab percetakan

PENGANTAR REDAKSI

Penerbitan Jurnal **Patanjala** Vol. 13 No. 2 mengalami perubahan nomenklatur penerbit sesuai dengan dinamika di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan pertama nomenklatur Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat. Perubahan kedua nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertambah dengan masuknya ristekdikti menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Jurnal Patanjala Vol. 13 No. 2 menghadirkan 6 tulisan dengan rincian 3 artikel sejarah, 1 artikel arkeologi, dan 2 artikel budaya. Artikel sejarah membahas masa kejayaan Banten sebagai kota pelabuhan, kemunculan pertunjukan adu domba di Priangan, dan perjuangan integrasi wilayah Kalimantan Barat ke dalam Republik Indonesia. Artikel arkeologi mengkaji lanskap budaya perkebunan kina di Kabupaten Bandung. Artikel bertema budaya mengkaji budaya pasar di Balikpapan dan nilai budaya pada ritual bulangan londong masyarakat Toraja.

Gregorius Andika Ariwibowo mengungkap peranan Banten pada Masa Kejayaan Jalur Rempah Nusantara Abad XVI Hingga Abad XVII. Kota pelabuhan Banten telah menjadi kota perdagangan terbuka yang menjadi persinggahan para pedagang dari Nusantara dan kawasan Asia. Kota Pelabuhan Banten menjadi salah satu pusat ekonomi dan perdagangan terbesar di Asia Tenggara yang bersaing dengan Batavia. Banten menjadi kota kosmopolitan menjadi urat nadi aktivitas ekonomi dan perdagangan dari jaringan transnasional. Aktivitas jaringan transnasional tersebut kemudian mencipta rupa interaksi dan akulturasi budaya, ide, dan pengetahuan. Kesultanan Banten berperan aktif dalam jejaring kosmopolitanisme budaya Arab dengan terbentuknya jaringan Banten dan Mekah.

Budiawati Supangkat, Rahman Latif Alfian, Johan Iskandar membahas budaya pasar tradisional di Pasar Baru Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Balikpapan merupakan pintu masuk jalur perniagaan di Kalimantan Timur. Budaya pasar dipahami sebagai keseluruhan norma dan nilai yang melingkupi kegiatan pemangku pasar tradisional di pasar. Para pedagang yang berniaga di Pasar Baru Balikpapan memiliki latar budaya yang heterogen, antara lain dari Sulawesi Selatan, Banjarmasin, Jawa, Madura, dan Sumatera. Mereka membawa nilai budaya masing-masing dalam kehidupan keseharian. Meski demikian, telah dicapai kesepakatan dalam berkegiatan di pasar sesuai kondisi dan kebutuhan para pedagang. Secara perlahan tercipta pola tindakan dinamis para pedagang yang dikonstruksi dalam waktu yang cukup lama.

Lia Nuralia dan **Iim Imadudin** mengkaji nilai budaya pada lanskap industri Perkebunan Kina Cinyuruan Bandung pada Masa Kolonial. Perkebunan Kina Cinyuruan di Bandung telah berdiri sejak tahun 1855. Saat ini menjadi kebun afdeeling dari Perkebunan Kertamanah PTPN VIII. Lanskap budaya industri perkebunan dimaksud meliputi area bekas kebun kina dan permukiman emplasemen, yang mengandung nilai budaya. Nilai budaya yang terkandung di dalamnya merupakan nilai budaya tradisional Sunda terkait kearifan lokal; dan nilai budaya kolonial yang terwujud dalam penggunaan teknologi modern. Kedua nilai budaya tersebut tampak pada tata letak dan arsitektur bangunan

permukiman, serta tata guna lahan area kebun sebagai sistem ekonomi subsistensi dan perkebunan sebagai sistem ekonomi modern Barat yang komersial.

Markus Deli Girik Allo, Nilma Taula'bi', Elim Trika Sudarsi, dan Eka Prabawati Rum menganalisis nilai budaya ritual *bulangan londong sembang suke barata* masyarakat adat Toraja. *Bulangan londong* adalah ritual dalam kepercayaan "aluk todolo" atau adat dalam kepercayaan lama masyarakat Toraja sebagai sarana untuk berhubungan dengan sesuatu yang mitos yang dianggap memiliki kekuatan untuk menyelamatkan, menjiwai, dan memberikan kedamaian, yaitu *puang matua*. Nilai-nilai budaya tersebut adalah *manuk* yang melambangkan nilai etos kerja, *ussembang suke barata* yang mewakili nilai religius bambu yang ditebas oleh mina, dan kayunan londong sebagai personifikasi nilai patriotik pemimpin. Nilai budaya dapat disosialisasikan dalam bentuk bahan ajar untuk peserta didik sebagai wahana penguatan karakter.

Budi Gustaman membahas pertunjukan adu domba di Priangan pada masa kolonial. Keberadaan jenis domba Garut dilatarbelakangi impor domba yang diinisiasi oleh K.F. Holle. Saat itu impor domba bertujuan membudidayakan wol di wilayah Garut. Kawin silang domba impor dan domba lokal menghasilkan jenis domba petarung sehingga disebut domba Garut. Masyarakat pribumi memiliki kebiasaan mengadu binatang sebagai bentuk hiburan. Dalam perkembangannya, pertunjukan adu domba ditampilkan pada setiap event besar, meski banyak kecaman dari orang Eropa yang disuarakan melalui media massa. Sebagai domba petarung, domba Garut populer sejak akhir abad ke-19, dan bahkan lebih populer lagi pada awal abad ke-20.

Mohammad Rikaz Prabowo dan Aman mengungkap perjuangan integrasi wilayah Kalimantan Barat ke dalam Republik Indonesia (RI). Pada tahun 1950 proses integrasi tersebut diwarnai krisis politik antara kubu republikan dengan pendukung Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) yang mempertahankan federalisme bersama Republik Indonesia Serikat (RIS). Krisis tersebut telah menyebabkan pemogokan massal pada bulan Maret 1950 di Pontianak yang melumpuhkan ekonomi di Kalimantan Barat. Beberapa upaya dilakukan untuk menengahi krisis. Salah satunya, kedatangan Komisaris RIS dan DPR RIS guna menyelesaikan krisis. Penangkapan Sultan Hamid II pada 5 April 1950 secara drastis mengubah konstelasi politik. Pemerintahan DIKB menjadi goyah sehingga mendorong penyerahan kekuasaan eksekutif kepada Pemerintah RIS pada 24 Mei 1950. DIKB secara resmi berintegrasi dalam RI setelah RIS dinyatakan dibubarkan pada 17 Agustus 1950.

Patanjala

Volume 13 Nomor 2 Oktober 2021

DAFTAR ISI

<p>Kota dan Jaringan Kosmopolitan: Banten pada Masa Kejayaan Jalur Rempah Nusantara Abad XVI Hingga Abad XVII <i>City and Cosmopolitan Networks: Banten During The Nusantara Spice Route Between The 16th To 17th Century</i> Gregorius Andika Ariwibowo</p>	<p>141 - 158</p>
<p>Menyelidik Budaya Pasar Tradisional di Pasar Baru Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur <i>The Reveal of Market Culture in The Traditional Market of Pasar Baru in Balikpapan City, East Kalimantan</i> Budiawati Supangkat, Rahman Latif Alfian, Johan Iskandar</p>	<p>159 - 173</p>
<p>Nilai Budaya pada Lanskap Industri Perkebunan Kina Cinyuruan Bandung Pada Masa Kolonial <i>The Cultural Value in The Landscape of The Cinyuruan Quinine Plantation Industry in Bandung During The Colonial Period</i> Lia Nuralia & Iim Imadudin</p>	<p>175 - 192</p>
<p>The Cultural Values of The Bulangan Londong Sembangan Suke Barata Ritual of The Indigenous People of Toraja <i>Nilai Budaya Ritual Bulangan Londong Sembangan Suke Barata Masyarakat Adat Toraja</i> Markus Deli Girik Allo, Nilma Taula'bi', Elim Trika Sudarsi, Eka Prabawati Rum</p>	<p>193 - 207</p>
<p>Menilik Pertunjukan Adu Domba di Priangan pada Masa Kolonial <i>The Fighting Sheep Show in Priangan During The Colonial Period</i> Budi Gustaman</p>	<p>209 - 223</p>
<p>Krisis Politik di Kalimantan Barat 1950: Suatu Proses Menuju Integrasi ke Dalam Republik Indonesia <i>The 1950 Political Crisis in West Kalimantan: A Process Towards The Integration Into The Republic of Indonesia</i> Mohammad Rikaz Prabowo & Aman</p>	<p>225 - 241</p>
<p>Tinjauan Buku Satu Kampung Tiga Maestro: Jejak Warisan Budaya di Kota Bengawan Gregorius Andika Ariwibowo</p>	<p>243 – 246</p>

Biodata Penulis

Pedoman Penulisan

Lembar Abstrak

Abstract Sheet

Indeks Penulis

Indeks Kumulatif

KOTA DAN JARINGAN KOSMOPOLITAN: BANTEN PADA MASA KEJAYAAN JALUR REMPAH NUSANTARA ABAD XVI HINGGA ABAD XVII¹

*CITY AND COSMOPOLITAN NETWORKS: BANTEN DURING THE NUSANTARA
SPICE ROUTE BETWEEN THE 16TH TO 17TH CENTURY*

Gregorius Andika Ariwibowo
Balai Arkeologi Jawa Barat
Jl. Raya Tagog Cinunuk No.KM. 17, Cimekar, Cileunyi, Bandung.
e-mail: andikaariwibowo@gmail.com

Naskah Diterima: 11 Mei 2021

Naskah Direvisi: 1 September 2021

Naskah Disetujui: 18 Oktober 2021

DOI: 10.30959/patanjala.v13i2.800

Abstrak

Kota kosmopolitan merupakan simpul dari jaringan-jaringan transnasional yang merupakan urat nadi dari aktivitas ekonomi dan perdagangan global. Aktivitas dan dinamika dari berbagai elemen-elemen jaringan transnasional tersebut kemudian juga turut menciptakan berbagai bentuk interaksi dan akulturasi budaya, ide, dan pengetahuan. Kehidupan kosmopolis yang tercipta di Banten telah memberikan warna dalam sejarah Jalur Rempah Nusantara. Kajian ini secara lebih dalam akan melihat seperti apakah rupa dari keberagaman yang tercipta di Banten? serta bagaimanakah mereka dapat saling menjaga keberagaman ini sehingga mampu menjadikan Banten sebagai pelabuhan kosmopolitan yang kaya pada masa tersebut? Kajian ini menggunakan metodologi sejarah dengan memanfaatkan beragam sumber, baik primer maupun sekunder, terutama dari beragam catatan harian, jurnal, dan dokumentasi yang berasal dari sekitar abad ke-16 hingga abad ke-17. Kota pelabuhan Banten telah menjadi kota perdagangan terbuka yang disinggahi oleh berbagai pedagang dari berbagai negeri di Nusantara dan Asia. Banten ketika itu merupakan kota yang memang dibangun dan dikelola untuk menjadi sebuah kota dagang yang terbuka bagi berbagai bangsa.

Kata kunci: Kesultanan Banten, Perdagangan Lada, Kosmopolitan, Jalur Rempah, Keberagaman.

Abstract

The cosmopolitan city served as the center of transnational networks. As a result, it is the lifeblood of global economic activity and trade. The activities and dynamics of the various elements related to the transnational network have also created various forms of interaction and acculturation not only to culture but also to ideas and knowledge. The cosmopolitan life created in Banten has had an impact on the history of the Nusantara Spice Route. The study reveals the diversity formed in the past of Banten, and how could they maintain the diversity to make Banten as a prosperous cosmopolitan port at that time. Beside that, the study explores deeper into the form of diversity created in Banten and the efforts to maintain the diversity so as to make Banten a rich

¹ Sebagian data dan sumber artikel ini diambil dari draft buku “Banten: Kota Pelabuhan Jalur Rempah Nusantara” sebagai bagian dari “Program Penyusunan Naskah Kota-Kota di Jalur Rempah Pada Era Kejayaan Nusantara” yang diselenggarakan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

cosmopolitan port at that time. The study uses a historical methodology with a variety of sources, both primary and secondary, mainly from various diaries, journals, and documentation dating from around the 16th century to the 17th century. Banten as a port city at that time had become an open trading city that was often visited by various traders not only from various countries in the Nusantara but also from the other Asian regions. On the other hand, the image of Banten as an open port at that time could not be separated from the facts that Banten was deliberately built and managed to become an open trading city for various nations in the world.

Keywords: banten sultanate, pepper trade, cosmopolitan, spice route, diversity.

A. PENDAHULUAN

Brenda Yeoh dan Weiqian Lin (2012) dalam pembahasannya mengenai *Cosmopolitanism in Cities and Beyond* mengartikan kota kosmopolitan sebagai kota yang memiliki karakter multikultural yang khas. Kota kosmopolitan merupakan bagian atau simpul dari jaringan-jaringan transnasional yang terbentuk dari aktivitas ekonomi dan perdagangan. Kemudian terciptalah berbagai interaksi dan pertukaran budaya, ide, dan beragam aktivitas manusia (Yeoh & Lin, 2012: 208).

Melalui penjelasan mengenai terminologi kota kosmopolitan tersebut, Brenda Yeoh dan Weiqian Lin kemudian merumuskan karakteristik dari terminologi kosmopolitan yang berada di kota-kota pelabuhan (*port city*). Kota pelabuhan pada masa kejayaan era perdagangan (*age of commerce*) bukan saja merupakan *rendezvous* bagi para pedagang, bangsawan, intelektual, *polyglot*, seniman, hingga intelektual yang memiliki mobilitas luar biasa, tetapi juga pusat dari aktivitas keseharian mereka.

Kota pelabuhan merupakan simpul-simpul yang terbentuk dari rangkaian jaringan budaya dan geografi yang saling berkesinambungan secara global pada masa tersebut. Mengingat peran kota-kota pelabuhan yang kerap dikenal sebagai pusat dari aktivitas perusahaan dagang multinasional maupun berbagai emporium tidak mengherankan bahwa berbagai studi mengenai kosmopolitan lebih menitikberatkan pada dinamika yang tercipta di kota-kota pelabuhan.

Mobilitas yang meskipun berlangsung secara ringkas antara para pelaku perdagangan seperti para pelaut, pedagang, intelektual, bangsawan, hingga para borjuis telah menghadirkan karakteristik masyarakat urban kosmopolitan. Aktivitas sosial dan kultural di antara mereka telah melampaui sekat-sekat batas teritorial negara-bangsa. Lebih lanjut Brendan Yeoh dan Weiqian Lin menyampaikan bahwa warisan kultural dari budaya kosmopolitan yang terbentuk pada masa *age of commerce* tersebut merupakan nilai penting dalam melihat latar belakang dari keterbukaan, harmoni, dan akulturasi yang nampak pada warisan sejarah dan budaya di wilayah kota-kota pelabuhan pada masa kini (Yeoh & Lin, 2012: 210).

Kehidupan kosmopolis yang tercipta di Banten telah memberikan warna dalam sejarah Jalur Rempah Nusantara.² Toleransi dalam keberagaman dan kemajemukan yang tercipta di kota-kota

² Jalur Rempah Nusantara merupakan sebuah *platform* budaya yang merekonstruksi dan merevitalisasi kesejarahan budaya bahari untuk menumbuhkan kebanggaan akan jati diri daerah-daerah di Indonesia, serta memperkuat jejaring interaksi budaya antardaerah, pulau, dan bangsa; Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya Jalur Rempah untuk pembangunan berkelanjutan; Merupakan upaya untuk mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai Warisan Dunia (*World Heritage*) untuk memperkuat diplomasi Indonesia, sekaligus meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia (Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, 2020).

pelabuhan di sepanjang garis pantai Nusantara selama masa kejayaan Jalur Rempah pada abad ke-15 hingga abad ke-17 menjadi nilai yang penting dalam melihat Indonesia pada masa kini.

Penerimaan akan berbagai unsur budaya dan tradisi yang dibawa oleh para pendatang yang singgah di kota-kota pelabuhan ini dapat saling berkelindan dengan tradisi dan budaya lokal. Hal inilah yang dirasa menjadi dasar pemikiran dalam melihat Banten sebagai kota kosmopolitan pada masa kejayaan Jalur Rempah Nusantara. Kajian ini secara lebih dalam akan melihat seperti apakah rupa dari keberagaman yang tercipta di Banten? serta bagaimanakah mereka dapat saling menjaga keberagaman ini sehingga mampu menjadikan Banten sebagai pelabuhan kosmopolitan yang kaya pada masa tersebut?

Fernand Braudel (1981) dalam bukunya *Civilization and Capitalism 15th - 18th Century: The Structures of Everyday Life: The Limits of the Possible* memberi pandangan menarik ketika melihat kota dan kehidupan masyarakat urban di ibukota kerajaan (*Imperial*) di wilayah Asia. Kota-kota ini menurut Braudel memiliki karakteristik sebagai kota yang megah, mewah, dan menggambarkan atau mewakili citra (*prestise*) dari penguasanya. Menurut Braudel meskipun para aristokrat atau bangsawan kerajaan memegang peran sebagai penguasa, namun sebenarnya tidak ada penguasa mutlak atas kota-kota ini. Hubungan yang terjadi antara para bangsawan, pedagang, imigran, dan rakyat jelata bersifat dinamis dan prematur, sehingga rentan terjadi gesekan di antara mereka. Pada sisi yang lain meskipun hubungan antarkelas dan kelompok begitu rentan dan dinamis, namun beberapa kota di Asia Timur maupun Asia Selatan selama rentang abad ke-16 hingga abad ke-17 telah menghadirkan suatu bentuk peleburan budaya (*melting pot*), lahirnya pandangan-pandangan progresif, serta kehadiran individu-individu yang independen. Kondisi ini dapat tercipta

akibat aktivitas maritim yang mendorong pada aktifnya lalu lintas dan transaksi perdagangan, serta hadirnya beragam pendatang dari berbagai bangsa dan latar belakang yang memperkaya khasanah pengetahuan dan budaya di kota-kota tersebut (Braudel, 1981 (Vol. 1): 524, 528).

Kajian ini mencoba membahas mengenai dinamika kota dan kehidupan urban kosmopolitan di Banten pada rentang periode abad ke-16 hingga abad ke-17 atau pada masa ketika Kesultanan Banten masih menjadi wilayah independen. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Fernand Braudel (1981) bahwa kebangkitan kota-kota pelabuhan di wilayah Asia pada abad ke-16 dan abad ke-17 disebabkan pada peningkatan Aktivitas perdagangan lintas samudera. Melihat kehidupan di kota-kota perdagangan pada masa itu tentu tidak saja melihat pada sebatas aktivitas ekonomi maupun politik perdagangan yang terjadi di pelabuhan atau pasar, namun juga pada keseluruhan perkembangan kehidupan sosial, budaya, dan pengetahuan yang tercipta akibat pertumbuhan di kota-kota tersebut. Hal yang sama juga digunakan untuk melihat kehidupan atau interaksi para pedagang yang singgah di kota tersebut. Para pedagang ini rupanya tidak saja melakukan transaksi perdagangan, namun juga melakukan beragam transaksi budaya, politik, dan pengetahuan yang pada akhirnya memberikan warna pada kehidupan kosmopolitan di kota-kota pelabuhan di Asia, termasuk di Banten ketika itu.

Sanjay Subrahmanyam (2016) dalam pendahuluannya pada buku *Merchant Networks in the Early Modern World* memberikan suatu sudut pandang menarik bahwa para pedagang ini telah membentuk jaringan dan komunitas pedagang lintas bangsa yang menjadi bentuk formasi awal kosmopolitanisme di kota pelabuhan. Sanjay dalam paparan pendahuluannya pada buku tersebut menyebutkan bahwa komunitas-komunitas

perdagangan ini bersifat terbuka terhadap berbagai latar bangsa dan budaya. Menurut Sanjay Subrahmanyam hal ini merupakan salah satu hasil dari transisi feodalisme ke dalam bentuk-bentuk awal kapitalisme yang terjadi di lingkungan dunia perdagangan dan kota-kota pelabuhan pada abad ke-16 dan abad ke-17. Hal ini dapat terjadi ungkap Sanjay Subrahmanyam karena keuntungan yang diperoleh dari perdagangan lintas samudera dihasilkan dari interaksi antarbangsa dan budaya yang tercipta di antara para pedagang tersebut (Subrahmanyam, 2016: xiii-xviii).

Kota-kota pelabuhan kemudian menjadi wadah atau medium dari berbagai bentuk interaksi, komunikasi, dan pertukaran pengetahuan yang tidak saja sebatas pada aspek perdagangan, namun juga pada aspek-aspek lain seperti budaya, tradisi, agama, bahasa, dan teknologi. Perdagangan tidak saja menjadikan kota-kota pelabuhan sebagai tempat aktivitas ekonomi yang hanya sebatas pada aktivitas bongkar muat ataupun transaksi jual beli, tetapi juga turut mengembangkan berbagai sistem ekonomi yang lebih kompleks seperti perbankan hingga agensi-agensi perdagangan yang berperan dalam proses pembuatan traktat atau perjanjian kerjasama perdagangan internasional. Hal inilah yang tentunya menjadikan komunikasi dan interaksi lintas budaya dan bangsa menjadi hal yang mendasar terjadi di kota-kota pelabuhan ketika itu (Chauduri, 1985: 224).

Banten menurut Anthony Reid merupakan salah satu contoh dari kota yang berhasil memadukan kemajemukan-kemajemukan yang hidup dan tinggal di dalamnya. Kondisi ini menurut Reid disebabkan oleh keberhasilan kota-kota tersebut dalam menarik para pedagang asing dan orang-orang kaya untuk bergantung kepada mereka. Keduanya dalam beberapa hal terintegrasi menjadi elite yang dominan dan menciptakan kemajemukan budaya yang memungkinkan terselenggaranya perdagangan. Kemajemukan ini dapat

berkembang dengan mengorbankan ambisi kerajaan yang sentralistis, hal ini dicerminkan dalam arsitektur kota tersebut. Rumah para bangsawan tersebar di berbagai kampung, masing-masing memiliki yurisdiksi sendiri-sendiri terhadap daerah di sekelilingnya (Reid, 1999: 100).

Freek Colombijn memberikan tiga kategorisasi para pedagang asing yang tinggal di Banten pada periode abad ke-16 hingga abad ke-18. Kategori pertama adalah para pedagang yang pada akhirnya tinggal permanen ataupun menetap dalam jangka waktu lama di Banten. Kategori pertama ini merupakan orang-orang Tionghoa yang pada awalnya tinggal di Banten untuk berniaga lada. Lambat laun orang-orang Tionghoa ini mulai menetap dan perniagaan yang mereka lakukan meluas hingga ke wilayah pedalaman Banten. Para pedagang Tionghoa yang telah berkembang menjadi pedagang perantara di Banten ini memiliki kapal-kapal yang membawa lada dari pedalaman Banten maupun Lampung ke pelabuhan Banten maupun pusat-pusat dagang yang didominasi oleh orang Tionghoa seperti di Palembang ataupun Bangka. Selain para pedagang Tionghoa, para pedagang yang berasal dari India (Keling) juga menguasai administrasi pelabuhan serta jaringan-jaringan niaga di Banten (Colombijn, 1989: 21).

Kategori yang kedua menurut Colombijn (1989) adalah para pedagang dan orang yang hanya singgah sementara di Banten. Menurut Colombijn kelompok ini tidak memiliki hunian permanen di Banten karena sifat mereka yang hanya sementara. Para pedagang ini tiba pada suatu musim muson untuk singgah sekaligus berdagang dan akan meninggalkan Banten pada musim muson berikutnya. Kategori ketiga menurut Freek Colombijn adalah para pedagang Eropa yang membangun loji dan benteng di wilayah Banten yang kemudian berkembang menjadi rival ataupun mitra dalam perdagangan bahari di kawasan

tersebut. Hubungan Banten dengan para pedagang Eropa ini bersifat dinamis, namun di antara para pedagang Eropa hanya VOC yang dianggap sebagai rival terbesar, terlebih setelah penaklukan *Jacatra* oleh VOC pada 30 Mei 1619 (Colombijn, 1989: 21).

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mencakup pada beberapa aspek seperti penentuan tema, penelusuran sumber dan materi, kritik sumber, hingga proses historiografi. Sumber-sumber yang digunakan dalam kajian ini meliputi sumber-sumber yang berasal dari beragam catatan harian, jurnal, dan dokumentasi seperti dari Willem Lodewycksz (Rouffaer dan Ijzerman, 1915), Cornelis Buijsero (Ijzerman, 1923), Peter Floris (Moreland, 1934), dan Tome Pires (Corteseo, 1944) mengenai Banten pada rentang periode abad ke-16 hingga abad ke-17.

Kajian ini merupakan sebuah rangkaian elaborasi dari berbagai naskah publikasi maupun beragam sumber sekunder yang membahas mengenai Sejarah Banten maupun aktivitas perdagangan rempah di Nusantara dan Asia pada sekitar abad ke-16 hingga abad ke-17. Sumber-sumber rujukan sekunder yang menjadi rujukan utama dalam kajian ini adalah karya dari Martin van Bruinnesen (1995), Anthony Reid (1999), Kenneth Hall (2011, 2014), dan Kaoru Ueda (2015).

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Aktivitas Perdagangan Maritim di Negeri Bawah Angin

Para pedagang dari Asia Timur seperti dari Tiongkok dan Ryukyu yang selalu menggunakan musim utara dalam bulan Januari atau Februari untuk berlayar ke Asia Tenggara atau Asia Selatan, mereka kemudian akan kembali pulang ketika angin bertiup dari selatan pada bulan Juni hingga Agustus. Para pedagang dari Asia Selatan dan Asia Barat menggunakan musim barat daya di Samudera Hindia

antara bulan April sampai Agustus sebagai cara yang paling bisa diandalkan untuk berlayar ke timur. Para pedagang ini idealnya dapat kembali pada musim yang sama setelah tinggal sebentar di kota-kota pelabuhan di Asia Tenggara, namun kebanyakan dari mereka kemudian tinggal untuk berdagang di negeri-negeri Asia Tenggara hingga bulan Desember. Hal tersebut selain untuk meningkatkan keuntungan dari perdagangan berbagai komoditas juga untuk menghindari musim pancaroba yang biasanya ditandai oleh ombak yang tinggi pada sekitar bulan Oktober, setelah selesai mereka akan kembali pada musim timur laut (Chauduri, 1985: 21-24; Reid, 1999: 78; Andaya dan Andaya, 2015: 17-20, 31-35).

Para pedagang asal Gujarat menempuh pelayaran yang lebih panjang untuk tiba di Asia Tenggara. Musim barat daya adalah musim yang paling baik untuk berlayar ke Sumatera atau Malaya, tetapi para pedagang ini harus berangkat dari negerinya pada bulan Maret sebelum angin menutup bandar-bandar India atau menanti sampai bulan Agustus atau September ketika bandar-bandar itu terbuka lagi. Orang Gujarat akan tinggal di kota-kota Asia Tenggara paling tidak selama satu tahun. Selama tinggal di kota-kota Asia Tenggara, para pedagang asal Gujarat ini menanti kedatangan kapal-kapal asal Tiongkok yang tiba pada rentang bulan Januari hingga Februari (Chauduri, 1985: 21-24; Reid, 1999: 78; Andaya dan Andaya, 2015: 17-20, 31-35).

Pelayaran berdasarkan musim ini berakibat pada berkembangnya dinamika kebudayaan di kota-kota pelabuhan di Asia Tenggara. Para pedagang dapat menunggu pergantian musim atau kedatangan rekan dagangnya yang berasal dari berbagai negeri di Asia. Interaksi antarindividu dan budaya yang terjalin di kota-kota pelabuhan ini kemudian berkembang menjadi jalinan akulturasi budaya. Mobilitas para pedagang lintas bangsa Asia yang berganti kapal di setiap kota persinggahan antara Mesir hingga

Tiongkok turut membentuk pola arus kebudayaan. Di kota-kota pelabuhan ini para awak kapal maupun penumpangnya akan tinggal di wilayah perkampungan sekitar kota, serta meramaikan pasarnya bahkan terlibat dalam upacara-upacara ritual (Reid, 1999: 78).

Anthony Reid mencatat bahwa interaksi antara para pedagang dan pelaut tidak hanya terjadi di kota-kota bandar, melainkan juga terjadi di atas kapal. Reid mencontohkan bahwa dalam pelayaran ke Tiongkok di dalam sebuah kapal dagang akan didapati para pedagang dan awak kapal dari beragam etnis dan bangsa. Di Tiongkok pada masa itu juga dapat dengan mudah ditemui orang-orang Asia Tenggara yang melintas di kota-kota besar Tiongkok, bahkan hingga ke Peking (Beijing) yang terletak agak jauh dari kota-kota pelabuhan (Reid, 1999: 80).

K.N. Chauduri menggambarkan pula bahwa jaringan perdagangan bahari di Samudera Hindia telah memberikan beragam karakteristik keberagaman budaya di kota-kota pelabuhannya. Chauduri menyebut bahwa keberagaman sosial dan budaya di Samudera Hindia dibentuk oleh empat warna peradaban yakni *Irano-Arabic*, India (Hindu-Buddha), Indonesia, dan Tiongkok. Ruang Geografis di kawasan Samudera Hindia bukan saja telah membentuk suatu jalinan perdagangan, namun juga rangkaian jalinan politik, kebudayaan, dan manusia. Chauduri kemudian mencontohkan bahwa Islam — tidak saja sebagai sebuah ajaran agama namun juga sebagai suatu pandangan politik, sosial, budaya, dan pengetahuan — dapat berkembang melalui perpaduan jalur-jalur bahari dan perdagangan (Chauduri, 1985: 21-24).

Barbara dan Leonard Andaya (2015) menyebutkan bahwa para pelaku perdagangan bahari pada masa itu dengan cerdas memanfaatkan faktor geografi dan lingkungan (*geographic environment*) untuk menggerakkan arus perdagangan global. Faktor inilah menurut mereka yang mendorong pula terciptanya jaringan

ekonomi dan budaya sehingga pada akhirnya menciptakan diversifikasi budaya di kawasan Samudera Hindia (Andaya dan Andaya, 2015: 14, 17-20, 31-35).

Menurut pandangan Barbara dan Leonard Andaya bahwa dinamika kosmpolitanisme dan keragaman budaya yang melibatkan berbagai bangsa dan etnis merupakan karakteristik dan kekhasan kehidupan urban Asia Tenggara pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Barbara dan Leonard Andaya menilai bahwa Tome Pires memang agak terlalu berlebihan ketika ia menyebutkan bahwa terdapat empat puluh bahasa yang lazim digunakan di Malaka pada awal abad ke-16, namun melalui catatan Tome Pires tersebut dapat tergambarkan bahwa Malaka merupakan sebuah kota yang kaya akan keragaman budaya. Keragaman budaya ini kemudian dapat berkembang dan saling berkelindan dengan mobilitas serta transaksi perdagangan di kota pelabuhan ini. Hal yang juga menarik menurut Barbara dan Leonard Andaya bahwa para penguasa dan pedagang Muslim yang tampil dominan di kota-kota dagang Asia Tenggara merupakan katalisator dalam proses terciptanya kosmpolitanisme pada masa itu (Andaya dan Andaya, 2015: 87).

Perdagangan jarak jauh dari Tiongkok, Asia Tenggara, India, hingga ke Teluk Persia maupun Jazirah Arab telah menyebabkan banyak orang dari berbagai bangsa berkumpul dan saling berinteraksi di kota-kota pelabuhan. Aktivitas ini pada gilirannya juga turut menimbulkan arus perdagangan dari dan ke wilayah pedalaman yang dilakukan oleh para pedagang perantara yang bukan saja dilakukan oleh para pedagang lokal namun juga para pedagang asing seperti Arab, Tionghoa, dan Keling. Para pedagang perantara ini membawa berbagai komoditas seperti beras, sayuran, ikan asin, gula, dan garam untuk memberi makan kepada orang-orang di daerah perkotaan. Mereka juga membawa barang-barang logam, keramik, dan tekstil impor dari mancanegara hingga ke wilayah

pedalaman yang merupakan pusat produksi komoditas impor (Prakash, 1998: 31-42; Beaujard, 2019: 501-504).

Para pedagang yang melayani jaringan pelayaran dan perdagangan yang luas di perairan Asia Tenggara yang tenang makin banyak pula yang berdomisili di wilayah-wilayah pedalaman. Para pedagang ini kemudian berkembang menjadi agen-agen peradaban yang tidak saja membawa muatan ataupun komoditas, namun juga beragam individu maupun kelompok yang berasal dari berbagai wilayah yang turut serta dalam penyebaran berbagai ide, gagasan, pandangan, filosofi, dan pengetahuan. Dinamika yang terjal ini dari beragam faktor inilah yang melatarbelakangi berkembangnya kosmopolitanisme pada masa itu, serta juga turut menciptakan akulturasi dan perpaduan dari berbagai unsur kebudayaan (Lombard dan Salmon, 1985: 73-94).

2. Banten Sebagai Kota Pelabuhan Bebas di Asia pada Abad XVII

Freek Colombijn (1989) menyebutkan bahwa Banten merupakan "*Riverine Coastal State*". Karakteristik negara-negara ini adalah mereka memiliki perkampungan maupun kota yang terletak di wilayah-wilayah pinggir sungai, pantai, dan pelabuhan; wilayah-wilayah pedalaman jarang dihuni karena dikelilingi hutan-hutan yang lebat dan belum dijelajahi; serta Kawasan Kotaraja merupakan wilayah yang padat karena menjadi hunian dari penduduk yang menetap maupun yang singgah untuk berdagang (Colombijn, 1989: 19).

Colombijn lebih jauh menyebutkan bahwa jaringan redistribusi komoditas dari dan ke wilayah pedalaman merupakan karakteristik sistem ekonomi yang dijalankan oleh negara-negara "*Riverine Coastal State*", selain tentunya perdagangan mancanegara yang merupakan penggerak utama pertumbuhan kota-kota pelabuhan ketika itu. Arus lalu lintas perdagangan di wilayah pedalaman ini juga turut membawa dinamika

keragaman budaya di wilayah-wilayah urban. Akulturasi budaya berkelindan dengan lalu lintas perdagangan lokal dan internasional ketika itu. Kampung-kampung para pedagang asing yang berada di luar benteng-benteng menjadi tempat bagi berkembangnya akulturasi budaya dan kosmopolitanisme ketika itu (Colombijn, 1989: 19-20).

Anthony Giddens menyampaikan bahwa salah satu faktor yang menjadikan sebuah kota sebagai kosmopolitan disebabkan oleh perkembangan globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat (Giddens, 2002: 4-5). Keterhubungan antar kota-kota pelabuhan akibat meningkatnya mobilitas perdagangan pada abad ke-16 hingga abad ke-18 telah menjadikan kota-kota besar seperti Banten menjadi *melting pot* dari berbagai budaya dan bangsa. Giddens menyebut bahwa sebuah kota kosmopolitan ditandai dengan hadirnya *global cosmopolitan society* yang berasal dari berbagai latar belakang seperti budaya, bangsa, tingkat ekonomi, dan gaya hidup. Perkembangan budaya kosmopolitanisme di suatu kota pada akhirnya juga turut mengubah kebijakan pemerintah kota terhadap wilayahnya. Kota-kota kemudian ditata sedemikian rupa untuk mendukung perkembangan budaya kosmopolitanisme yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya oleh kelompok masyarakat pendukungnya (Giddens, 2002: 19).

Struktur dan dimensi kota pada periode abad ke-16 hingga abad ke-18 digambarkan oleh Anthony Reid dalam pembahasannya mengenai jaringan perdagangan di Asia Tenggara. Reid mengatakan bahwa kota-kota di Asia Tenggara memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan dengan di Eropa. Kota-kota di pesisir Asia Tenggara rata-rata dihuni oleh lebih dari sekitar 100 ribu penduduk. Jumlah populasi penduduk Banten dalam catatan Reid dari beberapa sumber yang ia peroleh berada pada

rentang antara 220 ribu hingga 800 ribu penduduk (Reid, 1999: 82, 85).



Gambar 1. Struktur Kota Banten pada tahun 1596 seperti yang digambarkan dalam “Catatan Perjalanan Pertama: Cornelis de Houtman”.

Sumber: Rouffaer dan Ijzerman, 1915 (*Deerste Boek*): 104.

Dokumentasi Kota Banten yang tergambar dalam catatan perjalanan armada dagang Belanda pada tahun 1596 ini memberikan banyak informasi mengenai keadaan kota pelabuhan Banten pada masa tersebut. Berdasarkan keterangan yang dicatat mengenai keadaan kota pelabuhan tersebut didapat keterangan mengenai adanya kampung-kampung pemukim asing baik yang singgah maupun menetap di kota itu. Willem Lodewycksz mencatat bahwa terdapat pemukiman orang-orang Maluku, Tionghoa, dan Andaman (Keling) yang membangun pasar dan pemukiman di kota tersebut (ditunjukkan dengan huruf P, T, dan Y dalam gambar di atas) (Rouffaer dan Ijzerman, 1915: 105).

Pada 22 Juni 1596, armada dagang Belanda di bawah pimpinan navigator Cornelis de Houtman dan Gerrit van Beuningen berlabuh di Banten. Armada yang terdiri dari 4 buah kapal dan dilengkapi dengan 64 meriam ini pada awal keberangkatannya dari Belanda membawa sekitar 249 awak kapal membuang sauh di Pelabuhan Banten yang merupakan pelabuhan utama perdagangan lada. Beberapa jam setelah tiba di pelabuhan Cornelis de Houtman dan Gerrit van Beuningen cukup kaget ketika yang

menyambut mereka di pelabuhan adalah enam orang Portugis dan beberapa budaknya. Kekagetan ini terjadi karena Portugis yang merupakan rival utama mereka dalam persaingan dagang di Hindia telah memiliki peran penting di pelabuhan ini. Armada Belanda mengira ketika mereka berlayar langsung melintasi Samudera Hindia dari Tanjung Harapan, Maladewa, Pariaman, hingga tiba di Banten mereka akan menghindari Portugis yang mendominasi perdagangan dari India hingga Malaka (Ricklefs, 2001: 31; Bertrand 2015: 46).

Setelah dua hari tiba di Banten Cornelis de Houtman dan awak kapalnya disambut secara resmi oleh pihak Kerajaan Banten yang diwakili oleh Tumenggung Angabaya. Penyambutan dengan tradisi dan budaya khas Banten kepada tamu-tamunya dari negeri seberang inilah yang akan menjadi kesan dan gambaran awal dari selisih dan konflik antara Belanda dan Banten terutama hingga lebih kurang 80 tahun kemudian. Tumenggung Angabaya beserta para pembesar Banten dengan membawa kerbau dan air minum yang berasal dari sumber mata air milik kerajaan bermaksud memberikan penyambutan dengan menyembelih kerbau dan memberikan air minum tersebut sebagai bentuk bahwa orang-orang Belanda merupakan sahabat dan bermaksud baik untuk berdagang di Banten. Ketegangan terjadi ketika Cornelis de Houtman menolak pemberian air tersebut yang ia anggap telah diberikan racun, kemudian juga mencaci utusan Banten tersebut yang ia anggap tidak sopan. Perilaku Cornelis de Houtman ini menurut Romain Bertrand merupakan penanda awal dari buruknya perilaku Belanda dalam berhubungan dengan budaya dan tradisi perdagangan di Nusantara yang menjadikan semua bangsa sebagai sahabat dan terbuka pada berbagai unsur budaya asing. Namun kiranya hal yang patut ditekankan dalam hubungan ini adalah rasa saling menghargai dan menghormati (Bertrand 2015: 45).

Gambaran mengenai budaya penyambutan tamu asing dalam budaya bahari di Asia Tenggara juga diutarakan oleh Peter Floris yang menjadi awak kapal dagang EIC ketika tiba di Patani, Siam.³ Peter Floris mengatakan bahwa ketika tiba di Patani ia disambut oleh adat istiadat (*local 'customary rules and ceremonies*) khas budaya rakyat Patani. Peter Floris mengatakan ia harus melakukan rangkaian upacara *Sembah Datang* (upacara penyambutan dan pemberian hadiah kepada penguasa Patani) dan *Sembah Berniaga* (upacara memohon izin untuk dapat berdagang dan lisensi untuk membuka loji). Floris mengatakan bahwa hal yang hampir sama juga ia lakukan ketika ia tiba di Banten pada kunjungan sebelumnya. Menurut Floris meskipun upacara-upacara cukup rumit dilalui namun ia tidak menyesal sebab ia mendapatkan potongan harga untuk pembelian lada serta resolusi untuk pendirian loji ketika berada di Patani maupun Banten (Moreland, 1934: 37).

Di dalam rombongan penyambutan secara resmi oleh Kerajaan Banten terhadap armada Cornelis de Houtman yang dipimpin oleh Tumenggung Angabaya, terdapat seorang penerjemah bernama Keling Panjang (Quillin Panjan) (Guillot, 2008: 247; Perret, 2011: 176-177; Bertrand dalam Berg, Gottman, Hodacs, dan Nierstrasz, 2015: 48). Keling Panjang menurut penuturan Claude Guillot dan Romain Bertrand berasal dari Sao Tome, Meliapur, India dan sangat mahir dalam berbahasa Portugis, sehingga mampu

berkomunikasi dengan Cornelis de Houtman yang sebelum menjadi nahkoda Belanda merupakan pegawai di salah satu rumah dagang Portugis. Meskipun pada awalnya ada penolakan dari de Houtman terhadap undangan dari Angabaya untuk menemui Raja di Kraton, namun atas penjelasan dari Keling Panjang dalam Bahasa Portugis yang baik, akhirnya Cornelis de Houtman berkenan menemui Raja dan memberikan hadiah seremonial seperti yang biasa dilakukan para pedagang Eropa kepada seorang pemimpin di satu wilayah (Bertrand 2015: 48).

Claude Guillot memberikan catatan menarik bahwa di Banten pada masa kedatangan awal armada dagang Belanda sekitar tahun 1596 hingga 1609 terdapat tiga orang petinggi kerajaan yang berasal dari India, termasuk Keling Panjang. Sejak masa Banten Girang seperti tergambar dalam Kitab *Shun Feng Hsiang Sung* maupun keterangan Tome Pires yang menyebutkan bahwa Banten telah menjalin komunikasi dagang dengan India melalui perdagangan lada dan budak (Cortesao, 1944: 170-171; Mills dan Chen-chun, 1970: 90-91; Mills, 1979: 77, 83-85).

Claude Guillot mencatat bahwa peralihan dari periode Banten Girang hingga masa berdirinya Dinasti Islam di Banten sekitar periode 1522 hingga 1527, terdapat dua orang pegawai pelabuhan Banten yang disebut sebagai "Keling dari Sunda". Claude Guillot menyampaikan ini berdasarkan catatan Fransesco de Sa seorang pelaut Portugis yang diberikan amanat untuk menjalin perjanjian dengan Kerajaan Banten Girang (Guillot, 2008: 244).

Guillot menambahkan bahwa keterangan asal-usul pegawai ini didapat dari transkripsi antara Portugis dan Banten Girang yang menyebut bahwa pegawai pabean (*Fabym*) menyandang nama *Bemgar* yang dalam catatan Tiongkok biasa digunakan untuk menyebut nama Benggala. Ia juga menyebutkan nama salah seorang Syahbandar pelabuhan yang memakai nama gelar "Raja Mudylar"

³ Peter Floris merupakan salah satu awak dagang EIC yang berasal dari Belanda. Ia mulai bertugas di EIC sejak 1608. Sebelum bekerja di EIC ia pernah bekerja di VOC sejak tahun 1605. Akibat beberapa insiden dengan VOC ia pergi ke London untuk bergabung dengan EIC. Pada tahun 1614 hingga 1615 ia turut dalam pelayaran salah satu kapal dagang Inggris ke Banten dimana ia dikenali oleh salah seorang pejabat VOC di *Jacatra* ketika itu sebagai Peter Willemz van Elbings (Moreland, 1934: hlm. xxxv-xxxvi).

yang merujuk pada nama khas Tamil (Guillot, 2008: 244). Kehadiran orang-orang Tamil dan Benggala di Banten merupakan fenomena umum yang terjadi di wilayah-wilayah pelabuhan maupun pusat produksi rempah di Nusantara. Daniel Perret seorang sejarawan Prancis telah memberikan ulasan menarik mengenai dinamika kehidupan orang-orang Asia Selatan di Asia Tenggara pada periode abad ke-13 hingga abad ke-17. Para imigran dari Asia Selatan ini tidak hanya datang sebagai pedagang namun juga sebagai budak, pemungut cukai, nelayan, penerjemah, rentenir, bahkan hingga tokoh agama yang berperan dalam penyebaran Agama Islam (Perret, 2011: 159-199).

Komunitas terbesar para diaspora Asia Selatan di kota-kota dagang Nusantara seperti Pasai, Aceh, Banten, Makassar, dan Ternate merupakan budak-budak yang bekerja di pelabuhan ataupun perkebunan rempah. Di Aceh para budak yang berasal dari Asia Selatan ini juga dipekerjakan sebagai prajurit dan penambang emas di wilayah-wilayah pedalaman Aceh.⁴ Sementara di Banten budak-budak ini ditempatkan sebagai pekerja di perkebunan-perkebunan lada dan pelabuhan. Selain dipekerjakan oleh pemerintah budak-budak ini juga dimiliki oleh *orangkaya-orangkaya* yang memiliki konsensi pada sektor pertambangan maupun perkapalan. Kehadiran budak-budak ini pun turut berpengaruh pada berkembangnya pasar budak di kota-kota pelabuhan seperti Pasai, Aceh, dan Banten. Budak-budak yang diperdagangkan di kota-kota ini antara lain berasal dari daerah-daerah seperti Benggala,

Koromandel, Maladewa, Srilangka, Orissa, dan Malabar (Perret, 2011: 63).⁵

Peran orang-orang yang berasal dari Asia Selatan di dalam jaringan perdagangan di Nusantara maupun Asia Tenggara sangat nampak dalam aktivitas di daerah-daerah pelabuhan. Para penguasa bumiputera kerap kali memberikan kepercayaan penuh kepada mereka untuk mengatur administrasi dan lalu lintas perdagangan di pelabuhan. Di Banten setelah jatuhnya Banten Girang rupanya kendali pelabuhan tetap berada di tangan mereka yang berasal dari keturunan Tamil hingga tahun 1609. Claude Guillot menyebut salah seorang Syahbandar Tamil bernama Kyai Wijamanggala yang berasal dari Mailapore. Wijamanggala memainkan peran penting dalam struktur pemerintahan di Banten hingga selama hampir tiga dekade (Guillot, 2008: 245; Perret, 2011: 185).

Sepeninggal Maulana Yusuf yang wafat pada tahun 1580 terjadi pertentangan antara kelompok bangsawan dan pedagang di Banten. Para bangsawan menginginkan putra Maulana Hasanuddin yang selama masa kecil hingga dewasanya diasuh oleh Ratu Kalinyamat dari Jepara untuk menggantikan Maulana Yusuf. Sementara itu, para pedagang dan saudagar memberikan dukungan kepada putranya yakni Maulana Muhammad yang masih berusia delapan tahun untuk menjadi raja. Setelah beragam rangkaian peristiwa termasuk perang di muka gerbang kerajaan Banten, kelompok pedagang berhasil mengambil alih kekuasaan dan menempatkan Maulana Muhammad di atas takhta Banten, para pedagang juga

⁴ Ketika terjadi perang antara VOC dan Banten pada tahun 1682, Daniel Perret juga mengatakan bahwa terdapat legion pasukan yang berasal dari Gujarat yang berada di pihak Sultan Ageng Tirtayasa (Perret, 2011: 171).

⁵ Daniel Perret mencatat bahwa di Kerajaan Banten pada sekitar tahun 1620 terdapat sekitar 1500 orang budak yang berasal dari Asia Selatan yang bekerja di lingkungan Kraton. Para budak ini dipekerjakan sebagai eksekutor hukuman mati, prajurit, menjaga dan memelihara gajah kerajaan, maupun bekerja di berbagai properti milik kerajaan di wilayah pedalaman (Perret, 2011: 163).

menunjuk beberapa orang wakil mereka sebagai wali raja, serta tetap mempertahankan perdagangan bebas di Banten (Guillot, 2008: 245-246).

Hubungan perdagangan antara Banten Girang dan Tiongkok tetap berjalan dengan baik semasa pemerintahan Dinasti Islam di wilayah ini. Jalur-jalur pelayaran tradisonal yang telah berlangsung selama beberapa abad antara Banten, Pesisir selatan dan Barat Sumatera, Selat Sunda, dan Pesisir Utara Jawa bagian barat dengan kota-kota pelabuhan Tiongkok merupakan nadi yang menggerakkan laju dan mobilitas ekonomi dan manusia. Orang-orang Tionghoa merupakan salah satu pelaku utama dalam lalu lintas jaringan perdagangan rempah di Nusantara sejak masa pra-kolonial.

Pada catatan dokumentasi awal kedatangan Bangsa Belanda pada akhir abad ke-16 digambarkan beberapa aktivitas orang-orang Tionghoa di Banten. Orang-orang Tionghoa di Banten dalam catatan Belanda tersebut memiliki suatu hunian yang terletak di dekat Pelabuhan Banten (Pacinan). Orang-orang Tionghoa ini menjalankan keseharian mereka layaknya penduduk asli Banten seperti melaksanakan berbagai upacara adat dan peribadatan. Komunitas Tionghoa di Banten dipimpin oleh seorang pemimpin yang kemungkinan jabatan tersebut merupakan jabatan resmi yang diberikan oleh pihak Kerajaan Banten. Pemberian status istimewa kepada orang-orang Tionghoa di Banten dapat dimaklumi mengingat mereka merupakan konsumen terbesar lada sekaligus pelaku utama berbagai industri, salah satunya adalah pengolahan tebu (gula) di Banten. (Rouffaer dan Ijzerman, 1915: 121-125; Ijzerman, 1923: 15-16; Guillot, 2008: 89).

Hubungan yang telah lama terjalin antara para pembesar Banten dengan para pedagang Tionghoa telah menjadikan Banten bukan saja menjadi tempat singgah sementara bagi orang-orang Tionghoa. Diaspora orang-orang Tionghoa di wilayah pesisir Nusantara telah menjadikan mereka

sebagai bagian dari perkembangan dan pertumbuhan di wilayah kota-kota pelabuhan dan pusat produksi. Di Banten orang-orang Tionghoa diberikan hak untuk menetap dan menempati hunian tersendiri yang berada di luar benteng yang berdekatan dengan pasar dan pelabuhan.

Menurut Kenneth Hall di Banten para pedagang Tionghoa diberikan peran sebagai pedagang perantara sekaligus juga pengelola jaringan perdagangan ke wilayah pusat produksi di pedalaman. Para pedagang Tionghoa oleh para pembesar Banten diberikan kekuasaan dan hak dalam mengelola jaringan perdagangan lada dari pusat produksi di wilayah-wilayah pedalaman sungai di Sumatera hingga mengatur proses pengelolaan pemasarannya kepada para pedagang Eropa. Peran ini diberikan karena mata uang Tiongkok (*picis*) menjadi alat tukar utama bagi para penanam lada di pedalaman maupun berbagai transaksi dengan para pedagang multinasional. Para pedagang Tionghoa ini juga memiliki peran dalam aktivitas monetisasi maupun penukaran mata uang di wilayah-wilayah pedalaman (Hall, 2014: 233).

Para pedagang Tionghoa juga aktif sebagai pedagang di pasar-pasar yang terdapat di sekitar kota. Kaoru Ueda (2015) dalam disertasinya mengenai makanan dan budaya makan di Banten pada abad ke-17 hingga awal abad ke-19 juga memberikan ulasan mengenai keterlibatan orang-orang Tionghoa dalam aktivitas perdagangan di pasar. Ueda mengatakan bahwa terdapat tiga pasar yang buka setiap hari dan berada di sekitar kota. Kios-kios di pasar-pasar ini tidak hanya dimiliki oleh orang-orang Banten, namun juga oleh berbagai masyarakat dan bangsa yang singgah maupun tinggal di Banten. Orang-orang Portugis, Arab, Turki, Tionghoa, Melayu, Benggala, Keling, Pegu, Malabar, bahkan Abyssinian (wilayah sekitar Tanduk Afrika) menjajakan berbagai produk dagangan mereka di pasar-pasar Banten (Rouffaer

dan Ijzerman, 1915: 120-121; Ueda, 2015: 251).

Berbagai produk hasil bumi seperti rempah-rempah, bahan makanan (beras, aneka buah, kacang-kacangan, madu, gula, bumbu dapur, aneka jenis daging unggas dan hewan ternak), perhiasan (aneka jenis perhiasan yang terbuat dari batu mulia dan emas), serta berbagai bahan maupun produk tekstil (kain sutra, beludru, satin). Orang-orang Tionghoa selain menjual kain sutra juga memperdagangkan berbagai jenis dan kualitas keramik, kertas, hiasan rumah tangga, senjata, kristal, dan berbagai bahan pengobatan. Ueda juga memberikan keterangan bahwa para pedagang Tionghoa merupakan pedagang yang sangat hebat dalam proses tawar menawar, terutama dalam pembelian lada. Para pedagang Tionghoa ini membawa keranjang dan alat ukur mereka sendiri, hingga terkadang terjadi perdebatan dalam proses transaksi jual beli dengan para penjual. (Rouffaer dan Ijzerman, 1915: 110; Ueda, 2015: 251-254).

William van Lodewyck menyebutkan bahwa selain para bangsawan istana, beberapa pedagang Tionghoa merupakan sekelompok kecil pemilik hunian yang indah dan luas. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat konsensi dan keistimewaan yang diberikan kepada mereka dalam lalu lintas dan jaringan perdagangan ke daerah-daerah pedalaman penghasil lada. Selain itu para pedagang Tionghoa ini juga memiliki kapal (*junk*) yang berdagang hingga ke pelabuhan-pelabuhan baik di Nusantara maupun beberapa di kawasan Asia. Di Banten berdasarkan catatan Claude Guillot orang-orang Tionghoa ini juga berperan dalam perkembangan industri. Orang-orang Tionghoa memiliki pabrik penggilingan hingga penyulingan tebu untuk dijadikan gula maupun arak. Lodewyck juga menyampaikan selain pengolah tebu beberapa industri kerajinan kayu dan logam juga dimiliki oleh orang-orang Tionghoa di Banten (Rouffaer dan

Ijzerman, 1915: 123-124; Guillot, 2008: 132-137).

Pada masa puncak kejayaan Kesultanan Banten pada periode 1670 hingga 1682 di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Pelabuhan Banten menjadi salah satu pusat ekonomi dan perdagangan terbesar di Asia Tenggara yang bersaing dengan Batavia (Guillot, 2008: 65).⁶ Banten pada periode ini juga menerima kehadiran para pedagang Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis. Para pedagang asing dari Eropa tersebut yang memiliki loji atau gudang yang berada di sekitar luar tembok Kraton Kasultanan. Para pedagang Inggris di Banten tidak hanya membeli lada maupun komoditas rempah dan hasil bumi Nusantara, mereka bahkan menjual bir dan anggur kepada orang-orang Belanda di Batavia (Shaffer, 2013: 98).

Pada periode 1670 Banten juga berhasil bangkit dari keterpurukan setelah blokade perdagangan oleh VOC dari tahun 1628 hingga 1660. Pada tahun 1660 VOC dan Banten menandatangani perjanjian yang berisi pencabutan pengepungan terhadap jalur perairan di Teluk Banten oleh armada laut VOC. Diplomasi yang dilakukan oleh Banten terhadap upaya pencabutan pengepungan Teluk Banten oleh VOC dipimpin oleh seorang

⁶ Claude Guillot menyebut bahwa sepanjang dekade 1670 merupakan periode paling cemerlang bagi Kesultanan Banten sepanjang sejarah berdirinya sejak tahun 1527. Banten dalam pandangan Guillot telah berhasil dalam menyesuaikan diri dengan keadaan serta situasi politik dan ekonomi sebagai dampak peran orang barat yang semakin besar dalam perdagangan maritim di Asia Tenggara. Periode ini merupakan puncak sekaligus akhir dari masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang memiliki peran penting dalam konsolidasi antara politik, agama, dan perdagangan yang menjadikan Banten sebagai satu-satunya Kerajaan Islam terpenting di Nusantara ketika itu sejak wafatnya Sultan Agung dari Mataram (1645) dan jatuhnya Makassar (1666) (Guillot, 2008: 65).

Syahbandar Kaytsu yang merupakan seorang Tionghoa.⁷ Usaha Belanda untuk berusaha menghancurkan ekonomi dan perdagangan beras dan lada dari Banten maupun aktivitas perdagangan luar negeri rupanya tidak membuahkan hasil. Kota pelabuhan ini kemudian dapat lekas pulih bahkan menjadi lebih makmur. Pada rentang periode ini Banten tetap memiliki populasi Tionghoa yang besar. Para pemukim ini sebagian tinggal di rumah yang terbuat dari bata, serta terletak dekat dengan pasar dan alun-alun kerajaan (Guillot, 2008: 94-96, 252-253; Shafer, 2013: 93).



Gambar 2. Citra Kota Banten pada awal abad ke-18 sesudah berakhirnya perang sipil pada tahun 1682 yang masih tetap ramai dengan aktivitas perdagangan, meskipun tanpa kehadiran Bangsa Eropa.
Sumber: Pierre Van der Aa, 1729.

⁷ Syahbandar Kaytsu menjadi tokoh sentral di balik kebangkitan ekonomi Banten pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Kaytsu menurut Claude Guillot merupakan seseorang yang cerdas dan lihai dalam mengelola perdagangan. Ia hanya memiliki satu tujuan hidup ketika itu yakni memulihkan ekonomi Banten dan membuka kembali Banten sebagai pelabuhan internasional. Kaytsu mendiring Sultan Ageng untuk memiliki armada kapal dagang yang besar. Armada kapal ini sejak pertengahan dekade 1660-an memiliki peran penting dalam membina jalinan perdagangan dengan Portugis dan Spanyol di Manila. Kaytsu juga mendorong perbaikan pelabuhan agar dapat menarik para pedagang asing selepas blokade perdagangan oleh VOC.

Para pemukim Eropa juga memiliki pemukiman di luar benteng kraton. Para pemukim ini tidak hanya bekerja di loji-loji dagang, namun juga banyak dari mereka yang bekerja untuk para pembesar Kesultanan Banten maupun membuka berbagai industri maupun agensi perdagangan partikelir. Claude Guillot juga menyebutkan bahwa beberapa dari orang Eropa ini telah memeluk agama Islam dan telah mengikuti tradisi berpakaian masyarakat lokal Banten. Sebagaimana kota-kota pelabuhan lain di Banten juga terdapat berbagai tempat hiburan seperti gedung pertunjukan wayang bahkan hingga pertunjukan kabaret serta berbagai hiburan lainnya yang ditujukan untuk orang asing (Guillot, 2008: 96-97).

K.N. Chauduri seorang sejarawan Asia Tenggara yang banyak mengkaji hubungan antara Asia Tenggara dan India mengatakan bahwa Banten memiliki peran substansial dalam perdagangan bahari di Asia pada awal abad ke-17. Banten merupakan pelabuhan yang sangat penting pada periode tersebut karena mempertemukan para pedagang dari India, Tiongkok, dan Nusantara untuk saling berinteraksi dalam perdagangan. Di Banten para pedagang ini tidak hanya mencari lada, namun juga berbagai komoditas eksotis lain dari berbagai wilayah di Nusantara (Chauduri, 1978: 17).

3. Perkembangan Kosmopolitanisme Dunia Islam di Banten pada Abad XVI hingga Abad XVII

Ronit Ricci (2011: 155, 172), Kenneth Hall (2011: 34-38), dan David Henley (Henley dan Nordholt, 2015: 127) menyebutkan bahwa kebudayaan Islam telah berkembang di wilayah-wilayah bagian barat Nusantara seperti di Sumatera dan Semenanjung Malaya sejak abad ke-13. Perkembangan kebudayaan Islam ini tidak saja sebatas pada interaksi kultural para pedagang Islam dengan penduduk lokal, namun kebudayaan Islam telah membentuk suatu hibriditas budaya dengan unsur-

unsur lokal dalam masyarakat. Pengaruh khasanah kebudayaan dan ideologi Islam bahkan berkembang pula menjadi sebuah bentuk sistem pemerintahan seperti yang mula-mula terjadi di Samudera Pasai pada abad ke-13.

Ronit Ricci memberikan suatu gambaran yang menarik bahwa pengaruh bahasa Arab di Asia Selatan dan Asia Tenggara telah membawa kedua wilayah ini ke dalam kosmopolitanisme budaya Arab (*Arabic Cosmopolis*) pada periode tersebut. Bahasa dan Literasi Arab yang pada mulanya hanya merupakan bahasa dan literasi perdagangan kemudian berkelindan dengan bahasa dan literasi masyarakat di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Hal ini tidak saja berpengaruh pada perkembangan agama dan kebudayaan Islam, namun juga membawa pengaruh pada transfer pengetahuan dan budaya Arab di kawasan-kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Jaringan perdagangan rempah kemudian tidak saja memobilisasi berbagai aktivitas ekonomi, namun lebih jauh turut berperan besar dalam arus mobilisasi pengetahuan dan kebudayaan (Ricci, 2011: 172-173).

Gambaran kosmopolitanisme dan transfer pengetahuan maupun literasi bercorak agama seperti yang disampaikan oleh Ronit Ricci rupanya bukan hal yang hanya terjadi pada masa perkembangan Agama dan Budaya Islam di Nusantara. Wang Gungwu (1958) dan Tansen Sen (2014, 2018) menyebut bahwa arus perdagangan yang tercipta antara Asia Selatan dan Tiongkok pada masa Dinasti Chola dan Dinasti Tang telah menciptakan suatu "Jaringan Buddha" yang kemudian menciptakan kota-kota kosmopolis bercorak Buddha seperti di Palembang, Muara Jambi, dan Nalanda (Sen, 2018: 346). Tansen Sen menyebutkan bahwa lalu lintas perdagangan pada masa tersebut turut pula menyertakan para bikshu, sarjana, peziarah, misionaris, seniman, dan ahli bahasa yang berlalu lalang di kota-kota perdagangan ketika itu. Mereka kemudian tidak hanya singgah, namun juga

mendirikan pusat-pusat pendidikan dan produksi pengetahuan seperti di Muara Jambi, Palembang, dan Nalanda Mahavihara. Jejak-jejak keagungan pengetahuan dan budaya dari "*Buddhist Cosmopolis*" ini rupanya masih tergambar pada peninggalan-peninggalan cagar budaya di Nusantara (Sen, 2018: 346-347).

Jejak peninggalan "*Arabic Cosmopolis*" di Nusantara berbeda dengan jejak "*Buddhist Cosmopolis*" yang masih dapat disaksikan dari berbagai jejak peninggalan cagar budaya (*tangible heritages*). Ronit Ricci mengatakan bahwa jejak "*Arabic Cosmopolis*" ini tertinggal dalam berbagai unsur-unsur warisan budaya takbenda atau di dalam nilai-nilai budaya yang masih hidup di masyarakat, seperti di dalam berbagai rangkaian naskah, teks dan literasi yang tersebar di berbagai wilayah di Kepulauan Nusantara, diantaranya seperti *Kitab Shama'il al-Nahi* karya Imam al-Tirmidhi, *Bidayat al-Hidayah* karya Imam al-Ghazali, naskah-naskah yang berisi teks-teks *Qasidah* karya Sheikh Sadaqatullah, serta beragama puisi dan prosa yang berasal Tamil maupun Arabia di antaranya karya dari Imamul 'Arus dan Ahmad al-Marzuqi (Ricci, 2011: 154-158).

Pada abad ke-17, Kesultanan Banten telah cukup aktif dalam lalu lintas jaringan kosmopolitanisme budaya Arab yang berkembang di kawasan Samudera Hindia. Salah satu yang cukup menonjol adalah terbentuknya jaringan Banten dan Mekah pada tahun 1638 (Pigeaud dan De Graaf, 1976: 49; Laffan, 2015: 18-20). Michael Laffan menceritakan bahwa pada awal tahun 1630-an, Raja Banten Abdul Kadir mengirimkan sebuah misi ke Mekah selain untuk menunaikan ibadah haji juga untuk meminta gelar Sultan bagi Raja Banten dan penjelasan mengenai kandungan makna dari tiga risalah mengenai kajian eskatologi (teologi akhir zaman) sufi kepada Syarif Zayd yang merupakan salah seorang pemimpin keagamaan di Jeddah. Misi perjalanan para utusan Banten ke Mekah untuk tujuan politis dan keagamaan

ini serupa dengan perjalanan leluhur dan pendiri Kesultanan Banten yakni Sunan Gunung Jati yang pada sekitar tahun 1520-an mengunjungi Mekah untuk menunaikan ibadah haji, memperdalam ilmu agama, dan meminta gelar Sultan untuk diberikan kepada Sultan Trenggono dari Demak (Lombard, 2005: 55, 135-136; Laffan, 2015: 18).

Michael Laffan mengatakan bahwa para utusan Banten dalam perjalanannya menuju Mekah melintasi beberapa kota pelabuhan seperti Maladewa, Coromandel, Surat, Mocha, dan berlabuh di Jeddah. Selama di Mekah utusan-utusan Banten banyak menjalin relasi dengan para ulama dari berbagai negeri Islam seperti Gujarat, Usmani, Mesir, dan Persia. Laffan mengatakan bahwa mereka juga menjalin komunikasi yang sangat baik dengan Nurrudin ar-Raniri yang ketika itu telah tinggal di Gujarat. Martin van Bruinessen yang mengkaji mengenai sejarah tarekat dan pesantren di Banten mengungkapkan bahwa pada masa ini Banten telah membangun "*Meccan Connection*" atau jaringan Mekah. Jaringan Mekah ini kemudian semakin membentuk corak Islam di Banten yang kosmopolis (Bruinessen, 1995: 167-168; Laffan, 2015: 18)⁸.

Martin van Bruinessen juga mencatat bahwa sebelum meninggalkan Mekkah para utusan Banten juga mendirikan kedutaan Banten di kota tersebut. Kedutaan Banten di Mekah ini memiliki tugas merekrut ulama-ulama di Mekah untuk mengajar agama di Banten, serta menyempurnakan perumusan hukum-hukum Islam di Kesultanan Banten (Bruinessen, 1995: 168). Aktivitas pengajaran agama Islam oleh ulama-ulama

Arab di Banten menurut Bruinessen sebenarnya telah dimulai sejak dekade-dekade awal berdirinya Kesultanan Banten pada medio abad ke-16. Bruinessen menemukan jejak pesantren-pesantren lama yang diperkirakan berasal dari antara periode 1630 hingga 1640-an di sekitar daerah Gunung Karang yang dipimpin oleh seorang ulama keturunan Arab bernama Sèh Ibrahim bin Abu Bakar atau juga dikenal sebagai Ki Ageng Karang (Bruinessen, 1995: 173).



Gambar 3. Masjid Agung Banten sekitar tahun 1830.

Sumber: Martin van Bruinessen, 1995: 181.

Berdasarkan keterangan-keterangan dari *Sajarah Banten* yang diolah oleh Martin van Bruinessen didapat keterangan bahwa Maulana Hasanuddin pada masa awal pemerintahannya juga mendirikan sebuah pesantren yang bernama Pesantren Kasunyatan. Pesantren ini merupakan pusat pendidikan agama Islam yang berada dalam pengawasan dan pengelolaan Pemerintahan Banten. Pesantren ini terletak di bagian tenggara Kraton Surosowan yang terletak di wilayah Kasunyatan. Pesantren ini dipimpin oleh seorang guru yang bernama Kiai Dukuh dan kemudian oleh Maulana Hasanuddin diberikan gelar sebagai Pangeran Kasunyatan. Pesantren Kasunyatan selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan turut berperan dalam menyebarkan Agama Islam juga memiliki peran dalam menyalin ulang teks-teks dan naskah-naskah keagamaan seperti Al-Qur'an, Hadis,

⁸ Di Banten pada periode abad ke-16 hingga abad ke-18 berkembang beberapa tarekat seperti *Naqshbandiyya*, *Kubrawiyya*, *Shadhiliyya*, *Shattariyya*, *Sammaniyya*, *Rifa'iyya*, dan *Qadiriyya* yang banyak terpengaruh dengan perkembangan Islam di Timur Tengah maupun Asia Tengah (Bruinessen, 1995: 179-180, 184, 185, 189).

tafsir, hingga kitab-kitab pengetahuan (Bruinessen, 1995: 173-174).

Proses penyalinan dan pengayaan naskah-naskah keagamaan maupun kitab-kitab pengetahuan berbahasa Arab menurut Rinot Ricci merupakan salah satu karakteristik yang khas dari *Arabic Cosmpolitan* yang berkembang pada masa tersebut. Menurutnya hal ini memberikan suatu bentuk identitas yang unik dari komunitas-komunitas Islam, terutama di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Menurut Rinot Ricci terdapat penyesuaian yang sangat terperinci dari teks-teks asli yang berasal dari Arab untuk disalin dan disusun kembali ke dalam naskah dan teks yang kemudian berkembang di Asia Selatan maupun Asia Tenggara. Kekhasan teks-teks berbahasa Arab terutama di dalam Al-Qur'an terletak pada kekayaan metafora dan keunikan lafal yang khas yang mewakili masyarakat dan budaya Arab. Kondisi ini menurut Ricci menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi budaya dan bangsa Non-Arab untuk secara lebih dalam memahami maksud dari naskah maupun teks berbahasa Arab. Hal ini pada akhirnya menuntut adanya penyalinan naskah dari naskah asli di wilayah-wilayah yang telah terpengaruh kebudayaan Islam dan hendak memperdalam Islam sebagai sebuah keyakinan (Ricci, 2011: 153-154).

Bahasa dan literasi Arab meskipun memiliki keunikan-keunikan yang mungkin sulit untuk dipahami, namun nyatanya bahasa dan literasi ini segera berkembang menjadi *lingua franca* di wilayah-wilayah pantai Samudera Hindia. Penerimaan bahasa dan literasi Arab oleh kebudayaan dan bangsa di wilayah-wilayah pantai di Samudera Hindia inilah yang menjadi awal dari berkembangnya Islam sebagai agama dan kebudayaan di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Ricci lebih jauh juga mengatakan bahwa eksotika aroma rempah dari Asia Tenggara tidak saja membawa keuntungan ekonomi, namun juga bahasa, kosakata, dan literasi Arab ke wilayah Asia Tenggara. Kondisi ini tidak saja berpengaruh penting bagi

proses Islamisasi nilai-nilai keagamaan di wilayah ini, namun lebih jauh turut memperkaya pengetahuan dalam bidang pendidikan, kebudayaan, politik, dan sastra, serta turut membawa masyarakat Asia Tenggara sebagai bagian dalam ruang semesta kebudayaan Timur Tengah yang sangat kaya ketika itu (Ricci, 2011: 155).

D. PENUTUP

Kota pelabuhan Banten telah menjadi kota perdagangan terbuka yang disinggahi oleh berbagai pedagang dari berbagai negeri di Nusantara dan Asia. Banten dalam pandangan Emily Erikson ketika itu merupakan kota yang memang dibangun dan dikelola untuk menjadi sebuah kota dagang yang terbuka bagi berbagai bangsa. Lebih jauh dari itu Kesultanan Banten juga menjadi pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam yang cukup berpengaruh di wilayah barat Nusantara, serta merupakan tempat bagi bersemayamnya berbagai ajaran dan falsafah Islam yang berkembang dari Timur Tengah, Asia Tengah, hingga Asia Selatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas pendanaan yang diperoleh penulis dalam proses penyusunan artikel ini. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Dr. Wiwin Djuwita S. Ramelan atas pendampingannya dalam penyusunan naskah awal artikel ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Susanto Zuhdi, Dr. Didik Pradjoko, dan Dr. Sri Margana atas masukan dan diskusinya dalam rangkaian proses penyempurnaan naskah artikel ini dalam Seminar Hasil BPNB se-Indonesia 2020 di BPNB Provinsi Kepulauan Riau.

DAFTAR SUMBER

- Andaya, B. W. dan Andaya, L. Y. (2015). *A History of Early Modern Southeast Asia, 1400-1830*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Beaujard, P. (2019). *The Worlds of the Indian Ocean: A Global History, Volume II: From the Seventh Century to the Fifteenth Century CE*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Berg, M., Gottmann, F., Hodacs, H., dan Nierstrasz, C. (2015). *Goods from the East, 1600-1800: Trading Eurasia*. London: Palgrave MacMillan.
- Bertrand, R. (2015). Spirited Transactions. The Morals and Materialities of Trade Contacts between The Dutch, the British and The Malays (1596-1619). Dalam Berg, Maxine, Felicia Gottmann, Hanna Hodacs, dan Chris Nierstrasz. (Ed.), *Goods from the East, 1600-1800: Trading Eurasia*. London: Palgrave MacMillan.
- Braudel, F. (1981). *Civilization and Capitalism. Vol. I: The Structures of Everyday Life*. London: William Collins Sons & Co Ltd.
- Bruinessen, M. v. (1995). "Shari'a Court, Tarekat and Pesantren: Religious Institutions in the Sultanate of Banten", *Archipel* 50 (1995), hlm. 165-200.
- Chaudhuri, K.N. (1985). *Trade and Civilisation in Indian Ocean: an Economic History from Rise of Islam to 1750*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Colombijn, F. (1989). "Foreign Influence on The State of Banten 1596-1682". *Indonesia Circle. School of Oriental & African Studies. Newsletter*, 18: 50, hlm. 19-30.
- Cortesao, A. (1944). *The Suma Oriental of Tome Pires and The Book of Fransisco Rodrigues (Vol. I and II)*. London: Hakluyt Society.
- Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. (2020). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jalur Rempah oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahun 2020*. Jakarta: Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.
- Guillot, C. (2008). *Banten: Sejarah dan Peradaban Abad X – XVII*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Gungwu, W. (1958). "The Nanhai Trade: A Study of The Early History of Chinese Trade in The South China Sea". *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society*, Vol. 31, No. 2 (182), hlm. 1, 3-135.
- Hall, K. R. (2011). *A History of Early Southeast Asia: Maritime Trade and Societal Development, 100-1500*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Hall, K. R. (2014). "European Southeast Asia Encounters with Islamic Expansionism, circa 1500-1700: Comparative Case Studies of Banten, Ayutthaya, and Banjarmasin in the Wider Indian Ocean Context". *Journal of World History, Volume 25, Numbers 2-3, June/September 2014*, hlm. 229-262.
- Henley, D. (2014). "Ages of Commerce in Southeast Asian History" dalam Henley, David. dan Henk Schulte Nordholt (eds.). (2015). *Environment, Trade And Society In Southeast Asia: A Longue Durée Perspective*. Leiden: Brill, hlm. 120-132.
- Ijzerman, J. W. (1923). *Cornelis Buijsero te Bantam 1616-1618 Zijn Brieven en Journaal*. S-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Laffan, M. (2015). *Sejarah Islam di Nusantara*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Mills, J.V. (1979). "Chinese Navigators in Insulinde about A.D. 1500". *Archipel*, volume 18, 1979. *Commerces et navires dans les mers du Sud*, hlm. 69-93.
- Mills, J.V.G dan Feng Chen Chun. (1979). *Ma Huan: Ying-Yai Sheng-Lan 'The Overall Survey of The Ocean's Shores'*. Cambridge: Cambridge University Press/The Hakluyt Society.

- Moreland, W. H. (1934).
Peter Floris: His Voyage To The East Indies in The Globe 1611-1615. London: Hakluyt Society.
- Lombard, D. & Salmon, C. (1985).
"Islam and Chineseness. Archipel (volume 30, 1985), hlm. 73-94.
- Perret, D. (2011).
"From Slave to King: The Role of South Asians in Maritime Southeast Asia (From The Late 13th to The Late 17th Century)". Archipel (volume 82, 2011), hlm. 159-199.
- Pigeaud, T. G. Th., dan H. J. De Graaf. (1976).
Islamic States in Java 1500-1700. Amsterdam: Springer Netherlands.
- Prakash, O. (1998).
"The Trading World of India and Southeast Asia in The Early Modern Period". Archipel (volume 56, 1998), hlm. 31-42.
- Reid, A. (1999).
Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680: Jaringan Perdagangan Global (Jil. 2). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Ricci, R. (2011).
Islam Translated: literature, conversion, and the Arabic cosmopolis of South and Southeast Asia. Chicago: University of Chicago.
- Rouffaer, G., dan Ijzerman, J.W. (1915).
De Eerste Schipvaart der Nedelanders Naar Osst Indie onder Cornelis de Houtman 1595-1597 (De Eerste Boek van Willem Lodewycksz). S'Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Sen, T. (2014).
"Maritime Southeast Asia between South Asia and China to The Sixteenth Century". TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia / Volume 2 / Issue 01 / January 2014, hlm. 31 – 59.
- Sen, T. (2018).
Yijing and the Buddhist Cosmopolis of the Seventh Century. Dalam Saussy, Haun (Ed.), *In Texts and Transformations: Essays in Honor of the 75th Birthday of Victor H. Mair*. Amherst: Cambria.
- Shaffer, M. (2013).
Pepper: A History of World Most Influential Spice. New York: St. Martin Press.
- Subrahmanyam, S. (1996).
Introduction. Dalam Subrahmanyam, Sanjay (Ed.), *Merchant Network in Early Modern World*. London and New York: Routledge.
- Ueda, K. (2015).
"An Archaeological Investigation of Hybridization in Bantenese and Dutch Colonial Encounters: Food and Foodways in The Sultanate Of Banten, Java, 17th - Early 19th Century". Dissertation. Boston University Graduate School of Arts and Sciences.
- Yeoh, B. & Lin, W. (2012).
Cosmopolitanism in Cities and Beyond. Dalam Delanty, G. (Ed.), *Routledge Hand Book of Cosmopolitanism Studies*. London dan New York: Routledge Taylor and Francis Book.

MENYELISIK BUDAYA PASAR TRADISIONAL DI PASAR BARU BALIKPAPAN, KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR

THE REVEAL OF MARKET CULTURE IN THE TRADITIONAL MARKET OF PASAR BARU IN BALIKPAPAN CITY, EAST KALIMANTAN

Budiawati Supangkat¹, Rahman Latif Alfian², Johan Iskandar³

¹Departemen Antropologi, FISIP, Unpad, dan Pusat Riset Gender dan Anak Unpad,
Kampus Jatinangor, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM21, Sumedang 45363.

²Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, IAIN Purwokerto.
Jl. A. Yani No. 40A, Purwokerto, 53126.

³Departemen Biologi Fmipa, dan Pasca Ilmu Lingkungan (PSMIL & DIL) Unpad,
Kampus Jatinangor, Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, Sumedang 45363

^{1,2,3} e-mail: budiawati.supangkat@unpad.ac.id, rahmanlatif927@gmail.com,
johan.iskandar@unpad.ac.id

Naskah Diterima: 2 Mei 2021

Naskah Direvisi: 30 Agustus

Naskah Disetujui : 18 Oktober 2021

DOI: 10.30959/patanjala.v13i2.795

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai budaya pasar yang berlangsung di Pasar Baru Kota Balikpapan. Budaya pasar sendiri merupakan keseluruhan norma dan nilai yang melingkupi kegiatan pemangku pasar tradisional dalam berkegiatan di pasar. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dalam menggali data dari para pemangku Pasar Baru yang menjadi lokus penelitian. Etnografi dipilih karena penelitian ini berusaha menjangkau data baik itu data lisan, visual maupun tertulis dari sudut pandang pengampu Pasar Baru Balikpapan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pedagang yang berdagang di Pasar Baru Balikpapan berasal dari latar budaya yang beragam. Mengingat Balikpapan merupakan salah satu wilayah strategis juga pintu masuk dan jalur perniagaan khususnya di Kalimantan Timur. Dalam melakukan aktivitas perdagangan, pedagang membawa nilai budaya masing-masing. Meskipun demikian secara perlahan tercipta pola tindakan dari para pedagang. Meskipun berasal dari latar budaya yang berbeda, secara tidak tertulis para pedagang seperti telah mencapai kesepakatan dalam berkegiatan di pasar.

Kata kunci: budaya pasar, praktik, pedagang, pasar tradisional, Balikpapan.

Abstract

This article discusses the market culture at Pasar Baru in Balikpapan City. The market culture in this study can be defined as the overall norms and values adopted by traditional market stakeholders in their daily activities in the market. This study uses ethnographic methods to collect data from the stakeholders of Pasar Baru as the research locus. Ethnography was chosen based on the consideration that this research seeks to collect data, both oral, visual and written data from the point of view of the Pasar Baru supervisor in Balikpapan. The results show that the traders who trade at Pasar Baru in Balikpapan originate from the diverse cultural backgrounds. It is a consequence of the City of Balikpapan as one of the strategic areas as well as the entrance and route of commerce, especially in East Kalimantan. In their trading activities, the traders bring their respective cultural values. It slowly encourages the creation of new patterns in the behavior of traders. They seem to have reached an agreement in their activities in the market.

Keywords: market culture, practice, traders, traditional market, Balikpapan.

A. PENDAHULUAN

“Memasuki gapura bertuliskan Pasar Baru Balikpapan, terlihat di sepanjang jalan pedagang-pedagang menggelar lapak dengan alas terpal dan tatanan sayur-mayur menawarkan dagangannya ke pengunjung yang melintas di depannya.” Kondisi tersebut adalah penggalan gambaran kondisi di Pasar Baru Balikpapan pada pagi hari, situasi yang serupa juga berlangsung di pasar-pasar lainnya di Indonesia (Supangkat, 2012). Pasar Baru Balikpapan terletak di Kelurahan Kelandasan Ilir, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Lokasi pasar ini berada di tengah kota, dihimpit pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan di Kota Balikpapan. Apabila merujuk pada letak geografisnya, Pasar Baru Balikpapan bisa disebut sebagai Pasar Tradisional Kota. Namun demikian, meskipun suatu pasar terletak di dalam kota sejatinya pasar tradisional tetap memiliki karakter sosial lokal, karakter tersebut yang sering disebut sebagai budaya pasar tradisional (Effendi, 1997).

Kajian pasar terutama pasar tradisional selalu menarik perhatian dari sudut pandang sosial budaya (Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, 2013; Hermawan, Kristiani, & Ismiyati, 2018). Perbincangan pasar tradisional tentu mengungkap tentang ekonomi. Ekonomi sendiri terdiri atas dua ranah yaitu komunitas dan pasar. Kedua aspek tersebut membentuk ekonomi karena manusia dimotivasi oleh pemenuhan sosial, persaingan, dan tujuan akumulasi keuntungan (Gudeman, 2001). Pada dasarnya perdagangan, uang, dan pasar merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Perdagangan sendiri bukanlah aktivitas individual melainkan aktivitas kelompok, kegiatan tersebut berpusat pada pertemuan komunitas yang berbeda dengan tujuan melakukan pertukaran barang (Polanyi, 1985; Supangkat, 2012). Pasar tradisional dalam perkembangannya bukan hanya lokus bertemunya penjual dan pembeli, tetapi pasar juga menjadi tempat

berlangsungnya hubungan personal maupun kelompok yang intim. Dengan kata lain pasar tradisional tidak sekedar ruang ekonomi tetapi juga ruang sosial bagi para pemangku (Sadilah, Arianti, Herawati, Moertjipto, & Sukari, 2011; Seligmann, 2018). Hubungan yang terjalin antaraktor-aktor yang menghidupi pasar tradisional tidak melulu berorientasi pada perhitungan ekonomi, hubungan pribadi yang intim membuat hubungan yang terjalin tidak lagi terbebani oleh perhitungan untung rugi, tapi lebih ke pertukaran sosial (Granovetter, 2017).

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, dapat dipahami pasar tradisional memiliki nilai dan norma yang tidak hanya berorientasi pada untung rugi yang dihidupi oleh pemangku. Pada penelitian sebelumnya, mengenai Orang Kalang, Cina, dan Budaya Pasar di Pedesaan Jawa (Mulyanto, 2008), budaya pasar dalam penelitian tersebut dapat dipahami sebagai cara hidup kolektif serta kumpulan nilai dan norma tersendiri yang mendorong atau membatasi pengampunya dalam perniagaan serta menjadikan pasar (*market place*) sebagai bagian dari kerangka psiko-geografi tradisional mereka. Dalam penelitian yang berjudul Studi Budaya Pasar Tradisional dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Pedesaan, Effendi (2016) mengartikan budaya pasar terwujud dalam empat bentuk yaitu *artifacts* (benda-benda materiil), sistem tingkah laku dan tindakan yang berpola, sistem gagasan, dan seperangkat nilai.

Melalui pemahaman mengenai batasan budaya pasar seperti yang dipaparkan pada penelitian sebelumnya, penelitian ini berusaha menyelidik lebih dalam budaya pasar tradisional yang teraktual pada masyarakat perkotaan. Dalam penelitian ini pasar yang dimaksud adalah Pasar Baru Kota Balikpapan yang merupakan salah satu pasar tradisional di tengah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Fokus kajian pada penelitian ini seperti yang dijelaskan oleh Damsar,

bahwa kajian sosiologi pasar dapat dipahami sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan pasar yang dalam hubungan tersebut dapat dilihat bagaimana masyarakat memengaruhi pasar serta sebaliknya bagaimana pasar memengaruhi masyarakat (Damsar & Indrayani, 2018). Hal ini menjadi penting mengingat pasar tradisional menjadi tempat berpindahnya suatu komoditas dari satu orang ke orang lain, dari satu daerah ke daerah lain, dan satu peranan ke peranan lainnya, sehingga dalam “kehidupannya” para pedagang pasar tradisional sangat mengandalkan pola komunikasi dan relasi yang dibangun dalam waktu yang tidak sebentar (Belshaw, 1965).

Pada sisi yang lain, penelitian ini menjadi penting karena pada kenyataannya budaya pasar bukan sesuatu yang “bulat” yang di dalamnya homogen. Penelitian dalam psikologi budaya dan antropologi psikokultural menjelaskan bahwa subjektivitas manusia tidak hanya ditentukan oleh sebuah budaya tunggal melainkan ditentukan oleh interaksi simbolisme budaya, biografi individu, kebiasaan-kebiasaan yang menyatu dalam kehidupan harian dan pikiran yang penuh pertimbangan (Hefner, 2000). Dengan kata lain, budaya bukanlah suatu kenyataan sosial yang selesai, yang terinternalisasi oleh subjek-subjek budaya yang pasif karena para pedagang pasar tradisional merupakan aktor-aktor aktif yang selalu “bergerak”.

Memahami budaya pasar juga menjadi penting karena pada dasarnya pemahaman mengenai pola hidup para pedagang dan pengalaman perdagangan membentuk gagasan individu tentang diri dan kepribadian, tidak hanya sebagai pelaku ekonomi tetapi dalam hal lain seperti pemahaman mengenai gender, kelas, etnis, hingga bagaimana bentuk kepribadian para pedagang membentuk aspek-aspek budaya suatu pasar atau pasar tradisional (Endres & Leshkovich, 2018).

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini melihat lebih dalam bagaimana budaya pasar yang terbangun dan berjalan di pasar tradisional, khususnya Pasar Baru Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Budaya pasar yang tertuang dalam praktik pengampu pasar sehari-hari kemudian digali menggunakan metode etnografi. Penggunaan etnografi sebagai metode penelitian dipilih karena etnografi dapat menceritakan atau juga menggambarkan kisah yang berakar dari sudut pandang masyarakat lokal saat mereka menjalani kehidupan sehari-hari di komunitasnya (Fatterman, 2010). Selain itu, penggunaan etnografi juga merupakan upaya untuk memperhatikan makna tindakan dari kejadian yang ada pada kelompok masyarakat yang diamati (Spradley, 2007).

Metode etnografi mengadopsi lensa budaya untuk menafsirkan perilaku yang diamati, memastikan bahwa perilaku ditempatkan dalam konteks yang relevan dan bermakna secara budaya (Fatterman, 2010). Dalam penelitian ini pembacaan konsep kebudayaan dipahami sebagai suatu dimensi yang aktif dan konstitutif dari kehidupan sosial daripada sekedar mekanisme penjamin integrasi sosial, budaya menjadi *blueprint* seseorang maupun masyarakat menciptakan dunia mereka yang bermakna dalam dua level sekaligus: emosi dan kognitif (Geertz, 1973). Kebudayaan yang dibentuk kemudian dilihat sebagai budaya diferensial yang tumbuh dari adanya interaksi yang terus menerus antarmanusia, kelompok, dan lingkungan yang terus menerus mengalami perubahan (Abdullah, 2015).

Dalam penelitian ini pasar tradisional dilihat dalam empat wujud yaitu, (1) eksistensi fisik tempat (bangunan pasar) seperti lahan, tipe bangunan, dan lain-lain; (2) Seperangkat aktivitas (baik ekonomi maupun sosial) yang berlangsung terus menerus saat kegiatan pasar berlangsung; (3) Sistem gagasan yang melatarbelakangi berlangsungnya eksistensi fisik dan seperangkat aktivitas;

(4) Nilai yang menjadi dasar bagi sistem penyelenggaraan budaya di pasar tradisional (Effendi, 2016).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa teknik seperti observasi dan wawancara. Untuk metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dengan ikut berbaur dengan kegiatan yang terjadi di Pasar Baru Balikpapan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan karena untuk memahami masyarakat yang *liyan*, antropolog membenamkan dirinya di dalam komunitas yang diteliti, di dalamnya peneliti belajar, berpikir, melihat, merasakan, dan terkadang bertindak sebagai anggota pemangku kebudayaan, dan pada sisi yang lain peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan dirasakannya (Powdermaker, 1966). Selain itu pengamatan juga dilakukan secara rinci, hal ini diperlukan karena pengamatan rinci tersebut memungkinkan kita untuk mempelajari banyak aspek yang berbeda, memeriksa dalam hubungannya satu dengan yang lain, melihat proses dalam lingkungan utuh, dan juga memanfaatkan kapasitas peneliti untuk *verstehen* atau memahami lebih dalam sehingga menjangkau pandangan yang holistik (Valdelin, 2000). Dalam melakukan observasi terdapat beberapa hal yang diamati seperti kegiatan yang dilakukan oleh pedagang di pasar tradisional, pola komunikasi dan interaksi yang dilakukan oleh para pedagang, dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam menghadapi kondisi pandemi seperti saat ini.

Selain melakukan pengamatan, pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara kepada pedagang dan aktor-aktor di Pasar Baru Balikpapan. Wawancara yang dilakukan antara lain wawancara mendalam, wawancara ini ditujukan untuk menjangkau data dari pedagang yang berkaitan dengan kondisi pasar dari waktu ke waktu (historis), lalu untuk melihat penjelasan mendalam ketika menghadapi situasi pandemi seperti sekarang ini. Wawancara mendalam

ditujukan kepada informan yang dirasa mengetahui secara mendalam data yang diperlukan seperti pedagang yang sudah berjualan lama, pengelola pasar, maupun beberapa aktor yang berada di pasar. Meskipun dalam konsepnya terdapat wawancara terstruktur, pada kenyataannya informan dan responden bukanlah subjek pasif yang menunggu untuk mengungkapkan informasi dan wawasan mereka, tetapi informan juga merupakan penafsir situasi yang aktif dan memiliki perhatian mereka sendiri yang mungkin tidak terlihat oleh peneliti (Soulsby, 2004). Selain wawancara mendalam, peneliti juga menggunakan model wawancara tak berencana dan wawancara sambil lalu (Koentjaraningrat, 1991). Kedua model wawancara ini ditujukan kepada pengunjung pasar maupun masyarakat umum yang dilakukan secara acak. Wawancara ini bertujuan untuk melengkapi dan pengecekan data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam. Model wawancara ini sering digunakan peneliti ketika berada di warung makan, ketika bertemu dengan pengunjung pasar secara acak dan tanpa direncanakan. Model wawancara ini sering digunakan peneliti ketika mengamati kondisi pasar, maupun saat melakukan pengamatan dengan berkeliling Pasar Baru Balikpapan.

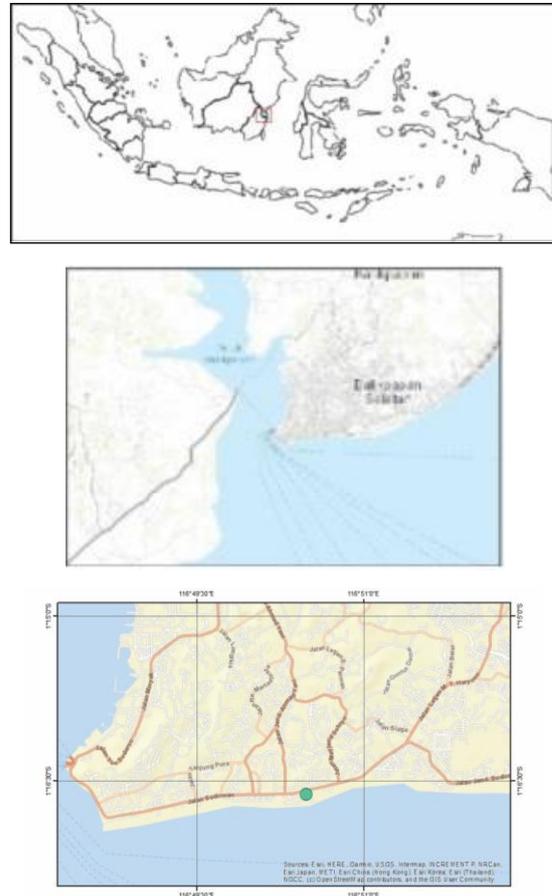
Salah satu yang menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti dalam mencari data adalah proses membangun *raport* atau hubungan dengan para informan. Pasar Baru dan para pedagang di Pasar Baru telah mengalami lika-liku yang panjang hingga sampai pada posisi sekarang. Hal ini menimbulkan kecurigaan tersendiri kepada peneliti ketika melakukan penelitian. Tidak jarang pedagang menyangka peneliti adalah pengelola pasar yang akan merubah bangunan pasar "lagi". Kondisi yang demikian membuat peneliti membutuhkan waktu lebih dalam membangun kepercayaan dari para pedagang. Pada lain sisi, berbagai kepentingan yang melingkupi "kehidupan"

pasar juga menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti. Meskipun demikian penggunaan triangulasi sebagai cara memvalidasi data sangat berguna sehingga peneliti banyak membandingkan data dari satu informan dengan informan lainnya.

Analisis data penelitian menggunakan analisis data kualitatif (Miles & Huberman, 1992). Analisis data tersebut terdiri dari empat alur kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga mendapatkan suatu pola tertentu pada masyarakat yang diteliti. Dalam melakukan analisis data alur tersebut tidak selalu berurutan karena langkah-langkah tersebut merupakan sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Adapun dalam proses verifikasi data, peneliti menggunakan triangulasi. Peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data yang didapat pada saat wawancara. Peneliti juga membandingkan data wawancara dari satu informan ke informan yang lainnya.

Pasar Baru Balikpapan berada di Kelurahan Klandasan Ilir. Pada gambar 1 dapat dilihat lokasi Pasar Baru Balikpapan berada tepat di pinggir Selat Makassar. Jarak dengan pusat Kecamatan Balikpapan Kota \pm 3 Km. Pasar Baru bukan satu-satunya pasar di Kecamatan Balikpapan Kota. Tidak jauh dari lokasi Pasar Baru Balikpapan terdapat Pasar Klandasan yang berada di Kelurahan Klandasan Ulu dan hanya berjarak \pm 1 Km dari Pasar Baru Balikpapan. Kedua pasar tersebut merupakan pasar tradisional tetapi di bawah pengelola yang berbeda. Pasar Baru Balikpapan dikelola oleh pihak swasta yaitu PT. Hasta Kreasi Mandiri yang dalam pengelolaannya selalu berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kota Balikpapan. Sedangkan, Pasar Klandasan dikelola oleh Pemerintah Kota

Balikpapan di bawah Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.



Gambar 1. Peta Lokasi Pasar Baru Balikpapan

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018.

Pasar Baru Balikpapan dipilih sebagai lokus karena lokasinya strategis secara sosial. Pasar ini tidak jauh dari pusat pemerintahan Kota Balikpapan, hanya berjarak 1,8 Km dari kantor Walikota Balikpapan. Pasar Baru juga tidak jauh dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang, yaitu hanya butuh 20 menit bila ditempuh berkendara. Selain tidak jauh dari bandara, letak Pasar Baru Balikpapan juga tidak jauh dari Pelabuhan Semayang yang merupakan pelabuhan di Kota Balikpapan, yaitu hanya berjarak 4,8 Km atau hanya butuh 15 menit bila ditempuh dengan berkendara. Lokasi yang

strategis ini membuat Pasar Baru Balikpapan menjadi salah satu tujuan bagi warga sekitar maupun pendatang untuk mengadu nasib dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Hal tersebut tercermin dengan beragamnya asal pedagang yang berdagang di Pasar Baru Balikpapan seperti dari Penajam, Sulawesi Selatan seperti Makassar, Banjarmasin, Jawa, Madura, maupun Sumatra seperti orang Minang. Banyaknya pendatang yang berdagang di Pasar Baru membawa juga pengetahuan yang mereka miliki dari pengalaman dan budaya masing-masing. Hal inilah yang menjadi fondasi dalam melihat pengetahuan para pedagang terutama pedagang ikan dalam penyebutan dan pengetahuan pada ikan yang diperjualkan. Lokasi Pasar Baru Kota Balikpapan dapat dilihat pada gambar 1.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Gambaran Rupa Fisik Pasar Baru Balikpapan

Nama Pasar Baru bagi warga masyarakat tergolong baru, sebelumnya Pasar Baru lebih dikenal dengan Pasar Balcony. Penyebutan Balcony sendiri merujuk pada nama pusat perbelanjaan yang berada di Kota Balikpapan yaitu Balcony City sebelum berubah nama menjadi Balikpapan Ocean Square. Pasar Baru sendiri terletak di area *basement* pusat perbelanjaan tersebut. Hal tersebut yang membuat banyak masyarakat mengenalnya dengan nama Pasar Balcony.

Hingga sekarang belum diketahui secara pasti bagaimana sejarah pasar ini dibangun. Belum ditemukan secara riil dokumen yang membahas sejarah Pasar Baru pada masa lampau. Tetapi dari beberapa cerita yang dihimpun dari pedagang pasar, pasar tersebut diyakini sudah ada pada tahun 1970-an. Salah satu informan sebut saja Mbah Karti (± 75 tahun) menceritakan bahwa beliau adalah perantau dari Jawa tepatnya dari Surabaya. Awal mula beliau sampai di Balikpapan beliau menggambarkan: “Pada waktu

pertama sampai wilayah di sini masih sepi, jalannya masih kecil dan banyak hutan-hutan. Dulu pasar ini juga pasar kecil tempatnya ada di depan sana dekat jalan raya yang sekarang.” (Wawancara, 27 Agustus 2019). Beberapa pedagang juga menjelaskan bahwa penamaan Pasar Baru tersebut karena pasar tersebut dibangun kembali seperti baru lagi. Para pedagang menceritakan bahwa Pasar Baru pernah terbakar beberapa kali. Pada awalnya Pasar Baru terletak lebih ke depan dari lokasi yang sekarang, lebih tepatnya di pinggir jalan raya. Pasar ini tidak dibangun secara formal oleh pemerintah tapi lebih ke perkumpulan pendatang yang membuka lapak-lapak dari kayu untuk berdagang.

Pedagang menceritakan bahwa tidak banyak kios yang dibangun permanen, kebanyakan kios dan lapak terbuat dari kayu. Mereka pun menggambarkan bahwa kondisi Pasar Baru pada saat itu adalah pasar yang kurang tertata dan penuh kesederhanaan. Hal ini yang membuat Pasar Baru beberapa kali mengalami kebakaran karena material yang dipakai untuk mendirikan kios atau lapak terbuat dari kayu sehingga mudah terbakar. Seorang pedagang sebut saja Bu Haji (55 tahun, bukan nama sebenarnya) menceritakan:

“Pasar Baru pernah terbakar empat kali, yaitu tahun 1986, tahun 1990, tahun 1994, dan yang terakhir itu kalau tidak tahun 2006 ya 2007. Saya kena imbasnya semua itu. Ada beberapa kejadian yang menjadi penyebab kebakaran pada waktu itu. Pada saat kebakaran pertama kata orang penyebabnya itu lilin dari salah satu pedagang. Ada juga pada tahun 2000-an itu karena korsleting listrik. Tapi ya enggak ada yang tahu pasti penyebab kebakaran itu.” (Wawancara, 26 Agustus 2018).

Oleh karena keterbatasan dokumen tertulis maupun foto-foto masa lalu Pasar Baru, kisah-kisah yang melingkupinya pun beragam. Meskipun demikian dari cerita

para pedagang tersebut, peneliti berkesempatan melihat bagaimana para pedagang memaknai Pasar Baru sebagai lokus yang mereka hidupi dan tempat mereka hidup.



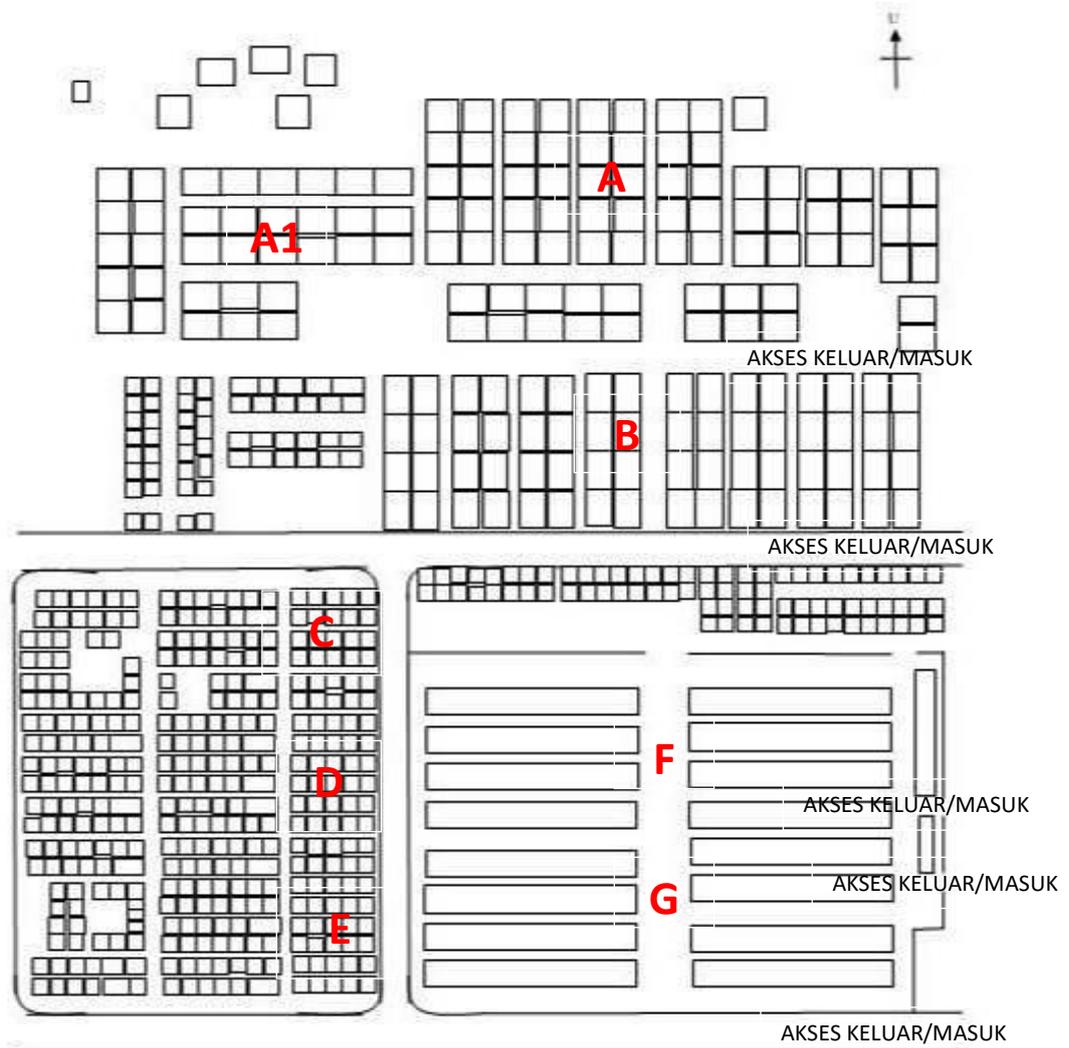
Gambar 2. Suasana di Sepanjang Jalan Setelah Gapura Masuk Pasar Baru Balikpapan
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018.

Lokasi Pasar Baru Balikpapan sekarang berada di area *basement* pusat perbelanjaan Balikpapan Ocean Square. Tidak sulit untuk menemukan pasar tradisional ini karena terdapat gapura bertuliskan Pasar Baru Balikpapan yang berada di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, jalan utama Kota Balikpapan. Bentuk bangunan Balikpapan Ocean Square yang berbentuk seperti ombak air laut juga menjadi penanda tersendiri untuk mempermudah pengunjung dalam mengunjungi Pasar Baru Balikpapan. Pada pagi hari, keramaian Pasar Baru terlihat dari jalan raya yang melintasi di depan gerbang. Antrean angkutan kota menunggu penumpang juga sering terlihat tidak jauh dari gapura masuk, yang tentu saja menambah suasana ramai dan sibuk kegiatan pasar pada pagi hari. Memasuki gapura bertuliskan Pasar Baru Balikpapan, pengunjung akan melihat beberapa pedagang menggelar alas-alas untuk berjualan sembari menawari siapa saja yang melintas. Selain pedagang yang berjualan di trotoar tidak sedikit pula pedagang yang berjualan dari mobil bak terbuka. Beberapa pedagang juga terlihat menggunakan gerobak dorong roda satu (umumnya untuk mengangkut pasir/tanah) yang difungsikan sebagai lapak atau media menata dagangannya. Jalan masuk menuju

bangunan pasar menjadi jalan yang sibuk pada pagi hari terutama ketika hari libur seperti yang tampak pada Gambar 2.

Untuk masuk ke dalam pasar, terdapat beberapa pintu yang bisa menjadi akses bagi para pengunjung pasar. Pintu tersebut berada di sisi Barat, Utara, dan Timur. Banyaknya pintu masuk tersebut memudahkan pengunjung untuk memasuki Pasar Baru. Letak pasar yang berada di *basement* membuat suasana di Pasar Baru memiliki kekhasan tersendiri. Hal yang paling terasa adalah udara yang sedikit pengap dan lampu-lampu yang menyala di siang hari. Pasar yang terletak di area *basement* membuat sinar matahari pada siang hari tidak masuk dengan sempurna, kondisinya cenderung gelap ketika lampu-lampu toko tidak dinyalakan. Kekhasan selanjutnya dari bangunan fisik Pasar Baru Balikpapan adalah banyaknya pipa-pipa dan saluran udara yang melekat pada atap pasar. Pipa-pipa dan saluran udara tersebut berfungsi menyuplai udara dan air untuk bangunan pusat perbelanjaan yang berada di atasnya. Selain itu, suara genset penyuplai listrik dan air kompresor juga menjadi hal yang menambah dan mewarnai riuhnya suara para pengampu Pasar Baru Balikpapan.

Di bagian dalam, tata letak pasar ditata sedemikian rupa oleh pengelola. Pada dasarnya pada saat awal setelah dibangun, pedagang ditata sesuai dengan jenis dagangannya. Namun demikian setelah beberapa tahun, ditambah pusat perbelanjaan (*mall*) belum sepenuhnya aktif tata letak pedagang sedikit banyak berubah tidak seperti perencanaan di awal. Tidak jarang ketika berkeliling mengitari pasar, ditemukan satu-dua kios yang menjual komoditas berbeda dengan kios lain. Misalnya saja ditemukan kios penjual pisang, di tengah kios peracangan dan sembako. Salah satu yang melatarbelakangi fenomena ini adalah telah berpindahnya kepemilikan kios.



Keterangan:

- A : Peracangan dan Sembako.
- B : Sayur dan Buah-Buahan
- C : Sembako
- D : Sayur
- E : Sayur
- F, G : Ikan dan Daging-Dagingan

Gambar 3. Denah Pasar Baru Balikpapan
 Sumber: Dokumentasi dan Olahan Peneliti, 2018

Beberapa pedagang memutuskan untuk menjual atau mengalihkan sewa kios kepada orang lain karena lika-liku berdagang yang tidak sesuai dengan rencana pedagang. Peralihan kepemilikan ini yang membuat pemilik baru, tidak semuanya meneruskan menjual komoditas pedagang sebelumnya. Di dalam pasar juga sering ditemui pedagang yang berdagang di lapak-lapak kecil, meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang ditemui di luar pasar. Para pedagang ini biasanya menjual sayur, atau jajanan pasar. Meskipun demikian secara keseluruhan pedagang di dalam pasar masih tertata rapi.

Pada saat penelitian ini dilakukan, tidak semua blok di dalam Pasar Baru terisi. Misalnya saja pada beberapa blok di sebelah Barat yang tidak terisi selain di blok bagian Barat. Beberapa blok yang berada di sisi Selatan juga tidak banyak yang mengisi. Hanya beberapa kios yang buka dan didapati aktivitas pedagang. Kedua blok tersebut nampak lebih gelap, meskipun pada saat aktivitas pasar sedang ramai-ramainya. Lampu-lampu tidak dinyalakan, dan banyak kios yang kurang terawat karena tidak memiliki penyewa. Para pedagang menuturkan alasan utamanya adalah karena kondisi pasar yang tidak seramai dulu dan juga keterbatasan modal dari para pedagang. Gambaran penataan kios di Pasar Baru Balikpapan dapat dilihat pada denah Pasar Baru yang tersaji dalam Gambar 3.

2. Rupa-Rupa Pedagang di Pasar Baru Balikpapan

Pedagang di Pasar Baru Balikpapan, sebagian besar merupakan perantau dari berbagai daerah. Seperti dari Sulawesi Selatan, Banjarmasin, Jawa, Madura, dan juga Sumatera. Setiap pedagang mempunyai komoditas perdagangan yang berbeda antara satu sama lain. Selain komoditas, media atau tempat berdagang para pedagang di Pasar Baru Balikpapan juga beragam. Berbeda dengan pedagang di Pasar Beringharjo yang menggunakan lapak, kios, los pasar, dan alas terpal

sebagai media dalam menggelar dan menjajakan komoditas dagangannya (Supangkat, Alfian, & Iskandar, 2021). Para pedagang di Pasar Baru Balikpapan menggunakan media atau tempat berdagang yang beragam seperti menggunakan mobil, gerobak dorong, motor, kios, lapak, los, toko, dan lesehan (menggelarnya di tanah). Rupa media atau tempat berdagang ini dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Rupa Tempat dan Media Berdagang

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018.

Jenis pedagang yang digambarkan pada Gambar 4 merupakan pedagang yang berdagang di luar pasar. Media atau tempat berjualan yang beragam pada pedagang di luar pasar dilandasi beberapa faktor, misalnya kepraktisan, memaksimalkan mobilitas, dan keterbatasan modal. Para pedagang yang menjajakan komoditas dagangannya di luar pasar, merupakan pedagang pagi. Pedagang pagi ini mempunyai keterbatasan waktu dalam berdagang, biasanya tidak lebih dari pukul 10.00 WITA. Para pedagang pagi ini mulai menggelar dan menata dagangannya semenjak subuh, sebelum para pedagang yang berada di dalam pasar membuka kiosnya masing-masing. Sasaran konsumen para pedagang pagi ini adalah pedagang sayur keliling (warga setempat menyebutnya Pedagang Sayur Motor) yang berbelanja pagi. Beberapa pedagang yang menasar konsumen subuh biasanya mulai menggulung alas dagangannya pada pukul 07.30 WITA. Sedangkan pedagang yang sasaran konsumennya eceran biasanya mulai menyudahi kegiatan berdagangannya pada pukul 10.00 s.d 11.00 WITA.

Beberapa pedagang mengutarakan alasan berdagang di luar pasar karena faktor keterbatasan modal. Para pedagang mengungkapkan bahwa harga sewa kios di dalam pasar cukup tinggi, ditambah kondisi perekonomian yang lemah tidak seperti masa-masa sebelumnya. "Sekarang pasarnya sepi tidak seperti dahulu. Jangankan menyewa kios, untuk modal berbelanja saja kadang tidak menutup" (Penuturan Bu Mastini, ±50 tahun, pedagang sayur di luar pasar, wawancara Agustus 2018). Beberapa pedagang juga menuturkan alasan pemilihan media atau tempat berdagang dikarenakan tempat para pedagang merupakan tempat yang tidak tetap. Para pedagang sayur yang menggunakan media mobil sebagai tempat berdagang misalnya, menjelaskan bahwa mereka tidak berdagang di Pasar Baru saja. Setelah berdagang di Pasar Baru pada pagi hari, selanjutnya mereka akan menjual sayurnya secara berkeliling ke

permukiman penduduk di Kota Balikpapan. Sedangkan pedagang yang menggunakan gerobak dorong menjelaskan pemilihan media berdagangnya dimaksudkan agar lebih memudahkan memindah barang dagangannya bila terjadi penertiban atau ketika cuaca kurang mendukung.

Berbeda dengan para penjual yang berdagang di dalam pasar, pedagang di luar pasar biasanya mempunyai resiko yang lebih besar. Status mereka yang tidak terdaftar oleh pengelola pasar, dan tidak membayar retribusi pasar, kerap dianggap sebagai pedagang "ilegal". Tidak jarang selama penelitian, terjadi penertiban pedagang di sepanjang jalan masuk dari gapura masuk Pasar Baru oleh petugas. Pada beberapa kesempatan, terlihat pula pedagang di luar pasar baru berani menggelar alas atau tempat berdagangnya setelah petugas penertiban melakukan tugasnya. Fenomena yang seperti ini tentu menjadikan kondisi yang pelik dan membutuhkan penyelesaian penuh agar tidak terjadi konflik. Sedikit banyak para pedagang di luar pasar juga mempunyai andil dalam menjaga kelestarian pasar.

Para pedagang yang berdagang di dalam pasar, sebagian besar menggunakan lapak, kios, dan toko-toko yang menjadi tempat berdagang. Jenis pedagang yang berada di dalam pasar lebih beragam, terutama komoditas yang dijualnya. Pedagang yang berdagang di dalam pasar biasanya membuka kiosnya sedikit lebih siang dari pada para pedagang yang berada di luar pasar. Jika para pedagang di luar pasar sudah siap sebelum adzan subuh, para pedagang di dalam pasar baru bersiap buka setelah adzan subuh. Puncak keramaian yang terjadi di dalam pasar biasanya terjadi setelah subuh hingga pukul 08.00 WITA, setelah itu kondisi pasar berangsur sepi. Pedagang yang berada di dalam pasar menjual berbagai komoditas, mulai dari sayur-mayur, buah-buahan, daging-dagingan, ikan, sembako, makanan, perabot, dan berbagai kebutuhan

rumah tangga hingga *snack* (makanan ringan).

Para pedagang Pasar Baru Balikpapan yang berdagang di dalam biasanya membayar biaya retribusi pasar yang ditarik setiap hari. Retribusi atau pedagang setempat menyebutnya *karcis*, biasanya digunakan untuk biaya pembersihan pasar yang dilakukan oleh petugas. Para pedagang membayar biaya sewa kios, toko, atau lapak berjualan setiap tahun. Para pedagang membayarnya ke pengelola pasar. Pedagang harus memperpanjang Kartu Tanda Bukti Hak Pemakaian Bangunan (KTBHPB) setiap tahun dengan biaya sebesar Rp 250.000,00. Tidak jarang ditemui *banner* himbauan perpanjangan KTBHPB dan persyaratan memperpanjang kartu tersebut pada setiap sudut pasar (seperti yang terlihat pada Gambar 5). Sedangkan untuk listrik atau biaya lampu ditarik per hari sesuai dengan biaya kebersihan. Kondisi pasar yang sepi, membuat tidak sedikit pedagang yang menunggak biaya sewa dan perpanjangan KTBHPB.



Gambar 5. Salah Satu Himbuan Persyaratan Perpanjangan KTBHPB (*Banner* Warna Kuning)

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018.

Pasar Baru Balikpapan, sebagai sebuah lokus sosial ekonomi menjadi pusat pertemuan masyarakat dari berbagai macam kebudayaan. Para pedagang pun mempunyai rupa yang beragam antara satu sama lain. Hal ini membuat munculnya budaya universal dan budaya parsial yang dihidupi oleh para pedagang di Pasar Baru Balikpapan.

3. Yang Umum dan Yang Khusus: Budaya Pedagang Pasar Baru Balikpapan

Budaya merupakan suatu sistem pola respon kebiasaan yang saling terkait dan saling bergantung antara satu dengan yang lain (Kroeber & Kluckhohn, 1952). Budaya pasar tradisional yang dibangun oleh pemangku pasar merupakan suatu proses pemaknaan yang tiada henti. Para pedagang disadari maupun tidak, membawa nilai-nilai budaya dari mana mereka berasal dan juga menyerap budaya masyarakat lain yang teraktual pada saat kegiatan perdagangan di pasar tradisional.

Pasar sebagai lokus sosial ekonomi menjadi arena produksi nilai yang dimaknai oleh para pedagang selaku pemangku pasar. Nilai budaya sendiri dapat dipahami sebagai seperangkat kesepakatan mengenai “ukuran” suatu tindakan ataupun praktik yang dilakukan dalam kegiatan pasar tradisional. Nilai budaya ini menjadi suatu pedoman bagi para pedagang terutama dalam berperilaku di pasar tradisional. Selain sebagai pedoman, nilai budaya pasar tradisional juga menjadi penentu pola pikir para pedagang dalam berkegiatan.

Dalam konteks pedagang dan berdagang, disadari atau tidak para pedagang berusaha mencari, menyerap, dan menampilkan nilai-nilai yang dianggap universal. Misalnya saja dalam praktik menimbang, para pedagang menyepakati bahwa komoditas seperti sayur, ikan, daging, maupun komoditas lain harus dijual dengan cara ditimbang. Hal ini dimaksudkan agar menciptakan nilai percaya antara pembeli dan pedagang. Selain itu nilai-nilai keramahan juga dibangun dan disepakati sedemikian rupa oleh pedagang. Nilai-nilai yang demikian menjadi nilai yang ditampilkan oleh pedagang, nilai ini bersifat umum. Keramahan dan kejujuran menjadi nilai yang dimaksudkan agar membangun modal sosial melalui relasi dan interaksi dengan para pembeli juga pedagang lainnya.

Selain nilai-nilai yang sengaja ditampilkan oleh para pedagang, pedagang juga mempunyai nilai-nilai khusus yang bersifat pribadi dan tidak serta-merta selalu ditampilkan di depan publik. Meskipun demikian bukan berarti nilai-nilai yang bersifat khusus ini tidak pernah nampak. Pada beberapa kesempatan nilai budaya yang bersifat khusus ini bisa menjadi perekat sosial bagi sesama komunitas. Misalnya saja, dalam keseharian sebagian besar pedagang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dalam berdagang. Hal ini disebabkan bahasa Indonesia merupakan nilai universal yang mana setiap pedagang dan pembeli menggunakannya. Akan menjadi berbeda ketika pedagang yang berasal dari Jawa bertemu dengan sesama pedagang dari Jawa atau pembeli yang merupakan perantau dari Jawa. Bahasa yang digunakan bukan lagi bahasa Indonesia, tetapi lebih ke bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Jawa ini dimaksud untuk merekatkan ikatan sosial, meskipun pada kenyataannya antara pedagang dan pembeli tidak selalu berasal dari satu daerah yang sama di Pulau Jawa. Tidak jarang, setelah mengetahui dari daerah yang sama dan mempunyai persamaan bahasa, konsumen akan berlangganan pada pedagang tersebut.

Komoditas yang diperdagangkan oleh para pedagang di Pasar Baru Balikpapan, biasanya juga menjadi penanda identitas tersendiri untuk para pedagang. Para pedagang sedikit banyak menjual komoditas perdagangan yang “dekat” dengan budaya asal para pedagang. Salah satu pedagang sayur di Pasar Baru menuturkan bahwa:

“Pedagang di sini itu berasal dari banyak daerah, kebanyakan pedagang merupakan perantau. Yang dijual juga beragam, tapi biasanya pedagang menjual barang-barang tertentu sesuai asal mereka. Seperti penjual tahu tempe di sini itu pasti orang Jawa, pedagang ikan laut yang kebanyakan orang Sulawesi

Selatan, pedagang ikan tawar yang orang Banjar, dan pedagang bumbu halus yang sebagian besar orang Minang atau Padang” (Wawancara Bu Jumi, ± 65 tahun, bukan nama sebenarnya, Agustus 2018).

Beberapa pedagang bahkan sudah turun temurun menjual komoditas tertentu. Misalnya pedagang ikan di Pasar Baru Balikpapan yang sebagian besar merupakan masyarakat dari Sulawesi Selatan dan sudah turun temurun menjual ikan. Alasan utama para perantau dari Sulawesi Selatan ini menjual ikan karena kehidupan di tempat mereka yang juga seorang nelayan dan dekat dengan laut (Alfian, Iskandar, & Iskandar, 2020).

Meskipun demikian hal tersebut tidak serta merta bisa menjadi generalisasi bahwa semua pedagang menjual komoditas dagangan sesuai dengan komoditas yang familiar dengan kebudayaan asalnya. Beberapa pedagang lebih memilih menjual komoditas yang dianggap potensial dengan kondisi pasar dan masyarakatnya. Misalnya saja salah satu penjual buah *lai* (sejenis durian) yang merupakan buah khas Kalimantan, merupakan perantau dari Madura. Pedagang tersebut menjelaskan, meskipun buah *lai* tidak ada di daerah asalnya tetapi buah ini menjadi salah satu buah yang banyak diminati oleh masyarakat sekitar. Melihat potensi yang tinggi untuk diperdagangkan, pedagang tersebut akhirnya menjual buah *lai*.

Pada sisi lain, para pedagang mempunyai pilihan logis dan terukur ketika memutuskan untuk menjual komoditas dagang tertentu. Beberapa faktor pemilihan biasanya didasarkan pada akses suatu komoditas, keminatan konsumen, persaingan dengan pedagang lain, ketersediaan modal. Tidak jarang pedagang yang merupakan perantauan menceritakan sebelum berangkat merantau dan memutuskan berdagang. Pedagang tersebut terlebih dahulu menanyakan hal-hal tertentu ke saudara atau perantau yang terlebih dahulu berangkat. Misalnya saja

menanyakan kondisi pasar, pedagang apa saja yang sudah ada, bagaimana harga komoditas dagang di tempat tersebut.

Kebudayaan yang teraktual saat ini pada pedagang merupakan langkah diakronis yang terbangun dari masa lalu dan terus bergerak ke depan dengan segala perubahan dan negosiasi oleh para pemanggunya, yaitu pedagang. Misalnya saja pada masa sebelumnya banyak pedagang yang menggunakan sistem *tumpuk* dalam menjual ikan maupun buah, sekarang seiring perkembangan alat ukur timbangan, sebagian besar pedagang menjual buah maupun ikan menggunakan timbangan sebagai alat ukur utama. Pada masa sebelumnya pedagang hanya berdagang secara langsung (bertemu pembeli langsung), ketika penelitian ini dilakukan, tidak sedikit pedagang yang juga melayani pemesanan belanja melalui media telekomunikasi seperti Whatsapp, SMS, maupun telepon. Kebudayaan yang terbentuk di Pasar dipengaruhi oleh beberapa hal seperti: budaya asal pedagang, budaya masyarakat setempat, kondisi perekonomian pasar tradisional, peraturan pasar, maupun dinamika perkembangan teknologi. Terdapat kebiasaan atau aturan yang disepakati bersama secara formal misalnya saja peraturan pasar yang dibuat oleh pengelola pasar. Sanksi yang diterapkan jelas sehingga pedagang harus menanggung konsekuensi apabila melanggar peraturan. Pada sisi lain ada pula kebiasaan atau aturan yang dibangun secara nonformal seperti nilai keramahan dan kejujuran. Nilai ini tidak tertulis dan disepakati secara nonformal, sanksi yang diterapkan pun lebih ke sanksi sosial. Pedagang yang diketahui kurang ramah atau bahkan tidak jujur biasanya menjadi pergunjingan sendiri di kalangan pedagang. Akhirnya, kebudayaan di Pasar Baru Balikpapan pun terus dimaknai dan dinegosiasikan oleh para pedagang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para pedagang itu sendiri.

D. PENUTUP

Kebudayaan pada dasarnya merupakan suatu kesepakatan tindakan yang selalu dimaknai oleh para pemanggunya, sehingga tidak lepas dari perubahan dan transformasi. Pun dengan budaya pasar tradisional di Pasar Baru Balikpapan, yang bertransformasi dari waktu ke waktu. Transformasi budaya yang terjadi, menunjukkan bahwa para pedagang sejatinya merupakan aktor-aktor yang aktif, selalu memberikan makna, dan mempunyai pilihan-pilihan logis dalam bertindak dan memaknai budaya yang teraktual. Budaya sejatinya merupakan suatu yang abstrak dan sulit untuk didefinisikan, salah satu cara dalam melihat budaya dalam penelitian ini adalah dengan memfokuskan kajian pada tindakan atau praktik yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar baru Balikpapan. Akhirnya penelitian ini mencapai kesimpulan bahwa budaya pasar di Pasar Baru Balikpapan menjadi salah satu pedoman dalam bertindak bagi para pedagang pasar tradisional di Pasar Baru. Selain sebagai pedoman dalam bertindak, budaya pasar sendiri terdiri atas nilai-nilai budaya yang dengan sengaja ditampilkan oleh para pedagang. Budaya pasar di Pasar Baru Balikpapan bukan sesuatu yang alami, tetapi dikonstruksikan oleh para pemanggunya dalam waktu yang tidak sebentar dan terus mengalami perubahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada SIMLITABMAS Kementerian Riset dan Teknologi atas pendanaan proyek penelitian Dr. Budiawati Supangkat MA, Surat Keputusan Nomor 10/E1/KP.PTNBH/2019 dan Nomor Perjanjian Kontrak 5097c/UN6.G/LT/2019. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan yaitu para pedagang di Pasar Baru Balikpapan, dan konsumen di Pasar Baru, Kota Balikpapan, atas kerjasamanya dengan penelitian ini.

DAFTAR SUMBER

- Abdullah, I. (2015). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alfian, R. L., Iskandar, J., & Iskandar, B. S. (2020). Fish species, traders, and trade in traditional market: Case study in Pasar Baru, Balikpapan City, East Kalimantan, Indonesia. *Biodiversitas*, 21(1), 393–406. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d210146>
- Belshaw, C. S. (1965). *Traditional Exchange and Modern Markets*. United State of America: Prentice-Hall, Inc.
- Damsar & Indrayani. (2018). *Pengantar Sosiologi Pasar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplimasi Budaya. (2013). *Menguak Pasar Tradisional Indonesia*. Jakarta: PT. Mardi Mulyo.
- Effendi, N. (1997). Pasar dan Fungsi Kebudayaan. In E. K. Masinambo (Ed.), *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Effendi, N. (2016). Studi Budaya Pasar Tradisional dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Pedesaan: Kasus Pasar Nagari dan Masyarakat Nagari di Propinsi Sumatera Barat 1. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18 (2), 105–120.
- Endres, K. W., & Leshkovich, A. M. (Ed.). (2018). *Trader in Motion: Identities and Contestations in the Vietnamese Marketplace*. United State of America: Cornell University Press.
- Fatterman, D. . (2010). *Ethnography: Step-by-Step*. United State of America: Sage Publications.
- Geertz, C. (1973). Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture. In *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Granovetter, M. (2017). *Society and Economy: Framework and Principles*. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Gudeman, S. (2001). *The Anthropology of Economy: Community, Market, and Culture*. United Kingdom: Blackwell Publisher.
- Hefner, R. W. (Ed.). (2000). *Budaya Pasar Masyarakat dan Moralitas dalam Kapitalisme Asia Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Hermawan, F., Kristiani, F. & Ismiyati. (2018). Model of Indonesian Traditional Market Revitalisation: Case Study of Five Metropolitan Cities in Java Island. *Advanced Science Letter*, 24, 3146–3151.
- Koentjaraningrat. (1991). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kroeber, A. ., & Kluckhohn, C. (1952). *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions*. New York: Vintage Books.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Mulyanto, D. (2008). Orang Kalang, Cina, dan Budaya Pasar di Pedesaan Jawa. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 10 (2), 23–40.
- Polanyi, K. (1985). The Economy as Instituted Process. In M. Granovetter & R. Swedberg (Ed.), *The Sociology of Economy Life*. San Francisco: Westview Press.
- Powdermaker, H. (1966). *Stranger and Friend: The Way of an Anthropologist*. New York: W.W. Northon & Company.
- Sadilah, E., Arianti, C., Herawati, I., Moertjipto, & Sukari. (2011). *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang Jawa Tengah*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- Seligmann, L. (2018). Space, Place and Contentious Politics of Market Redevelopment. In *Traders in Motion: Identities and Contestation in the Vietnamese Marketplace*. New York: Cornell University Press.
- Soulsby, A. (2004). Who is Observing Whom? Fieldwork Roles and Ambiguities in

- Organisational Case Study Research. In *Fieldwork in Transforming Society: Understanding Methodology from Experience*. New York: Palgrave Macmillan.
- Spradley, J. P. (2007). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Supangkat, B. (2012). *Pasar dan Perempuan Pedagang di Pasar Ujung Berung Bandung*. Universitas Indonesia.
- Supangkat, B., Alfian, R. L., & Iskandar, J. (2021). Traditional Market and Women's Work In The Beringharjo Market, of Yogyakarta. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan humaniora*, 23(1), 1–11.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i1.29807>.
- Valdelin, J. (2000). Produktutveckling och marknadsföring. In *Qualitative Methods in Management Research*. Thousand Oaks: Sage.

NILAI BUDAYA PADA LANSKAP INDUSTRI PERKEBUNAN KINA CINYIRUAN BANDUNG PADA MASA KOLONIAL

THE CULTURAL VALUE IN THE LANDSCAPE OF THE CINYIRUAN QUININE PLANTATION INDUSTRY IN BANDUNG DURING THE COLONIAL PERIOD

Lia Nuralia¹, Iim Imadudin²

^{1,2} Balai Arkeologi Jawa Barat

Jl. Raya Tagog Cinunuk No.KM. 17, Cimekar, Cileunyi, Bandung.

^{1,2} e-mail: liabalar@yahoo.com, imadudin1975@gmail.com

Naskah Diterima: 22 Juli 2021

Naskah Direvisi: 13 September 2021

Naskah Disetujui : 18 Oktober 2021

DOI: 10.30959/patanjala.v13i1.848

Abstrak

Perkebunan Kina Cinyiruan di Bandung telah berdiri sejak tahun 1855. Perkebunan Kina Cinyiruan saat ini telah menjadi kebun afdeeling dari Perkebunan Kertamanah PTPN VIII, sejak digabungkan secara manajerial di masa kemerdekaan. Jejaknya dapat ditelusuri sebagai lanskap budaya industri perkebunan berupa area bekas kebun kina dan permukiman emplasemen, yang mengandung nilai budaya. Apa dan bagaimana nilai budaya tersebut menjadi permasalahan pokok dalam tulisan ini. Metode penelitian adalah desk research dengan pendekatan arkeologi industri serta konsep nilai budaya dan lanskap budaya. Hasil yang diperoleh adalah lanskap budaya industri Perkebunan Kina Cinyiruan memiliki tata guna lahan beragam dengan tinggalkan budaya benda beraneka fungsi. Nilai budaya yang terkandung di dalamnya merupakan nilai budaya tradisional Sunda dan nilai budaya kolonial, terkait kearifan lokal dan teknologi modern Barat. Kedua nilai budaya tersebut tampak pada tata letak dan arsitektur bangunan permukiman, serta tata guna lahan area kebun sebagai sistem ekonomi subsistensi dan perkebunan sebagai sistem ekonomi modern Barat yang komersial.

Kata kunci: Nilai budaya, lanskap budaya industri, perkebunan kina Cinyiruan.

Abstract

The Cinyiruan quinine plantation in Bandung has been established since 1855. After the managerial merger during the independence of Indonesia, it is now the government-owned plantation of PTPN VIII Kertamanah. The existence of the plantation can be traced as a cultural landscape of the plantation industry. It includes the area of the former quinine plantation and the emplacement settlement. Both contain cultural values. The main problem in this paper comprise what and how the values are. The research method used is the desk research with an industrial archeology approach and the concept of cultural values and cultural landscapes. The results obtained indicate that the cultural landscape of the Cinyiruan quinine plantation industry has a variety of land uses with cultural relics of various functions. The cultural values contained are the Sundanese traditional cultural values and colonial cultural values which relate to the local wisdom and western modern technology. These two cultural values are traceable in the layout and architecture of residential buildings as well as the land use of the garden area as a subsistence economic system and the plantations as a modern commercial Western economic system.

Keywords: cultural values, industrial cultural landscape, Cinyiruan quinine plantation.

A. PENDAHULUAN

Nilai budaya pada lanskap industri perkebunan kina bukan saja memberi gambaran tentang bentang alam industri perkebunan, tetapi dapat memberi penjelasan tentang nilai budaya perkebunan masa kolonial. Nilai budaya perkebunan merupakan nilai budaya campuran antara budaya Barat dan Timur; antara budaya orang-orang Eropa (Belanda) dan orang-orang Asia (Sunda-Indonesia). Kedua budaya tersebut bertemu dalam aktivitas industri di perkebunan kina masa lalu, dan di masa sekarang tampak dari lanskap budaya industri yang diwariskannya.

Lanskap budaya industri perkebunan merupakan bentang alam yang ditata, guna memenuhi kepentingan industri perkebunan. Lanskap budaya perkebunan di masa lalu dapat ditelusuri di masa kini melalui jejak lahan dan objek arkeologis kebun dan lahan permukiman emplasemen. Salah satu lanskap budaya industri perkebunan tersebut berada di Afdeling Kebun Cinyuruan, Perkebunan Kertamanah PTPN VIII di Pangalengan Kabupaten Bandung.

Perkebunan Kina Cinyuruan dahulu terpisah secara manajerial dari Perkebunan Kertamanah. Perkebunan ini didirikan oleh Pemerintah Belanda pada pertengahan abad ke-19, tepatnya pada 1855. Pada 1877 didirikan Perkebunan Kina Kertamanah (Kertamanah I)¹. Kedua perkebunan tersebut memiliki lahan kebun berbatasan. Pada masa sekarang, Perkebunan Cinyuruan menjadi bagian (*afdeeling*) dari

Perkebunan Kertamanah. Penggabungan terjadi di era kemerdekaan dengan alasan efisiensi perusahaan.

Perkebunan Kina Cinyuruan menjadi penting untuk dikaji, erat kaitannya dengan posisi, dan tinggalan budayanya di masa sekarang. Lokasi Perkebunan Kina Cinyuruan memiliki posisi strategis dengan cakupan lahan lebih memungkinkan untuk ditelusuri, dan beragam tinggalan budaya yang ada masih bisa dideskripsikan wujud fisiknya dan menunjukkan sinyal nonverbal (nonfisik/abstrak) sebagai nilai budaya yang terkandung di dalam wujud fisik tersebut. Sementara itu, Perkebunan Kertamanah di masa sekarang memiliki lahan yang sangat luas sebagai hasil dari gabungan beberapa lahan kebun. Keadaan ini akan memerlukan banyak usaha untuk menelusuri jejaknya.

Komoditas Perkebunan Kertamanah sekarang adalah kebun penghasil teh dan kopi, serta aneka tanaman sayur, dan buah, sedangkan kina sudah tidak diproduksi lagi. Berdasarkan hasil penelitian pada 2019 dan informasi dari pihak kebun pada 2021 (Ramadhan, wawancara, Maret 2021). Perkebunan Kertamanah merupakan gabungan dari Perkebunan Kertamanah, Perkebunan Cinyuruan, Perkebunan Tirtasari, dan Perkebunan Cikembang. Perkebunan Kertamanah sekarang sebagai kebun induk memiliki enam afdeling, yaitu Kertamanah, Cinyuruan, Puncak Gedeh, Wayang, Tirtasari, dan Cikembang (Nuralia, 2019: 33).

Sebagian lahan bekas Perkebunan Kina Cinyuruan, sekarang sudah ditanami kopi dan teh, tetapi satu dua pohon kina (*Chincona sucirrubra* dan *Chincona ledgeriana*) masih tampak di lahan yang belum dialihfungsikan. Sementara itu, bangunan atau struktur bangunan lama yang masih ada sebagian tetap dipertahankan dan digunakan. Sebagian bangunan lainnya dibiarkan begitu saja. Ada pula bangunan yang sudah hancur karena usia atau sengaja dihancurkan, dan di atasnya didirikan bangunan baru atau dibiarkan menjadi lahan kosong.

¹ *Gouvernement Kina Onderneming Tjinjioean (Peta Topografi Blad 32 B/Alg. No. XL 38-B, 1919 - 1923., n.d.)*. Kebun Kina Cinyuruan didirikan oleh Pemerintah Belanda 17 Desember 1855 (terpapat di Tugu Peringatan Seratus Tahun Kebun Kina Cinyuruan, Kertamanah, Pangalengan, Bandung, 1995). Perkebunan Kertamanah I, II, III, dan IV (30 Mei 1877; 16 Jan 1884; 12 Feb 1892; 13 Jan 1908; 29 Nov 1911) (*Regerings Almanak Voor Nederlandsch-Indie, 1880, 1892, 1893, 1900, 1901, 1902, 1906.*)

Tata guna lahan bekas Perkebunan Cinyiruan beraneka ragam, dan mengalami perubahan fungsi seiring perkembangan zaman. Perubahan yang terjadi dalam periode waktu tertentu telah melahirkan budaya khas perkebunan yang terus berkembang. Bekas lahan perkebunan tersebut menjadi lanskap budaya industri perkebunan yang bernilai sejarah. Lanskap budaya industri perkebunan juga memberi petunjuk tentang nilai-nilai budaya perkebunan. Apa dan bagaimana nilai budaya perkebunan masa kolonial apabila ditelusuri dari lanskap budaya industri perkebunan tersebut, akan menjadi permasalahan pokok dalam tulisan ini.

Nilai budaya dalam sistem budaya merupakan lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkupnya. Nilai adalah ukuran baik dan buruk, memiliki fungsi memantapkan dan menstabilkan kebudayaan (Foster, 1975). Perbedaan nilai-nilai dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu perbedaan ruang dan waktu. Misalnya budaya Barat dan budaya Timur memiliki nilai-nilai yang berbeda, karena orang Barat memiliki ruang yang berbeda dengan orang Timur. Kemudian perbedaan nilai juga terjadi karena perbedaan waktu seiring perkembangan zaman. Pada zaman dahulu nilai tertentu memiliki makna tinggi, tetapi menjadi turun atau tidak bernilai di masa sekarang. Perbedaan nilai budaya tersebut akan berpengaruh kepada berbagai bidang kehidupan, salah satunya terhadap sistem ekonomi dan sistem sosial yang dianut oleh suatu negara atau sekelompok manusia.

Sistem perkebunan merupakan sistem perekonomian pertanian komersial (*commercial agriculture*) bercorak kolonial, bersandar kepada sistem perkebunan Eropa (*european plantation*). Ciri-ciri utama sistem perkebunan, yaitu bentuk usaha pertanian berskala besar dan kompleks; bersifat padat modal (*capital intensive*); lahan luas; organisasi tenaga kerja besar; pembagian kerja rinci; tenaga kerja upahan (*wage labour*); struktur hubungan kerja rapih; teknologi modern;

spesialisasi; sistem administrasi dan birokrasi; serta tanaman komersial (*commercial crops*) komoditas ekspor. Keadaan ini berbeda dengan sistem kebun yang tradisional dengan ekonomi subsisten, tidak padat modal, dan tidak berorientasi ekonomi (Kartodirdjo & Surjo, 1991: 3-4).

Lanskap budaya (*cultural landscape*) merupakan suatu bentukan lanskap masa lampau yang memiliki dimensi waktu di dalamnya (Nurisjah & Pramukanto, 2001), hasil interaksi antara manusia dengan sistem alam, dalam rentang waktu panjang. Suatu bentukan lanskap dikatakan memiliki nilai sejarah apabila memiliki minimal satu kriteria. Ada tiga kriteria yang mendukung suatu bentukan lanskap, yaitu: (1) *etnografis*, merupakan produk khas suatu sistem ekonomi dan sosial suatu kelompok/suku masyarakat (etnik); (2) *associative*, suatu bentuk lanskap yang berasosiasi atau yang dapat dihubungkan dengan suatu peristiwa, personal, masyarakat, legenda, pelukis, estetika dan sebagainya; dan (3) *adjoining*, adalah bentukan lanskap bagian dari suatu unit tertentu, bagian monumen, atau bagian dari struktur bangunan tertentu. Selanjutnya dijelaskan bahwa lanskap budaya juga merupakan lanskap sejarah, lanskap yang berasal dari masa lampau, dan di dalamnya terdapat bukti fisik tentang keberadaan manusia pendukung budaya tersebut (Harvey dan Buggy, 1988).

Lanskap budaya atau *cultural landscape* disebut juga dengan istilah "saujana budaya". Istilah "saujana budaya" merupakan satu konsep yang telah diterima secara luas dan diadopsi dalam kriteria *World Heritage* sejak tahun 1973. *UNESCO World Heritage Centre* pada tahun 2005 menjelaskan bahwa "saujana budaya" sengaja dirancang oleh manusia, terbentuk secara perlahan dan bertahap, hasil dari interaksi manusia dengan alam (baik yang sudah menjadi reliik maupun yang masih terus berproses). Saujana budaya asosiatif selalu dikaitkan dengan

gagasan religius, tradisi, atau pemahaman budaya tertentu atau terkait unsur budaya tak benda (*intangible*) (Lanskap Budaya, 2018).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian situs perkebunan termasuk penelitian arkeologi industri (*industrial archaeology*) (Casella, 2005: 15). Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian arkeologi industri tahun 2019, dengan *framework: surface surveys, excavations, archival research*; dan *oral history interviews* (Palmer & Neaverson, 2000: 15); dan diperkaya dengan sumber data hasil survei tahun 2021. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah *desk research* terhadap laporan hasil penelitian arkeologi, jurnal ilmiah, buku, serta sumber arsip kolonial ketika penulisan dilakukan di tahun 2021. Tulisan ini menggunakan konsep nilai budaya dan konsep lanskap budaya.

Langkah-langkah pengkajian yang dilakukan sebagai berikut.

- Menetapkan objek arkeologis yang akan dijadikan sumber data;
- Melakukan deskripsi terhadap objek

arkeologis mengenai wujud fisik dan tata letaknya dalam lanskap kebun dan emplasemen permukiman;

- Mencari sumber arsip terkait sejarah perkebunan dan *lay out* kawasan kebun dan emplasemen lama;
- Mencari pengertian konsep yang digunakan; dan
- Melakukan analisis bentuk wujud fisik, memahami simbol atau sinyal nonverbal (bahasa nonverbal) yang ditunjukkan, dan interpretasi terhadap wujud fisik sehingga dapat menjelaskan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

C. HASIL DAN BAHASAN

Perkebunan kina Cinyuruan terletak di Bandung Selatan dengan fisiografi didominasi lahan perbukitan dan pegunungan. Karakter lingkungan seperti ini sangat cocok untuk tumbuh kembang pohon kina. Perkebunan ini merupakan perusahaan besar milik negara, *Gouvernement Kina Onderneming Tjinyiroean* yang didirikan 17 Desember 1855 (Nuralia et.al, 2019: 215).



Gambar 1. Perkebunan Cinyuruan (*Gouvt. Kina Og. Tjinjiroean*)
Sumber: Peta Topografi Blad 32 B (Alg. No. XL 38-B) Java. Res. Preanger Regentschappen. Topografischen Dienst in 1919 - 1923. Dutch Colonial Maps – Leiden University Libraries.

Permukiman emplasemen perkebunan didirikan pada pedataran lereng atau puncak yaitu bukit, dan lembah. Bukit, lereng, dan lembah tersebut merupakan lahan luas di gunung-gunung yang masih aktif dahulunya, bahkan ada yang masih menunjukkan keaktifannya sampai sekarang.

Salah satu puncak gunung api di Bandung Selatan, di Kecamatan Pangalengan di bagian timur adalah Gunung Malabar (2.321 m dpl). Kawasan lahan di sebelah selatan Gunung Malabar terdapat Gunung Wayang (2.182 m dpl) dan Gunung Windu (2.054 m dpl) (Peta Topografi sheet, 1944). Daerah pegunungan ini tersusun oleh batuan gunung api muda. Kawasan di antara puncak-puncak gunung merupakan Dataran Pangalengan. Lahan di tengah-tengah Dataran Pangalengan terdapat danau (situ) bernama Situ Cileunca. Dataran Pangalengan ini tersusun oleh endapan piroklastika yang sangat tebal (Nuralia et.al, 2019). Kemudian kawasan permukiman emplasemen perkebunan Cinyiruan juga berada di antara sungai kecil, yaitu sungai Cihejo yang berhulu di lereng timur Gunung Malabar, cabang dari sungai besar Citarum. Kawasan di bagian tengah terdapat aliran Cisangkuy yang berhulu di Situ Cileunca, mengalir ke utara di sebelah barat Gunung Malabar (Nuralia et.al, 2019: 118-121).

Lokasi Kebun Cinyiruan berada di daerah pedalaman dengan topografi lahan tidak rata atau bergelombang (Gambar 1). Lahan seperti ini memberi efek persediaan air yang tidak tetap. Keadaan topografi secara tidak langsung berperan dalam pengembangan profil tanah dan mempengaruhi persediaan air, yang dapat digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu, juga memengaruhi nilai pertanian tanah, sehingga berkaitan dengan drainase luar dan dalam, serta kemudahan melaksanakan pengerjaan pembajakan (Foth, 2010: 211).

Perkebunan Cinyiruan merupakan perusahaan perkebunan milik pemerintah

Belanda ketika pertama kali didirikan di tahun 1855. Sistem perkebunan merupakan sistem ekonomi modern berpadu dengan sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi modern berasal dari budaya Barat yang dibawa oleh Belanda (Eropa) yang menjadi pengelola dan pemilik perkebunan, sedangkan budaya Timur (Asia) adalah budaya para pekerja kebun berasal dari pribumi asli Indonesia (etnis Sunda). Kedua budaya bercampur dalam satu komunitas dengan sistem ekonomi berbeda.

Sistem ekonomi modern diterapkan ke dalam perkebunan dalam skala besar dengan komoditas tanaman pertanian komersial, sedangkan sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi subsistensi, berjalan dalam keseharian para pekerja perkebunan. Para pekerja atau kuli kebun menggarap sawah dan ladang serta beternak untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari (Nuralia, 2016). Dengan Demikian, dalam komunitas perkebunan terjadi dualisme ekonomi seperti yang dikemukakan J.H. Boeke. Hasil sistem kebun masuk sektor ekonomi subsistensi, sedangkan hasil agro industri masuk sektor ekonomi Barat (Boeke, 1983). Hasil kebun adalah garapan mandiri para pekerja berupa lahan sawah, lahan kebun sayur dan palawija, serta ternak. Sebagian besar hasil kebun dikonsumsi sendiri dan ada sebagian kecil lainnya dijual di pasar lokal. Kemudian lahan hasil agro industri (perkebunan) di antaranya kopi, kina, teh, karet, dan kelapa sawit, yang merupakan komoditas perdagangan dunia internasional (ekspor).

Sistem ekonomi modern melahirkan sistem ekonomi uang, sebagai jelmaan sistem ekonomi liberal (Barat) beserta kapitalismenya. Sistem ini secara perlahan dan terus menerus menunjukkan garis progresif terhadap pertanian di Pulau Jawa dan sebagian wilayah utara Pulau Sumatera (Sajogyo, 1982: 7). Upah buruh perkebunan dibayar dengan uang. Alat tukar berupa uang sudah semakin populer dalam masyarakat perkebunan, walaupun



Gambar 3. Emplasemen Permukiman Afdelin Kebun Cinyuruan Perkebunan Kertamanah
 Sumber: Laporan Penelitian Arkeologi, 2019.

5. Bekas Madrasah (Bekas Rumah Dinas Mandor Besar Cinyuruan)
6. Tuga Peringatan 100 Tahun Kebun Cinyuruan
7. Bekas PLTM Cinyuruan
8. Posyandu Aster 21 dan Rumah Karyawan (Bekas Komplek Pabrik Kina Cinyuruan)
9. SDN Cibeureum
10. Bekas lokasi Pasar Cinyuruan
11. Rumah Dinas ADM Kertamanah (Bekas Rumah ADM Cinyuruan)
12. SDN Campaka
13. Rumah Dinas Asisten Afdeling Cinyuruan (bekas Rumah Tinggal Gerald Alfred Cup, Botanik dan Administratur Kebun Cinyuruan tahun 1945 – 1970-an)
14. Makam Gerald Alfred Cup (Tuan Keub/Tuan Cup).

Hidayat, wawancara, 2019). Tradisi produksi di sini adalah proses produksi pengolahan kina dari mulai pengadaan kulit kina basah di kebun dan pengolahan kulit kina kering di pabrik. Langkah-langkah pengolahan tersebut menjadi tinggalan budaya tak benda (*intangible culture*) yang memiliki nilai-nilai budaya khas perkebunan. Nilai budaya khas perkebunan merupakan budaya *hybrid*, campuran antara budaya Barat dan budaya Timur (Nuralia dan Imadudin, 2019).

Nilai budaya Barat berjalan beriringan dengan nilai budaya Timur, karena tidak pernah benar-benar terjadi percampuran antara kedua budaya tersebut. Pertemuan dua budaya terlihat dari bentuk dan gaya arsitektur rumah tinggal. Unsur arsitektur Eropa dipadu dengan unsur arsitektur lokal, yaitu dinding tebal dengan plester semen yang menggunakan teknologi modern, berpadu dengan bentuk atap bahan isian dinding yang digunakan adalah bata merah dari tanah liat bakar dan batu alam (andesit). Bentuk atap lebih menunjukkan ciri arsitektur lokal (Sunda,

Tinggalan budaya tak benda di Kebun Cinyuruan berupa tradisi produksi dan nilai budaya perkebunan, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan (Hidayat, wawancara, 2018;

yaitu atap *jolopong* (kampung) dan *parahu kumereb* (limasan). Keadaan ini tampak pada rumah pejabat tinggi perkebunan, seperti rumah administratur, rumah sinder afdeling, dan jajaran rumah pengelola lainnya yang diperuntukkan bagi orang-orang Eropa.



Gambar 4. Perumahan Karyawan Jejer 10 Kebun Cinyiruan

Sumber: Dokumentasi Iim Imadudin, 2021.

Pertemuan antara budaya Barat dan Timur juga tampak pada perumahan pegawai yang secara wujud fisik banyak mengadopsi bentuk rumah panggung (Gambar 4). Bahan dinding dan atap juga terbuat dari bahan kayu dan ijuk, yang menjadi penanda rumah tradisional Sunda. Unsur budaya Barat ditunjukkan dengan tata letak dalam ruang yang khas alam pegunungan, dengan ketinggian lahan tidak rata. Penataan lahan perumahan pegawai di alam hutan hujan tropis berbeda dengan penataan lahan bangunan dalam penataan rumah tradisional Sunda. Hutan yang telah dibuka untuk lahan pemukiman kemudian ditata dengan cara *cut and fill*. Lahan diratakan dan disesuaikan dengan jarak antar rumah yang sama, serta lahan yang datar dan tertata rapih.

Bangunan rumah administratur atau manajer perkebunan (Gambar 5) dan rumah karyawan berbeda secara fisik, berdasarkan kriteria model bangunan dan penyebutan rumah dan perumahan. Rumah ADM bermodel rumah non panggung, sedangkan rumah pekerja bermodel rumah panggung. Penyebutan rumah untuk bangunan pejabat tinggi sebagai bangunan tunggal. Sementara itu, rumah karyawan

disebut perumahan, sekelompok rumah dengan model dan dimensi yang hampir sama. Model rumah non panggung identik dengan rumah modern Barat, dengan bahan bangunan dan teknologi modern, walaupun unsur tradisional (timur) atau lokal masih dipergunakan sebagai penyesuaian dengan lingkungan alam sekitar. Kemudian model rumah panggung menyerupai rumah tradisional Sunda, dengan sentuhan unsur teknologi Barat dalam penataan lahan bangunan (Nuralia, et.al, 2019: 101-102).



Gambar 5. Rumah Manajer/ADM Perkebunan Kertamanah.

Sumber: Dokumentasi Iim Imadudin, 2021.



Gambar 6. Makam Gerald Alfred Cup di Bekas Lahan Kebun Kina Cinyiruan

Sumber: Dokumentasi Iim Imadudin, 2021.

Lahan permukiman perkebunan juga menyediakan lahan kuburan atau pemakaman umum. Biasanya digunakan untuk para pekerja atau karyawan kebun. Kemudian lahan kuburan khusus disediakan untuk para pejabat tinggi perkebunan. Salah satu lahan khusus makam ditemukan di bekas Kebun Kina Cinyiruan, di lahan datar di lereng bukit Kebun Kina. Ada satu makam dengan

penanda salib di bawah pohon beringin dan dikelilingi pohon kina, yaitu makam Gerald Alfred Cup, seorang botanis dan Administratur Perkebunan Kina Cinyuruan terakhir. Ia dikenal sebagai *Meneer Cup* atau Tuan Kap (Gambar 6).



Gambar 7. Bekas Lahan dan Sisa Pondasi Pabrik Kina Cinyuruan
Sumber: Dokumentasi Iim Imadudin, 2021.

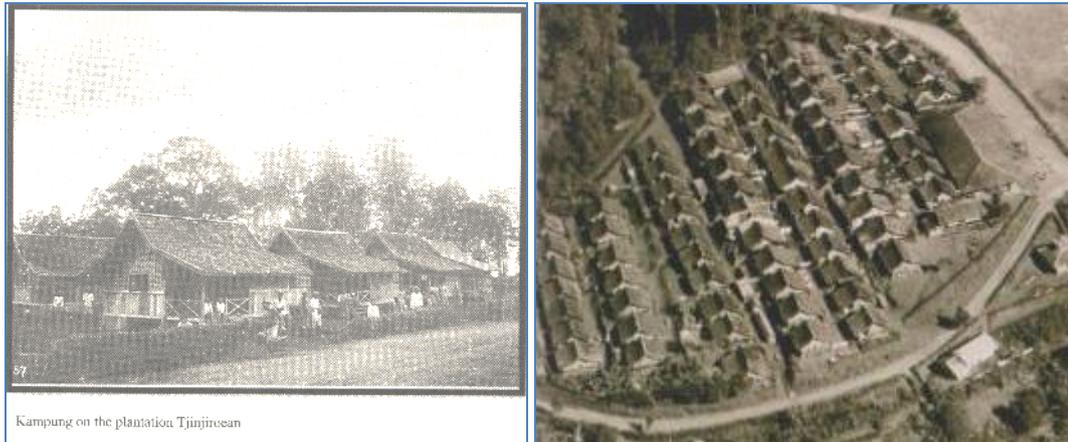
Tata guna lahan dalam lanskap budaya industri perkebunan kina memiliki keterkaitan dengan fungsi bangunan yang didirikan di atasnya. Lahan produksi menjadi tempat berdirinya pabrik sebagai bangunan produksi utama dan bangunan pendukung produksi (Gambar 7). Letak pabrik dan bangunan pendukung produksi akan berdekatan karena ada hubungan formal di antara keduanya. Misalnya PLTM (kantor, turbin, bak air) memiliki hubungan formal sangat jelas dengan Pabrik Kina, karena pabrik pengolahan kulit kina kering dapat beroperasi apabila ada pendukung energi listrik untuk menghidupkan mesin penggilingan (Nuralia, et.al, 2019: 98).

Berdasarkan bentuk, arsitektur dan tata letak bangunan rumah tinggal tersebut, tampak adanya perpaduan serasi antara nilai budaya Barat dan Timur. Kemudian tampak juga adanya perbedaan yang kontras yang menunjukkan fungsi rumah terkait peran (status) dan jenis

pekerjaannya. Pada masa kolonial, struktur sosial masyarakat perkebunan terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu pemilik dan pekerja atau antara majikan dan buruh (Nuralia, 2016). Majikan berasal dari orang-orang Eropa (Belanda) dan buruh adalah orang-orang pribumi asli Indonesia (Sunda). Dengan demikian, masyarakat perkebunan secara kontras terdiri dari dua ras, yaitu ras Eropa dan ras Asia dengan budaya Barat dan Timur. Budaya yang berbeda melahirkan sistem nilai yang berbeda pula. Akibat dari keadaan kontras dalam kehidupan sosial di perkebunan tersebut menunjukkan sistem sosial yang bersifat dualisme, yaitu sistem sosial tradisional Timur dan sistem sosial modern Barat.

Keberadaan sistem ekonomi dan sistem sosial yang bermuka dua membuktikan lanskap Kebun Cinyuruan memiliki kriteria sebagai lanskap budaya industri yang bernilai sejarah. Lanskap tersebut sengaja dibentuk oleh Pemerintah Kolonial berkaitan dengan kolonialisme dan imperialisme orang-orang Eropa di tanah jajahannya. Salah satu bukti penjajahan yang paling konkret adalah adanya pemerasan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui pendirian perusahaan perkebunan.

Dualisme ekonomi perkebunan menunjukkan adanya kriteria etnografis khas perkebunan. Kriteria etnografis merupakan produk khas suatu sistem ekonomi dan sosial suatu kelompok/suku masyarakat (etnik). Dalam hal ini adalah etnis Sunda sebagai kelompok besar manusia yang terlibat dalam perputaran ekonomi Pemerintah (penjajah) Belanda. Sementara itu, orang-orang Belanda sebagai bangsa pendatang berhasil menguasai sumber alam dan sumber daya manusia pribumi (yang dijajah).



Gambar 8. Perumahan karyawan “Jejer Sapuluh” Kebun Cinyiruan Lama
 Sumber: Publicatie Zonder Vermelding LUCHTOPNAME K.N.I.L.M. VERBODEN 938 dan
 Dokumentasi Karyawan Perkebunan Kertamanah (Repro/Scan Manual oleh Lia Nuralia, 4 Juli 2019)

Lanskap industri perkebunan juga menunjukkan adanya kriteria asosiatif. Suatu bentuk lanskap yang berasosiasi atau yang dapat dihubungkan dengan suatu peristiwa, personal dan masyarakat. Dalam kasus Kebun Kina Cinyiruan, peristiwa besar itu terjadi pada pertengahan abad ke-19 atau tahun 1855, ketika pertama kali Kebun Cinyiruan didirikan oleh Pemerintah Belanda. Pendirian Perkebunan Cinyiruan merupakan salah satu peristiwa penting yang berdampak besar kepada perkembangan ekonomi Hindia Belanda dan perubahan nilai budaya, yaitu lahirnya budaya khas masyarakat perkebunan dengan nilai-nilai budaya hibrid. Budaya hibrid ketika itu ditunjukkan dengan adanya penyebutan budaya indis, yang lahir dalam berbagai ruang kolonial, di kota-kota dan di desa-desa (Soekiman, 2011), termasuk di desa pegunungan tempat berdirinya perkebunan.

Kebun Afdeling Cinyiruan sebagai lanskap budaya industri perkebunan yang bisa juga disebut sebagai “saujana budaya”, bersifat asosiatif karena terkait dengan keragaman budaya, tradisi budaya lokal Sunda, yang terkait unsur budaya tak benda atau *intangible culture*. Kebun Afdeling Cinyiruan juga merupakan bentukan lanskap bagian dari suatu persekutuan besar pemerintah kolonial

dalam sistem ekonomi kolonial, yang berasal dari masa lampau, dengan bukti fisik tentang keberadaan manusia berupa lahan kebun, dan lahan emplasemen permukiman yang di atasnya masih tersisa bangunan lama dan sisa-sisanya. Dengan demikian, lahan kebun dan emplasemen permukiman Cinyiruan memiliki sifat *adjoining*.

Lanskap budaya industri Perkebunan Cinyiruan dengan tiga kriteria tersebut melahirkan nilai-nilai budaya campuran antara budaya Barat dan budaya Timur. Nilai budaya dalam sistem budaya merupakan lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkungannya, terkait erat dengan ukuran baik dan buruk, serta memiliki fungsi memantapkan dan menstabilkan kebudayaan. Ada dua nilai budaya secara garis besar yang tumbuh dalam masyarakat Perkebunan Kina Cinyiruan masa kolonial, yaitu:

1. Nilai budaya kolonial; dan
2. Nilai budaya tradisional Sunda.

Kedua nilai budaya tersebut berkaitan erat dengan kearifan lokal dan sisi positif kolonialisme Barat di Indonesia, melalui lanskap industri perkebunan warisan kolonial Belanda.

1. Nilai Budaya Tradisional Sunda Berpadu dengan Nilai Budaya Kolonial Barat dalam Lanskap Budaya Industri Perkebunan

Nilai budaya tradisional Sunda tampak pada perumahan karyawan (pegawai) perkebunan secara wujud fisik bangunan dan tata letak bangunan atau pola pemukiman. Kemudian nilai budaya lainnya tampak pada tata guna lahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan berupa kebun, ladang, dan sawah.

Wujud fisik bangunan rumah orang Sunda adalah model rumah panggung dengan bentuk atap di antaranya *joloppong* (kampung), *parahu kumereb* (limasan), dan *julang ngapak* (model kampung dengan ujung melebar dan menekuk). Kemudian bahan lantai, bahan dinding, dan penutup atap memanfaatkan potensi alam di lingkungan pegunungan. Penampakan fisik tersebut menjadi ciri menonjol yang tampak kasat mata. Ciri rumah tradisional Sunda dengan bentuk atap *julang ngapak* tampak pada perumahan karyawan Perkebunan Cinyuruan dahulu (Gambar 8). Sementara itu, perumahan karyawan emplasemen permukiman Afdeling Cinyuruan Perkebunan Kertamanah sekarang memiliki bentuk atap perpaduan bentuk atap *joloppong* dan *parahu kumereb*.

Adopsi model rumah panggung memanfaatkan budaya lokal dan ketersediaan di lingkungan setempat, menjadi pilihan kaum koloni. Dalam hal ini adalah budaya Sunda di dataran Pangalengan, Priangan Jawa Barat. Model rumah panggung tersebut merupakan salah satu kearifan lokal dalam pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang sesuai dengan kondisi alam pegunungan di Priangan dengan iklim tropis basah. Model rumah panggung juga memiliki makna dan filosofi tersendiri bagi masyarakat Sunda. Konsep filosofi ini yang tidak ditemukan pada perumahan karyawan perkebunan, sehingga tidak identik dengan penjelmaan rumah tradisional Sunda.

Rumah panggung tradisional Sunda menunjukkan kearifan lokal, memiliki makna sebagai berikut: (1) bahan yang digunakan sesuai iklim tropis basah Indonesia; (2) posisi lantai tidak menempel ke permukaan tanah, sehingga rumah tidak menjadi lembab; (3) penghuni tidak berada di permukaan tanah, tetapi di tengah-tengah sehingga tidak langsung merasakan udara dingin (Nuralia, 2020: 85).

Secara fisik ada kesamaan antara keduanya, yaitu memiliki lantai berada di atas tanah, ada ruang antara permukaan tanah dan lantai rumah atau berkolong (Nuryanto dan Ahdiat, 2014). Persamaan lain yang juga tampak mirip pada bahan bangunan yang digunakan. Bahan dinding bilik bambu, rangka kayu, lantai papan atau *palupuh*, serta penutup atap dari ijuk atau daun-daun kering. Kemudian terjadi perkembangan lain dengan sentuhan budaya Barat, yaitu bahan penutup atap memakai genteng tanah liat.

Filosofi model rumah panggung tradisional Sunda menjadi perbedaan menonjol antara keduanya. Tampak dalam pembagian ruang, struktur bangunan, dan tata letak dalam lanskap ruang permukiman (Tabel 1). Rumah tradisional Sunda memakai konsep Tri Tangtu. Kata Tri artinya tiga dan kata Tangtu artinya pasti. Pemahaman konsep Tri Tangtu bahwa dunia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *ambu handap* (dunia bawah), *ambu tengah* (dunia tengah), dan *ambu luhur* (dunia atas) (Danasasmita, et.al, 1987). Kemudian pembagian ruang dibagi tiga, yaitu (1) *tepas* (teras/ruang terbuka) untuk menerima tamu, sebagai ruang laki-laki, (2) tengah imah (ruang transisi/netral) untuk laki-laki dan perempuan, dan (3) *goah* dan *pawon* (ruang belakang untuk wanita) (Heryana, 2010: 372-373). Sementara itu, pembagian ruang pada perumahan karyawan perkebunan tidak mengadopsi filosofi Sunda tersebut.

Pola perkampungan orang Sunda memiliki ciri khas tersendiri, yaitu pola memanjang dan memusat dengan pusat rumah ketua adat (*pupuhu*) di ujung jalan.

Pola ini dapat dijumpai pada perkampungan masyarakat Baduy di Banten dan Kampung Naga Tasikmalaya di Jawa Barat (Nuralia, 2020: 83).

Konsep dasar arsitektur tradisional Sunda adalah harmoni dengan alam. Sebutan bumi untuk rumah tinggal, penataan rumah melingkar memanjang membentuk huruf U, memiliki makna berkumpul (*ngariung*). Rumah dibangun sederhana membujur dari timur ke barat, menyesuaikan dengan peredaran sinar matahari dan tidak menentang hukum alam. Keadaan ini menjadi sangat baik karena sirkulasi udara dan cahaya lancar dan berubah secara alamiah (Suharjanto 2014: 514).

Pola pemukiman rumah karyawan perkebunan dan rumah tradisional Sunda memiliki pola yang berbeda. Pola pemukiman rumah karyawan perkebunan berderet atau berjejer teratur, di atas lahan berkontur rata, dalam bentuk lahan persegi atau persegi panjang (Gambar 5 dan 7). Pola pemukiman seperti ini adalah hasil bentukan tangan manusia, sebagai bukti adanya persentuhan budaya Barat. Kontur lahan alam pegunungan yang tidak rata atau topografi permukaan tanah bergelombang, diubah dengan metode *cut*

and fill. Persentuhan budaya barat dalam arsitektur rumah karyawan perkebunan menjadi gaya campuran yang sering disebut sebagai gaya Indis (Sukiman, 2011: 3).

Persentuhan budaya Barat pada Rumah Karyawan Perkebunan juga tampak dalam struktur bangunan dan tata ruang dalam. Konsep modern Eropa dalam bentuk sederhana, tetapi tetap mengacu kepada konsep *form follows function*, yaitu bentuk mengikuti fungsi, sebagai karakter yang cukup khas (Mayer 1992).

Lahan pemukiman pekerja Kebun Cinyuruan dahulu disebut Komplek Jejer Sapuluh. Sekarang bentuk lahan dan rumah sudah mengalami perubahan (Gambar 5). Bentuk rumah di Komplek Jejer Sapuluh yang masih dijumpai adalah bangunan rumah yang dibangun sekitar tahun 1960-an (Jajang, Asisten Afdeling Tirtasari Perkebunan Kertamanah di Cinyuruan, 6 Juni 2019).

Perubahan bentuk rumah terutama tampak pada bentuk atap. Pada awalnya rumah karyawan Kebun Cinyuruan berbentuk atap *julang ngapak*. Kemudian ketika dilakukan perubahan di tahun 1960-an, bentuk atapnya berubah menjadi atap *jolopong* dan atap *parahu kumereb*

Tabel 1. Model Rumah Tradisional Sunda dan Rumah Karyawan Perkebunan

Bangunan Rumah	Model	Pembagian Ruang	Struktur Bangunan	Tata Letak dalam Ruang Pemukiman	Lanskap	Bahan Bangunan
Tradisional Sunda	Rumah Panggung	Konsep Tri Tangtu	Konsep Tri Tangtu	Mengelompok, tidak rapih, jarak antar rumah tidak sama, permukaan lahan tidak rata atau sesuai kontur tanah		Kayu, bambu, batu, daun-daunan, penggunaan pasak kayu untuk sambungan.
Karyawan Perkebunan	Rumah Panggung	<i>form follows function</i>	Morfologi Tubuh Manusia	Mengelompok, tertata rapih, jarak antar rumah sama, permukaan lahan rata dengan metode <i>cut & fill</i>		Kayu, bambu, batu, genteng tanah liat, penggunaan pasak kayu untuk sambungan.
Pejabat Perkebunan	Rumah Permanen	Model Victorian yang kompleks	Morfologi Tubuh	Terpisah, terencana dengan baik, gaya arsitektur khusus, permukaan lahan rata di atas pedataran puncak bukit dengan		Bata merah, batu andesit, kayu, kaca, genteng tanah liat dan atap

(Gambar 5). Bentuk atap yang digunakan masih merupakan atap tradisional Sunda. Dengan demikian, ada kearifan lokal yang masih dipertahankan dan menjadi identitas rumah karyawan perkebunan.

Lanskap budaya industri perkebunan juga tampak dalam tata guna lahan pertanian, yaitu kebun, sawah, dan ladang. Ketiga lahan tersebut menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari atau ekonomi subsisten. Para pekerja menjalankan kesehariannya bekerja sebagai buruh kebun dan pabrik, kemudian menggarap lahan yang ada di sekitar rumahnya atau lahan kosong tidak jauh dari tempat tinggalnya. Biasanya mereka bercocok tanam sayuran dan palawija, bersawah atau menanam padi basah, serta berladang atau menanam padi huma. Selain itu, mereka juga beternak unggas untuk memenuhi kebutuhan protein sekeluarga. Sementara itu, tata guna lahan sebagai area tanaman komersial atau perkebunan kina merupakan konsep ekonomi modern kaum koloni (Barat/Belanda). Pohon kina ditanam di lahan miring seperti di lereng gunung atau lereng bukit. Lahan perkebunan tersebut menjadi produksi utama yang menghasilkan tanaman komersial yang laku di pasaran dunia. Tanaman kina pernah menjadi primadona di awal abad ke-20, hampir 90 % kebutuhan kina dunia dipasok dari Hindia Belanda.



Gambar 9. Lukisan Tangan Rumah ADM Perkebunan Cinyuruan Masa Kolonial (1942)
Sumber: Rumah Dinas ADM Perkebunan Kertamanah, 2019.

Lanskap budaya industri perkebunan juga menampakkan lahan pemukiman utama, yang berada di pedataran lereng dengan halaman luas dan berlatar belakang kebun kina di lereng gunung atau bukit. Penempatan ini sangat direncanakan dan ditata dengan baik, karena diperuntukkan bagi pejabat tertinggi perkebunan ketika itu, yaitu rumah tinggal administrator, seperti tampak dalam gambar lukisan (Gambar 9).

Rumah administrator perkebunan Kina Cinyuruan dahulu (sekarang Rumah Dinas Perkebunan Kertamanah), berada di puncak bukit dengan pemandangan ke lahan kompleks pabrik, perumahan karyawan Jejer Sapuluh, dan perkantoran. Posisi tersebut sangat strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi pengelolaan. Pemerintah kolonial membentuk lanskap alam yang bertujuan untuk menopang berbagai kepentingan mulai dari keletakan lanskap hingga keberlangsungan proses produksi. Hal tersebut merupakan bagian dari proyek negara yang disebut sebagai rekayasa sosial. Masyarakat dibentuk atas logika rasional pengetahuan dalam skema perencanaan yang ilmiah (Scott, 1998).

Kaum koloni atau para pengusaha perkebunan dengan sengaja memanfaatkan budaya lokal para pekerja perkebunan. Hak ini menjadi sangat menguntungkan untuk membuat mereka nyaman, bekerja giat, dan tinggal menetap di perumahan perkebunan yang disediakan perusahaan. Demikian juga dengan rumah tinggal pejabat tinggi perkebunan, menempati lahan yang paling strategis, akses keluar masuk mudah memiliki jalur jalan tersendiri. Hal ini terlihat dari Rumah Dinas Administrator Perkebunan Cinyuruan (Gambar 5 dan Gambar 9) yang memiliki jalan masuk kendaraan roda empat dan tangga naik untuk pejalan kaki. Selain itu, jalan masuk ke perkebunan kina tersendiri di bagian belakang rumah.

Rumah administrator tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas keseharian yang sengaja diadakan. Selain bangunan

inti, ada bangunan tambahan (ruang *service*) dan bangunan mes (untuk menerima dan menginap tamu dari luar). Bangunan inti diperuntukkan bagi administratur dan keluarga, bangunan tambahan untuk kamar para pembantu, dan kebutuhan pelayanan. Dalam hal ini, tampak nilai budaya kolonial yang memberi ruang hidup layak bagi para pembantu rumah tangga dan pekerja lainnya.

Rumah administratur perkebunan Cinyiruan tersebut menjadi model rumah dengan arsitektur khas Eropa di perkebunan, atau bangunan kolonial perkebunan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, model dan gaya bangunan arsitektur Eropa identik dengan kesan modern, megah, klasik, *gothic*, serta warna yang lembut, cerah, dan hangat, seperti *Victoria Style*. Desain secara visual eksterior cukup kompleks dan detail. Dinding rumah tebal, pintu dan jendela berukuran besar, serta bentuk bangunan menjulang tinggi.

Bangunan khas Eropa tersebut juga memiliki permukaan lantai yang ditinggikan dari permukaan tanah. Terdapat anak tangga untuk mencapai teras dan pintu masuk utama. Selain itu, pintu masuk utama dilengkapi dengan pintu masuk tambahan di samping kiri dan kanan serta di bagian belakang rumah. Halaman cukup luas di sekeliling rumah dengan kolam ikan, tanaman hias pendek, dan pohon tinggi peneduh. Pintu gerbang masuk dari jalan raya atau jalan perkebunan lebih dari satu akses. Ada jalan lebar untuk kendaraan roda empat dan ada jalan setapak beranak tangga untuk jalan orang.

Bangunan rumah dinas administratur perkebunan Cinyiruan (sekarang Kertamanah) merupakan bangunan rumah ADM yang kedua. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur transisi modern Eropa (Hartono dan Handinoto, 2006). Gaya Eropa dipadu dengan lokal dengan penyesuaian iklim tropis basah Indonesia di alam pegunungan

Priangan Jawa Barat. Penetapan ini berdasarkan pendirian bangunan yang diperkirakan didirikan antara akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, di era peralihan dari gaya Empire (*Indische Empire Stijl*) ke gaya Indo Eropa (*Indo-European Stijl*) atau kolonial modern. Perubahan gaya ini diawali dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Hindia Belanda ketika itu. Modernisasi penemuan baru di bidang teknologi² dan kebijakan politik kolonial³.

Visual interior atau tata ruang dalam bangunan rumah administratur perkebunan Cinyiruan juga menunjukkan kesan rumit dan detail. Bangunan yang terdiri dari dua bagian (inti dan ruang *service*) serta bangunan mes yang menempel di bangunan inti tersebut, memiliki tata ruang dalam khas rumah hunian dengan detail ruang tertentu. Ruang utama atau ruang tamu berpadu dengan ruang tengah dengan persinggungan batas ruang. Kemudian ruang kamar tidur utama dan kamar tidur anak memiliki posisi yang berlawanan atau sejajar dengan lorong sebagai penghubung. Kemudian ruang makan berpadu dengan ruang dapur (dapur bersih). Hampir setiap ruangan memiliki keterhubungan melalui *connecting door*. Sementara itu, bangunan tambahan sebagai ruang *service*, terdiri dari banyak ruang seperti dapur (dapur kotor), kamar tidur pembantu, ruang cuci setrika, WC, gudang, dan ruang serba guna

² Seperti listrik, telepon, telegram, serta kendaraan bermotor yang mulai marak digunakan di Hindia Belanda di awal abad ke-20, terutama di kota-kota besar, seperti Batavia, Bandung, Semarang, Surabaya, dan lain sebagainya (Hartono dan Handiboto, 2006: 81). Termasuk di perkebunan di Bandung Selatan, seperti Perkebunan Cinyiruan dan Kertamanah mulai menggunakan kendaraan bermotor roda empat, khusus bagi para pejabat tinggi perkebunan.

³ Lahirnya UU Agraria 1870, dicanangkannya Politik Etis 1901, diberlakukannya UU Desentralisasi 1905 (Hartono dan Handiboto, 2006: 81).

lainnya. Selanjutnya bangunan mes untuk tamu memiliki pembagian ruang yang hampir sama dengan bangunan inti. Kondisi ini menunjukkan masih adanya gaya arsitektur era *Indische Empire Stijl* dengan model Victorian baru yang rumit dan detail.

Bahan bangunan rumah administratur tersebut lebih memanfaatkan bahan yang tersedia di lingkungan alam sekitarnya. Di antaranya bahan kayu, bata merah, dan batu andesit (batu kali), serta bahan atap sirap. Kelengkapan bahan penutup jendela berupa kaca adalah bahan modern yang mempercantik bangunan dan pemenuhan kebutuhan akan penerangan alami dari cahaya matahari yang masuk menembus kaca.

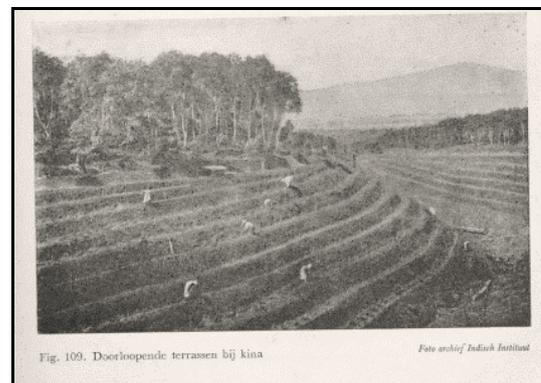
Selain ruang permukiman, ruang produksi di pabrik dan di kebun, juga ada ruang pendukung produksi dan ruang fasilitas sosial atau fasilitas umum. Ruang pendukung produksi memuat bangunan pendukung produksi, seperti gudang, PLTA, dan bangunan serba guna lainnya. Kemudian ruang fasilitas umum atau fasilitas sosial terdiri dari pasar, sekolah, tempat ibadah (masjid), poliklinik, posyandu, pemakaman, dan sarana olah raga (lapang tenis).

Bangunan-bangunan fasilitas perusahaan tersebut memberi kemudahan dan pemenuhan kebutuhan keseharian. Para pemilik dan pengelola (pejabat/unsur pimpinan) dan karyawan (para pekerja administrasi dan tenaga kasar/buruh), memiliki hak untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Kehidupan keseharian akan pangan, sandang, dan papan terpenuhi dengan optimal. Keadaan ini menunjukkan nilai kemajuan kolonialisme Barat di Indonesia.

Kina tumbuh baik di lahan miring pada punggung gunung atau bukit menghadap ke Barat. Menurut pengelola perkebunan, kina tidak terlalu membutuhkan sinar matahari, sehingga lereng Barat menjadi pilihan tepat untuk pencahayaan pohon menuju cahaya sore (Gambar 10).



Gambar 10. Bekas Kebun Kina Cinyiruan.
Dok. Balai Arkeologi Jawa Barat, 2019.



Gambar 11. Lanskap Kebun Kina Pada Lahan Miring Berterasering
Sumber: *Archief Indisch Instituut* dalam *Van Gall en C. Van De Koppel, Deel 1, 1946*.

Pada zaman Belanda penanaman kina juga menyesuaikan dengan kebutuhan karakteristik pohon kina. Lereng bukit yang berkontur miring sekitar 30-45 ditata dengan undakan-undakan tanah atau terasering (Gambar 11). Lahan seperti ini memudahkan penanaman dan pemeliharannya. Para pekerja akan mengikuti kontur tanah melingkar lereng bukit atau lereng gunung, yang telah ditata dengan teras-teras tersebut.

Lokasi perkebunan kina dalam lanskap industri perkebunan menjadi sangat penting. Tanaman produksi utama di Perkebunan Cinyiruan pada masa kolonial sangat diperhatikan dan dijaga pertumbuhannya untuk menghasilkan kulit kina yang sesuai dengan kebutuhan ekspor, kualitas tinggi, dan menghasilkan zat quinine yang berkualitas. Selain memudahkan penanaman dan perawatan,

juga akan memudahkan pemanenan dan pengangkutan hasil panen ke lokasi pabrik.

Pada zaman dahulu hasil panen kulit kina basah dari kebun tidak diangkut manual dengan kendaraan, tetapi bisa langsung menuju lokasi pabrik (penjemuran) dengan lori kereta gantung. Menurut penuturan pengelola perkebunan, dahulu ada lori kereta gantung dari puncak bukit kebun kina menuju pabrik, sehingga memudahkan dan mempercepat penerimaan kulit kina basah di tempat penimbangan untuk kemudian masuk ruang penjemuran (Jajang, wawancara, Juni 2019).

Perkembangan lebih lanjut terjadi dengan keberadaan kendaraan roda empat untuk mengangkut hasil panen. Kulit kina basah yang sudah diikat dan dimasukkan ke dalam karung akan diangkut ke pabrik dengan truk. Selanjutnya alat angkut kulit kina juga bisa dilakukan dengan menggunakan sepeda motor dan angkutan tradisional (Permana, wawancara, Juni 2018; Hidayat, wawancara, Juli 2019). Alat angkut tradisional dengan cara dipikul di pundak secara manual yang dilakukan oleh para pekerja dengan menggunakan "rancatan" kayu dengan wadah "tolombong" terbuat dari bambu atau menggunakan karung yang diikat di kedua ujung "rancatan" tersebut. Pengangkutan tersebut terutama dari kebun kina yang berjarak dekat dengan pabrik dan kulit kina sudah dikumpulkan di satu titik di tepi jalan perkebunan.

Keberadaan jalan perkebunan dan ruang kebun yang diperuntukkan sebagai jalur lalu lintas lori kereta gantung, menunjukkan adanya ruang budaya yang berfungsi ganda. Jalur lori kereta gantung bermula dari lahan kebun melintasi ruang permukiman dan ruang lainnya sehingga sampai di pabrik. Kemudian jalur jalan perkebunan tidak hanya sebagai ruang mobilitas para pekerja dan pengelola, tetapi juga lalu lintas bahan produksi utama, yaitu kulit kina kering dari kebun menuju pabrik.

Pohon kina dapat tumbuh sampai ketinggian maksimal sekitar 15 meter dari permukaan tanah. Pohon-pohon kina yang usianya sudah puluhan tahun tersebut menjadi pohon biji yang akan menumbuhkan pohon-pohon baru, setelah melalui proses tertentu. Lahan kebun kina membutuhkan lahan terbuka luas, seperti halnya hutan belantara, tetapi tetap terpelihara dan tidak dibiarkan tumbuh pohon-pohon lain yang akan mengganggu pertumbuhan kina itu sendiri. Ada beberapa pohon pendamping dan pelindung, seperti pohon damar dan pohon kayu putih. Juga ada beberapa pohon lain di luar batas lahan kebun kina.

D. PENUTUP

Lanskap budaya industri perkebunan kina Cinyuruan merupakan ruang permukiman dan perkebunan, dengan tata guna lahan yang terbagi ke dalam beberapa bagian sesuai fungsinya. Ruang permukiman terdiri dari lahan kompleks pabrik, lahan perkantoran, lahan perumahan karyawan, lahan fasilitas sosial atau fasilitas umum, lahan sarana olah raga, serta lahan rumah tinggal pejabat tinggi perkebunan.

Lahan kebun untuk keperluan hidup sehari-hari para pekerja, di samping keberadaan pasar yang siap menyediakan berbagai keperluan. Kemudian lahan perkebunan menjadi lahan produksi utama, yaitu produksi kina, yang bersifat komersial dengan penataan modern barat. Tata guna lahan pada lanskap budaya industri perkebunan tersebut tidak hanya menjadi ruang budaya fisik, tetapi juga memiliki nilai budaya yang bersifat non fisik. Pertama, nilai budaya tradisional Sunda sebagai kearifan lokal dalam harmoni dengan alam. Kedua, nilai budaya kolonial dari perspektif kolonialisme Barat

DAFTAR SUMBER

- Archief Indish Instituut dalam *Van Gall en C. Van De Koppel, Deel 1*, 1946.
- Album foto “*Pictures From The Archives of The Royal Tropical Museum Amsterdam*” di Rumah Manajer / ADM Perkebunan Kertamanah.
- Boeke, J. H. (1983). *Prakapitalisme Di Asia*. Terjemahan D. Projosiswoyo. Jakarta: Yayasan Sinar Harapan bekerja sama dengan Yayasan Tani Atsiri Wangi.
- Casella, E. C. (2005). “*Social Workers: New Directions in Industrial Archaeology*”. Dalam Eleanor Conlin Casella and James Symonds (Edited), *Industrial Archaeology: Future Directions*. USA: Springer Science and Business Media Inc. p. 3-32.
- Danasasmita, S., Ayatrohaedi., Wartini, T., Darsa, U. A. (1987). *Sewakadarma, Sanghyang Siksakandang Karesian, Amanat Galunggung: Transkripsi dan Terjemahan*. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Ditjen Kebudayaan Depdikbud.
- Daniel, M. (2004). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Foster, G. M. (1975). *Traditional Society and Technical Change*, Harper & Row Publisher, New York-Evanston-San Fransisco-London.
- Foth, H. D. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*. Terjemahan Soenartomo Adisoemarto.
- Hartono, S. dan Handinoto. (2006). *Arsitektur Transisi di Nusantara dari Akhir Abad ke-19 Ke Awal abad Ke-20 (Studi Kasus Komplek Bangunan Militer di Jawa Pada Perlaihan Abad 19 Ke 20)*. Dalam *Dimensi Teknik Arsitektur* Vol. 34 No. 2, Desember 2006. Halaman 81-92.
- Harvey, R. R. and S. Buggey. (1988). *Historic Landscape section 630*. C. W. Harris and N. T. Dines, editor. Time Saver Standards For Landscape Architecture. New York: Mc Graw-Hill Book Co.
- Heryana, A. (2010). *Tri Tangtu Di Bumi di Kampung Naga: Melacak Sistem Pemerintahan (Sunda)*. *Patanjala* Vol. 2, No. 3, September 2010: 359 – 376.
- Hidayat, T. (Juni, 2018). *Wawancara*.
- Hidayat, T. (Juli, 2019). *Wawancara*.
- Imadudin, I. (2021). *Laporan Survei Kanal Budaya “Cerita Kina dari Bumi Pasundan”*. Bandung: BPNB Provinsi Jawa Barat.
- Jajang. (Juni, 2019). *Wawancara*.
- Kartodirdjo, S. & Surjo, D. (1991). *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Lanskap Budaya*. (2018, 13 November). <http://borobudurpedia.id/lanskap-budaya/>.
- Mayer, B. 1992. *The Complete Book of Interior Design*. Australia: Simon and Schuster Ltfd
- Nuralia, L. (2020). *Model Rumah dan Kearifan Lokal Rumah Karyawan Perkebunan Zaman Belanda di Bandung Jawa Barat. Prosiding Seminar Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi (EHPA) Tahun 2019*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Cetakan Pertama, November 2020.
- Nuralia, L. & Imadudin, I. (2020). *Simbol Kuasa dan Nilai Budaya dalam Tinggalan Arkeologi Kolonial di Perkebunan Teh Sedep Kabupaten Bandung*. *Patanjala* Vol. 12 No. 2 Oktober 2020: 177-193.
- Nuralia, L. & Imadudin, I. (2019). *Kebudayaan Hibrid Masa Kolonial di Perkebunan Batulawang Banjar*. *Patanjala* Vol.11 No.1, Maret 2019.
- Nuralia, L., Saptono, N., Hermawan, I., Wulandari, R., Pamumpuni, A., Widarwanta, Hidayat, D., Saripudin, D., Montana, F. (2019). *Laporan Penelitian Arkeologi. Bangunan Industri dan Produksi Perkebunan Kina Kabupaten Bandung Barat dan Sekitarnya, Provinsi Jawa Barat, Abad XIX – XX Masehi*. Bandung: Balai Arkeologi Jawa Barat.
- Nuralia, L. (2016). *Situs Perkebunan Cisaga 1908-1972: Kajian Arkeologi Industri tentang Kode Budaya Kolonial*. Tesis

- Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Program Studi Magister Arkeologi, UI.
- Nurisjah, S. dan Pramukanto, Q. (2001). *Perencanaan Kawasan untuk Pelestarian Lanskap dan Taman Sejarah*. Program Studi Arsitektur Lanskap, Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian. Bogor: IPB. 49p (tidak dipublikasikan).
- Nuryanto & Ahdiat, (2014). Kajian Hubungan Makna Kosmologi Rumah Tinggal Antara Arsitektur Tradisional Masyarakat Sunda dengan Arsitektur Tradisional Masyarakat Bali (Penggalian Kearifan Lokal menuju Pembangunan Berbasis Konsep Bangunan Hijau). Seminar Nasional *Arsitektur Hijau*. Denpasar: Universitas Warmadewa.
- Palmer, M. & Neaverson, P. (2000). *Industrial Archaeology, Principles and Practice*. London and New York: Routledge.
- Permana, Ervi. (Juni 2018). *Wawancara*.
- Peta Topografi Blad 32 B (Alg. No. XL 38-B) *Java. Res. Preanger Regentschappen. Topografischen Dienst in 1919 - 1923. Dutch Colonial Maps* – Leiden University Libraries.
- Peta Topografi Blad 32 B/Alg. No. XL 38-B, 1919 - 1923.*, n.d. Jakarta: ANRI.
- Peta Topografi sheet.* (1944). No. 39/XL-C., A.M.S.
- Publicatie Zonder Vermelding
LUCHTOPNAME K.N.I.L.M.
VERBODEN 938
- Ramadhan. (Maret, 2021). *Wawancara*.
- Regerings Almanak Voor Nederlandsch-Indie, 1880, 1892, 1893, 1900, 1901, 1902, 1906.* Jakarta: ANRI
- Suharjanto, G. (2014). Konsep Arsitektur Tradisional Sunda Masa Lalu dan Masa Kini. *Jurnal Comtech*, Vol. 5 (1), 505-521.
- Sajogyo (Ed). (1982). *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Agro Ekonomika.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Yale University Press.
- Sukiman, D. (2011). *Kebudayaan Indis, Dari Zaman Kompeni Sampai Revolusi*. Depok: Komunitas Bambu.
- van Hall, C.J.J en C.Van De Koppel. (1946). *De Landbouw In Den Indischen Archipel Deel 1, In drie deelen*. Algemeen Gedelte, MCMXLV.

THE CULTURAL VALUES OF THE *BULANGAN LONDONG SEMBANGAN SUKE BARATA* RITUAL OF THE INDIGENOUS PEOPLE OF TORAJA

NILAI BUDAYA RITUAL BULANGAN LONDONG SEMBANGAN SUKE BARATA MASYARAKAT ADAT TORAJA

**Markus Deli Girik Allo¹, Nilma Taula'bi², Elim Trika Sudarsi³
Eka Prabawati Rum⁴**

^{1,2,3} Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia
Jl. Nusantara No.12 Makale

⁴ Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar, Indonesia

^{1,2,3,4} e-mail: jesuitzjoseph@yahoo.com, nilma@ukitoraja.ac.id,
elimtrikasudarsih@ukitoraja.ac.id, eprabawaturum@gmail.com

Naskah Diterima: 6 Mei 2021

Naskah Direvisi: 17 Agustus 2021

Naskah Disetujui : 18 Oktober 2021

DOI: 10.30959/patanjala.v13i2.798

Abstract

The purpose of this study was to investigate the cultural values in the ritual of Bulangan Londong Sembangan Suke Barata as part of the Toraja indigenous people life. The research method used in this study is a qualitative method. Meanwhile, the respondents involved in this study include culturist, linguists, and the Toraja community. The research instruments used in this study were document files, interviews with the subjects, and observations using a video recorder that recorded the ritual process of Bulangan Londong Sembangan Suke Barata. The data analysis technique in this study includes three main steps, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the cultural values contained in the rituals of the Bulang Londong Sembangan Suke Barata were 'Manuk' which symbolized the value of the work ethic, 'Ussembang Suke Barata' which represented the religious value of bamboo slashed by 'Mina', and 'Kayunan Londong' which personifies the leader's patriotic value.

Keywords: *cultural values, bulangan londong sembangan suke barata ritual, indigenous people of Toraja.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki nilai-nilai budaya dari ritual bulangan londong sembangan suke barata dari masyarakat adat Toraja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Responden penelitian ini adalah budayawan, ahli bahasa, dan komunitas Toraja. Instrumen penelitian yang digunakan adalah file dokumen, wawancara dengan subjek, dan pengamatan dengan menggunakan perekam video pada ritual bulangan londong sembangan suke barata. Teknik analisis data mencakup tiga langkah utama, pengurangan data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya yang terkandung dalam ritual bulangan londong sembangan suke barata adalah manuk yang melambangkan nilai etos kerja, ussembang suke barata yang mewakili nilai religius bambu yang ditebas oleh mina, dan kayunan londong sebagai personifikasi nilai patriotik pemimpin.

Kata kunci: *nilai budaya, bulangan londong sembangan suke barata, masyarakat adat Toraja.*

A. INTRODUCTION

Toraja culture has undergone a drastic cultural change. Since long ago we have lived in a global village, therefore we have two types of cultural heritage that influence each other. The first is the cultural heritage of Toraja ancestors and each ethnic group in Indonesia which is hundreds of numbers (Sandarupa, 2014).

In the societal dimension, the Toraja people are so famous for their social and cultural traditions that are loaded with religious nuances, beauty, and the character of local wisdom that is maintained for generations from generation to generation (Baan & Suyitno, 2020), held as a complete philosophy of life (Sudarsi, Taula'bi', & Girik Allo, 2019), as a guide to determine attitudes, behaviors and work ethic for the community in religion, society, and nation (Rantetana, 2017). Thus it can be seen in the life of the Toraja people, that his life as a whole is bound by customs and culture (Wahyuningsih, 2018). It is developed based on the belief that becomes the motivation, namely the determination to live harmoniously and harmoniously, which at the same time becomes the purpose of the alliance concerned (Handayani, Ahimsa-Putra, & Budiman, 2020). In the beliefs and lives of the Toraja people, society and individuals are governed by *aluk sola pemali*, namely *aluk tallu oto'na* and *aluk a'pa' oto'na*. *Aluk tallu* which include belief in Puang Matua, belief in gods, and to multiply puang. While *aluk a'pa' oto'na* concerns social rules (Biringkanae, 2003; Indratno, 2016).

Toraja is one of the ethnic groups in South Sulawesi (Masitha Dewi, Gesrianto, & Daeng Tata Raya, 2020; Guntara, Fatchan, & Ruja, 2016) performs the unique culture especially for the funeral ceremony (Suriamihardja, 2006) and the thanksgiving ritual (Mustafa, 2018). Both of the two dimensions of ritual in Toraja are organized and ordered by "aluk" or custom (Surya, Rahman, & Makka, 2017; Sandarupa, 2015). One of the *lesoan aluk* or rituals performed both on the activities of *rambu*

tuka' and *rambu solo'* toraja is *bulangan in londong* or cockfighting (Santosa, Basuki, & Puspita, 2019). In this study, researchers focused more on the *bulangan londong* held at the death ceremony (*rambu solo'*) namely *bulangan londong sembang suke barata*. Palayukan (2015), today some people still understand that the implementation of *bulangan londong sembang suke barata* is part of *ada'*, *aluk* (custom) and is a legacy of ancestors that must be preserved.

The ritual of *bulangan londong* in the death ceremony is only given to them who is the highest social status or the Torajan leader. But not all the highest social status of Torajan is automatically celebrated by giving *bulangan londong sembang suke barata* (Waterson, 1993). Those who hold the leader that chosen through "kombongan" or great deliberation and when he led the society, he served the community for prosperity and save them from danger. Besides the previous requirements, those who can be given the ritual of *bulangan londong sembang suke barata* is the family who held the funeral ceremony in the *rapasan sapu randanan* type. The *rapasan sapu randanan* means the river's edge, this ritual sacrifices the number of buffaloes (Rahmita, 2018). *Rapasan* is the funeral ceremony held for the highest social status of Torajan (*tana' bulaan*). The number of buffaloes sacrificed from 24, 30, even more than 100. In *Rapasan sapu randanan* ritual, the family prepares the statue made of wood that resembles the deceased's face and body. Actually, the level of *rapasan ritual* is divided into three; *rapasan diongan* (lower requirements), *rapasan sundun* (complete/top), and *rapasan sapu randanan* (river's edge) (Ranteallo, 2007; Ismail, 2019). The decision of someone can be given the *bulangan londong* ritual is through great deliberation and community recognition by bringing the cock when the death ceremony begins.

Unfortunately, these customs and cultures in their application are abused and not placed in their actual place. Culture is no longer placed as life management practiced in accountability relations in society. *Bulangan*

Londong is implemented not on the actual customary rules. Community groups involve gambling in these activities so that it gives rise to negative values. Thus, the bulangan *londong londong* must be returned to the actual customary rules, so that the values of local toraja wisdom can be maintained and become a guide to people's lives in living life. Related to this have emerged different perceptions. On the one hand, some see it as part of lesson *aluk* that can only be carried out by adherents of the religion *aluk sanda pitunna* (Aluk Todolo) (Lestari, Soleha, Ibrahim, Ruwaedah, & Roosihermiatie, 2012). On the other hand, some see it as a custom that can be carried out by community groups outside the beliefs of *aluk todolo*, although it is only held in certain circles or groups (A'ban, 2019).

The studies on the value in Toraja culture and bulangan *londong sembangan suke barata* rituals have been conducted by several researchers. Palayukan (2015) found that the implementation of bulangan *londong* in Toraja lately is no longer based on norms or prevailing Toraja customs. Meanwhile, indicators of gambling practices in a bulangan *londong* ritual when using valuables such as gold, silver, money, and so on are put in one place. Whoever comes out as the winner, is the one who deserves *suke baratu* (Prayogi & Danial 2016).

Furthermore, in the bulangan *londong sembangan suke barata* phrase, the word "barata" means mourning. The word *barata* is different from the word *baratu*, *baratu* means a collection of stones, a bet collected by all participants (Manggau & Jayadi, 2019). From this aspect *baratu* more meaning gambling because of risking objects. From the dimension of Toraja customs and culture, Tappi (2006) found that bulangan *londong sembangan suke barata* is a divine ritual and is an integral part of the *aluk* or ritual and culture of Toraja, according to the teachings of *aluk todolo*.

Meanwhile, related to Toraja cultural values, Sandarupa (2017) and Bahfiarti (2015) found the values in the oral literature of Toraja namely "*malambu*" or honesty, "*misa' kada*"

or single voice, and the values of "*kasiuluran*" or brotherhood. Meanwhile, Pasande (2013) found that *longko'* culture as a result of the internalization of various understandings held firmly by the Toraja people, not only contains the value of honor, self-esteem, and shame but also other positive values in the form of spirit and work ethic. *Kamalamburan* (honesty) and *carapace* (harmony) are the values that are prioritized by the Toraja people. *Longko'* culture is especially relevant in relation to the nation's efforts to address the dangers of corruption through a cultural approach.

Patiung (2017) found that the application of Toraja cultural values in language learning at Toraja High School has built the values of *kasiuluran* (kinship), *tengko situru'* (togetherness), *kabassaran* (work ethic), *sikamali'* (love), *kapapatongan* (religious), *siri'* (shame), and the value of *umpangke' to mandadianna* (child devotion to parents). Syarif, Hasriyanti, Fatchan, Astina, & Sumarmi (2016) found the values of togetherness, and adhesive for the people in the Toraja death ceremony conversation. Ratnawati (2009) found hard-working and patient values in the folktale Toraja. Thus, in this study, the authors investigated the cultural values of the bulangan *londong sembangan suke barata* ritual of the indigenous people of Toraja, Indonesia.

In the context of today's Toraja society, *Bulangan londong sembangan suke barata* has been matched or even identified with cockfighting gambling. This brings negative consequences, namely decreased morals because what is revealed from these activities are chicken cockfighting gambling and other forms of gambling. It shows that the understanding and implementation of customs is no longer put on its portion and has not been responsible. Differences in perception and implementation of these activities have threatened the comfort and order of people's lives. At least it has caused confusion, tension, and even social conflict, especially when placed in the context of religious diversity and the relationship between religious law,

positive law and customary law. Departing from the problem, the authors are interested to know the cultural values of the *bulangan londong sembang suke barata* ritual of the indigenous people of Toraja, Indonesia.

B. METHOD

This study used Creswell qualitative method (2012). In collecting data in this study, researchers used research instruments, namely: Oral literary documents obtained from various sources such as libraries (digital and non-digital). Furthermore, in-depth interviews with: traditional Toraja figures and Toraja oral-literary speakers. Observation participant is assisted by filed note, recording device to document the results of interviews, pictures (photos) with a camera, and video capture with the help of handycam. This research was conducted in the North Toraja regency and Tana Toraja. The subjects of the study included: Traditional and cultural figures of Toraja, and speakers of Toraja oral literature.

In qualitative research as recommended by Miles and Huberman, data analysis includes three main steps: 1) data reduction, 2) data presentation, 3) conclusion drawing, and verification. These three steps are carried out continuously from the beginning. The three main things according to Milles and Huberman can be described as follows:

The stages of data analysis in this study can be explained through the process of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion or verification as follows: 1) Data collection: this data collection was conducted in connection with data in the field, namely researchers conducting observations, interviews, and giving questionnaires to respondents in this study. 2) Data reduction: at this stage, researchers examined several data obtained from interview transcription, field notes, observations, and documentation data. All the data is analyzed and organized, namely by writing a summary, separating important data related to research problems

with irrelevant data. Related to irrelevant data, researchers will still reanalyze if later researchers still need those data in data processing before drawing the conclusion. 3) Presentation of data: the presentation of data is a set of information that is composed and can draw a conclusion in taking an action. The form of presentation of data selected in this study is a narrative form with the purpose/expectation of each data that can not be separated from the background. 4) Drawing conclusions is a complete configuration activity. In accordance with the objectives to be achieved from the background as above, the analysis and withdrawal of conclusions are carried out. In this study, researchers re-corrected the results of the study and after the data is appropriate can then be drawn conclusions from each existing item.

C. FINDINGS AND DISCUSSION

Aluk is the teachings and rules of life as a belief that has been passed down since time immemorial. In the Toraja-Indonesia dictionary, compiled by Tammu and van der Veen (1972), *aluk* is defined as the thing of being devoted to God and God; traditional or religious ceremonies, customs; and behavior. Therefore, *aluk* can be understood as a belief, worship ceremonies according to the established manner based on the teachings of the religion concerned, customs and behavior as an expression of belief in daily life. *Aluk* is not only about belief, but it includes teachings, rites, and prohibitions or *pemali* (Kobong, 2000). *Aluk* also includes the rules of life or discipline of the cosmos both individually and with the environment. *Aluk* discussed in this section is *Aluk todolo (kandian todolo)*, which is a term for the religion, tribe, beliefs, and rites of life of the Toraja people before the arrival of new religions such as Islam and Christianity.

According to the Toraja myth, everything in this world begins in the sky, including the origin of the ancestors of all

beings. This world is a shadow of the world above or a duplicate of the celestial world. *Aluk* is set apart in heaven, therefore the *aluk* is divine. According to this belief, *puang matua* created the earth with all its contents including the rules used in his worship of the creator. From heaven, *aluk* is brought down with all its completeness to the earth by man (*Tomanurun, Pangala Tondok*). The *aluk* that governs the relations of the entire cosmos is complete and is mentioned in the expression *Aluk Sanda Pitu* (all seven, meaning complete and sufficient, nothing less).

The way of worship has also been established by the creator in the form of *aluk* through rites and *pemali*. It has also been determined that the sacrifices used in rituals are animals, plants, water, iron accompanied by praises and hymns (Biringkanae, 2003). This *aluk* was created by the gods and the gods faithfully followed it. The system of life of these gods was brought to earth and manifested in the daily life of man. The *aluk* is commonly called *aluk sanda pitunna* or *aluk pitungsa'bu pitu ratu' pitungpulo pitu*.

Aluk is a matter of dutiful to *puang matua*, the god and *topuang*. *Aluk* concerns the belief in whom it is believed, namely the teachings, ceremonies (rites), and prohibitions or bans. It also contains the rules of how man relates to the highest. The meaning of the word requires that *aluk* is not only a matter of belief alone but *aluk* includes teachings, rites, and prohibitions or *pemali*. All actions such as war, dance, eating, house building mating, processing rice fields, slaughtering animals, fighting feet are all tied with *aluk*. The deeds of the *aluk* regardless of the series of worships, then the deeds result in calamity. Because in religion, man has a relationship with the "highest spirit", called God, who creates and rules nature. *Aluk* himself is much feared and therefore should not be violated. Because of fear of the consequences of violations of *aluk* then people often do victims self-offering (*massuru*). *Aluk* has the power to guarantee life, *aluk* is a guarantee of

sustainable living, providing peace of well-being but also can bring the danger of disease, disaster, curses if violated (Biringkanae, 2003).

One of the rituals (*lesoan aluk*) performed at the solo sign activity' Toraja is *bulangan londong sembangan suke barata*. Today some people still understand that the implementation of *bulangan londong sembangan suke barata* is part of *ada'*, *aluk* (custom) and is a legacy of ancestors that must be preserved. *Bulangan londong* is a ritual in the belief of "aluk todolo" or custom in the old belief of the Toraja people as a means to relate to something that is a myth which is something that is considered to have the power to save, animate, and give peace namely *puang matua*. *Bulangan londong sembangan suke barata* as one of the liturgical parts (*lesoan alukna rambu solo'*) in *rambu solo'* can be interpreted as a rooster fight with the aim of reed chicken that fell into *suke barata* (pours) that had previously been cut (developed) by to *minaa*. Reed chicken inserted into bamboo or pouring is a symbol of the peak of purification of the dead (behind the *pesungna*) as well as a form of appreciation, the last respect of the dead for his services to guard, nurture and dare to make good decisions, and right as a community leader during their life.

Bulang is also defined as a leash on roosters, *londong* (rooster), *sembangan* (flatter) once with tilt, *suke* (tube of bamboo), roofing; *barata* means mourning. The word *barata* is different from the word *baratu*, *baratu* means a collection of stones, a bet collected by all participants (Rita, 2000). The use of the word *baratu* in the *sembangan suke baratu* sentence more leads to the sense of cockfighting with betting objects, where betting objects such as gold, silver, money and so on are put in one place. Whoever comes out as the winner, is the one who deserves *suke baratu* (Manta, 2000). From this aspect *baratu* more meaning gambling because of risking objects.

In relation to *aluk*, *bulangan londong* has been used as a ritual in the belief of *aluk*

todolo as a tool to relate to something that has been considered a myth that is considered to have the power and power to save, animate and give peace namely Puang Matua. *Bulangan londong sembang suke barata* as one of the liturgical parts (*lesoan alukna rambu solo*) in *rambu solo* can be interpreted as a rooster fight with the aim of reed chicken that fell into *suke barata* (pours) that had previously been cut (developed) by to *minaa*. Reed chicken inserted into bamboo or pours is a symbol of the peak of purification of the dead (behind *the pesungna*).

Bulangan londong sembang suke barata integrates in the *aluk rambu solo*, especially in the implementation of *aluk barata kendek* (*dipuli misa' pitu lombo*). *Bulangan londongna lessoan barata, sembang bulo lako toditolabonggalelena disonda kapayunganna dipatiran sangka, dilau'eran pangalukanna situru' pangraku'na*. This means that the *bulangan londong* in the ceremony of grief is reserved only for the nobility or leaders. But not all nobles are automatically paraded. He must be a leader elected by deliberation (*kombongan*) and when he leads his attention is devoted to serving the welfare of the community and protecting his community from all dangers that come threatening. The determination that he should not be given the *bulangan londong* is through a communiqué agreement and public recognition by bringing the *kayuman londong* at the start of the ceremony of grief.

According to the mythology of Toraja *bulangan londong* especially related to the settlement of things (*silondongan*) begins (*tigaronto*) above the sky.

"That *puang matua* asked to build a house *a'riri bonga ura'na*. To build this house it takes *pande petanga'* (thinker), *pandepaita* (necromen), *pande manarang* (smart person), and *pande paliu'* (supervisor). After the house of *a'riri bonga posi'* is done thanksgiving or *mangrara banua* and as a condition cut three kinds of animals or in *tallu rarai* (sacrifice of blood from 3 types of animals) namely

chicken, pig, and buffalo" (Biringkanae, 2003).

The thanksgiving event also divided the social structure and position in the community (*toe nene'*) to all citizens who attended. Some are determined to be *Parengge'*, *to Makaka*, and some are determined to be slaves because they are late to the event.

"[...] He who will be a slave (*la lumbang mendadi peosok ongan*). But he objected, that how could he be appointed a slave while we were one blood, one flesh, we were brothers. So it was decided to resolve the issue with customary law (*Petarian Pempitu Dao Langi'*). *Tampo sitetean, siukkunan, sibambangan, sipakoko, simimmi', sidemmeran padang*, and the latter *silondongan*. But the one who has been designated as a slave remains defeated".

The dispute that occurred above the sky due to the division of positions and positions in the community is considered as the beginning of the emergence of *Petarian Pempitu Dao Langi'* (Toraja customary judiciary). Especially the solution of things with *Silondongan* road.

The ritual of *bulangan londong* in the death ceremony is only given to them who is the highest social status or the Torajan leader. But not all the highest social status of Torajan is automatically celebrated by giving *bulangan londong sembang suke barata* (Waterson, 1993). Those who hold the leader that chosen through "*kombongan*" or great deliberation and when he led the society, he served the community for prosperity and save them from danger. Besides the previous requirements, those who can be given the ritual of *bulangan londong sembang suke barata* are the family who held the funeral ceremony in the *rapasan sapu randanan* type. The *rapasan sapu randanan* means as the river's edge, this ritual sacrifices the number of buffaloes (Tsintjilonis, 2000). *Rapasan* is the funeral ceremony held for the highest social status of Torajan (*tana' bulaan*). The number of buffaloes sacrificed from 24, 30,

even more than 100. *Rapasan sapu randanan* ritual is very unique, the family prepares the statue made of wood that resembles the deceased's face and body. The level of *rapasan ritual* is divided into three; *rapasan diongan* (lower requirements), *rapasan sundun* (complete/top), and *rapasan sapu randanan* (river's edge) (Ranteallo, 2007; Ismail, 2019). The decision of someone can be given the *bulangan londong* ritual is through great deliberation and community recognition by bringing the cock when the death ceremony begins.

The values contained in *bulangan londong sembang suke barata* found in this study are: *manuk londong* which symbolizes the value of work ethos, *ussembang suke barata* which represents the religious value of bamboo slashed by *to minaa*, and *kayunan londong* as the personification of the patriotic value of the leader.

1. **Manuk Londong: Symbol of The Value of Work Ethos**

For the Toraja people, "Manuk Londong"/ rooster has a variety of symbols. One of them is as a symbol of the value of work ethos. In the morning, the rooster's crow becomes an alarm to start work activities. All family members work hand in hand as farmers, ranchers, and other activities. They work until sunset. This is similarly conveyed by the respondent in this study, ELS, that, "It is the rooster that wakes the Toraja people in a resting place to start the activity until the chicken returns to its contest". Thus, chickens become an alarm for the activities of the Toraja people to start and finish their work every day. At the same time show ethos work Toraja people, ELS, "*membuyapi manuk namane sule*" or they will go home if the chicken is already contested".

One of the "*lolo patuoan*" or animal dimensions used in the ritual *bulangan londong sembang suke barata* is "manuk londong" or rooster. In the socio-cultural aspect of Toraja, *manuk londong* symbolizes the value of ethos of

the work of the Toraja people. In the morning, when the rooster crows then the Toraja human activity begins. Likewise, in the afternoon, when the chickens return to the "*buyanna*" or place of perch, then the activity is stopped, continued the next day, and they return home to rest. This is similar to that stated by Tappi (2006) that the rooster's crow awakens the man from the bed, reminding the human to start activities in the morning and stop by the time the chicken returns to its contest. Chickens welcome the morning rays to knit and move on with life for mankind. (Alfiah & Supriyani, 2016) state that so important roosters give so many symbols for the life of the Toraja people that the rooster is also depicted in the traditional house of *tongkonan* which is set against the background of natural forces in the form of a series of curved lines that are interpreted as rooster feathers ("Londong" or Rooster). This motif symbolizes manliness, might, and wisdom.

The work ethos of the Toraja people is not only seen in their hometown, the hard work of Toraja people is also so famous overseas. Everyone who has Toraja blood has an obligation to bear the consequences of the cultural traditions in their hometown, so even though they are far from home, they still have a material obligation to the implementation of cultural traditions in their hometown. The spirit of close togetherness binds the brotherhood of the Tana Toraja tribe to make their children who are in the middle of being obliged to continue to send a number of materials as a payment of "debt" to families who carry out customary traditions. This closely binding cultural tradition and needing enough material make every tribe of Toraja Land has a spirit of hard work and a high work ethos in order to produce enough material to finance the cultural tradition. The income they get in overseas areas will be sent to their hometown in Toraja.

Toraja indigenous people, symbolically in the figure of the rooster

gives the impression of the shape, attitude, and behavior of the rooster instinctively attached to each individual into a concept of personality that is intact as an exemplary social norm and behavior, such as: charismatic, knight, nurturing, disciplined, loyal, honest, and polite to achieve perfection in the life of a qualified man in the world and the hereafter. Based on this belief, there are two fundamental things that become the purpose of the Toraja people in working, namely to buy Puang and obtain blessings. Both of these things are a necessity in the world now and in the future, *puya*.

These two things are closely fused and inseparable. In relation to that, the Torajas knew no separation between spiritual and temporal. Each work (which corresponds to the *aluk*) has a religious connotation. *Membali Puang* is a situation when a deceased person returns to become a god when the rites of his death are perfect (behind the *pesungna*). Solo sign ceremony' is a rite to transition one from world life to the mystical nature (poetic). The rites of death require so many sacrifices/offerings because they go through several ceremonial processes, and take a long time. For the ceremony, it takes sacrifices and foodstuffs, and costs for the people present in the ceremony (rites).

Therefore property or wealth is important and pursued by the Toraja people during his life. Property/wealth determines the slow pace of a person to buy *puang*. It can happen that a person does not make a mistake of his own during life or the inability of his relatives to complete the rites that become a condition for *to memballi puang*. For the sake of his safety, the Toraja people were able to live a simple life even languishing, working hard, diligently, and living frugally, this lifestyle was applied to gather provisions for life in *puya*. Work and work influence and determine the "heavenly" life of the Toraja people. Thus safety motivation underlies work behavior and plays an important role in the work ethic of the

Toraja people. Safety motivation is closely related to other work motivations, namely to get blessings from *puang matua* and *membali puang*. The work obtained in addition to meeting the needs of life is partly used as an offering in rites. The rites cover all human activities from birth to death.

Every effort, activity, and stage of life has its rites. The main purpose of the implementation of these rites is to glorify God. But actually, the basic motivation behind the purpose of praising God is the desire to get blessings. Offerings are sought to please *puang matua* and *to memballi puang* to bestow their blessings on the worshipping man or the family left behind. The wealth is used as a means to persuade *puang matua* and the gods (*to memballi puang*) to increase property and live a happy and prosperous life. Therefore wealth is often identified with happiness and well-being both in this world and in the world there. All offerings in *aluk rambu tuka'* addressed to *puang matua* and all sacrifices in the solo sign' to the ancestors, will not be in vain but will be a channel of blessings that can bring inner birth well-being. But the most important motivation of the other motivations of the life and work of the Toraja people is safety.

Work in understanding the Toraja people when connected with safety is a means to buy safety. One's salvation is determined by the fewest savings he accumulates while on earth. Work determines the safety of the Toraja people. Positively the practice of work in the life of the Toraja people contains the view that there are no joints and corners of human life that are independent of faith (belief) thus no activity of human life is independent of the observation of God (*puang matua*); this world is part of later (heavenly) life so that all human efforts are focused on salvation. This can make man aware of God's presence in every activity and work. The religious motivation

behind *bulangan londong sembang suke barata* ritual is safety and leadership.

For the sake of his safety, the Toraja people were able to live a simple life even languishing, working hard, diligently, and living frugally, this lifestyle was applied to gather provisions for life in *Puya*. Work and work influence and determine the "heavenly" life of the Toraja people. Thus safety motivation underlies work behavior and plays an important role in the work ethic of the Toraja people. Safety motivation is closely related to other work motivations, namely to get blessings from *puang matua* and *membali puang*. The work obtained in addition to meeting the needs of life, partly used as an offering in rites. The rites cover all human activities from birth to death. Every effort, activity, and stage of life has its rites. The main purpose of the implementation of these rites is to glorify God. But actually, the basic motivation behind the purpose of praising God is the desire to get blessings. Offerings are sought to please *puang matua* and *membali puang* to bestow their blessings on the worshiping man or the family left behind. The wealth is used as a means to persuade *puang matua* and the gods (*to membali puang*) to increase property and live a happy and prosperous life. Therefore wealth is often identified with happiness and well-being both in this world and in the world there. All offerings in *aluk rambu tuka'* addressed to *puang matua* and all sacrifices in the *rambu solo'* to the ancestors, will not be in vain but will be a channel of blessings that can bring inner birth well-being. But the most basic motivation of the other motivations of the life and work of the Toraja people is safety.

2. *Usseimbang Suke Barata*: Religious Value in Slashed Bamboo

According to *ELS*, "*usseimbang suke barata*" or bamboo cutting is carried out by a "*to minaa*" or Toraja literary expert/pastor of the original Toraja religion (*aluk*

todolo/ old belief)". *Usseimbang suke* is performed before the ritual of "*ma'palao*" begins. *Ma'palao* procession is one of a series of *rambu solo'* rituals (ceremony of grief) Toraja, this procession is the activity of parade the body of the "*tongkonan*" or traditional house Toraja to the location of "*liang*" or grave.

The stage of "*usseimbang suke barata*" begins with taking bamboo and then a "*to minaa*" cuts it into a "*suke*" similar to a traditional Toraja drink place. The tool for cutting it is a traditional Toraja machete called "*la'bo' todolo*". *La'bo' todolo* is believed to be a sign as well as a decision on whether this ritual can be performed or not. Meanwhile, *to minaa* was present and performed her duties as a priest during the procession. When "*to mina*" slashes the *suke* once, it means that the procession of *bulangan londong sembang suke barata* has been blessed and valid to be carried out.

The piece of "*suke*" or bamboo is then taken by *to mina* to the location of the implementation of the *rambu solo'*. While the *suke* is carried by *to mina*, a group of dancers welcome. The dance used is dance *to ma'randing*. This dance depicts the war situation in ancient times. This dance is also a sign that the deceased is a tough and brave leader. Then, the "*suke*" is cut into pieces in a barn or "*reed*". After being cut into pieces, it is continued by carving and arranging the "*suke*" like a necklace.

"*Suke*" which has been arranged like a necklace is prepared as a place to unite chicken feathers that fall out when pitted. The purpose of collecting chicken feathers in the "*suke*" is as a supply of spirits entering the "*puya*" or place where the spirits dwell forever (heaven). The result of collecting chicken feathers in the "*suke*" is placed in two different places: in *tonkonan / alang*, and at the burial site. This is a sign and a warning that the family at the site once performed the ritual of "*bulangan londong sembang suke*

barata" in memory and respect for the leader who has died.

The Toraja people in the traditional procession of old beliefs in this case the ritual of *bulangan londong sembangan suke barata* shows a very high religious value. The stages in each ritual are always preceded by "*singgi*" or prayer so that each activity process can run well, smoothly, and avoid danger.

In the procession of the implementation of *bulangan londong sembangan suke barata*, there is one activity carried out by "*to mina*" or Toraja literary experts/pastors of the original religion of Toraja (*aluk todolo* / old beliefs of the Toraja people) namely the procession *Usseimbang suke barata*. *Usseimbang suke barata* represents the religious value of bamboo slashed by *to mina*. The stage of "*usseimbang suke barata*" begins with taking bamboo and then a "*to minaa*" cuts it into a "*suke*" similar to a traditional Toraja drink place. The tool for cutting it is a traditional Toraja machete called "*la'bo' todolo*". *La'bo' todolo* is believed to be a sign as well as a decision on whether this ritual can be performed or not. Meanwhile, *minaa* was present and performed her duties as a priest during the procession. When "*to mina*" slashes the *suke* once, it means that the procession of *bulangan londong sembangan suke barata* has been blessed and valid to be carried out. This is similar to that stated by (Palayukan, 2015) that *bulangan londong sembangan suke barata* is a hereditary custom of the Toraja people who have a high spiritual value, and this ritual is not indiscriminately carried out, only a solo sign party' at the level of *rapasan sapu randanan* can carry it out. In addition, the procession is closely related to the religious belief that a nobleman who died while in *puya* was still served by a servant so that in the realm of spirit they did not become slaves. Chickens are sacrificed after being pitted into provisions, while they enter the spirit realm which for the

Toraja people is called "*puya*". The chicken will be a requirement for a leader to enter into the spirit world and become a *to memali puang* (Tappi, 2006).

The ritual of *bulangan londong* in the death ceremony is only given to them who is the highest social status or the Torajan leader. But not all the highest social status of Torajan automatically celebrated by giving *bulangan londong sembangan suke barata* (Waterson, 1993). Those who hold the leader that chosen through "*kombongan*" or great deliberation and when he led the society, he served the community for prosperity and save them from danger. Besides the previous requirements, those who can be given the ritual of *bulangan londong sembangan suke barata* are the family who held the funeral ceremony in the *rapasan sapu randanan* type. The *rapasan sapu randanan* means the river's edge, this ritual sacrifices the number of buffaloes (Tsintjilonis, 2000). *Rapasan* is the funeral ceremony held for the highest social status of Torajan (*tana' bulaan*). The number of buffaloes sacrificed from 24, 30, even more than 100. *Rapasan sapu randanan* ritual is very unique, the family prepares the statue made of wood that resembles the deceased' face and body. Actually, the level of *rapasan* ritual is divided into three; *Rapasan diongan* (lower requirements), *rapasan sundun* (complete/ top), and *rapasan sapu randanan* (river's edge) (Ranteallo, 2007; Ismail, 2019). The decision of someone can be given the *bulangan londong* ritual is through great deliberation and community recognition by bringing the cock when the death ceremony begins.

3. Kayunan Londong: Personification of The Leader's Patriotism

The ritual of the *bulangan londong sembangan suke barata* in the *rambu solo*' procession is carried out under certain conditions. First, the determination of whether a deceased person is said to be worthy of a *bulangan londong sembangan*

suke barata is through "*kombongan*" activities or deliberations. At this deliberation, the other leaders invited the whole community to attend and give a decision. To determine whether or not someone is given *bulangan londong sembangan suke barata* was determined by deliberations, in which another leader invited all communities to be involved in attending and making decisions in the commencement.

The deliberations called *kombongan* are the unifying pillars of the community. The presence of the community in the *kombongan* rights. The agreement through the commencement can change the existing rules, remove and replace them with the new rules. *Kombongan* has absolute power as a decision-maker called *Untesse Batu mapipang* (can break rock). Therefore, each *kombongan* needs to be sacrificed by chickens and hanging pigs the magnitude and value of the decisions to be taken, in such a way, his desperation is very binding on members of the community. With the ritual event, the decision of *kombongan* can be said to have value as a covenant (*bass*) involving the god who is believed. It is the duty of other leaders to secure the decision of the commission. The point is that the decision through *kombongan* reveals the public's recognition of the quality of leadership of the dead.

Second, the substance of the requirement is that only those who have performed a major task according to Toraja customs are given this ritual. *ELS* explains that those who have carried out the *tongkonan* philosophy are entitled, "*bida, sugi', manarang sia kinaa, na barani*".

"*Bida*" means descendants of Toraja nobles. In Toraja mythology, "*Bida*" is *to manurun di langi'* or nobleman who descends from the sky. The degree they obtained has different terms, depending on the area residents in the Toraja tribe. According to *ELS*, some are given the title "*puang, ma'dika, ambe', tedong pariu,*

anak topatalo, and others". Those who become descendants of noble "*Bida*" do not immediately become a ruler or leader, he must pass the time to gain experience of wisdom/intelligence possessed and supported by "*kasugiran*" or wealth. *Sugi'* means to have abundant world wealth, *manarang sia kinaa* means smart and generous, and *barani* means courage in nurturing and protecting its people and dare to make decisions under any circumstances for the good of the people.

The leader of the Toraja people must be "*sugi*" or rich. *ELS* reveals that "Representation of "*kasugiran*" or wealth of Toraja people is in "*tallu lolona*" philosophy or three pillars of life of Toraja people, "*lolo tau*" or human, "*lolo patuan*" or animal, and "*lolo tananan*" or plants. In *lolo tau* philosophy, for Toraja people in this perspective, many children become a measure of wealth. *ELS* explains that "It is the child who lifts the dignity and dignity of the family through "*tongkon*" or sitting with the rest of the family in customary activities or assisting the family in *urrundunan sara'* or participating in traditional ritual activities, *rambu tuka'* (joy rituals) and *rambu solo'* (rituals of sorrow).

Hymn *lolo tau* enshrined in oral literature Toraja namely, "*kasalle male melendong, lobo' male meburinti, sangtontian pelendongna, sangburia' peburintinna*". [Someday, grow up, go catch the eel, the adult catches the rice parrot, one bond catches the eel, one basket of the rice kareo bird catches]. This hymn is spoken for boys so that when they grow up they will be able to find eels/fish and birds in the rice fields as food. As for girls, also prayed to be able to find foodstuffs in the form of fish, said hymns like this, "*kasalle male meurang, lobo' male mekabumbu', sangseran peurangna, sangbakku' pekabumbu'na*" [if big later, go looking for shrimp, as an adult go looking for lead fish, hopefully, a lot of shrimp catches, a basket of lead head fish]. These

two hymns are said in the hope that one day when the children in the family grow up to work hard to collect materials (treasures) for the needs of their lives.

On *lolo patuan*, buffalo, pork, and chicken are a measure of the wealth of the Toraja people. A person who initially raised chickens was tried again to raise pigs and was further improved by raising buffalo. The pet buffaloes were exchanged for rice fields or exchanged temporarily for other people's rice fields. Meanwhile, rice becomes one of the most valuable *lolo patuan*. Toraja people who have a lot of rice fields are stored in barns "*alang*". *Alang* lined up containing rice became a sign of "*kasugiran*" or wealth of the Toraja people.

In addition to the aforementioned conditions, the one entitled to be given a month by *suke barata* according to the ELS is a "*rambu solo*" in the state of "rapasan sapu randanan". *Rapasan sapu randanan* translated as fiber with the riverbank, this ritual sacrifices a number of buffalo. The range of buffalo sacrifices starts from 24, 30, even above 100 heads. *Rapasan sapu randanan* ritual is so unique because, in this procession, the family prepares "*tau-tau*" or wooden statue resembling the face and body shape of one of the deceased families (which is temporarily declared customarily).

Thus, in "*aluk*" or Toraja custom, the element of courage and toughness of a leader is highly appreciated. Thus, the implementation of the *bulangan londong sembangan suke barata* ritual aims to honor the deceased leader for his services while still alive in thinking about the territory he leads and upholding justice, truth, and doing good in accordance with "*aluk*" or customs and "*pemali*" or norms.

In the life of the Toraja people, that their life as a whole is bound by customs and culture (Wahyuningsih, 2018). It is developed based on the belief that becomes the motivation, namely the determination to live harmoniously and harmoniously, which at the same time becomes the

purpose of the alliance concerned (Handayani, Ahimsa-Putra, & Budiman, 2020). In the beliefs and lives of the Toraja people, society and individuals are governed by *aluk sola pemali*, namely, *aluk tallu oto'na* and *aluk a'pa' oto'na*. *Aluk tallu oto'na* is a rule of a man with his beliefs which include belief in Puang Matua, belief in gods, and to multiply *puang*. While *aluk a'pa' oto'na* concerns social rules (Biringkanae, 2003; Indratno, 2016). It is based on "*aluk*" or Toraja custom that the element of courage and toughness of a leader is highly appreciated. Thus, the implementation of the *bulangan londong sembangan suke barata* ritual aims to honor the deceased leader for his services while still alive in thinking about the territory he leads and upholding justice, truth, and doing good in accordance with "*aluk*" or customs and "*pemali*" or norms. This is related to (Tappi, 2006) that *bulangan Londong Sembangan Suke Barata* is a magical ritual that integrates individual personalities in a continuous cycle as an explanation of individual attitudes/behaviors and instinctive impressions in every Torajan, especially among leaders and nobles. In line with Alfiah and Supriyani (2016) that roosters give symbols for the life of the Toraja people such as manliness, might, and wisdom.

In rites *aluk todolo*, chicken has the meaning of offerings both in the feast of *rambu tuka'* and in the ceremony of *rambu solo'*, moreover at the *kaperokan* event (*aluk sumpu lolokna, ditallu rarai* namely the blood of chickens, pigs, and buffalo). Similarly, in the sign *solo'* when *meaa (ma'peliang)* chicken is taken to the grave (*to' liang*) and pitted but without betting as the completeness of the ceremony in the hope that the chicken will bring the safety of the soul of the dead. (... *kengku manukna lapendek londongna tulang didi' angku tiaranko sau' tondok pong lalondong* ...). A solo ceremony for a leader who qualifies for the leadership of *tallu bakaa* is said to

be *sundun* (complete) when performed by *bulangan londong sembang suke barata* ritual. This ritual is a prerequisite for *puya* guards, *puang lalondong*, to allow him to enter the spirit world.

The belief of salvation as above is contained also in the myth of *la pandek and tulangdidi*'. The spiritual meaning of *la pandek's* living behavior and beloved chicken, lies in his interspersed relationship with his master: the live chicken of the broiler caterpillar *tulangdidi*', and vice versa *tulangdidi*' revived because of the services of chickens. From the understanding that man is applied in the figure of a rooster (*londong*) this then develops far with special understandings symbolically, cultured from the impression of the shape, attitude, and behavior of roosters instinctively attached to each individual into a concept of a complete personality as an exemplary social norm and behavior, such as; charismatic, knighted, nurturing, disciplining, loyal, honest, and polite to achieve perfection in the life of a man who is qualified in the world and the hereafter. Thus the belief that exists in the implementation of the *bulangan londong sembang suke barata* is concerned about the issue of human safety after death. While the myth is to make *puang* and *kayunan londong* to *puya*. This understanding is also inseparable from myths about chicken *la pandek tulangdidi*.

The ritual of *bulangan londong sembang suke barata* has a dual purpose or function. On the one hand, he intended to celebrate death as a path to the upper realm. In other words, this ritual serves as the initiation of lifting a person (the dead) to a higher existence. On the other hand, this ritual also serves educationally and transformatively. This means that in this ritual participants communicate and absorb certain values about leadership, about what should be upheld in society. It can also be said that this ritual is intended to pay homage to the dead. In this way, the

participants of the ritual at the same time expressed their intention to respect and uphold the philosophy of leadership that has been implemented by the retired leader.

D. CONCLUSION

Based on the results of this study, it can be concluded that the cultural values contained in the ritual of *bulangan londong sembang suke barata* are *manuk londong* which symbolizes the value of work ethos, *ussembang suke barata* which represents the religious value of bamboo slashed by *to minaa*, and *kayunan londong* as the personification of the patriotic value of the leader.

Based on the findings of cultural value contained in the Ritual of *bulangan sembang suke barata* in this study, the researchers considered it important to maintain the ritual of *bulangan sembang suke barata* in the procession of *rambu solo*' Toraja in accordance with the "*aluk*" or customs prevailing in Toraja. The cultural value found in this study is so essential in maintaining the character of the kingdom that upholds the value of work ethic, religion, and patriotism in public life.

In order for the cultural value in this ritual to be more interpreted and imbued by the Toraja people and known to the world, it is necessary for the next researcher to develop teaching materials based on Toraja cultural values for the development of the character of Toraja learners.

REFERENCES

- A'ban, R. (2019). *Nilai Sosial dalam Cerita Rakyat Toraja Seredukung (Suatu Tinjauan Sosiologi Sastra)*. (Skripsi), Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.
- Alfiah, A., & Supriyani, E. (2016). Perubahan Bentuk Rumah Adat Tongkonan Tana Toraja Berdasarkan Pendapat Teori Lesesau. *Teknosains: Media Informasi Sains dan Teknologi*, 10(2), 183–196. <https://doi.org/10.24252/TEKNOSAINS.V10I2.1899>

- Baan, A., & Suyitno, I. (2020). Cultural Representation of Toraja Ethnic on The Use of Vocabulary In Singgi' Speech. *Litera*, 19(2), 228–246. <https://doi.org/10.21831/ltr.v19i2.32074>
- Bahfiarti, T. (2015). Cultivation Cultural Values Toraja Parents and Children Through Family Communication In Makassar City. *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 209–218.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Guntara, F., Fatchan, A., & Ruja, I. N. (2016). Kajian Sosial-Budaya Rambu Solo' dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 1(2), 154–158.
- Handayani, R., Ahimsa-Putra, H. S., & Budiman, C. (2020). Out of Crisis: Maintaining Hegemony through Rambu Solo Ritual in Toraja. *International Journal of Indonesian Society and Culture*, 12(2), 246–258. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i2.23014>
- Indratno, I. (2016). Silau'na Tongkonan Sebagai Sebuah Realitas Tondok. *Ethos Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 75–84.
- Ismail, R. (2019). Ritual Kematian dalam Agama Asli Toraja “Aluk To dolo” (Studi atas Upacara Kematian Rambu Solok). *Religi*, 15(1), 87–106.
- Lestari, W., Soleha, M., Ibrahim, I., Ruwaedah, & Roosihermiatie, B. (2012). *Etnik Toraja Sa'dan Desa Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan*. In *Etnografi Kesehatan Ibu dan Anak*. Surabaya: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.
- Mackey, Alison, and Gass, M., S. (2005). *Second Language Research: Methodology and Design*. London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Manggau, A., & Jayadi, K. (2019). Karume Tradition in Toraja Tribe, South Sulawesi. Paper presented at the The 1st International Conference on Education Social Sciences and Humanities (ICESSSHum 2019).
- Masitha Dewi, A., Gesrianto, J., & Daeng Tata Raya, J. (2020). Ethnosemantics Study Of Lexicon “Kuburan” In The Toraja People. *Retorika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 13(2). <https://doi.org/10.26858/retorika.v13i2.13804>
- Mustafa. (2018). Mitos Sangbidang: Rasionalisasi dalam Sastra Lisan Toraja. *Jurnal Al-Qalam*, 24(2), 307-318.
- Palayukan, M. (2015). *Peran Pemerintah Daerah Tana Toraja Dalam Menanggulangi Perjudian Bulangan Londong (Sabungayam) pada Upacara Kematian di Tana Toraja*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pasande, S. (2013). Budaya Longko' Toraja dalam Perspektif Etika Lawrence Kohlberg. *Jurnal Filsafat*, 23(2), 117–133.
- Patiung, D. (2017). Budaya Toraja dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. *Jurnal Idaarah*, 1(1), 121–132.
- Prayogi, R., & Danial, E. (2016). Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Humanika*, 23(1), 61-79.
- Rahmita, A. (2018). Analisis pola Interaksi Edukatif Bernuansa Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Ekonomi Kelas X di SMA Negeri 6 Toraja Utara. Skripsi, Universitas Negeri Makassar, Makassar.
- Ranteallo, I. C. (2007). *Pemakaman Ritual Mantunu Dalam Upacara Pemakaman Rambu Solo' (Studi Kasus Tentang Pemakaman Ritual Mantunu Dalam Upacara Pemakaman Rambu Solo' Tingkat Rapasan Sapu Randanan di Tongkonan Buntu Kalambe'*. Universitas Gadjah Mada.
- Rantetana, M. (2017). OPINI: Falsafah Tallu Lolona Kekuatan Budaya Toraja; Masa

- Lalu, Sekarang dan Masa Datang – Kareba Toraja. Retrieved November 23, 2019, from Kareba Toraja website: <https://www.karebatoraja.com/opini-falsafah-tallu-lolona-kekuatan-budaya-toraja-masa-lalu-sekarang-dan-masa-datang/>
- Ratnawati. (2009). Nilai Budaya dalam Cerita Rakyat Toraja. *Mabasan*, 3(2), 48–65.
- Sandarupa, S. (2014). Kebudayaan Toraja Modal Bangsa, Milik Dunia. *Sosiohumaniora*, 16(1), 1–9.
- Sandarupa, S. (2015). Glokalisasi Spasio-Temporal dalam Agama Aluk To Dolo Oleh Agama Kristen di Toraja. *Sosiohumaniora*, 17(1), 86. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5677>
- Sandarupa, S. (2017). “The Voice of a Child”: Constructing a Moral Community through Retteng Poetic Argumentation. *Toraja. Archipel*, (91), 231–258. <https://doi.org/10.4000/archipel.316>
- Santosa, A. B., Basuki, Y., & Puspita, A. M. I. (2019). The effectiveness of Local Wisdom-Based Teaching Materials in Enhancing Creative Writing Skills of Elementary School Students. *JELTL Journal of English Language Teaching and Linguistics*, 4(3), 349-359.
- Sudarsi, E. T., Taula’bi’, N., & Girik Allo, M. D. (2019). Filosofi Tallu Lolona dalam Himne Passomba Tedong (Etnografi Kearifan Lokal Toraja) [The Philosophy of Tallu Lolona in the Hymns of Passomba Tedong (Ethnography of Torajan Local Wisdom)]. *Sawerigading*, 25(2), 61. <https://doi.org/10.26499/sawer.v25i2.666>
- Suriamihardja, D. A. (2006). Reaping Wisdom From The Teaching of Aluk Todolo for Environmental Management. *The International Symposium: Crossing Disciplinary Boundaries and Re-Visioning Area Studies: Perspective from Asia and Africa*, from 9th to 13th November.
- Surya, W., Rahman, F., & Makka, M. (2017). Folktale from England to Toraja. *Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)*, 3(7), 1–5.
- Syarif, E., Hasriyanti, Fatchan, A., Astina, K., & Sumarmi. (2016). Conservation Values of Local Wisdom Traditional Ceremony Rambu Solo Toraja’s Tribe South Sulawesi as Efforts The Establishment of Character Education. *EFL Journal*, 1(1), 17–23.
- Tappi, S., R. (2006). *Bulangan Londong Sembangan Suke Barata: Sebuah Tinjauan Teologis-Sosiologis Tentang Bulangan Londong Sembangan Suke Barata*. Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja.
- Wahyuningsih, D. (2018). Representasi Ritual Upacara Kematian Adat Suku Toraja dalam Program Dokumenter Indonesia Bagus Net TV Episode Toraja. *Ejournal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 68–82.
- Waterson, R. (1993). Taking The Place of Sorrow: The Dynamics of Mortuary Rites Among The Sa’dan Toraja. *JSTOR*, 21(2), 73–96.

MENILIK PERTUNJUKAN ADU DOMBA DI PRIANGAN PADA MASA KOLONIAL

THE FIGHTING SHEEP SHOW IN PRIANGAN DURING THE COLONIAL PERIOD

Budi Gustaman

Departemen Sejarah dan Filologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung – Sumedang Km. 21, Jatinangor
e-mail: budi.gustaman@unpad.ac.id

Naskah Diterima: 1 Mei 2021

Naskah Direvisi: 31 Agustus 2021

Naskah Disetujui : 18 Oktober 2021

DOI: 10.30959/patanjala.v13i2.788

Abstrak

Adu domba sangat populer di Priangan, khususnya di wilayah Garut. Popularitas adu domba (Garut) tidak bisa dilepaskan dari historisitasnya. Penelitian ini ditujukan untuk mempertanyakan kemunculan domba Garut serta pertunjukan adu domba pada awal perkembangannya. Metode yang digunakan adalah metode sejarah, dengan memanfaatkan sumber berupa buku dan koran yang diproduksi pada masa kolonial. Temuan utama penelitian ini ialah kemunculan jenis domba Garut dilatarbelakangi impor domba yang diinisiasi oleh K.F. Holle untuk tujuan budidaya wol. Kawin silang domba impor dan domba lokal menghasilkan jenis domba petarung yang lazim disebut domba Garut. Pertunjukan adu domba muncul dari kebiasaan masyarakat pribumi dalam mengadu binatang, hingga berkembang menjadi hiburan yang sering diselenggarakan pada setiap event besar. Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai domba petarung, domba Garut muncul dari 'ketidaksengajaan' hingga menjadi populer sejak akhir abad ke-19, dengan diiringi berbagai kecaman dari perspektif orang Eropa perihal esensi permainannya.

Kata kunci: Adu Domba, Domba Garut, Garut, Priangan.

Abstract

Fighting sheep is very popular in Priangan, especially in the Garut region. The popularity of fighting sheep can't be separated from the history that lies behind it. This research is intended to answer the questions about the emergence of Garut sheep and sheep fighting show at the beginning of its development. The method used in this research is the historical method by utilizing sources of books and newspapers produced during the colonial period. The main finding of this study is that the emergence of the Garut sheep breed was motivated by the import of sheep initiated by K.F. Holle for wool cultivation purposes. The crossbreeding of imported sheep and local sheep has resulted in the type of fighting sheep which is now commonly referred to as Garut sheep. The fighting sheep show itself emerged from the indigenous people's habit of fighting animals which later developed into an entertainment that was often held at every major event. The conclusion of this study is that Garut sheep as fighting sheep emerged from an 'accidental habits' and then became popular since the late 19th century. On the other hand, it has also drawn criticism from the perspective of Europeans who are concerned about the essence of the fighting sheep.

Keywords: fighting sheep, Garut sheep, Garut, Priangan.

A. PENDAHULUAN

Dilansir dari situs resmi Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat, seni ketangkasan adu domba termasuk salah satu atraksi wisata unggulan di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Garut. Domba Garut pada dasarnya memiliki nilai yang tinggi sebagai sebuah komoditas budaya maupun komoditas ekonomi, termasuk sebagai aset untuk meningkatkan sektor pariwisata. Terlebih, popularitas domba Garut terus menanjak, hingga pernah masuk ke lingkungan Istana pada 27 Agustus 2016 lalu. Beberapa di antaranya berjalan di atas karpet merah disambut langsung oleh Presiden. Dalam kontes domba yang bertajuk *Piala Kemerdekaan Republik Indonesia* tersebut, Presiden memberi pesan bahwa domba Garut merupakan simbol seni, budaya, dan kebangkitan ekonomi kerakyatan.

Popularitas domba Garut pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya yang identik sebagai binatang petarung. Masyarakat Sunda memiliki minat yang besar terhadap pagelaran adu domba. Adu domba kerap digelar pada setiap kemeriahan yang diselenggarakan di Tatar Sunda. Kondisi ini sejatinya telah terlihat sejak masa kolonial, yaitu ketika domba Garut dan pertarungannya, sudah sangat populer di kalangan masyarakat Priangan sejak masa kolonial.

Narasi tentang sejarah domba Garut dan pagelaran adunya sebenarnya banyak diulas pada portal-portal daring. Namun, terkadang ada beberapa fakta yang berbeda dalam penyampaiannya, termasuk sumber-sumber yang dirujuknya, sehingga perlu dipertegas dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan secara faktual. Untuk itu, tulisan ini diikhtikan untuk menarasikan kembali eksistensi domba Garut di masa-masa awal perkembangannya. Adapun tiga pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah: *Pertama*, bagaimana narasi historis perihal kemunculan jenis domba Garut? *Kedua*, bagaimana pagelaran adu domba Garut pada masa kolonial, serta bagaimana

pemaknaannya di mata orang-orang Eropa dan pemerintah kolonial?

Penelusuran diawali dengan pembacaan sumber-sumber yang diproduksi pada awal abad ke-19, baik koran, buku, ataupun catatan perjalanan. Sumber-sumber pada awal abad ke-19 ternyata tidak ada yang menarasikan penyelenggaraan adu domba di Priangan, meski pertunjukan mengadu binatang merupakan hal yang lazim dilakukan di Jawa sebelum abad ke-19. Setidaknya, Thomas Stamford Raffles mengemukakan hal ini dalam *The History of Java*. Raffles (1830: 386-390) mengemukakan bahwa ada beberapa pertarungan binatang yang kerap dijadikan tontonan di Jawa, yakni adu harimau dengan kerbau (*rampogan*), adu banteng, adu biri-biri jantan dengan babi liar, adu burung puyuh, adu ayam, serta adu jangkrik.

Kolega Raffles, John Crawfurd (1820: 113-117) juga mencatat beberapa adu binatang dalam buku berjudul *History of the Indian Archipelago*. Adu ayam, adu burung puyuh, adu jangkrik, adu harimau dengan banteng, adu banteng, serta adu babi liar dengan kambing dan domba adalah pertarungan binatang yang lazim dilakukan di Nusantara. Permainan adu domba telah ada meski bertarung dengan babi liar, di mana Crawfurd menyebutnya sebagai “suatu pertarungan yang menggelikan tanpa darah”.

Pada 1860-an, tulisan Karel Frederick Holle dalam *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch-Indie* memberi landasan awal perihal budidaya domba di Priangan. Tulisan tersebut mengantarkan pada hipotesis bahwa tahun 1860-an menjadi masa awal budidaya domba Garut di Priangan, khususnya domba jenis petarung. Pembacaan terhadap tulisan tersebut juga menghadirkan hipotesis lain bahwa hadirnya domba petarung berawal dari kegagalan dalam pembudidayaan wol. Adu domba (Garut) selanjutnya banyak disebutkan pada beberapa koran yang diproduksi pada akhir abad ke-19, seiring

dengan masifnya budidaya domba di Priangan. Perlahan, adu domba menjadi kebiasaan yang sering dilakukan anak-anak penggembala, hingga menjadi suatu tontonan yang kerap menghiasi berbagai acara berskala besar di wilayah Priangan. Popularitas adu domba nyatanya menyisakan kritik dari orang-orang Eropa perihal esensi kekerasan yang ada dalam penyelenggaraannya. Adu domba pun menjadi suatu permasalahan yang memperlihatkan ambiguitas antara hiburan dan kekejaman terhadap binatang.

Secara umum, popularitas adu domba yang dirasakan sekarang muncul dari dimensi sosio-kultural masyarakat Sunda masa kolonial. Tentu, dengan tidak mengabaikan eksistensi orang Eropa dalam menghadirkan dan menarasikan pertunjukan populer tersebut, terlepas dari berbagai pandangan normatif terhadapnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Disebabkan kondisi pandemi Covid-19, heuristik atau pencarian sumber sejarah dilakukan secara daring melalui laman web *delpher.nl*, *archive.org*, dan *digital collection* Leiden University. Laman web *delpher.nl* menyediakan sumber-sumber digital yang menarasikan adu domba di Priangan, berupa buku, koran, dan majalah, baik terbitan Hindia Belanda maupun terbitan Belanda. Koran atau majalah yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya *De Preanger-Bode*, *De Locomotief*, dan *Bataviaasch Nieuwsblad*. Sementara itu, beberapa koran pribumi, seperti *Kaoem Moeda* dan *Matahari*, yang terhimpun dalam *Overzicht van de Inlandsche en Maleisch-Chineesche Pers*, juga menjadi rujukan penting. Selain itu, sumber penting lain yang digunakan adalah tulisan K.F. Holle berjudul "Merinos-Schapen", yang terhimpun dalam *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch Indie*.

Pada tahap kritik dilakukan pengujian dan perbandingan beberapa sumber untuk menguji otentisitas dan kredibilitasnya. Misalnya, ada tendensi untuk melihat awal mula budidaya domba Garut di Priangan. Tulisan K.F. Holle dalam *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch Indie* - yang berisi data perihal proses kawin silang domba impor dengan domba lokal - adalah sumber "tertua" yang membahas hal tersebut. Sumber ini diperkuat dengan sumber lain, seperti sumber M. Buys berjudul *In het Hart der Preanger* yang ditulis pada 1900. Selain itu, penting juga untuk "membuktikan" narasi yang menyebutkan Bupati Suryakantalegawa yang menginisiasi lahirnya jenis domba Garut, seperti yang disebutkan pada portal-portal online. Jika mengacu pada sumber yang memuat periodisasi pemerintahan di Priangan, maka pada masa R. Adipati Wiratanu Datar VII (1836-1871) lah awal mula domba Garut dibudidayakan. Periode tersebut sejalan dengan informasi yang diungkapkan K.F. Holle yang melakukan proses kawin silang domba impor dan domba lokal pada 1860-an. Hal ini tentunya keliru jika mengacu pada masa pemerintahan Bupati Suryakantalegawa yang menjabat pada 1915 hingga 1929. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan jika Bupati Suryakantalegawa memiliki minat yang besar pada budidaya domba Garut. Hal tersebut memerlukan penelitian lebih lanjut.

Pada tahap interpretasi dilakukan beberapa penafsiran terhadap fakta-fakta yang ada. Misalnya, dongeng *Roesdi djeung Misnem* karangan A.C. Deenik dan Raden Djajadiredja merepresentasikan (sejauh mana) pemaknaan adu domba dalam masyarakat Sunda. Dongeng yang bercerita menyoal keseharian masyarakat Sunda tersebut, menyisipkan cerita tentang kebiasaan menggembala domba dalam keseharian anak-anak Sunda. Selain itu, dikisahkan pula mengenai hajatan seorang camat yang menggelar adu domba sebagai

salah satu kemeriahan di wilayahnya. Singkatnya, dongeng yang dibuat pada awal abad ke-20 tersebut merepresentasikan kondisi masyarakat pada zamannya. Tahap historiografi atau penulisan pada akhirnya menjadi bagian akhir metode sejarah, di mana dilakukan penulisan fakta-fakta yang disusun secara sistematis.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Asal Usul Domba Garut

Dalam beberapa literatur yang diproduksi sejak pertengahan abad ke-19, penyebutan ‘domba Priangan’ lebih lazim digunakan dibandingkan penyebutan ‘domba Garut’ pada masa sekarang. Domba Priangan merupakan jenis domba hasil persilangan antara domba Kaapse atau Cape, domba Jawa (jenis domba lokal), dan domba Merino. Pada abad ke-20, Garut menjadi pusat penangkaran domba di Jawa (Barwegen, 2005: 65). Hal ini lah yang membuat domba begitu identik dengan Garut.

Sebelum dikenal domba berjenis campuran, di wilayah Priangan telah ada jenis domba lokal yang oleh orang Belanda dikenal sebagai “domba Jawa” atau “domba Hindia”. Orang-orang Belanda memiliki cara pandang khusus terkait keberadaan domba di Priangan, yakni nilai komersil yang bisa diambil dari pemanfaatan bulu domba untuk pemintalan wol, seperti yang dilakukan di Eropa. Namun, bulu domba lokal dianggap terlalu lurus dan berantakan. Bahkan, sampel bulu domba lokal yang dikirim ke Inggris disebut sebagai “stok paling kasar yang pernah dilihat”. Impor domba Merino dilakukan untuk mendapatkan bulu domba berkualitas baik, tetapi upaya ini dianggap tidak memuaskan (*Veeteelt overdruk uit Mededeelingen der Regering Omtrent*, 1926: 131).

K.F. Holle berperan besar atas impor domba Merino pada medio abad ke-19. Hasil persilangan antara domba lokal dengan domba impor menghasilkan jenis domba Garut atau domba Priangan yang

memiliki ciri tubuh lebih kurus dan berbulu sedikit jika dibandingkan dengan domba di Eropa. Sementara itu, domba jantan umumnya memiliki tubuh yang kokoh dan kaki yang kuat, berukuran besar, berekor panjang, serta dihiasi tanduk yang melengkung indah (Buys, 1900: 132-133).

Dalam tulisannya di *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch-Indie*, K.F. Holle menyebutkan bahwa sebelum Juni 1866 ia mengimpor sebanyak 37 ekor domba, dengan rincian: 1 domba jantan, 15 domba betina, 10 anak domba betina, dan 11 anak domba jantan. K.F. Holle lebih rinci lagi menyebutkan bahwa dari keseluruhan domba yang diimpor, ada beberapa domba yang mati, yakni 2 domba betina, 1 anak domba betina, dan 1 anak domba jantan. Dua domba betina yang mati kemungkinan disebabkan usianya yang sudah tua. Salah satu domba terlihat tampak sehat sebelum mati mendadak. Sementara itu, kedua anak domba yang mati adalah anak domba tidak berinduk, yang sulit untuk beradaptasi dengan domba betina yang bukan induknya (Holle, 1868:162-165).

Selanjutnya, beberapa anak domba impor tersebut diberikan kepada para pembesar di Priangan, seperti Bupati Limbangan (1 anak domba jantan dan 1 anak domba betina), Tuan van Nispen di Sumedang (1 anak domba jantan), Tuan Levyssohn di Sumedang (1 anak domba jantan), Tuan Loheijde di Bandung (1 anak domba jantan), *Hoofdpanghoeloe* (Kepala Penghulu) di Garut (1 anak domba jantan dan 1 anak domba betina), serta *Hoofdgekommitteerde voor koffij-kultuur* (Komisaris Utama Perkebunan Kopi) di Garut (1 anak domba jantan) (Holle, 1868:163).

“De ram, dien ik aan den regent afstond, is reeds flink opgeschoten en belooft wat zijn uiterlijk betreft niet voor zijn vader te zullen onderdoen. Ik heb zelfs reden om te vooronderstellen, dat wij hier

spedig in de gelegenheid zullen zij te beoordeelen in hoeverre zijne nakomelingen naar hem aarden".

"Domba yang saya berikan kepada bupati [Limbangan]¹ sudah mengalami kemajuan yang baik dan tidak akan kalah dengan penampilan ayahnya [domba Merino jantan]. Saya bahkan punya alasan untuk mengira bahwa akan segera dapat menilai sejauh mana keturunannya bahwa di sini kita akan segera bisa menilai sejauh mana keturunannya memiliki kesamaan karakter dengannya..." (Holle, 1868: 163).

Budidaya pemintalan wol memang menjadi saah satu tujuan K.F. Holle dalam upaya mengawinsilangkan domba impor dengan domba lokal. Dalam hal ini, dilakukan pula perkawinan silang dengan "*Kaapsche schapen*" (domba Cape),

¹ Jika mengacu pada tahun ditulisnya sumber ini oleh K.F. Holle, maka bupati yang dimaksudkan adalah R. Adipati Wiratanu Datar VII yang menjabat bupati Limbangan (Garut) pada periode 1836-1871. Hal yang menjadi suatu kesulitan adalah "membuktikan" asal usul domba Garut, yang banyak disebutkan oleh berbagai media online (termasuk situs resmi Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat), bahwa kemunculan domba Garut diinisiasi oleh Bupati Garut Suryakantalegawa yang menjabat pada periode 1915-1929 (bahkan dalam situs resmi Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat terdapat kesalahan dalam penulisan periode pemerintahan Bupati Suryakantalegawa, yakni 1815-1829). Hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Adapun bupati Limbangan (Garut) yang menjabat pada medio abad ke-19 hingga medio abad ke-20 ialah: R. Adipati Wiratanu Datar VII (1836-1871), R. Adipati Wiratanu Datar VIII (1871-1915), R.A.A. Suryakantalegawa (1915-1929), dan R.A.A. Muhamad Musa Suryakantalegawa (1929-1944) (Lubis, 1998: 320).

seperti yang dilakukan oleh K.F. Holle yang mengawinkan dombanya dengan domba Kaapse milik Bupati Limbangan.

"... het Kaapsche schaap meestaal meer dan 1 jong werpt en dus spediger vermenigvuldigt dan het merino-schaap, dat, hier althans, slechts een jong ter wereld brengt ... het Kaapsche schaap grooter van gestalte".

"... domba Kaapse biasanya melahirkan lebih dari satu anak dan berkembang biak lebih cepat daripada domba Merino, yang setidaknya di sini melahirkan satu anak ... domba Kaapse bertubuh lebih besar" (Holle, 1868: 165).

Namun demikian, K.F. Holle menilai bahwa perkembangbiakan domba kurang begitu diminati penduduk pada pertengahan abad ke-19 (Holle, 1868: 164-165).

Salah satu faktor penyebab kurangnya minat penduduk Priangan pada budidaya domba ialah kebutuhan penduduk Priangan yang relatif kecil pada daging, yang cukup terpenuhi oleh budidaya kerbau. Begitupun minat yang kurang dalam pemanfaatan bulu domba untuk pemintalan wol (Buys, 1900: 133).

"... zij op de wol der schapen geen prijs stellen, gelijk blijkt uit het feit, dat zij deze eenvoudig wegwerpen als de schapen geschoren zijn. Deze verkwisting is te meer te betreuren in een koel en vochtig berland, waar enkele wollen artikelen, zoodat dekenen en baadjes, ook bij de inlanders - die ze betalen kunnen - zeer gewild zijn. Kon men hen bewegen om de wol te gaan spinnen en weven ... dan zou hun hiermede eene nieuwe, hoezeer dan ook bescheiden,

bron van inkomsten geopend worden.”

“... Mereka tidak menghargai bulu domba, sebagaimana fakta bahwa mereka begitu saja membuangnya ketika domba dicukur. Limbah ini lebih disesalkan di negara pegunungan yang sejuk dan lembab, di mana beberapa barang wol seperti selimut dan baju sangat diminati penduduk yang mampu membelinya. Jika mereka dapat dibujuk untuk meminta dan menenun wol ... itu akan membuka sumber pendapatan baru bagi mereka.” (Buys, 1900: 133).

Secara umum, peternakan domba di Hindia Belanda menempati posisi yang tidak begitu strategis. Upaya untuk mengembangkan produksi wol dengan mengembangkan peternakan domba merino juga kurang memuaskan, sehingga lambat laun peternakan domba yang berorientasi pada produksi wol mulai ditinggalkan (Stroomberg, 2018: 247).

Meski tidak menghasilkan kepuasan dalam budidaya wol, nyatanya pembiakan yang intensif antara domba lokal dengan domba impor menghasilkan jenis domba Garut yang bernilai tinggi, terutama jenis domba adu yang banyak dipelihara di wilayah barat Priangan. Pada 1926, domba adu ini harganya bisa mencapai f 100 – f 150 (Buys, 1900: 133).

2. Pagelaran Adu Domba

“Karasmenan keur pesta ti beurang, di alun-alun geus diatur: tangkal jambe beunang ngabalur ku gajih, diluhurna digantungan rupa-rupa kahakanan. Jajangkungan, maen colok, ngadu domba, maen calung, jeung tatabeuhan geus ngajajar ... Sora hulu domba nu diadu tinggeleduk matak riout nu alajo. Nu

bogana ngabobotohan dombana.”

“Keramaian dalam pesta dari siang sudah diatur di alun-alun: pohon jambe [pinang] sudah diolesi oleh lemak, di atasnya digantung berbagai makanan. [permainan] Jajangkungan, main colok, adu domba, main calung dan perangkat musik sudah berjajar ... Suara kepala domba yang beradu membuat pusing bagi yang menonton. Pemiliknya memberi dukungan pada dombanya (Deenik dan Djajadiredja, 1913: 66-67).

Penggalan dongeng berjudul *Roesdi djeung Misnem* di atas menggambarkan kemeriahan pesta di suatu alun-alun yang menampilkan banyak pertunjukan, salah satunya *ngadu* domba, sebagai bentuk sebuah pesta hajat yang diselenggarakan oleh seorang Camat. Dongeng tersebut merepresentasikan kebiasaan masyarakat Sunda yang kerap menjadikan adu domba sebagai suatu hiburan besar yang diselenggarakan untuk memperingati atau memeriahkan momen-momen penting.

Pertunjukan adu domba menampilkan pertarungan dua ekor domba yang saling beradu. Domba dibuat saling berhadapan, kemudian keduanya ditarik mundur hingga jarak sekitar 15 meter. Setelah dilepaskan, keduanya saling menanduk sehingga membuat pantat kedua domba naik akibat benturan keras. Tubrukan ini terjadi berulang kali hingga salah satu domba menyerah atau sekarat. Domba yang diadakan mendapat perawatan khusus berupa pemberian jamu-jamuan oleh pawangnya. Jika ada domba yang mogok di tengah pertandingan, sang pawang menyentil atau meremas buah zakar domba dengan keras (Raap, 2013: 165).

Serupa dengan cerita pada dongeng *Roesdi djeung Misnem* di atas, beberapa fakta memperlihatkan narasi yang sama, yakni dalam sumber yang diproduksi sejak

akhir abad ke-19. Koran *De Locomotief* edisi 22 Juni 1896 misalnya memberitakan suatu momen penting, yakni kunjungan Raja Siam ke Jawa, khususnya ke Bandung dan Garut. Ketibaan rombongan Kerajaan Siam tersebut disambut secara khusus oleh residen Priangan, sekaligus disuguhi pertunjukan-pertunjukan menghibur, seperti balap kuda dan adu domba. Dengan menaiki kereta api dari Batavia, Raja Siam beserta rombongannya tiba di Bandung dan menginap di Hotel Homman. Lalu, mereka bertamasya ke Garut, dengan mengunjungi Talaga Bodas dan Kawah Papandayan. Mereka menginap di suatu pesanggrahan di Cisurupan (*De Locomotief*, 22 Juni 1896).

Pertunjukan adu domba juga dilakukan untuk memperingati momen penting lainnya, yakni pengangkatan Ratu Wilhelmina sebagai Ratu Belanda pada 31 Agustus 1898. Gaung perayaan tersebut sampai hingga ke Garut, yaitu ketika perayaan tersebut diselenggarakan pada 7 September 1898. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Belanda pada pukul 9 pagi oleh anak-anak Eropa di sekolah Eropa dan oleh anak-anak pribumi di sekolah pribumi, disertai pemberian lencana dan hadiah. Acara dilanjutkan dengan permainan rakyat di alun-alun. Pada sore hari pukul 16.30 diselenggarakan prosesi oleh kepala pribumi disertai pertunjukan adu domba. Setelah itu, pada pukul 17.30 diadakan pesta untuk anak-anak di lingkungan Eropa dan Pribumi. Pada pukul 20.30, parade Tionghoa dan pesta kembang api diselenggarakan di alun-alun. Acara terakhir dilakukan pada pukul 21.30, yakni pesta di lingkungan Eropa untuk orang Eropa, dan pesta di lingkungan Pribumi untuk kepala pribumi (*De Preanger-Bode*, 31 Agustus 1898).

Berbagai permainan rakyat ditampilkan di alun-alun Garut, termasuk pertunjukan adu domba (*De Preanger-Bode*, 31 Agustus 1898). Selain itu, perayaan tahun baru Jawa atau tahun baru Hijriah juga menampilkan berbagai

kemeriahan, seperti yang diberitakan *De Locomotief* 18 Juli 1902:

“De javaansche Nieuwjaarsdag werd geboren in zonneglans en jong en oud, uitgedost in de kleurigste baadjes (iets speciaal vroolijks van de Preanger-Regentschappen) spoedde zich naar de aloon-allon om van de volksspelen te geniten. De grootste attractie waren de rammengevechten, die zouden plaats hebben; we hadden al reusachtige pracht-exemplaren ien voorbijbrengen, die straks hun hersenpannen tegen elkander zouden moeten beproeven”.

“Hari tahun baru Jawa (Hijriah) di bawah sinar matahari, tua dan muda mengenakan baju warna-warni (kemeriahan khusus di Keresidenan Priangan) bergegas ke alun-alun untuk menikmati permainan rakyat. Daya tarik utama adalah adu domba jantan yang akan berlangsung. Kami telah melihat spesimen besar lewat, yang akan segera menguji kepala mereka satu sama lain”.



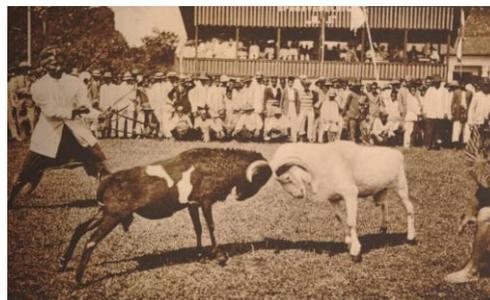
Gambar 1. Adu Domba di Alun-Alun Garut (antara 1901 – 1902)

Sumber: Digital Collections Leiden University Libraries, KITLV 19180.

Pada 31 Agustus 1904, *Koninginnedag* atau Hari Ratu juga diperingati di Garut. Setelah melakukan pengibaran bendera pada pagi hari, permainan populer dimainkan di alun-alun, diantaranya adu domba jantan yang dianggap sebagai permainan paling menarik. Pada malam sebelum perayaan, dilakukan pemberian bintang emas kepada Patih Limbangan R. Aria Soeria Katadiredja, penyematan gelar rangga kepada R. Danoekoesoemo, serta sebuah penghargaan diberikan pula kepada Lurah Cianjur. (*De Preanger-Bode*, 1 September 1904).

Adu domba sangat sering diselenggarakan di alun-alun Garut, di mana bupati Garut memiliki kesenangan yang besar terhadap pertunjukan ini. Setiap minggu pagi ketika tidak disibukkan dengan tugas resmi, bupati seringkali melihat adu domba dan pacuan kuda dari atas *babancong*. Babancong adalah sebuah bangunan berbentuk kubah yang berada di depan kediaman bupati sebagai sarana bupati menyapa rakyatnya (Van Dyck, 1922: 64). Adu domba juga selalu menjadi hiburan pada saat perayaan Lebaran di Garut, seperti yang diberitakan koran *Bataviaasch Nieuwsblad* terbitan 29 September 1888.

Animo masyarakat yang tinggi membuat adu domba selalu hadir dalam acara-acara besar yang dilakukan di wilayah Priangan. Pun dengan Pekan Raya (*jaarmarkt*) yang diselenggarakan di Bandung pada 30 Maret hingga 1 April 1907. Beberapa pertunjukan binatang mewarnai pameran tersebut, mulai dari pacuan kuda, *dancing horse*, hingga adu domba jantan (*De Preanger-Bode*, 15 Maret 1907). Di distrik Ujungberung Wetan, perayaan dalam rangka pemberian gelar rangga kepada Wedana Ujungberung Wetan, disertai khitanan cucunya, digelar berbagai acara, seperti adu domba dan nayuban (*De Preanger-Bode*, 1 Desember 1913).



Gambar 2. Adu Domba di Bandung sekitar 1915

Sumber: Digital Collections Leiden University Libraries, KITLV 94249.

Pagelaran adu domba dilakukan juga dalam rangka pergantian nama Desa Cimareme pada 20 November 1922. Desa Cimareme merupakan salah satu desa di Kabupaten Garut yang pernah menjadi tempat terjadinya konflik berdarah pada 1919. Konflik tersebut melibatkan Haji Hassan dan keluarganya yang meninggal akibat rentetan tembakan marsose karena dianggap melakukan “pemberontakan”. Perubahan nama ini dilatarbelakangi adanya anggapan citra buruk mengenai nama Cimareme karena peristiwa tersebut. Desa Cimareme pun diganti dengan nama Desa Sukasari pada 20 November 1922. Acara perubahan nama tersebut dilakukan dengan meriah, dengan dihadiri asisten residen, bupati, patih, dan para pejabat pribumi. Dilakukan pula beberapa acara, seperti pawai berhias boneka dan badut, pawai sepeda, serta acara yang paling populer, yaitu adu domba. Menjelang malam, pesta kembang api digelar, diteruskan dengan alunan gamelan, wayang, dan nayuban hingga larut malam (*De Preanger-Bode*, 29 November 1922; *De Sumatra Post*, 9 Desember 1922).

Pada perkembangannya, pagelaran adu domba juga dilakukan di luar wilayah Garut dan Bandung. Misalnya, pada Juni 1926, adu domba digelar pada acara besar

di Batavia, yakni Pasar Gambir² (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 25 Juni 1926).



Gambar 3. Iklan pagelaran adu domba pada acara Pasar Gambir 1938
Sumber: *Bataviaasch Nieuwsblad*, 9 September 1938.

Selain itu, pada 9 Agustus 1928 adu domba diselenggarakan pada pasar malam di Tegal (*De Indische Courant*, 9 Agustus 1928). Pagelaran serupa juga dilaksanakan di Rangkasbitung pada 5 Juni 1929, yang juga menampilkan adu domba sebagai salah satu bentuk kemeriahannya (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 5 Juni 1929).

Pertunjukan adu domba masih digelar hingga dekade terakhir masa kolonial. Pada September 1938, peringatan 125 Tahun Garut menampilkan adu domba sebagai salah satu acara utamanya, selain pawai, pertandingan gulat, bioskop terbuka (layar tancap), pertandingan sepak bola, dan berbagai pameran (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 1 September 1938). Dua tahun kemudian, di Garut diselenggarakan pula adu domba untuk memeriahkan pembukaan poliklinik di Wanaraja, Garut (*Het nieuws van den dag*, 2 Januari 1940).

Secara umum, penyelenggaraan adu domba begitu masif dilakukan di wilayah Priangan. Namun demikian, di balik popularitas adu domba, ada kecaman-kecaman yang mencapnya sebagai permainan yang bersifat kejam.

3. Antara Hiburan dan Penyiksaan Binatang

Adu domba yang dianggap sebagai hiburan, ternyata menyisakan berbagai kecaman dari orang-orang Eropa. Mempertarungkan dua ekor domba dianggap sebagai permainan yang kejam. Kecaman ini setidaknya telah hadir sejak akhir abad ke-19 yang umumnya disuarakan melalui media massa.

“Drie kwartier lang zagen wij zulke geweldige bonzen, dat ieder onzer onwillekeurig zich over het voorhoofd streek en een gewaarwording van hoofdpijn kreeg, terwijl de rammen geen ander teeken van ontroering gaven dan het uitsteken van de tong en het aflikken van den bek. De eigenaars der dieren, allen wel gekleede menschen, stelden er blijkbaar veel prijs op, dat hun rammen overwinnaars bleven, hoewel er niets anders mede te verdienen was dan eer, en het gevaar bestond, dat de verslagen ram door een bijzonder nijdig tegenstander geducht met de horens toegetakeld werd”.

“Selama tiga seperempat jam, kami melihat sepasang domba jantan baru, saling berhadapan, dan mendengar mereka bertubrukan dengan sangat keras sehingga masing-masing dari kami tanpa sadar mengusap dahi dan merasakan sakit kepala, sementara domba jantan itu menyerah. Tidak ada tanda emosi lain selain menjulurkan lidah dan menjilati mulut. Para pemilik domba yang semuanya berpakaian bagus, menaruh harga tinggi bahwa domba jantannya terus menjadi penakluk, meskipun tidak ada yang bisa diperoleh dari hal itu

² Pasar Gambir merupakan cikal bakal Pekan Raya Jakarta yang dimulai sejak 1906

selain kehormatan, dan berani mengambil resiko bahwa domba jantan kalah dilukai oleh kebuasan tanduk lawan yang ditakuti” (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 29 September 1888).³

Dari koran tersebut terlihat bahwa ketidaksukaan orang Eropa terhadap adu domba sudah hadir sejak akhir abad ke-19, masa di mana adu domba mulai populer dilakukan di Priangan. Kritik terhadap pertunjukan adu domba juga disuarakan dalam cerita bersambung berjudul “Zaterdagavondcadetjes” yang ditulis oleh Kees Moppering, yang dimuat pada koran *de Preanger Bode*. Pada edisi 27 Agustus 1900, Kees Moppering menceritakan ketidaksukaannya pada adu domba yang cukup banyak digemari oleh penduduk Sunda. Menurutnya, pertunjukan tersebut tidak baik apalagi tidak ada larangan dari polisi. Ia menambahkan:

“[...] daarbij blijft 'n ram toch altijd maar doodgoed schaaap; d'r zit geen fut in; je moet ze eerst woedend maken voor ze elkander aanvallen en voor ze op het commando van 'n 12-jarigen snotjongen elkaar met de stalen hoorns den kop te pletter stooten. De politie heeft groot gelijk, dat ze zich met de bescherming van dit sullige schepsel niet ophoudt... de rammen kunnen voor mijn part allemaal 'n hersenschudding krijgen [...]”.

“[...] seekor domba jantan selalu merupakan domba yang amat baik, tidak ada tenaga di dalamnya, Anda harus

membuat mereka marah sebelum mereka menyerang satu sama lain dan sebelum mereka saling menghancurkan dengan tanduk baja atas perintah anak berusia 12 tahun. Polisi sangat tepat bahwa mereka tidak perlu repot untuk melindungi makhluk lemah ini ... Para domba jantan yang saya pedulikan bisa mengalami geger otak [...]” (*De Preanger-Bode*, 27 Agustus 1900).

Kees Moppering melihat bahwa adu domba tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa dalam pertunjukan “resmi”. Adu domba nyatanya menjadi kebiasaan yang sering dilakukan anak-anak saat mereka menggembala dombanya. Dalam Bahasa Sunda dikenal istilah *ngadoe* atau *ngadoekeun*, yang berarti membuat dua ekor domba jantan bertarung satu sama lain. Kebiasaan *ngadoe* pada dasarnya sudah ada pada anak laki-laki Sunda. Mereka suka melatih domba untuk menyeruduk. Seorang anak laki-laki biasanya naik di atas kepala domba dan dengan kesulitan memegang leher domba tersebut untuk mendesaknya menyerang lawan. Mereka pun berusaha untuk mendorong bagian bokong dombanya, lalu menarik ekornya untuk membuatnya beradu. Hal lain yang dilakukan adalah menusuk domba mereka dengan cara yang kejam. Upaya ini berhasil membuat kedua domba berlari dan saling beradu, hingga membuat anak-anak tersebut riang dan bertepuk tangan (*De Preanger-Bode*, 17 Februari 1898).

Meskipun masih banyak digemari oleh masyarakat pribumi, pertunjukan adu domba sempat dilarang dipertontonkan pada beberapa momen penting di Bandung pada 1908, seperti peringatan ulang tahun ke-50 Ratu Juliana dan Hari Ratu (*koninginnedag*) pada 31 Desember. Polisi dan pemerintah telah meminta agar adu domba – yang dilaksanakan di Lapangan Tegallega - dihilangkan dari daftar kedua

³ Penggalan kalimat di atas dimuat dalam koran *Bataviaasch Nieuwsblad* edisi 29 September 1888 dengan judul “Lebaran te Garoet”. Judul ini dimuat kembali dalam buku yang ditulis M. Buys berjudul *In het hart der Preanger* dan diterbitkan pada 1900.

acara tersebut. Pelarangan tersebut didasarkan atas pandangan bahwa adu domba merupakan suatu hal yang “barbar”, di mana dua ekor domba dipaksa bertarung beberapa kali dan tidak jarang tanduknya dipotong – meski semuanya begitu menyenangkan untuk beberapa penonton (*Het nieuws van den dag*, 20 Agustus 1908; *Bataviaasch Nieuwsblad*, 2 September 1908).

Pada dasarnya, orang Eropa begitu sensitif melihat kekerasan terhadap binatang. Kampanye untuk melarang kekerasan terhadap binatang telah dilakukan di Eropa sejak awal abad ke-19, dan terlihat masih pada akhir abad ke-19. Khusus di Inggris, berbagai pelarangan adu satwa (*animal baiting*) diberlakukan, seperti adu ayam, adu beruang atau banteng dengan beberapa anjing (*bull-baiting* atau *bear-baiting*), serta adu ayam. Regulasi yang tegas ditetapkan pada 1835 melalui *Cruelty to Animals Act 1835* (Undang-Undang Kekerasan Binatang 1835), di mana pelaksanaannya tidak lepas dari upaya *Society for Prevention of Cruelty to Animals* (SPCA) yang dibentuk pada 1824 (Gustaman, 2015: 113-115).

Di Hindia Belanda, kekerasan terhadap binatang diatur dalam pasal 302 ayat 1 dan 2 *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda)⁴, yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 1918. Sejatinya, adu domba juga masuk ke dalam ketentuan pidana tersebut. Namun, pro dan kontra kemudian muncul seiring masih dilaksanakannya adu domba di wilayah Priangan, seperti yang masih dilakukan hampir setiap pekan di Bale Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong,

Kabupaten Garut (*Kaoem Moeda*, 25/29 April 1921). Para penyayang binatang menilai bahwa balapan kuda – sebagai pertunjukan yang juga banyak digemari – juga harus dihapuskan jika adu domba tidak dilarang (*Kaoem Moeda*, 18/23 Juli 1921).

Orang-orang Eropa pada dasarnya tidak terlalu meminati pagelaran adu domba. Di Tasikmalaya misalnya, acara adu domba pada Pasar Malam yang diselenggarakan pada Agustus 1922 sangat sedikit menarik penonton dari kalangan orang Eropa (*De Preanger-Bode*, 5 Agustus 1922).

Beberapa sindiran dialamatkan kepada bupati, khususnya Bupati Garut yang tidak melarang adu domba dengan alasan sebagai bentuk promosi peternakan domba Garut (*De Preanger-Bode*, 17 Januari 1923). Terlebih, Bupati Garut beserta masyarakatnya sangat menggemari adu domba. Salah satu sindiran di media massa mengatakan bahwa seseorang harus bertanya kepada direktur *Veeartsenijsschool* (Sekolah Kedokteran Hewan), ‘apakah adu domba diperlukan sebagai promosi peternakan yang baik?’ (*Matahari*, 30 September 1922). Adu domba sebagai bentuk promosi untuk pembudidayaan domba dirasa tidak relevan dibandingkan dengan promosi yang seharusnya dilakukan dalam bentuk pameran. Pada dasarnya, adu domba sangat menentukan nilai seekor domba diukur dari kondisi saat pertarungan. Jika seekor domba kalah, maka nilainya akan turun. Sebaliknya, seekor domba pemenang akan dihargai dengan harga tinggi oleh sesama orang Sunda, tetapi tidak oleh orang Eropa (*De Preanger-Bode*, 17 Januari 1923).

Pro dan kontra juga mengarah pada daya tahan domba saat pertarungan, khususnya pada dahi domba yang menjadi pusat benturan. Ada anggapan yang menyebutkan bahwa dahi domba tahan terhadap benturan karena memiliki struktur kepala yang kuat. Selain itu, para pemilik domba selalu menggunakan perawatan

⁴ Pasal 302 ayat: (1) Perbuatan menganiaya binatang dihukum dengan hukuman penjara selama 4 bulan dan dua minggu atau dengan denda sebanyak 120 gulden; (2) Jika kejahatan itu dilakukan di tempat umum, maka dijatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan atau denda sebanyak 120 gulden (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, 1921: 167)

khusus agar otot-otot dahi domba menjadi mati rasa (Gustaman, 2015: 188).

Bupati Bandung pun menjadi sasaran kritik karena di wilayahnya diselenggarakan adu domba yang diikuti oleh 300 ekor domba yang telah dikumpulkan dari seluruh Kabupaten Bandung. Domba yang terpilih dianggap yang paling unggul sehingga membuat para penonton bersorak. Para penyayang binatang menyayangkan hal tersebut yang tidak sesuai dengan slogan-slogan yang terpampang di tempat umum, khususnya sekolah-sekolah (*Matahari*, 14, 24, dan 30 Januari 1923).

“Behandel de dieren met zachtheid! Spaar de vogels! [Perlakukan binatang dengan lembut! Selamatkan burung-burung!]. Slogan-slogan itu tergantung di depan sekolah untuk mengajarkan anak-anak agar tidak menyakiti binatang, tetapi di sisi lain, para pembesar membiarkan binatang berkelahi. Kusir Sado didenda karena menggunakan kuda yang terluka, dan orang lain dihukum karena sabung ayam, tetapi di tengah lapangan terbuka domba jantan diizinkan untuk bertarung” (*Matahari*, 14, 24, dan 30 Januari 1923).

Atas penyelenggaraan adu domba tersebut, Bupati Bandung menyampaikan pernyataan bahwa ia pada dasarnya adalah penentang pertunjukan adu domba, terutama jika melibatkan adanya uang taruhan. Ia pun berjanji untuk mengatur semuanya menjadi lebih baik (*Matahari*, 14, 24, dan 30 Januari 1923).

Adu domba yang dianggap kejam juga menjadi perhatian Perkumpulan Penyayang Binatang (*Vereeniging tot Bercherming van Dieren*) cabang Bandung. Hal ini disampaikan pada rapat yang diselenggarakan pada Januari 1930 di Gedung Societiet Concordia (sekarang Gedung Merdeka) (*De Preanger-Bode*, 30 Januari 1923).

Adanya beberapa kecaman terhadap adu domba, nyatanya tidak membuat adu domba dilarang secara tegas. Beberapa pagelaran masih terus dilakukan di beberapa tempat di Priangan. Salah satu

alasan yang membuat adu domba masih sering dilaksanakan adalah pemasukan yang besar sebagai dampak dari banyaknya peminat atau penonton pada setiap penyelenggaraannya. Hal ini salah satunya ditunjukkan pada suatu *volksfeesten* (pesta rakyat) yang diselenggarakan oleh Wedana Bandung pada minggu pagi 7 Januari 1923. Acara tersebut menampilkan adu domba di alun-alun Bandung, yang diikuti sebanyak 250 domba jantan. Uang dari hasil pertunjukan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan desa atau kampung. Pagelaran tersebut disaksikan oleh banyak masyarakat pribumi, dan juga kepala komisaris polisi, serta dokter hewan (*De Preanger-Bode*, 8 Januari 1923).

Acara tersebut diprotes oleh beberapa pihak. Salah satu protes dimuat dalam koran *De Sumatra Post* edisi 29 Januari 1923.

“Zeker, de wedana zal als Soendanees wel weten, wat den Soendanees vermaakt, maar om zijn toevlucht te nemen tot dergelijke, wreede en elke beschaving tergende vermakelijkheden, teneinde aan geld te komen voor de kosten van een nieuwe brug, dus voor het algemeen belang, protersteeren wij hier ten sterkste. Waarom niet eens weer een wedstrijd gehouden in pijl en boog schieten, ook tegen entree. Wij kunnen verzekeren, dat er ook veel geld in het laadje zal komen, vooral wanneer de menak er zich voor spant. Het houden van dergelijk wedstrijden bij feestelijke gelegenheden of ten behoeve van het algemeen belang, zal nergens tegenstand vinden...”

“Tentu, sebagai orang Sunda, wedana tahu apa yang bisa menghibur orang Sunda, tetapi tidak dengan menyelenggarakan hiburan

yang begitu kejam untuk mendapatkan uang untuk biaya pembangunan jembatan baru. Untuk kebaikan bersama, kami melakukan protes keras di sini. Mengapa tidak menyelenggarakan pertandingan panahan dengan biaya masuk. Kami dapat meyakinkan Anda bahwa banyak uang yang akan masuk juga, terutama ketika para menak berusaha. Penyelenggaraan pertandingan semacam itu pada acara-acara pesta untuk kepentingan umum, tidak akan mendapat pertentangan” (*De Sumatra Post*, 29 Januari 1923).

Koran *Bataviaasch Nieuwsblad* terbitan 27 Juli 1923 mengulas lagi perihal acara tersebut dalam lingkup perdebatan di dalam lingkup pemerintahan. Pada salah satu laporan disampaikan adanya pengumpulan uang sebesar 800 gulden hasil dari pagelaran adu domba, di mana uang tersebut akan digunakan untuk biaya pembuatan jembatan di kampung-kampung. Ada sebuah mosi yang disampaikan oleh seorang Eropa bernama Tuan Schneider pada dewan kota.

“Met rammengevechten kom je voor desa-bruggen al en heel eind, maar als er iets noodig is van steviger constructie, een permanente brug dus, dan is er ielts noodig dat meer publiek trekt en dus meer opbrengt.”

“Dengan adu domba, Anda bisa melakukan banyak hal untuk jembatan, tetapi jika sesuatu dibutuhkan untuk konstruksi yang lebih kuat yakni jembatan permanen, maka perlu menarik lebih banyak penonton dan dengan demikian menghasilkan [uang] lebih banyak...” (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 27 Juli 1923).

Tuan Schneider terkesan “menyindir” pemerintah Kota Bandung yang sebelumnya memiliki keinginan untuk menerangi atau membangun kampung-kampung. Tuan Schneider beralasan bahwa pemerintah lamban dalam menangani masalah tersebut, serta terkesan bahwa walikota Bandung tidak tertarik dengan kampung-kampung seperti yang diutarakan beberapa orang pribumi (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 27 Juli 1923).

Pada dasarnya, pagelaran adu domba menjadi suatu paradoks bagi pemerintah kolonial. Hingga berakhirnya masa kolonial, pagelaran adu domba tidak pernah benar-benar dilarang meski telah diberlakukan regulasi perihal kekerasan terhadap binatang. Setelah Indonesia merdeka, pagelaran adu domba tetap menjadi pertunjukan yang diminati di wilayah Priangan, bahkan hingga kini.

D. PENUTUP

Popularitas adu domba yang bertahan hingga sekarang bisa dibilang berawal dari “ketidaksengajaan”. Impor domba yang dilakukan pada 1860-an oleh K.F. Holle awalnya ditujukan untuk budidaya wol seperti di Eropa. Namun demikian, kawin silang domba impor dan domba lokal menghasilkan jenis domba yang besar dan dianggap gagah untuk beradu. Meski belum bisa dibuktikan secara faktual, masyarakat Sunda memiliki kebiasaan mengadu domba – entah sebelum atau setelah adanya budidaya domba impor.

Secara kuantitas dan kualitas, popularitas adu domba sangat besar sejak akhir abad ke-19, bahkan lebih populer sejak awal abad ke-20. Berbagai *event* besar di wilayah Priangan selalu mempertontonkan adu domba sebagai pagelaran yang banyak menarik penonton.

Kontroversi pun mengiringi popularitas adu domba, di mana orang-orang Eropa penyayang binatang menganggap adu domba sebagai bentuk kekerasan terhadap binatang. Pada dasarnya, hal ini merupakan masalah perspektif. Perspektif Barat perihal

binatang mengarah pada perlakuan yang “manusiawi” terhadap binatang, seperti yang masif dikampanyekan dan dipraktikkan di Eropa. Perbedaan perspektif ini mengantarkan pada penyebutan adu domba sebagai permainan yang “barbar”. Meski muncul berbagai kecaman, terutama disuarakan di media massa, - serta diperkuat dengan adanya regulasi perihal kekerasan terhadap binatang – adu domba tidak dilarang secara tegas pada masa kolonial. Adanya anggapan sebagai bentuk budidaya peternakan, dan juga sebagai penghasil pundi-pundi uang yang besar, membuat adu domba tetap digelar hingga berakhirnya masa kolonial.

DAFTAR SUMBER

- Veeteelt overdruk uit Mededeelingen der Regeering Omtrent* (1926).
- Advertentie. *Bataviaasch Nieuwsblad*, 9 September 1938.
- Barwegen, M. (2005). *Gouden Hoorns; De geschiedenis van de veehouderij op Java, 1850-2000*. Proefschrift Landbouwniversiteit Wageningen.
- Binnenland. Tegal. *De Indische Courant*, 9 Agustus 1928.
- Bokkengevechten. *Kaoem Moeda*, 25/29 April 1921. Overzicht van de Inlandshe en Maleisch-Chineesche Pers No.18/1921.
- Bokkengevechten en Wedrennen. *Kaoem Moeda*, 18/23 Juli 1921. Overzicht van de Inlandshe en Maleisch-Chineesche Pers No. 30a/1921.
- Buys, M. 1900. *In Het Hart der Preanger*. Leiden: S.C. van Doesburgh.
- Crawfurd, J. (1820). *History of The Indian Archipelago*. Edinburgh: Archibald Constable and Co.
- De Aanstaaende Pasar Gambir. *Bataviaasch Nieuwsblad*, 25 Juni 1926.
- Deenik, A.C. dan Rd. Djajadiredja. (1913). *Roesdi djeung Misnem; Bokoe batjaan pikeun moerid2 di Sakola Soenda*. ‘s-Gravenhage: Blankwaardt & Schoonhoven.
- De Omdooping der Desa Tjimareme. *De Preanger-Bode*, 29 November 1922.
- De Omdooping der Desa Tjimareme. *De Sumatra Post*, 9 Desember 1922.
- De Koning van Siam te Garoet. *De Locomotief*, 22 Juni 1896.
- Digital Collections Leiden University Libraries. Rammengevecht op de aloen-aloen te Garoet voor het huis van de assitent-resident, diakses pada tanggal 5 April 2021, dari <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/>
- Dieren-Bescherming. *De Preanger-Bode*, 30 Januari 1923.
- Digital Collections Leiden University Libraries. Rammengevecht te Bandoeng, diakses pada tanggal 5 April 2021, dari <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/>
- Enkele Onderwerpen van Algemeen Belang*. Weltevreden: Landsdrukkerij.
- Feesten te Bandoeng. *Bataviaasch Nieuwsblad*, 2 September 1908.
- Garoet Bestaat 125 jaar. *Bataviaasch Nieuwsblad*, 1 September 1938.
- Gustaman, B. (2015). *Animal Welfare di Hindia Belanda; Perkembangan Wacana Tentang Kesejahteraan Satwa 1896-1942*. Tesis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Holle, K.F. (1868). “Merinos-Schapen”. *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch Indie uitgegeven door de Nederlandsch-Indische Maatschappij van Nijverheid en Landbouw Deel XIII*. Batavia: Ogilvie & Co.
- Jaarmarkt. *De Preanger-Bode*, 15 Maret 1907.
- Lebaran te Garoet. *Bataviaasch Nieuwsblad*, 29 September 1888.
- Lubis, N. H. (1998). *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.

- Mut. Een vacantiereisje op Java. *De Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (1921)*. *Locomotief*, 18 Juli 1902.
- Nederlandsch-Indie Bandoeng, 17 Februari 1989. *De Preanger-Bode*, 17 Februari 1898.
- Nederlandsch-Indie Bandoeng, 31 Augustus 1898. *De Preanger-Bode*, 31 Augustus 1898.
- Pasar Malem te Rangkas. *Bataviaasch Nieuwsblad*, 5 Juni 1929.
- Preanger Kroniek – Raadsoverzicht. *Bataviaasch Nieuwsblad*, 27 Juli 1923.
- Raap, O. J. 2013. *Soeka-Doeka Djawa Tempo Doeloe*. Jakarta: KPG.
- Raffles, T. S. (1830). *The History of Java Vol. I*. London: John Murray.
- Rammengevechten. *De Preanger-Bode*, 17 Januari 1923.
- Rammengevechten. *De Sumatra Post*, 29 Januari 1923.
- Rammengevechten. *Matahari*, 14, 24, 30 Januari 1923. Overzicht van de Inlandshe en Maleisch-Chineesche Pers No. 6/1923.
- Stroomberg, J. (2018). *Hindia Belanda 1930*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Uit Bandoeng. *Het nieuws van den dag*, 20 Augustus 1908.
- Uit Tasikmalaja. *De Preanger-Bode*, 5 Augustus 1922.
- Van die ren daar – uit Garoet schrijft men ons. *De Preanger-Bode*, 1 September 1904.
- Van die ren daar – uit Oedjoengbroeng. *De Preanger-Bode*, 1 Desember 1913.
- Van Dyck, J.Z. (1922). *Garoet en Omstreken*. Batavia: G. Kolff & Co.
- Volksfeesten. *De Preanger-Bode*, 8 Januari 1923.
- Vooruitgang?. *Matahari*. 4/30 September 1922. Overzicht van de Inlandshe en Maleisch-Chineesche Pers No. 41/1922.
- Wanaradja's Polikliniek – Feestelijke Openning. *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 2 Januari 1940.

KRISIS POLITIK DI KALIMANTAN BARAT 1950: SUATU PROSES MENUJU INTEGRASI KE DALAM REPUBLIK INDONESIA

*THE 1950 POLITICAL CRISIS IN WEST KALIMANTAN:
A PROCESS TOWARDS THE INTEGRATION
INTO THE REPUBLIC OF INDONESIA*

Mohammad Rikaz Prabowo¹, Aman²,

^{1,2} Magister Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta
Jl. Kolombo, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta

^{1,2} e-mail: mohammadrikaz.2020@student.uny.ac.id, aman@uny.ac.id

Naskah Diterima: 3 Mei 2021

Naskah Direvisi: 29 Agustus 2021

Naskah Disetujui : 18 Oktober 2021

DOI: 10.30959/patanjala.v13i2.796

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjuangan integrasi wilayah Kalimantan Barat ke dalam Republik Indonesia (RI) pada tahun 1950 yang diwarnai krisis politik antara kubu republikan dengan pendukung Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) yang mempertahankan federalisme bersama Republik Indonesia Serikat (RIS). Penelitian menggunakan metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa krisis politik antara kedua kubu telah menyebabkan pemogokan massal pada bulan Maret 1950 di Pontianak yang berdampak luas pada bidang ekonomi se-Kalimantan Barat. Komisaris RIS dan DPR RIS datang untuk menengahi dan menyelesaikan krisis ini. Akan tetapi perubahan konstelasi politik terjadi cepat karena ditangkapnya Sultan Hamid II pada 5 April 1950. Jalannya pemerintahan DIKB yang tidak stabil mendorong penyerahan kekuasaan eksekutif kepada Pemerintah RIS pada 24 Mei 1950, dan secara resmi berintegrasi dalam RI setelah RIS dinyatakan dibubarkan pada 17 Agustus 1950.

Kata kunci: *Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB), Sultan Hamid II, Republik Indonesia Serikat (RIS), Republik Indonesia (RI).*

Abstract

The study aims to explore the struggle for integration of the West Kalimantan region into the Republic of Indonesia (RI) in 1950. The integration was marked by a political crisis between the republicans and the supporters of the Special Region of West Kalimantan (DIKB) who defended federalism with the United States of Indonesia (RIS). The study uses the historical method through the stages of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of the study indicate the fact that the political crisis between the two parts led to a mass strike in March 1950 in Pontianak. The strike had a wide impact on the economy throughout West Kalimantan. The Commissioners of the United States of Indonesia and the House of Representatives from the United States of Indonesia managed to mediate and resolve the crisis. However, changes in the political constellation occurred quickly due to the arrest of Sultan Hamid II on April 5, 1950. The unstable run of the Special Region of West Kalimantan government prompted the handover of executive power to the United States of Indonesia Government on May 24, 1950, and officially integrated into the Republic of Indonesia after the United States of Indonesia was declared disbanded on August 17, 1950.

Keywords: *Special Region of West Kalimantan, Sultan Hamid II, United States of Indonesia, Republic of Indonesia.*

A. PENDAHULUAN

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 menjadi babak baru dalam sejarah perjalanan bangsa. Indonesia berhasil lepas dari belenggu penjajahan dan bersiap memasuki masa depan dengan memerintah tanah airnya sendiri. Akan tetapi kehendak ini sesungguhnya mengalami banyak tantangan, salah satunya masalah kedaulatan wilayah negara. Masih banyak wilayah yang ketika itu ragu-ragu dan enggan menjadi bagian dari RI karena berbagai alasan.

Di Kalimantan Barat misalnya, kesultanan-kesultanan yang ada mengalami trauma berat pasca penjajahan Jepang yang merenggut banyak nyawa pemimpin dan kerabat mereka. Pemerintah RI dianggap belum memiliki pengalaman bernegara dan mampu menjamin keamanan serta kesejahteraan masyarakat, termasuk sistem feodal melalui pemerintahan swapraja yang ingin tetap dipertahankan. Di sisi lain, hubungan mereka dengan Belanda sebelum masuknya Jepang sudah terjalin cukup baik. Dengan begitu, ketika *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) di bawah pimpinan Dr. Van Der Zwall kembali hadir dan resmi berkuasa pada 22 Oktober 1945, ‘mantan mitra’ itu diterima dengan tangan terbuka.

Kondisi ini tentunya mendapatkan penolakan hebat dari pemuda republikan yang mendukung pemerintahan RI. Aksi-aksi untuk menentang kehadiran kembali Belanda baik dengan gerakan massa maupun perlawanan terus berlangsung di seluruh penjuru Kalimantan Barat hingga tahun 1946 (Ahok et al., 1992: 53). Apabila ditarik lebih jauh, gerakan-gerakan penentangan Belanda untuk mencapai kemerdekaan telah muncul sebelum tahun 1942 di Kalimantan secara umum. Misalnya, pada tahun 1935 berdiri

Partai Indonesia Raya (Parindra) di ibukota *Gubernemen Borneo*, Banjarmasin yang diikuti dengan pendirian partai ini di kota lain (Wajidi, 2015: 19). Di Pontianak Parindra baru berdiri pada 1936 yang digawangi Raden Koempoel, Kepala Kantor Pos Pontianak dan Hadjarati guru *Holland Inlandse School* (Soedarto et al., 1978: 54). Akan tetapi saat Jepang berkuasa pada tahun 1942, seluruh aktivitas politik dilarang yang berimbas berakhirnya aktivitas Parindra di Borneo (Wajidi, 2015: 19). Itulah mengapa pasca proklamasi RI, gerakan-gerakan untuk menentang kembali Belanda seolah tinggal melanjutkan saja karena telah terkaderisasinya pemuda/tokoh yang sadar akan nasionalisme.

Gerakan ini akhirnya berkembang menjadi persaingan politik setelah munculnya organisasi Gabungan Persatuan Indonesia (GAPI) pimpinan dr. Mas Soedarso pada akhir 1946 dan Komite Nasional Kalimantan Barat (KNKB) tahun 1949. Baik GAPI maupun KNKB menolak eksistensi Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) yang dianggap bentukan Belanda pimpinan Sultan Hamid II, dan mendesak wilayah ini bergabung ke dalam RI (Soedarto, 1989: 99). Persaingan ini terus terjadi bahkan ketika DIKB telah menjadi bagian dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) yang bersistem federalisme. Sistem ini oleh kalangan republikan dianggap sudah usang dan merupakan sisa-sisa pemerintahan feodal-kolonial. Sebaliknya, tokoh-tokoh DIKB yang didominasi para aristokrat menilai federalisme adalah sistem yang paling tepat diterapkan mengingat heterogenitas wilayah, sekaligus tetap mempertahankan corak pemerintahan swapraja.

Persaingan mencapai puncaknya pada tahun 1950, dengan terjadinya krisis politik di Pontianak. Terjadi pemogokan massal dan kelumpuhan ekonomi yang

meluas ke daerah lain. Hal ini dikarenakan letak Pontianak yang strategis berada di muara Sungai Kapuas dan Sungai Landak sebagai pintu gerbang ke daerah-daerah pedalaman di Kalimantan Barat. Sebagai contoh, Ricklefs (2008) dalam Rahmayani (2013: 12) menyebutkan pada masa pendudukan Jepang, Pontianak yang menjadi kota penting bagi industri terpaksa terhenti. Hal itu memengaruhi perekonomian kota-kota di sepanjang aliran Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kota lain seperti Singkawang yang terkenal dengan industri keramik juga cukup bergantung pada Pontianak. Ini disebabkan keramik-keramik dari Singkawang banyak didistribusikan ke luar melalui pelabuhan Pontianak (Rahmayani, 2013: 15). Posisi strategis Pontianak dengan daerah-daerah lain telah menempatkan kota ini sebagai pusat perdagangan dan pusat Pemerintahan Karasidenan Borneo Barat oleh Belanda sejak dulu (Hasanudin, 2016: 204).

Peristiwa ini menarik untuk dikaji karena menjadi catatan sejarah yang belum banyak tersampaikan. Khazanah penulisan sejarah periode revolusi kemerdekaan di Kalimantan Barat cukup sedikit, sehingga membuat peneliti lainnya kurang memiliki gambaran seperti apa yang terjadi kala itu. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menambah kekurangan khazanah sejarah wilayah ini secara umum.

Kenyataan bahwa terdapat gerakan-gerakan politik untuk menentang berkuasanya kembali Belanda dan menolak federalisme perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini guna mengubah pandangan dalam historiografi, bahwa periode ini dianggap hanya berisi perjuangan secara fisik atau bersenjata saja. Padahal perjuangan untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga melalui lobi-lobi dan diplomasi. Adanya krisis politik yang berdampak luas memengaruhi beberapa sektor di Kalimantan Barat pada periode itu layak menjadi suatu peristiwa besar. Penyelesaian yang diambil untuk

mengakhiri krisis akan mengarah pada suatu kenyataan baru ketika nantinya Kalimantan Barat secara resmi berintegrasi bersama RI.

Apa yang terjadi di Kalimantan Barat pada periode ini, menggambarkan bagaimana proses pendewasaan Indonesia sebagai negara yang baru memperoleh kedaulatan mulai diuji. Wirawan dalam Bhakti dan Mengko (2018:5), menyebutkan proses pembentukan bangsa (*nation building*) yang masih dini akan memicu konflik horizontal. Para *founding father* menawarkan konsep bentuk negara yang menurut mereka paling ideal dan saling bersaing agar dapat diterapkan. Menurut Ni'matul Huda (2009: 49), RIS tidak dibentuk dengan landasan konseptual yang matang. Dalam kenyataannya negara yang berbentuk federal ini bermula dari usaha Belanda untuk menghancurkan RI hasil proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga banyak mendapatkan penolakan dari sejumlah tokoh-tokoh kemerdekaan.

Mengetahui bagaimana kondisi politik di Kalimantan Barat sebelum KMB tahun 1949 yang penuh persaingan antara kubu republikan dengan pro-federalisme, dapat menjadi pembuka untuk memahami bagaimana krisis politik ini akhirnya mencapai puncak di awal tahun 1950. Dengan demikian bahasan ini menjadi rumusan masalah yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan membahas terjadinya krisis politik yang menyebabkan pemogokan massal dan kelumpuhan ekonomi. Pada rumusan masalah yang terakhir secara khusus akan membahas langkah atau upaya untuk menyelesaikan krisis politik yang mengarah pada integrasi Kalimantan Barat ke dalam RI.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang secara tidak langsung beririsan dengan topik yang diangkat oleh peneliti. *Pertama*, penelitian berjudul *Sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat (1946-1950)* oleh Khamsyahurrahman, tahun 2015. Penelitian ini mengangkat secara khusus

eksistensi DIKB mulai ketika hendak didirikan hingga akhirnya dibubarkan seiring bergabung dengan RI pada 1950. Nilai lebih dari penelitian ini ialah memuat cukup lengkap struktur dan badan-badan organisasi DIKB serta daftar tokoh-tokoh yang bergabung di dalamnya. Kendati demikian, penelitian ini kurang menyampaikan dinamika politik yang terjadi pada periode tersebut, termasuk pertentangan-pertentangan antartokoh hingga menjadi suatu krisis politik.

Kedua, penelitian berjudul *Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia* oleh Taufiq Tanasaldy, tahun 2014. Penelitian ini secara khusus mengangkat sejarah politik di tingkat lokal Kalimantan Barat dari masa kolonial hingga kontemporer. Salah satu bagian terpenting pada penelitian ini adalah bagian perkembangan politik di wilayah ini pada periode pasca Perang Dunia II hingga tahun 1950 yang memuat informasi-informasi dinamika sosial di sekitar Pontianak. Hanya saja, penelitian ini menekankan pada keterlibatan etnis Dayak sebagai kekuatan politik baru pada periode tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui tahapan pengumpulan sumber-sumber/data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran pada sumber-sumber (interpretasi), dan penulisan sejarah (historiografi).

Salah satu sumber primer yang digunakan berasal dari catatan harian pelaku sejarah seperti karya M. Yanis yang telah dikemas dalam sebuah novel sejarah berjudul *Djampea*. Karya ini memiliki kelebihan karena mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi secara kronologis dan penuh penghayatan. Bahkan penulis juga menuliskan koran-koran lokal yang meliputi peristiwa-peristiwa tersebut. Sayangnya, koran lokal ini belum berhasil peneliti dapatkan. Hal ini mendorong penggunaan surat kabar yang terbit secara nasional melalui layanan daring

Perpustakaan Nasional RI dan layanan digitalisasi surat kabar berbahasa Belanda melalui Delpher (www.delpher.nl). Akan tetapi surat kabar yang digunakan hanya yang diterbitkan di Indonesia rentang waktu 1945-1950.

Adapun sumber-sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku dan hasil kajian yang terkait tentang RIS, revolusi kemerdekaan, dan sejarah sosial politik di Kalimantan Barat. Salah satunya buku *Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 Daerah Kalimantan Barat* oleh Pasifikus Ahok, Slamet Ismail, dan Wijoso Tjitrodarjono. Buku ini diterbitkan oleh Kanwil DEPDIKBUD RI Kalimantan Barat, penulis anggap kredibel karena ditulis oleh ahli dan menggunakan data-data yang terpercaya.

Langkah selanjutnya yakni dilakukan kritik sumber baik secara eksternal dan internal. Fakta-fakta yang didapatkan dalam proses ini dimaknai dan ditempatkan secara kronologis dan tematis. Proses pemaknaan memerlukan pengetahuan yang mencukupi tentang tema penelitian yang sedang dikerjakan. Untuk itu diperlukan proses interpretasi. Seperti pada buku M. Yanis yang penulis sebutkan sebelumnya, meski dikemas dalam novel sejarah buku ini telah mendapatkan anotasi dari ahli. Asfar mengungkapkan M. Yanis memanfaatkan novel sebagai pencatat peristiwa sejarah dengan deskripsi yang menawan, ia meletakkan budaya sebagai gejala universal manusia, melontarkan kata balas (*antwoord*) terhadap kenyataan di dalam dan di luar diri penulis (Asfar, 2005: 96). Penjabaran fakta-fakta sejarah secara kronologis tanpa adanya suatu interpretasi akan menjadi sebuah karya kronik, bukan karya sejarah (Kanumuyoso, 2020: 44). Hal ini penting, agar dapat berlanjut dan dihasilkan penyusunan fakta-fakta yang komprehensif dalam proses historiografi.

Kanumuyoso (2020: 45-46), menyebutkan penggunaan metodologi menyebabkan adanya pendekatan antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lain. Hal ini dikarenakan setiap penggambaran

terhadap gejala sejarah yang kompleks menuntut pendekatan yang memungkinkan seleksi fakta yang diperlukan. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan politik yang menggambarkan bagaimana jalannya sejarah ditentukan kejadian politik, perang, diplomasi, dan tindakan tokoh politik. Oleh sebab itu sejarah konvensional adalah sejarah yang identik dengan politik (Abbas, 2014: 36).

Sejarah politik konvensional cenderung membahas peristiwa-peristiwa berdampak secara nasional. Berbeda dengan hal itu, pada penulisan ini digunakan kajian sejarah politik tingkat lokal. Peristiwa tingkat lokal tidak selalu merupakan hasil dari perkembangan politik di tingkat nasional. Akan tetapi dapat pula dimulai dari suatu kejadian yang menjadi besar sehingga berdampak secara lokal bahkan ke tingkat nasional (Kanumuyoso et al., 2020: 20-21).

Krisis Politik secara lebih jauh juga memengaruhi sektor perekonomian. Untuk itu pendekatan ekonomi juga digunakan dalam penulisan ini. Kanumuyoso (2020: 47), menyebutkan pendekatan ekonomi mengutamakan untuk melihat sejarah dari aspek hubungan pertukaran barang, pengakumulasian modal, pengorganisasian produksi, pelebagaan sistem moneter, dan sebagainya.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Kondisi Politik di Pontianak Sekitar KMB

Perdebatan-perdebatan tentang bentuk negara federalis dan unitaris semakin gencar dibicarakan terkait dengan persiapan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda. Kepala DIKB Sultan Hamid II, yang juga Ketua BFO memainkan peranan penting dalam lobi-lobi politik terhadap pemimpin republik. Ia berhasil mencapai kompromi dengan Mohammad Hatta dalam Konferensi Inter Indonesia (KII) di Yogyakarta pada 19-22 Juli 1949. Hasil kesepakatan tersebut yakni akan dibentuk RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme. Pada KII kedua tanggal

30 Juli 1949 di Jakarta, bendera merah putih disepakati sebagai bendera RIS dan Presiden RIS nantinya juga dipilih bersama antara RI dan BFO (Putro, 2018: 40).

Sementara itu di Pontianak, organisasi GAPI telah mendapatkan suntikan tenaga baru pasca perombakan kepengurusan dan bebasnya sang pemimpin dr. Mas Soedarso. Hal ini berkat Kesepakatan Roem-Roijen pada 7 Mei 1949, dimana sebagai langkah awal perundingan antara Indonesia dengan Belanda, para tawanan republik yang sebelumnya ditahan telah dibebaskan (Agung, 1994: 84). Para tawanan sebagian besar belum diadili, dan tawanan di sini dalam artian tidak hanya personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau militan republik, namun juga mereka yang menentang NICA (Amir, 2010: 352).

Di kemudian hari GAPI gencar melakukan desakan-desakan kepada Pemerintah DIKB agar mengizinkan pengibaran bendera sang dwiwarna Merah Putih (Putro, 2018: 40). Dalam KII silam juga telah disepakati Merah Putih sebagai bendera RIS. Pada 18 September 1949, Pemerintah DIKB mengizinkan pengibaran Merah Putih dengan syarat berdampingan dengan bendera Merah Putih Biru. Ukuran dan tingginya harus sama serta dikibarkan hanya pada hari-hari yang diperbolehkan (*Het Nieuwsblad*, 20 September 1949). Barulah pada 19 Oktober 1949 diizinkan mengibarkan bendera Merah Putih tanpa syarat apa pun seantero Kalimantan Barat terhitung mulai tanggal 24 Oktober 1949 (Yanis, 1998: 250).

Momentum ini tidak disia-siakan GAPI, dengan mengambil tempat di Lapangan Kebun Sayur, maka pada 24 Oktober 1949 diadakan upacara pengibaran Merah Putih yang dihadiri oleh berbagai elemen rakyat maupun organisasi politik dan kepemudaan. Juga hadir pada kesempatan itu organisasi Tionghoa yang turut memeriahkan. Sehingga diperkirakan upacara itu tidak kurang dihadiri oleh 3.000 warga masyarakat yang turut datang dengan membawa bendera Merah Putih

(Ahok et al., 1992: 87). Aksi upacara ini menjadi ajang pembuktian kepada pemerintah DIKB maupun NICA bahwa rakyat masih mendukung dan setia di belakang panji-panji kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu di Den Haag Belanda, perundingan KMB untuk menentukan status Indonesia ke depan mulai dilaksanakan pada 23 Agustus 1949. Ada empat pihak yang saling berunding merumuskan solusi paling baik untuk Indonesia. Delegasi RI diketuai oleh Mohammad Hatta, Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marseveen, BFO diwakili Sultan Hamid II, dan PBB dipimpin oleh Critchley sebagai penengah (Utami, 2018: 101). Dalam sambutannya pada pembukaan KMB, Hamid menyebutkan sebagai negara yang bebas merdeka Indonesia akan mengambil tempat dalam deretan bangsa-bangsa merdeka dan mengharapkan pengertian dan kepercayaan seluruh dunia (*Het Dagblad*, 24 Agustus 1949).

Dalam kesempatan berbicara menyampaikan pandangannya dalam KMB, Sultan Hamid II tetap menyuarakan perlunya membawa Indonesia ke bentuk negara federal. Ia mengungkapkan alasan mengapa negara federal lebih cocok untuk Indonesia dan BFO perlu didirikan:

Sejak badan federal itu dilahirkan, maka ditujukan untuk tercapainya kemerdekaan Tanah Air kita, kemerdekaan bagi segenap bagian Tanah Air kita, dan untuk mencapai suatu persatuan yang dapat menjamin kemerdekaan baik bagi seluruhnya maupun untuk bagian-bagiannya (Vinsensius, 2015: 24).

Sebenarnya Mohammad Hatta juga merupakan tokoh yang berpikiran Indonesia didesain dalam suatu federalisme. Menurutnya model negara seperti RIS dapat menata harmoni dalam suatu struktur yang federal, dengan desentralisasi sempurna hingga ke pelosok tanah air. Akan tetapi ia menekankan pada

persatuan identitas yang muncul sebagai Bangsa Indonesia, tidak masalah Indonesia kelak diatur dalam suatu *Eenheidsstaat* (Negara Kesatuan) atau *Bondstaat* (Negara Serikat) (Mangunwijaya, 1999: 19 & 23). Hatta juga menghargai dinamika dan keinginan rakyat akan negara Indonesia yang unitaris.

Pada 2 November 1949 perundingan KMB usai dengan menghasilkan keputusan, salah satunya Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Akan tetapi penyerahan kedaulatan dari Belanda baru dapat dilaksanakan pada 27 Desember 1949 baik di Amsterdam maupun di Jakarta (Hatta, 2018: 222).

Di Kalimantan Barat sendiri, khususnya Pontianak, berita pengakuan kedaulatan disambut dengan ekspresi kebahagiaan. Akan tetapi, sebagian lain merasa kurang menerima karena bentuk federalisme yang disepakati, bukan negara unitaris/kesatuan. Pada 26 November 1949, GAPI mengadakan rapat untuk membahas isi dari perundingan KMB. Secara umum GAPI menerima isi dari perundingan sebagai suatu realita, namun dengan catatan bahwa mereka akan tetap mendukung negara kesatuan. GAPI juga menyatakan akan mengawal penyerahan kedaulatan Indonesia di Pontianak (Ahok et al., 1992: 87).

Keesokan harinya pada 27 November 1949, Sultan Hamid II sebagai salah satu delegasi dalam KMB telah kembali ke Pontianak. Ia disambut meriah oleh masyarakat yang bersuka cita atas suksesnya KMB (*De Locomotief*, 29 November 1949). Sultan Hamid II memainkan peranan penting dalam forum KMB. Kesediaan Belanda menyetujui penyerahan kedaulatan kepada RIS tidak terlepas dari keberhasilannya membujuk Ratu Juliana (Listiana et al., 2015: 5).

Untuk memantapkan perjuangan kaum republik, maka pada 26 November 1949 berdirilah organisasi Komite Nasional Kalimantan Barat (KNKB). Organisasi ini dikenal sebagai pendukung

kuat unitarisme/kesatuan sebagai bentuk Negara Indonesia. KNKB berjuang dengan melakukan lobi-lobi politik yang bertujuan mengintegrasikan DIKB dalam RI ke depannya (Soedarto, 1989: 225).

KNKB mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat/suku di Kalimantan Barat. Organisasi ini diketuai oleh Tan Husni Abdullah dan Sabam Hendrik Marpaung sebagai sekretarisnya. Tokoh-tokoh lain yang sebelumnya tergabung dalam PRI maupun GAPI seperti M. Nazir Effendi, Munzirin A.S, Burhan Ibrahim, dan A.S Djampi juga tergabung dalam KNKB (Tanasaldy, 2014: 96).

Menjelang penyerahan kedaulatan sebagaimana kesepakatan dalam KMB, unsur-unsur politik di Kalimantan Barat mulai memikirkan perlunya kehadiran pasukan TNI di wilayah ini untuk penjagaan keamanan. Unsur politik itu di antaranya adalah dari Partai Masyumi, mendesak GAPI dengan mosi agar pengiriman pasukan TNI segera terlaksana. Mosi itu kemudian dipertimbangkan oleh GAPI (*Java Bode*, 26 Desember 1949).

Pada 25 Desember 1949 atas nama KNKB, Sabam Hendrik Marpaung pergi ke Jakarta untuk meminta masuknya TNI ke Kalimantan Barat agar tidak terjadi kekosongan kekuatan pertahanan apabila *Koninklijk Nederlandsch Indies Leger* (KNIL) nantinya dibubarkan setelah penyerahan kedaulatan. TNI akan masuk ke Kalimantan Barat sebagai unsur utama dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) dimana nantinya akan dibuka kesempatan bagi tentara bumiputera eks-KNIL maupun pejuang dari badan-badan perjuangan untuk masuk ke dalam APRIS. Tepat pada 27 Desember 1949 diadakanlah upacara penyerahan kedaulatan RIS di bekas rumah residen Kalimantan Barat (Ahok et al., 1992: 87). Hal ini luput dari pantauan Sultan Hamid II yang telah kembali berangkat ke Belanda untuk menghadiri upacara penyerahan kedaulatan (*Nieuwe Courant*, 24 Desember 1949).

2. Terjadinya Krisis Politik di Kalimantan Barat Tahun 1950

Krisis politik yang terjadi pada tahun 1950 berawal dari semangat kaum republik yang tetap berkeinginan memperjuangkan Kalimantan Barat menjadi bagian RI. Misi itu belum tercapai hingga penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949. Hal ini dapat dirunut pada keberadaan organisasi politik pro-RI yang masih tetap eksis pasca KMB, yakni GAPI dan KNKB. Soal tujuan perjuangan keduanya juga sama, menuntut DIKB bergabung dalam RI.

Salah satu pekerjaan rumah yang menjadi kekhawatiran seluruh lapisan masyarakat pasca KMB ialah persoalan keamanan. GAPI dan KNKB yang berpikiran selaras dengan Pemerintah RI, berpendapat bahwa sebagai tindak lanjut dari KII dan KMB maka tentara APRIS yang akan dibentuk haruslah intinya berasal dari TNI (Leirissa, 2006: 309). Hal ini juga sesuai dengan aturan Pasal 181 ayat (1) Konstitusi RIS dimana urusan pertahanan tetap dipegang oleh Pemerintah Federal RIS (D. Utami, 2004: 226).

Di wilayah Kalimantan Barat, perjuangan-perjuangan fisik membela kemerdekaan sebenarnya dilakukan oleh badan-badan perjuangan atau militan pro republik, bukan TNI (Ahok et al., 1992: 59). Kehadiran TNI harus disegerakan, bila tidak pembentukan APRIS di wilayah ini intinya akan berasal dari tentara eks-KNIL. Hal ini akan menyulitkan perjuangan kaum republikan dalam mengintegrasikan Kalimantan Barat ke dalam RI.

Pada 1 Januari 1950, TNI telah membuka markasnya di Pontianak dengan diiringi upacara penaikan bendera Merah Putih oleh beberapa organisasi pemuda dan kepanduan seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API) dan Pelajar Islam Indonesia (PII). Keesokan hari, Komando Subteritorial dan Pasukan Kalimantan Barat mengeluarkan Pengumuman Nomor 1 tanggal 2 Januari 1950 yang ditandatangani oleh Mayor Suharsono tentang pemberian kesempatan pada pasukan gerilya maupun kelaskaran untuk

mendaftarkan diri menjadi prajurit (Ahok et al., 1992: 272 & 277).

Masuknya TNI di Kalimantan Barat ditanggapi berbeda oleh berbagai kalangan sehingga menjadi pembuka krisis politik di Pontianak. Menurut Kepala DIKB Sultan Hamid II, kedatangan TNI bukanlah suatu hal yang mendesak di wilayahnya terkait dengan hal keamanan. Ditambah pasukan yang telah ada seperti KNIL dan Tentara Federal DIKB belum dilakukan reorganisasi. Ia telah berkomunikasi kepada Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX agar penyelesaian masalah pengiriman TNI itu menunggu dirinya pulang dahulu dari Belanda (Persadja, 1955: 59).

Dalam buku Tanjungpura Berjuang: Sejarah Kodam XII Tanjungpura, disebutkan terdapat suatu tendensi bahwa Sultan Hamid II menolak kedatangan TNI di wilayahnya. Kepada Mayor Suharsono yang juga turut mendarat bersama Letkol Sukanda Bratamanggala, Sultan Hamid II mengungkapkan bahwa ia menerima peleburan KNIL dan Tentara Federal ke dalam APRIS tetapi menolak kedatangan TNI di wilayahnya untuk turut dilebur. Menurutnya keberadaan eks-KNIL dan Tentara Federal yang juga akan melebur ke APRIS sudah cukup kuat untuk menjaga keamanan (Staf Semdam XII, 1970: 135).

Pola-pola penolakan kehadiran TNI sebagai pasukan inti untuk membentuk APRIS ini sebenarnya juga terjadi di wilayah lain kala itu. Setidaknya Peristiwa APRA di Bandung pada 23 Januari 1950, disebabkan karena sikap Westerling dan ribuan tentara KL, KNIL, serta tentara federal yang tidak setuju dengan pembentukan APRIS. Begitu pula dengan Peristiwa Andi Aziz (April 1950) di Makassar, menuntut agar hanya eks-KNIL yang dijadikan pasukan APRIS. Sedangkan di Ambon pada April 1950 justru lebih rumit dan berlarut. Selain menolak kedatangan TNI, juga mendeklarasikan pendirian Republik Maluku Selatan (RMS) dan memisahkan

diri dari Indonesia (Bhakti & Mengko, 2018: 54-55).

Masalah pengiriman TNI ini akhirnya menjadi pembicaraan di Kabinet RIS. Kolonel T.B Simatupang (Kepala Staf APRIS) mengungkapkan pasca keberatan Sultan Hamid II tersebut, TNI sempat menunda pengiriman pasukannya ke Kalimantan Barat. Akan tetapi setelah melalui proses sidang kabinet RIS, pengiriman TNI ke wilayah itu tetap diteruskan (Persadja, 1955: 103-105). Dengan demikian pengiriman TNI ini telah disetujui oleh Kabinet RIS yang memutuskan masalah dislokasi pasukan merupakan kewenangan Kementerian Pertahanan. Bukan semata-mata keputusan Sultan Hamengkubuwono IX sendiri. Selain itu, berdasarkan Pasal 182 ayat (2) Konstitusi RIS menyebutkan Pemerintah RIS dapat menunjuk Menteri Pertahanan sebagai Panglima Umum APRIS apabila dipandang perlu. Dengan demikian pemutusan masalah dislokasi berada di kewenangan Menteri Pertahanan sesungguhnya telah sesuai dengan konsitusi (D. Utami, 2004:226).

Datangnya pasukan TNI menuai pro dan kontra, golongan federalis yang masih kuat berkuasa mengecam gagasan ini namun mereka tidak dapat berbuat banyak. Di sisi lain beberapa tokoh DIKB mulai mengalihkan dukungan pada RI, di antaranya A.F Korak dan J.C Oevaang Oeray, keduanya anggota Badan Pemerintahan Harian (BPH), yang bertugas membantu tugas-tugas harian Pemerintah DIKB. Keduanya adalah tokoh Partai Persatuan Dayak (PPD) (Aju, 2017: 24).

Beberapa hari sebelumnya pada 5 Januari 1950, KNKB mengadakan rapat dengan menghasilkan dua keputusan. *Pertama*, mencalonkan dr. Soedarso sebagai Kepala DIKB yang sejak 27 Desember 1949 dijalankan secara *acting* oleh Mahsyur Rifai. Ia ditetapkan sebagai *acting* karena Sultan Hamid II telah ditetapkan sebagai Menteri Negara RIS. *Kedua*, memprotes tindakan penangkapan

16 pemuka masyarakat Ngabang pada tanggal 26 Desember 1949 tanpa alasan yang jelas. Keesokannya pada tanggal 6 Januari 1950 GAPI juga mengadakan rapat untuk menggagas diadakannya pemilihan umum untuk menentukan susunan Dewan Kalimantan Barat (DKB) yang baru. Sementara itu GAPI berencana untuk membubarkan diri dan menyerahkan perjuangan sepenuhnya kepada KNKB karena banyaknya kesamaan anggota (Usman, 2018: 88).

DKB melakukan sidang perdana dengan pembahasan pemilihan anggota baru pada 11 Januari 1950. Sidang diwarnai aksi demonstrasi KNKB dengan pengerahan massa. Pimpinan aksi, Sabam Hendrik Marpaung dan Uray Bawadi menuntut dibubarkannya DIKB dan bergabung dengan RI serta menerima masuknya TNI. Demonstrasi ini memang telah diprediksi akan terjadi. Sultan Hamid II kemudian menemui massa dan meyakinkan demonstran untuk tenang. Ia berjanji akan menanggapi tuntutan soal pemilu anggota DKB yang lebih demokratis.

Seusai massa demonstran bubar, sidang kembali dilanjutkan dengan berhasil memutuskan Masyhur Rifai meneruskan jabatan Pelaksana Sementara (*acting*) Kepala Daerah selama belum adanya keputusan berdasarkan pemilu baru (*Java Bode*, 12 Januari 1950). Posisi ini merupakan suatu hal yang cukup membingungkan, sebab Sultan Hamid II yang telah terpilih menjadi Menteri Negara RIS tidak meletakkan jabatannya sehingga terjadi dualisme jabatan. Di sisi lain ia tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Kepala DIKB secara efektif karena sebagai menteri harus berada di Jakarta.

Krisis politik di Kalimantan Barat akhirnya mendorong Perdana Menteri Mohammad Hatta bersama rombongan di antaranya Menteri Dalam Negeri, Ide Anak Agung Gede Agung mengunjungi Pontianak pada 12 Januari 1950 (*Het Nieuwsblad*, 14 Januari 1950). Kedatangan Hatta ke Pontianak ini menjadi kesempatan

kaum republikan untuk menyuarakan tuntutan mereka langsung. M. Nazir Effendy misalnya, ia mendesak agar DKB yang tidak representatif dan tidak demokratis dibubarkan serta segera dilaksanakan pemilihan umum. Hatta menanggapi dengan tenang, menurutnya saat ini masih banyak yang harus dikerjakan dan disempurnakan dan kesemuanya itu butuh waktu. Sehingga ia mengharapkan massa untuk bersabar sampai pemilihan umum yang mereka inginkan dapat terselenggara (Yanis, 1998: 286).

Pada sore harinya ribuan massa berkumpul di Lapangan Kebon Sayur menghadiri rapat raksasa yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RIS, memberikan amanat atas nama Perdana Menteri. Dalam amanatnya, Ide Anak Agung kembali mengingatkan rakyat agar menerima apa yang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat, sembari tetap bertindak tenang dan tentram menjaga daerahnya masing-masing. Pada 14 Januari 1950 Sultan Hamid II memutuskan untuk ikut bersama rombongan Perdana Menteri Mohammad Hatta ke Jakarta (Ahok et al., 1992: 88). Seperti diketahui, Sultan Hamid II merupakan Menteri Negara, yang diberikan tugas untuk merancang lambang negara. Turiman menyebutkan, lambang negara yang digunakan saat ini, Garuda Pancasila, merupakan hasil rancangannya yang ditetapkan oleh Dewan Menteri RIS tanggal 11 Februari 1950 dan disahkan Parlemen RIS pada 17 Februari 1950 (Turiman, 2013: 315).

Pasukan TNI sebagai unsur inti APRIS tepat mendarat di Pontianak pada 16 Januari 1950. Sebanyak 200 prajurit pimpinan Mayor Firmansyah mendarat dengan menumpang kapal KPM Kaimana. Kedatangan pasukan ini membawa kepercayaan diri lebih bagi republikan. Pasukan disambut dengan meriah oleh rakyat sepanjang jalan dari pelabuhan hingga ke tangsi (Ahok et al., 1992: 88). Di sisi lain warta berita juga melaporkan ada sebagian penduduk yang menaruh

sedikit perhatian pada datangnya pasukan TNI (*De Locomotief*, 18 Januari 1950).

Pada 18 Januari 1950 Mayor Firmansyah sebagai Komandan Komando Subteritorium Militer I Kalimantan Barat mengumumkan bahwa persoalan keamanan khususnya di Kota Pontianak sepenuhnya telah berada di tangan APRIS. Keesokan harinya pada 19 Januari 1950 dikeluarkan lagi suatu pengumuman tentang pendaftaran diri pasukan-pasukan gerilya dan laskar-laskar republik. Kemudian pada 22 Januari 1950 kembali dilaksanakan rapat akbar yang bertujuan untuk mengenalkan TNI kepada rakyat di Lapangan Kebun Sayur (Yanis, 1998: 289). Kini masyarakat telah mengetahui kehadiran TNI yang bertugas untuk menjaga keamanan agar senantiasa tetap kondusif.

Desakan demi desakan terus dilancarkan oleh KNKB baik dengan sebuah mosi ataupun pengerahan massa untuk berdemonstrasi. Apalagi setelah diketahui beberapa negara-negara bagian maupun daerah otonom dalam RIS mulai melakukan pembahasan bergabung dengan RI. Feith (2007), mengungkapkan di akhir bulan Januari 1950 beberapa dewan legislatif negara/daerah seperti Jawa Timur, Madura, dan Jawa Tengah telah meloloskan resolusi untuk dapat bergabung ke dalam RI (Feith, 2007: 61). Hal ini dimungkinkan melalui Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kepengurusan RIS. UU ini menjadi dasar hukum bagi negara dan daerah untuk melakukan penggabungan (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1985: 42).

Desakan rakyat untuk bergabung ke RI tidak hanya terjadi di negara bagian/daerah di Jawa yang dikenal sebagai basis republikan. Bahkan, di Negara Indonesia Timur (NIT) yang merupakan negara bagian terbesar dalam RIS juga terjadi gerakan serupa. Pada 5-7 Februari 1950 Biro Pejuang Pengikut RI (BPPRI) berhasil mengadakan rapat akbar di Polombangkeng mendesak NIT

bergabung pada RI. Dilanjutkan pada 23 Februari 1950 wakil BPPRI menuju Jawa menyampaikan sikap para pejuang dan republikan ke Pemerintah RIS (Amir, 2010: 354). Sementara itu DKB belum juga melaksanakan suatu pembicaraan ke arah menuju integrasi serupa. Sebagai usaha untuk terus menekan DIKB, KNKB mengadakan rapat raksasa untuk membuktikan besarnya dukungan rakyat akan penggabungan kepada RI. Rapat tersebut sedianya dilaksanakan pada 4 Maret 1950 di Lapangan Kebun Sayur (Yanis, 1998: 291).

Sayangnya, rapat ini dihalang-halangi oleh aparat dan menindak massa dengan kekuatan senjata (represif) hingga menyebabkan seorang massa terluka. Aksi penindakan itu diduga atas perintah Pelaksana Sementara Kepala DIKB (*De Locomotief*, 9 Maret 1950). Hal ini justru semakin memperbesar jurang antara kaum republikan dengan Pemerintah DIKB yang ingin tetap mempertahankan federalisme sehingga memperburuk krisis politik. Akibatnya, KNKB melakukan aksi pembalasan dengan mengadakan pemogokan massal seluruh pekerja dan buruh se-Pontianak pada 6 Maret 1950. Di luar dugaan, aparat justru membalasnya dengan penangkapan sejumlah tokoh politik seperti Sabam Hendrik Marpaung, M. Nazir Effendy, Munzirin AS, Burhan Ibrahim, AS Djampi, G.M. Affandi Rani dan beberapa pengurus KNKB (Soedarto, 1989: 258).

Pemogokan umum ini menyebabkan kelumpuhan pada berbagai sektor ekonomi. Penduduk dalam dan luar kota yang menggantungkan hidupnya pada sistem distribusi terutama bahan pokok beras, mulai mengalami kesulitan sejak jaringan distribusi se-wilayah Kalimantan Barat yang berpangkal di Pontianak itu berhenti. Aktivitas bongkar muat di dermaga pelabuhan juga sepi. Supir angkutan yang bertugas mendistribusikan bahan-bahan pokok tidak ketinggalan ikut dalam aksi pemogokan dengan menolak

mengangkut penumpang dan barang (Yanis, 1998: 292).

Imbauan dan anjuran KNKB ini diikuti tanpa paksaan dari para pekerja dan buruh, bukti bahwa organisasi ini memiliki pengaruh besar di Pontianak. Aksi pemogokan ini menyebabkan lumpuhnya kegiatan ekonomi yang berimbas pada kesulitan rakyat mendapatkan bahan pokok atau keperluan sehari-hari.

Penangkapan itu membuat pengurus KNKB tidak leluasa bergerak, hingga akhirnya keluar Pengumuman Nomor 2 tanggal 8 Maret 1950 yang menegaskan pemogokan terus berjalan sebelum adanya penjelasan resmi dan menuntut untuk segera dibebaskan rekan mereka yang ditahan. KNKB juga mendesak Komisaris RIS di Jakarta datang untuk ikut ambil bagian dalam penyelesaian krisis politik (Yanis, 1998: 291).

Esoknya pada 9 Maret 1950 KNKB kembali mengeluarkan pengumuman akan membagikan beras kepada rakyat sembari tetap melaksanakan pemogokan. Kemudian pada 10 Maret 1950 KNKB kembali menegaskan pokok-pokok pendirian perjuangan mereka yang jadi tuntutan, yakni: *Pertama*, Kalimantan Barat bergabung ke RI dan mendapatkan otonomi seluasnya; *Kedua*, *acting* Kepala DIKB menyerahkan mandatnya; *Ketiga*, pucuk pimpinan daerah supaya dipegang oleh Komisaris RIS untuk sementara menunggu penggabungan ke RI (Yanis, 1998: 292).

3. Upaya-upaya Menyelesaikan Krisis Politik dan Dampaknya

Aksi pemogokan dan tuntutan yang dilancarkan oleh KNKB yang semakin hari semakin militan itu membawa keprihatinan Pemerintah Pusat RIS karena menyebabkan lumpuhnya perekonomian di Kalimantan Barat khususnya Pontianak. Menurut laporan, aksi mogok itu menyebabkan lumpuhnya komunitas bisnis dan tutupnya kantor pos, telegraf, dan telepon serta terhentinya transportasi publik. Bahkan warung-warung skala kecil

juga memilih untuk tidak berjualan (*Java Bode*, 10 Maret 1950). Lebih jauh lagi sebagai dampak dari pemogokan dan alasan keamanan penerbangan, maskapai Garuda Indonesia Airways memutuskan untuk menghentikan pelayanannya yang kala itu lepas landas dengan pesawat amfibi dari Sungai Kapuas (*Nieuwe Courant*, 15 Maret 1950).

Akan tetapi demikianlah tujuan aksi-aksi itu, agar permasalahan ini mendapatkan perhatian lebih dan Pemerintah RIS ambil bagian dalam penyelesaiannya. Kedatangan rombongan PM Mohammad Hatta pada 12 Januari 1950 yang mengupayakan kondusivitas politik nyatanya hanya menjadi solusi sementara.

Pada 12 Maret 1950 apa yang menjadi tuntutan KNKB akhirnya terbayar dengan kedatangan Komisaris Umum RIS Mr. Indra Kusuma dan M. Soeparto di Pontianak. Kedatangan rombongan komisaris ini bertujuan untuk menuntaskan masalah pemogokan di Kalimantan Barat dan menjadi penengah dalam krisis politik antara DIKB dengan KNKB. Atas perintah dari Komisaris Umum, dan demi kelancaran perundingan, maka tokoh-tokoh republik yang dijebloskan di Penjara Sungai Jawi kemudian dibebaskan (Andi & Rahman, 2010: 35). Menurut Mr. Indra Kusuma, pemogokan yang berdampak luas ke seluruh Kalimantan Barat itu merupakan yang terbesar di Indonesia waktu itu (Soedarto, 1989: 260).

Secara terpisah pada 12 Maret 1950 itu pula, telah mendarat di Pontianak Komisi *Fact Finding* yang dibentuk oleh DPR-RIS. Misi ini diketuai oleh Mr. Lukman Wiradinata yang bertugas untuk menilai keadaan di Kalimantan Barat dan mencatat fakta-fakta sebenarnya yang terjadi. Setelah melewati sejumlah penyelidikan dan mengadakan komunikasi ke berbagai pihak, komisi mengambil kesimpulan bahwa tidak ditemukan campur tangan TNI dalam kemelut di Kalimantan Barat termasuk dalam aksi pemogokan massal (Nugraha, 2012: 130).

Aksi-aksi revolusioner seperti pemogokan massal berhasil membawa sejumlah pihak dari pusat baik unsur eksekutif (Komisaris Umum RIS) maupun unsur legislatif (DPR-RIS) berduyunduyun ke Pontianak menyelesaikan krisis politik yang ada. Secara paralel baik Komisaris Umum RIS dan DPR RIS menginisiasi pertemuan-pertemuan dengan menghadirkan perwakilan KNKB dan DIKB untuk menemukan solusi penyelesaian yang paling baik.

Pada 18 Maret 1950 berhasil dicapai persetujuan antara KNKB dan Pemerintah DIKB yang ditengahi oleh Komisaris Umum RIS, yakni pengumuman mengakhiri pemogokan (Usman, 2018: 96). Hari itu juga pemogokan massal usai dan secara berangsur kegiatan perekonomian kembali pulih. Hal ini juga tidak terlepas dari usaha Komisi *Fact and Finding*, dimana dr. Mas Soedarso terlibat sebagai sekretaris komisi dalam menengahi DIKB dan KNKB (Darmadi, 2017).

Komisaris Umum RIS juga mengumumkan dibentuknya suatu Badan Pertimbangan sebagai suatu lembaga transisi pemerintahan dan jalan tengah agar konflik antara Pemerintah DIKB dan KNKB berakhir. Badan Pertimbangan ini beranggotakan Sabam Hendrik Marpaung, Uray Bawadi, A. Mawardi Djafar, Mochtar Hadikusumo, dan Adenan (Usman, 2018: 97). Selanjutnya lewat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RIS tanggal 20 Maret 1950, dibentuk Panitia Pemilihan Umum (PPU) DKB. Susunan PPU ini cukup seimbang berdasarkan keterwakilan baik dari republikan maupun kubu DIKB (Nugraha, 2012: 130).

Pada 5 April 1950 Sultan Hamid II ditangkap atas tuduhan keikutsertaannya dalam Pemberontakan APRA Bersama Westerling dan rencana penyerangan Dewan Menteri RIS pada 24 Januari 1950 (*Nieuwsblad voor Indonesie*, 6 April 1950). Kabar ini segera menjadi pembicaraan di kalangan republikan, membahas langkah selanjutnya yang harus ditempuh atas tertangkapnya Kepala DIKB

itu. Hal ini semakin membawa ke arah kenyataan yang semakin rumit dan sulit untuk dipertahankannya eksistensi DIKB. Tertangkapnya Sultan Hamid II menyebabkan perubahan cepat konstelasi politik di Kalimantan Barat.

Secara *de-facto* Pemerintahan DIKB tidak pernah berjalan dengan baik, telah dibentuk juga Badan Pertimbangan sebagai lembaga transisi pemerintahan. Ditambah Sultan Hamid II semakin mustahil menjalankan tugasnya karena ditahan pihak berwenang. Maka atas dasar itu, pimpinan KNKB mengirim kawat kepada Pemerintah RIS menuntut agar DIKB dibubarkan. Tuntutan ini ditolak, namun berjanji akan segera mengirimkan seorang Residen untuk menjabat (Nugraha, 2012: 131).

Berkaca pada kondisi aktual di Kalimantan Barat dimana semakin gencarnya tuntutan untuk pembubaran DIKB yang terkulminasi dengan pemogokan umum. Maka, DPR-RIS pada 15 April 1950 melakukan voting dan menghasilkan mosi mendukung DIKB bergabung dengan RI (Feith, 2007: 65). Mosi disahkan dengan perbandingan lima puluh lawan satu suara secara aklamasi dan mengusulkan afiliasi Kalimantan Barat ke RI (*De Locomotief*, 18 April 1950).

Mosi pengambilan suara itu dalam hemat penulis pasti melibatkan perwakilan dari anggota Senat yang mewakili negara bagian/daerah. Sebab, sistem parlemen pada masa itu menganut sistem bikameral, kekuasaan (perundang-undangan) federal dilakukan oleh pemerintah bersama-sama DPR dan Senat khusus mengenai hubungan antara RIS dan daerah-daerah bagian (Widayati, 2015: 421). Pemerintah RIS pun kemudian merespon dengan mengangkat R. Budiarjo sebagai Residen mulai 18 April 1950, menggantikan Mahsyur Rifai (Nugraha, 2012: 131).

Ditangkapnya Sultan Hamid II menyebabkan Pemerintah DIKB kurang memiliki legitimasi politik. R. Budiarjo bukan memimpin atas nama Pemerintah DIKB, ia dikirim sebagai kepanjangan

tangan pusat. R. Budiarto diberikan kekuasaan-kekuasaan federal hingga terpilihnya Dewan yang baru dan pemilihan tentang bergabung atau tidaknya DIKB pada RI (*Kalimantan Berjuang*, 31 Maret 1950). Cepat atau lambat R. Budiarto juga akan kembali ditimpali dengan jabatan Kepala Daerah.

Pada dasarnya DKB siap menjalin kerjasama dengan Pemerintah RIS atas dasar federasi. Akan tetapi tekanan rakyat dan pergolakan politik terus menuntut dibubarkannya DIKB serta keadaan ekonomi yang tidak kunjung membaik. Maka pada 7 Mei 1950, lewat sebuah sidang akhirnya Badan Pemerintahan Harian (BPH) menyatakan pembubaran dirinya (Abubakar et al., 2019: 142). Seluruh kewenangan pemerintahan dan dewan eksekutif akan dilimpahkan ke pemerintahan RIS sesuai ketentuan konstitusi (*Nieuwe Courant*, 12 Mei 1950).

Fungsi-fungsi eksekutif pada DIKB secara teknis dapat dikatakan sudah tidak eksis lagi. Pembubaran 7 Mei 1950 tersebut, dilandasi dua surat keputusan sidang, yakni Nomor 234/R dan 235/R. Isinya berturut-turut, BPH dan Pelaksana Sementara Kepala DIKB, menyerahkan segala hak dan kekuasaannya kepada Pemerintah RIS yang diwakili oleh seorang Pejabat yang berpangkat Residen. Lebih lanjut lagi mulai tanggal 10 Mei 1950, DIKB yang berdiri berdasarkan Keputusan DKB Nomor 179/DW tertanggal 22 September 1947 dinyatakan tidak berlaku lagi (dihapuskan). Pada 24 Mei 1950 Menteri Dalam Negeri RIS kembali mengeluarkan Surat Keputusan No. B.Z.17/2/47, menetapkan bahwa segala hak dan kewajiban yang sudah tidak dapat dijalankan lagi oleh Pemerintah DIKB dan alat-alat perlengkapannya yang diserahkan oleh swapraja, untuk sementara dijalankan oleh seorang Residen berkedudukan di Pontianak (Aju, 2017: 71).

Dengan demikian Kalimantan Barat tinggal selangkah lagi agar bergabung ke dalam RI. Pemerintah RIS dan Pemerintah

RI sebenarnya merencanakan diadakannya suatu konferensi untuk membicarakan tentang pembentukan negara kesatuan yang dimulai pada 16 Mei 1950 (*Java Bode*, 10 Mei 1950). Konferensi menghasilkan komunikasi bersama antara PM. Mohammad Hatta mewakili RIS dan PM. Abdul Halim mewakili RI pada 19 Mei 1950 yang menyepakati pembentukan negara kesatuan (*Nieuwe Courant*, 20 Mei, 1950).

Di bidang keamanan, kondisi Kalimantan Barat yang mulai kondusif dari ketegangan politik berpengaruh positif pada reorganisasi tentara dalam rangka pembentukan APRIS. Sekitar pertengahan bulan Maret 1950, Komando Sub Teritorium Militer I Kalimantan Barat kembali diperkuat satu Kompi Pancasila pimpinan Kapten S. Harjojo dari Divisi Diponegoro (Jawa Tengah). Pada 9 April 1950 kembali diperkuat satu Batalyon Pagarruyung pimpinan Mayor Mustafa Kamal dari Sumatera Barat. Fusi tentara KNIL dan TNI dalam membentuk APRIS semakin menunjukkan perkembangan yang baik. Pada 7 Juni 1950, Komandan KNIL di Kalimantan Barat menyerahkan pasukannya untuk bergabung ke dalam APRIS, antara lain: satu kompi KNIL di Sintang, Ketapang, Sambas, dan Singkawang, serta 1 kompi tentara federal di Pontianak (Staf Semdam XII, 1970: 141).

Kalimantan Barat akhirnya resmi bergabung ke dalam RI seiring penghapusan RIS. Pada 17 Agustus 1950 di Jakarta, Presiden Sukarno memproklamasikan pengembalian bentuk Indonesia menjadi negara kesatuan. Presiden mengharapkan dengan kembalinya ke bentuk kesatuan diharapkan stabilitas dapat tercipta di Indonesia (*Nieuwsblad voor Indonesie*, 18 Agustus, 1950).

Pendirian DIKB sedari awal sebelum berdirinya RIS (1947), memang cukup kontroversial. Diiringi berbagai pro-kontra di lingkungan masyarakat maupun di pihak-pihak yang memiliki kekuatan

politik. Masyarakat, memandang bahwa DIKB sebagai warisan pemerintahan kolonial yang tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan yang telah dicapai. Sebaliknya, pihak raja-raja ingin tetap mempertahankan kekuasaannya (Alqadrie & Sastrowardoyo, 1984: 88).

Bubarnya DIKB merupakan salah satu contoh kegagalan Indonesia menerapkan sistem federalisme kala itu. Dari sisi perimbangan politik, kegagalan ini sebenarnya telah diprediksi sejak penetapan susunan Kabinet Hatta pada 20 Desember 1949 yang tetap didominasi oleh tokoh republik. Sementara dari sisi keamanan, negara-negara bagian atau daerah seperti Negara Pasundan diklaim tidak dapat menjamin keamanan dan ketentraman rakyat (Rinardi, 2012: 183-184). Sehingga hal ini berpengaruh pada stabilitas nasional. Munculnya pemberontakan-pemberontakan seperti di Bandung, Makassar, Ambon, dan juga pemogokan umum di Pontianak menjadi bukti konkrit gagalnya negara bagian/daerah menciptakan kondusivitas.

D. PENUTUP

Dari pembahasan di atas dapat ditarik sejumlah kesimpulan. *Pertama*, di sekitar KMB friksi antara kaum republikan dalam GAPI dengan kelompok federalis di DIKB berhasil direduksi. GAPI menerima isi KMB sebagai realita perjuangan dan tetap memperjuangkan agar Kalimantan Barat berintegrasi ke RI. Untuk lebih memantapkan misi, dibentuk Komite Nasional Kalimantan Barat (KNKB). Sebagai usaha pertamanya, utusan KNKB berangkat ke Jakarta pada 25 Desember 1949 untuk meminta TNI segera mengambil alih keamanan di wilayah ini.

Kedua, kedatangan TNI untuk mengambil alih keamanan memicu krisis politik. Kepala DIKB merasa kehadiran TNI belum diperlukan karena pasukan KNIL yang ada sudah cukup. Akibatnya terjadi demonstrasi yang menuntut diterimanya TNI dan dibubarkannya DIKB. Puncak krisis politik terjadi pada 4

Maret 1950, aparat menangkap pemimpin KNKB dan menindak represif massa yang hendak mengadakan rapat raksasa dan menuntut pembubaran DIKB. Akibatnya, pada 6 Maret 1950 KNKB mengajak mogok massal pekerja yang diikuti oleh rakyat. Pemogokan ini menyebabkan lumpuhnya aktivitas ekonomi.

Ketiga, upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan krisis politik secara umum dilakukan melalui perundingan. Lewat mediasi dari Komisaris Umum RIS dan DPR-RIS, pada 18 Maret 1950, KNKB dan DIKB setuju untuk mengakhiri pemogokan dan membentuk Badan Pertimbangan sebagai lembaga transisi pemerintahan dan jalan tengah mengakhiri konflik. Akan tetapi, ditangkapnya Sultan Hamid II pada 5 April 1950 mendorong perubahan konstelasi politik ke arah proses likuidasi DIKB. Pemerintah RIS mengirimkan R. Budiarto untuk menjadi Residen Kalimantan Barat. Pada 7 Mei 1950 lewat surat 234/R dan 235/R, DIKB mengeluarkan keputusan bahwa Badan Pemerintahan Harian dan *acting* Kepala Daerah DIKB menyerahkan hak dan kekuasaannya kepada Residen Kalimantan Barat, serta mulai tanggal 10 Mei 1950 DIKB dinyatakan dibubarkan. Kalimantan Barat resmi berintegrasi ke RI pada 17 Agustus 1950 seiring penghapusan RIS.

DAFTAR SUMBER

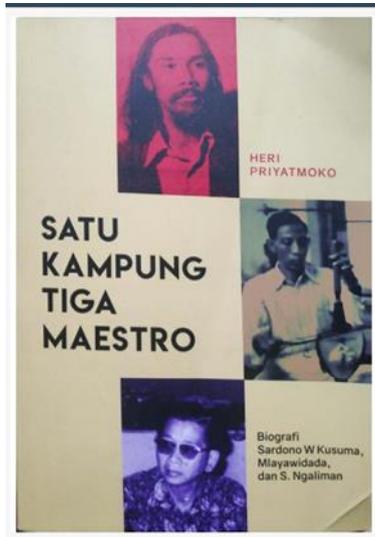
- Abbas, I. (2014). Memahami Metodologi Sejarah Antara Teori dan Praktek *. In *Jurnal ETNOHISTORI* (Vol. 1, Issue 1). <http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/848669>
- Abubakar, A., Krisdiana, R., Usman, S. D., Andi, U. F., Wibawa, M. A., & Akbar, A. (2019). *Menegakkan Kedaulatan dan Ketahanan Ekonomi: Bank Indonesia Dalam Pusaran Sejarah Kalimantan Barat* (Nawiyanto (ed.)). BI Institute.
- Agung, I. A. A. G. (1994). *Pernyataan Rum-Van Roijen 7 Mei 1949*. Yayasan Pustaka Nusantara-Sebelas Maret University Press.

- Ahok, P., Ismail, S., & Tjitrodarjono, W. (1992). *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 - 1949) Daerah Kalimantan Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. https://pustaka.kebudayaan.kemdikbud.go.id/index.php?p=show_detail&id=1524&keywords=
- Aju. (2017a). *J.C. Oevaang Oeray: Dari Federasi ke NKRI*. Derwati Press.
- Aju. (2017b). *Kalimantan Barat: Lintasan Sejarah dan Pembangunan dari Era Kolonial Belanda-Tahun 2013*. Derwati Press.
- Alqadrie, S. I., & Sastrowardoyo, P. (1984). *Sejarah Sosial Daerah Kotamadya Pontianak*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. http://pustaka.kebudayaan.kemdikbud.go.id/index.php?p=show_detail&id=2384&keywords=sejarah+sosial+kotamadya+pontianak
- Amir, M. (2010). Dari Federalis Ke Unitaris: Studi Kasus Sulawesi Selatan 1945-1950. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 2(2), 341. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v2i2.22>
- Andi, T. N., & Rahman, R. (2010). *Pemerintahan Kota Pontianak dari Sultan Sampai Walikota*. Komunitas Lentera.
- Anonim. (1947, Mei, 13). West-Borneo-Statuut Getekend. *Het Dagblad*, 4.
- Anonim. (1949, Agustus, 24). Sultan Hamid II ter R.T.C: Indonesie iz Zwaar Ziek. *Het Dagblad*, 2.
- Asfar, D. A. (2005). *Citra Manusia Dalam Novel Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat Karya M. Yanis*. Balai Bahasa Kalimantan Barat.
- Bhakti, I. N., & Mengko, D. M. (2018). Intelejen dan Politik di Indonesia: Tinjauan Sekilas pada Era Soekarno. In I. N. Bhakti, D. M. Mengko, & S. N. Siregar (Eds.), *Intelejen dan Politik Era Soekarno2* (pp. 1–22). LIPI Press.
- Colijn, A. W. (1949, November, 29). Welkom voor S. Hamid. *De Locomotief*, 2.
- Colijn, A. W. (1950, Januari, 18). TNI in Pontianak. *De Locomotief*, 4.
- Darmadi, Y. (2017). 110 Tahun Dokter Mas Soedarso. *Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat*, 2. <https://www.pustaka-bpnbkabar.org/berita/110-tahun-dokter-mas-soedarso>
- Feith, H. (2007). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Equinox.
- Hasanudin. (2016). Politik dan Perdagangan Kolonial Belanda di Pontianak. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 8(2), 203–218. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v8i2.73>
- Hatta, M. (2018). *Menuju Gerbang Kemerdekaan*. Kompas Media.
- Houbolt, J. (1950, Agustus, 18). Vervulling van Nationale aspiraties brengt politieke stabiliteit. *Nieuwsblad Voor Indonesie*, 2.
- Houbolt, J. (1950, April 6). Commentare op Arrestatie van Sultan Hamid II. *Nieuwsblad Voor Indonesie*, 1.
- Huda, N. (2009). *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*. Pustaka Pelajar.
- Joel, H. (1949, November 26). Overdracht, concentratie en hulpverlening. *Java Bode*, 4.
- Joel, H. (1950, Januari, 12). Daerah-hoofd West-Borneo. *Java Bode*, 2.
- Joel, H. (1950, Maret, 10). Staking te Pontianak legt bedrijfsleven lam. *Java Bode*, 4.
- Joel, H. (1950, Mei, 10). Tweehoeksconferentie begint 16 Mei. *Java Bode*, 1.
- Kanumuyoso, B. (2020). *Metode Sejarah*. Direktorat PTLK, Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kanumuyoso, B., Brahmantyo, K., & Irsyam. Tri Wahyuning M. (2020). *Penulisan Sejarah* (A. S. Rizal (ed.)). Direktorat PTLK, Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Klooster, W. S. (1949, September 20). De vlag in Kalimantan. *Het Nieuwsblad*, 4.
- Klooster, W. S. (1950, Januari, 14). Hatta Bezoek Aan Pontianak. *IHet Nieuwsblad*, 4.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Leirissa, R. Z. (2006). *Kekuatan Ketiga Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Pustaka Sejarah.
- Listiana, D., Wijanarko, N. B., Prabowo, R. D., & Ratmanto, A. (2015). *Melawan Arus: Membaca Narasi Baru Sejarah Indonesia* (Ara (ed.)). Atap Buku. https://www.academia.edu/35991217/TR_OPE_BARU_SULTAN_HAMID_II_DI_RANAH_POLITIK_LOKAL
- Mangunwijaya, Y. (1999). *Menuju Republik Indonesia Serika*. PT. Gramedia Pustaka.
- Mierop, A. H. F. (1949, Desember, 24). Delegation naar Nederland. *Nieuwe Courant*, 4.
- Mierop, A. H. F. (1950, Mei, 20). Essentialia RI-grondwet en het goede van de RIS. *Nieuwe Courant*, 4.
- Mierop, A. H. F. (1950, Maret, 15). Pontianak geisoleerd. *Nieuwe Courant*, 4.
- Mierop, A. H. F. (1950, Mei, 10). West-Borneo. *Nieuwe Courant*, 4.
- Nugraha, D. P. (2012). *Partai Politik Lokal di Indonesia (Analisis Kedudukan Dan Fungsi Partai Politik Lokal 1955-2011)*. Universitas Indonesia.
- Persatuan Djaksa-Djaksa Seluruh Indonesia (Persadja). (1955). *Process Peristiwa Sultan Hamid II*. Penerbit Djakarta.
- Putro, W. S. (2018). Konferensi Inter-Indonesia Tahun 1949: Wujud Konsensus Nasional antara Republik Indonesia dengan Bijeenkomst voor Federaal Overleg. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 3(1), 34. <https://doi.org/10.14710/jscsl.v3i1.17341>
- Rahmayani, A. (2013). Industri Keramik Tradisional Cina Di Sakkok, Singkawang 1933-2000. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 5(2), 217. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v5i2.133>
- Rinardi, H. (2012). Dari RIS Menjadi Negara RI: Perubahan Bentuk Negara Indonesia Pada Tahun 1950. *MOZAIK: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 12(2), 92–209.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1985). *30 Tahun Indonesia Merdeka: 1950-1964*. PT. Citra Lamtoro Agung Persada.
- Soedarto. (1989). *Naskah Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908-1950*. Pemerintah Daerah Tk.II Kalimantan Barat.
- Soedarto., Adhisidharto, W., & Sugeng. (1978). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Staf Semdam XII. (1970). *Tandjungpura Berjuang: Sejarah Kodam XII/Tandjungpura*. Pontianak. Yayasan Tanjungpura.
- Tanasaldy, T. (2014). *Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia Dayak Politics of West Kalimantan*. KITLV.
- Teunis, A. (1950, Maret, 9). Staking in West-Borneo. *De Locomotief*, 4.
- Teunis, A. (1950, April 18). West-Borneo is Opgeheven. *De Locomotief*, 1.
- Turiman. (2013). Analisis Semiotika Hukum Terhadap Lambangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 43(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol43.no3.1495>
- Usman, S. D. (2018). *Di Bawah Lambaian Sang Merah Putih: Kisah Revolusi Kalimantan Barat 1945-1950*. Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kalimantan Barat.
- Utami, D. (2004). *Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) 20 Desember 1949-6 September 1950* [Universitas Sanata Dharma]. <https://repository.usd.ac.id/25949/>
- Utami, S. R. (2018). *Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1949*. Derwati Press.
- Vinsensius. (2015). *Sultan Hamid II Berwajah Ganda Dalam Karier Politikanya di Indonesia* [Universitas Sanata Dharma]. <https://repository.usd.ac.id/2748/>

- Wajidi, W. (2015). Eksistensi Partai Indonesia Raya (Parindra) Di Kalimantan Selatan, 1935-1942. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 7(1), 17. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v7i1.80>
- Widayati, W. (2015). Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 415. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.415-424>
- Yanis, M. (1998). *Djampea: Novel Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat*. Dewan Kesenian Kalimantan Barat dan Badan Penerbit Universitas Tanjungpura.
- Zamzam, Z. (1950, Maret, 31). Residen buat Kalimantan Barat. *Kalimantan Berdjung*, 1.

Tinjauan Buku



Judul Buku : *Satu Kampung Tiga Maestro: Sardono W. Kusuma, Mlayawidada, S. Ngaliman*
 Penulis : Heri Priyatmoko
 Penerbit : Buku Katta & Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 Tahun : 2020
 Halaman : X + 254 Halaman

Satu Kampung Tiga Maestro: Jejak Warisan Budaya di Kota Bengawan

Zurab Pololikashvili selaku ketua *World Tourism Organization* (UNWTO) pada tahun 2018 mengatakan bahwa warisan budaya menceritakan kepada kita yang hidup pada hari ini, mengenai kisah tentang manusia. Kisah ini tergambar dalam berbagai bentuk peninggalan (*legacy*) yang dapat berupa monumen hingga beragam jenis keunikan ekspresi budaya. E. Potter dan E. A. Modlin, Jr mengatakan bahwa warisan budaya merupakan wujud (benda maupun tak benda) dari rangkaian memori sosial manusia, baik individu maupun kelompok, yang menunjukkan identitas ataupun dapat memberikan identifikasi pada keunikan ataupun kekhasan pengetahuan maupun budaya, serta pengalaman pada masa lalu (Potter dan Modlin dalam Hanna, Porter, Modlin, Carter, dan Butler (*eds.*), 2015: 4; World Tourism Organization (UNWTO), 2018: i). Konsepsi mengenai warisan budaya pada masa kontemporer saat ini juga telah mempertimbangkan berbagai bentuk kajian-kajian etnografi dan antropologi yang memberikan kesadaran terhadap perlindungan ekspresi, representasi, dan manifestasi kebudayaan individu maupun kelompok (World Tourism Organization (UNWTO), 2018: 19).

Melalui buku “Satu Kampung Tiga Maestro”, Heri Priyatmoko (2020) menawarkan satu ulasan menarik mengenai jejak warisan budaya di Kota Surakarta (Solo) dalam fragmen kehidupan para seniman tradisi di Kampung Kemlayan. Heri menghadirkan sebuah gambaran pemukiman menarik yang berada di pusat Kota Solo, yang tidak saja menjadi hunian, namun lebih dalam dari itu, Kampung Kemlayan merupakan padepokan sekaligus ruang ekspresi para seniman yang jejak sejarahnya dapat ditelusuri hingga periode awal renaissance budaya Jawa di Surakarta pada akhir abad ke-18. Pada tulisan di bukunya ini Heri tidak saja menghadirkan memori tentang Kampung Kemlayan yang dikenal pula sebagai *Kampung Gamelan* atau *Kampung Karawitan*, namun Heri menghadirkan sosok-sosok yang tumbuh dari sejak menjalani proses *nyantrik* hingga menjadi begawan-begawan seni yang adiluhung baik di Surakarta maupun Tanah Air. Heri menghadirkan

tiga sosok begawan seni dalam Budaya Jawa maupun Budaya Indonesia yaitu Sardono W. Kusuma, Mlayawidada, dan S. Ngaliman.

Putu Agustiananda (2012) dalam artikelnya mengenai pelestarian budaya di Kota Surakarta mengatakan bahwa warisan budaya di kota ini tidak hanya berupa monumen atau bangunan bersejarah, namun seluruh aspek morfologi perkotaan di Surakarta merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilestarikan. Kampung sebagai bagian dari morfologi urban dapat memiliki nilai historis maupun kultural yang kemudian juga dapat dikembangkan sebagai kawasan budaya (*heritage*). Putu Agustiananda selanjutnya mengatakan bahwa di Kota Surakarta terdapat enam kategori kawasan cagar budaya yakni: 1) area atau distrik; 2) bangunan tradisional; 3) bangunan kolonial; 4) bangunan keagaamaan; 5) fasilitas umum dan penunjang kawasan kota; serta 6) taman dan ruang terbuka publik. Upaya dalam membangun pemahaman terhadap pentingnya nilai warisan budaya terhadap suatu objek material di suatu kawasan urban adalah dengan melakukan reproduksi memori melalui penyusunan narasi tentang objek tersebut di masa lampau dan pemanfaatannya dalam membentuk karakteristik identitas perkotaan pada masa kini. Persepsi terhadap kategorisasi cagar budaya di Surakarta sebagaimana yang telah disusun oleh Putu Agustiananda akan semakin kuat apabila turut pula disusun narasi pelengkap yang dapat menceritakan kisah mengenai objek material tersebut. Pada tataran inilah kemudian E. Potter dan E.A. Modlin Jr. menegaskan mengenai reproduksi memori pada suatu objek cagar budaya hendaknya perlu dilakukan agar terjalin narasi antara objek materi dengan pengalaman historis yang terbentuk di ruang atau objek material tersebut (Agustiananda, 2012: 28-29; Potter dan Modlin dalam Hanna, Porter, Modlin, Carter, dan Butler (*eds.*), 2015: 5).

Proses reproduksi memori tentang Kampung Kemlayan inilah yang hendak disampaikan oleh Heri Priyamoko (2020) dalam bukunya. Buku yang terdiri dari enam bab ini menawarkan empat kisah menarik yakni tentang ekologi budaya di Kampung Kemlayan dan mengenai individu-individu yang berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas Kampung Kemlayan sebagai kampung Seni Karawitan Jawa. Proses reproduksi memori Kampung Kemlayan dikisahkan oleh Heri Priyatmoko di dalam bab kedua buku ini. Pada bab ini Heri bercerita mengenai ekosistem budaya di Kampung Kemlayan yang khas sebagai kampung para seniman penabuh gamelan sejak masa pemerintahan Sunan Pakubuwono IV dari Surakarta yang bertahta sejak 1768 hingga 1820. Pada bagian ini Heri bercerita mengenai formasi sejarah di Kampung Kemlayan beserta dengan dinamika dari rangkaian peristiwa yang terjadi di kampung ini.

Heri melihat bahwa telah terjadi konvergensi antara lingkungan Kampung Kemlayan dengan munculnya para individu seniman yang kemudian dapat tumbuh hingga menjadi begawan-begawan seni terkemuka. Suasana kampung yang selalu semarak dengan tabuhan gamelan telah membentuk anak-anak di Kemlayan untuk mengakrabi seni sejak usia dini. Proses regenerasi yang berlangsung sejak akhir abad ke-18 telah menciptakan identitas bagi masyarakat di kampung ini. Heri menunjukkan beragam realitas sosial yang menggambarkan bahwa telah terjadi proses berkesenian yang telah berlangsung secara berkelanjutan selama beberapa generasi. Kampung Kemlayan meskipun lekat dengan jejak feodalisme karena para seniman-seniman karawitan ini pada masa sebelum kemerdekaan merupakan para *abdi dalem* sekaligus priayi, namun mampu menghadirkan keragaman budaya yang lebih egaliter. Dengan keragaman budaya yang lebih egaliter itu, mereka mampu bersinergi untuk menghasilkan bentuk kesenian sesuai dengan permintaan dari budaya massa yang berkembang pada masa sesudah kemerdekaan di Surakarta.

Gambaran yang disampaikan oleh Heri pada bab kedua inilah yang kiranya menunjukkan bahwa Kemlayan bukan sekedar kampung hunian semata. Proses reproduksi memori terhadap beragam aspek sosial dan budaya yang disajikan oleh Heri juga menjadi modal penting bagi upaya pelestarian Kampung Kemlayan sebagai salah satu cagar budaya di Kota Surakarta. Seni yang berkembang di Kampung Kemlayan tidak lantas berhenti seiring dengan memudarnya konsumsi *langgam* Jawa pada masyarakat saat ini. Kemlayan rupanya pada saat ini tidak lantas bertransformasi mengikuti arus budaya massa, namun melalui kehadiran kembali sosok maestro tari Sardono W. Kusumo, Kemlayan tetap menghadirkan bentuk budaya yang adiluhung berpendar dari panggung dan studio tari milik Sardono W, Kusumo. Identitas sebagai kampung budaya dan seniman masih melekat hingga kini, tentu tidak berlebihan bahwa kemudian Heri menyebut bahwa Kemlayan merupakan salah satu pilar budaya Surakarta. Alasan inilah yang kerap membuat Heri yang juga merupakan salah satu penggiat di komunitas pencinta sejarah dan budaya di Kota Solo, yaitu *Solo Societies* kerap mengajak anak muda untuk datang, singgah, dan mendengarkan dongeng tentang Kemlayan. Memori sosial ini hadir tidak saja dalam bentuk material jejak budaya, namun juga hadir dalam narasi, tabuhan gamelan, dan gerak tari yang masih kerap ditemui di kampung itu.

Pada bab tiga dalam bukunya, Heri mengajak pembaca untuk masuk ke dalam ruang semesta begawan tari Sardono W. Kusumo. Menampilkan sosok-sosok budayawan dan seniman seperti Sardono, Mlayawidada, dan S. Ngaliman dalam pembahasannya mengenai Kemlayan, memberikan penguatan terhadap narasi memori sosial tentang keberadaan Kemlayan sebagai esensi penting dalam pembahasan mengenai situs warisan budaya di Kota Bengawan. Membahas mengenai situs budaya hendaknya tidak saja melihatnya dalam esensi ruang dan materi. E. Potter dan E.A. Modlin Jr. sekali lagi memberikan suatu gambaran bahwa bagaimana kehadiran dan pengalaman individu yang berada di dalam ruang ataupun situs budaya akan memberikan suatu nilai dan pemahaman yang lebih luas mengenai arti dan esensi makna terhadap objek warisan budaya tersebut kepada para pengunjung yang singgah (Potter dan Modlin dalam Hanna, Porter, Modlin, Carter, dan Butler (*eds.*), 2015: 5).

Sardono W. Kusumo yang dipaparkan oleh Heri dalam bab ketiganya ini merupakan sosok Sardono yang telah kembali pulang ke Kemlayan dari perjalanannya yang panjang dalam berkesenian. Sardono di dalam catatan Heri ini hendak menghidupkan kembali kehidupan berkesenian di Surakarta yang ia mulai dari studio tarinya di Kemlayan. Sardono ingin menghidupkan kembali gairah berkesenian di Surakarta seperti pada masa Sunan Pakubuwono X dan Pangeran Mangkunegara VII, ketika Surakarta masyhur sebagai pusat kebudayaan Jawa. Melalui Kemlayan, Sardono hendak menghidupkan kembali ruang-ruang sejarah di Kota Surakarta yang telah ditinggalkan untuk kembali lestari sebagai ruang publik dan berkesenian. Pengalaman panjang Sardono yang mulai belajar menari dari alunan tabuhan gamelan di Kemlayan hingga menjadi Guru Besar di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) menjadi modal utama dalam menghidupkan kembali Solo sebagai *The Spirit of Java*. Melalui upaya yang dilakukan oleh Sardono serta para pemerhati dan pelaku budaya di Kota Solo, Kampung Kemlayan kembali dihidupkan melalui berbagai narasi memori sosial dan budaya, serta menjadi ruang ekspresi berkesenian. Kampung Kemlayan oleh Sardono dan rekan-rekan tetap dipertahankan sebagai kampung para seniman meski para seniman-seniman karawitan yang bermukim di Kemlayan kini mulai hilang, namun keberadaan studio Sardono dan aktifitas berkesenian yang dilakukan oleh murid-muridnya tetap berlangsung. Hal inilah kiranya yang diharapkan kembali bahwa di Kemlayan dapat melahirkan kembali para maestro-maestro seni terkemuka di Indonesia.

Pada bab keempat dan kelima, Heri bercerita tentang Mlayawidada dan S. Ngaliman. Kedua maestro dalam seni karawitan dan seni tari ini dianggap sebagai begawan terakhir yang menyemarakkan kehidupan berkesenian di Kraton Surakarta Hadiningrat maupun Kota Solo. Kedua seniman ini berada pada fase peralihan sejarah dari masa Kasunanan Surakarta ke masa Republik Indonesia yang merdeka. Mereka kini tidak hanya mencari nafkah di lingkungan keraton, namun juga turut berkarya dalam ruang publik yang lebih luas baik di panggung hingga studio RRI dan TVRI. Pembahasan Heri mengenai kedua tokoh ini memberikan suatu perspektif menarik dalam masa-masa awal kemerdekaan. Heri menghadirkan kisah tentang bagaimana para seniman ini harus berjuang untuk bertahan dengan kemampuan kesenian yang mereka miliki pada fase-fase yang penuh gejolak; pada masa revolusi hingga dua dekade awal masa kemerdekaan.

Fragmen sejarah mengenai bagaimana seni keraton kemudian berkembang menjadi konsumsi publik secara tidak langsung juga diungkapkan oleh Heri. Melalui apa yang dikisahkan oleh Heri ternyata ada fase yang menarik dalam sejarah kebudayaan di Indonesia tentang bagaimana seni keraton yang adiluhung kemudian mengalami transformasi menjadi budaya massa namun tanpa harus mengubah esensi tradisi (*pakem*) yang menjadi jiwa dari seni tersebut secara revolusioner. Para seniman di Kemlayan rupanya mampu tampil dengan menyesuaikan diri pada perkembangan jaman serta selera masyarakat tanpa harus kehilangan identitas mereka sebagai *empu* budaya tradisi sekaligus seniman-priayi yang terhormat. Melalui buku setebal 254 halaman ini Heri Priyamoko telah menjadikan Kampung Kemlayan sebagai sebuah ruang pusaka (*heritage landscape*) yang kaya akan rangkaian memori sosial dan budaya.

(G. Andika Ariwibowo)

Daftar Pustaka

- Agustiananda, Putu. (2012).
Urban Heritage Conservation in Surakarta, Indonesia: Scenarios and Strategies for the Future. International Journal of Civil & Environmental Engineering IJCEE-IJENS Vol: 12 No: 02. (hlm. 28-35)
- Potter, Amy E. dan Modlin, Jr. E. A. (2015).
Introduction dalam Stephen P. Hanna, Amy E. Potter, E. Arnold Modlin, Jr., Perry Carter, dan David L. Butler. (2015). *Social Memory and Heritage Tourism Methodologies*. New York: Routledge. (hlm. 1-11).
- World Tourism Organization (UNWTO). (2018).
Tourism and Culture Synergies. Madrid: UNWTO

BIODATA PENULIS



Aman dilahirkan di Brebes pada 15 Oktober 1974. Pendidikan terakhir pada program Doktorat (S3) Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Saat ini menjadi dosen di Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Beberapa penelitian yang dihasilkan di antaranya, *Understanding Indonesian History, Interest in Learning History and National Insight with Nationalism Attitude* (International Journal of Evaluation and Research in Education, 2020), *The Implementation Of Authentic Assessment In History Learning At Senior High School*, (International Journal of Social Studies, 2020) dan, *Religious Example of Character Nyi Ageng Serang in 2013 Curriculum*, (2nd International Conference on Social Science and Character Educations (ICoSSCE 2019) THOMSON REUTERS)



Budiawati Supangkat Iskandar dilahirkan di Sydney, 29 Maret 1959. Ia merupakan alumnus S1 Antropologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia; S2 di Postgraduate Social Anthropology Kent University, at Canterbury, UK; dan S3 di Pascasarjana Antropologi Universitas Indonesia Depok. Saat ini menjadi pengajar di S1 dan Pascasarjana Prodi Antropologi, FISIP, Unpad; Selain itu juga menjadi Ketua Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Padjadjaran. Banyak menulis di berbagai jurnal nasional, Internasional dan menulis beberapa buku.



Budi Gustaman dilahirkan di Majalengka, 11 Agustus 1991. Ia merupakan alumnus Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran (2013), dan Pascasarjana Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (2015). Saat ini bekerja sebagai pengajar di Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Beberapa penelitian yang dihasilkan di antaranya: “Sisi Lain Kehidupan Preangerplanters: Dari Perburuan hingga Gagasan Konservasi Satwa Liar” (*Jurnal Patanjala vol.11 No.2 Juni 2019*), “Binatang-Binatang di Sekitar Letusan Krakatau 1883” (*Jurnal Sejarah vol. 2 No. 2 Agustus 2019*), “Antara Mitos dan Realitas: Historisitas Maung di Tatar Sunda” (*Metahumaniora Vol. 9 No.1, July 2019*), “Menelusuri Jejak dan Rupa Spesies Selebritis: Visualisasi Ekspedisi-Ekspedisi Perburuan Varanus Komodoensis 1912-1939” (*Jurnal Sejarah vol. 3 No.2 Desember 2020*)



Eka Prabawati Rum dilahirkan di Wajo 12 Agustus 1987. Ia alumnus Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Makassar pada tahun 2008. Ia lulus Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Pascasarjana Universitas Negeri Makassar pada 2015. Saat ini, Ia melanjutkan Program Doktorat di Pascasarjana Universitas Negeri Makassar sejak tahun 2017. Selain sebagai mahasiswa, saat ini Ia juga bekerja di Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun karya ilmiah yang pernah dipublikasikan adalah “Lecturers’ Approaches to Developing Students’ Interpersonal Communication Skills in Indonesian EFL Classroom” yang dipublikasikan oleh Asian EFL Journal tahun 2020.



Elim Trika Sudarsi dilahirkan di Rantepao (Toraja), 19 Mei 1989. Pada tahun 2012 dia mendapatkan gelar sarjana pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Kristen Indonesia Toraja dan magister pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Negeri Makassar pada tahun 2015. Ia menjadi tenaga pengajar (dosen) pada program studi Pendidikan bahasa Inggris di Universitas Kristen Indonesia Toraja sejak tahun 2012 dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan pada program doktoral di Universitas Negeri Makassar. Beberapa karya ilmiah yang di hasilkan di antaranya: *The effect of lecturers' personality to students' learning motivation* (dipublikasikan pada *ELT Worldwide: Journal of English Language Teaching* 2015), *Code mixing in students' daily conversation at English department of UKI Toraja* 2017, dan *The Philosophy of Tallu Lolona in the Hymns of Passomba Tedong/ ethnography of torajan local wisdom* (dipublikasikan pada *Jurnal Bahasa Indonesia bagi penutur asing JBIPA Sawerigading* pada tahun 2019).



Gregorius Andika Ariwibowo merupakan Peneliti Ahli Muda di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat (BPNB Provinsi Jawa Barat), Direktorat Jenderal Kebudayaan. Menyelesaikan pendidikan Pascasarjana bidang Ilmu Sejarah dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011. Bidang kepakaran yang ditekuni ialah kajian bidang Sejarah Lokal dan Global. Artikel terakhir yang diterbitkan yakni pada tahun 2020 berjudul “Perkembangan *Afdeeling* Teluk Betung pada Masa Kolonial 1857 hingga 1930” di *Jurnal Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya* 21 (3), 35-50.



Iim Imadudin lahir di Karawang, 16 Januari 1975. Meraih gelar Sarjana Sastra (Sejarah Indonesia) pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD tahun 1998 dan Magister Humaniora pada Konsentrasi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UNPAD tahun 2013. Bekerja sebagai Peneliti pada Balai Arkeologi Jawa Barat sejak Agustus 2021. Sebelumnya Peneliti di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat mulai tahun 2005 s.d. 2021, dengan kepakaran Sejarah Kolonial dan Peneliti pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Padang dari tahun 2000 s.d 2005. Karya ilmiah dua tahun terakhir, yaitu: “Kebudayaan Hibrid Masa Kolonial di Perkebunan Batulawang Banjar” (Patanjala, 2019); “30 Tahun BPNB, Pengalaman, Kenangan, Harapan” (Buku, 2019); “Simbol Kuasa dan Nilai Budaya dalam Tinggalan Arkeologi Kolonial di Perkebunan Teh Sedep Kabupaten Bandung” (Patanjala, 2020).



Johan Iskandar dilahirkan di Purwakarta, 7 Agustus 1953. Ia merupakan alumnus S1 di Biologi FMIPA Unpad; S2 di Chiang Mai University, Thailand; and S3 di University of Kent, at Canterbury, UK. Saat ini menjadi pengajar di Prodi Biologi, FMIPA, Unpad; pengajar S2 Program Magister Ilmu Lingkungan (PSMIL) dan Doktor Ilmu Lingkungan (DIL), Pascasarjana Unpad; dan juga peneliti senior di Pusat Unggulan Lingkungan dan Ilmu Keberlanjutan (PULIK)/*Center for Environment and Sustainability Science* (CESS), Unpad. Banyak menulis di berbagai jurnal nasional, internasional, menulis beberapa buku tentang lingkungan, ekologi manusia, serta etnobiologi dan etnoekologi, serta banyak menulis di mediamasa nasional, lokal, dan majalah

Biodata Penulis



Lia Nuralia lahir di Garut, 5 November 1972. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Sastra (Sejarah Indonesia) di Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra UNPAD tahun 1997. Pada tahun 2016 berhasil meraih Magister Humaniora (Arkeologi) pada Program Magister Arkeologi, FIB Universitas Indonesia. Bekerja sebagai Peneliti Madya dengan kepakaran Arkeologi Islam Kolonial, di Balai Arkeologi Jawa Barat dari tahun 2005 sampai sekarang. Sebelumnya bekerja sebagai peneliti pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Padang dari tahun 2000 s.d 2005. Karya ilmiah satu tahun terakhir, yaitu: “Menapak Jejak Budaya Perkebunan Warisan Belanda (Panglejar, Pangheotan, Maswati, Rajamandala)” (Buku, 2020); “Simbol Kuasa dan Nilai Budaya dalam Tinggalan Arkeologi Kolonial di Perkebunan Teh Sedep Kabupaten Bandung” (Patanjala, 2020); “Artefak Kolonial Perkebunan Panglejar, Maswati, Rajamandala Masa Hindia Belanda: Arti dan Arah Sejarah” (Panalungtik, 2020); “Jejak Budaya Austronesia di Kawasan Perkebunan Peninggalan Zaman Hindia Belanda” (Prosiding Balar Jabar, 2020); “Model Rumah dan Kearifan Lokal Rumah Karyawan Perkebunan Zaman Belanda di Bandung Jawa Barat” (Prosiding Puslit Arkenas, 2020).



Markus Deli Girik Allo dilahirkan di Makale 22 Desember 1987. Ia mendapatkan gelar S.Pd. dari UKI Toraja pada tahun 2012 dan M.Pd. dari Universitas Negeri Makassar pada tahun 2015. Saat ini, selain menjadi dosen di UKI Toraja, juga melanjutkan studi S3 pada program studi Pendidikan Bahasa Inggris UNM Makassar. Adapun karya ilmiahnya yang pernah dipublikasikan di antaranya “The coursebook of introduction to prose” (penerbit deepublish, 2019), “The Coursebook of Cross-Cultural Understanding” (penerbit deepublish, 2020), “A Critical Discourse Analysis on Lecturers’ Language Power in EFL Teaching (An Ethnography Study at a Higher Education) dipublikasikan pada Asian EFL Journal tahun 2020, “Intercultural Communication in EFL Classrooms” dipublikasikan pada Ethical Lingua: Journal of Language Teaching and Literature tahun 2018, “Is the online learning good in the midst of Covid-19 Pandemic? The case of EFL learners” dipublikasikan pada Jurnal Sinestesia tahun 2020.



Mohammad Rikaz Prabowo dilahirkan di Pontianak 14 April 1991. Ia merupakan alumni Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada tahun 2015 dan kini tengah melanjutkan studi Magister di program studi yang sama. Saat ini menjadi Guru Sejarah di SMA Negeri 10 Pontianak dan SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Aktif di Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Pengurus Wilayah Kalimantan Barat. Beberapa penelitian yang pernah dihasilkan di antaranya, *Peristiwa Mandor 28 Juni 1944 di Kalimantan Barat: Suatu Pembunuhan Massal di Masa Pendudukan Jepang* (Jurnal Bihari, 2019), *Eksistensi Partai Persatuan Dayak (PPD) Pada Pemilu 1955* (Jurnal Swadesi, 2020) dan, *Kedaulatan Semu: Praktik Pemerintahan Negara dan Daerah Bentukan Belanda 1947-1948* (1st International Conference on History, Social Sciences, and Education, Universitas Negeri Malang, 2021).



Nilma Taula'bi' dilahirkan di Rantepao, 20 Juni 1988. Ia mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris dari UKI Toraja pada tahun 2012. Ia lulus S2 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Makassar pada tahun 2015. Saat ini ia sedang melanjutkan studi pada jenjang S3 pada program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Negeri Makassar. Saat ini ia mengabdikan sebagai pengajar di UKI Toraja. Adapun karya ilmiah yang pernah dihasilkan adalah *Speech Acts of the Lecturers in Teaching English*, *The Impact of Brainstorming Strategies towards Students Writing Skill* and *The Philosophy of Tallu Lolona in the Hymns of Passomba Tedong* (Ethnography of Torajan Local).



Rahman latif Alfian dilahirkan di Pati, 27 September 1991. Ia menempuh pendidikan sarjana pada Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Universitas Negeri Semarang dan lulus program magister pada program studi Ilmu Antropologi di Universitas Padjajaran pada tahun 2018. Saat ini mengabdikan sebagai pengajar di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto atau yang sebelumnya dikenal sebagai IAIN Purwokerto mengampu bidang Antropologi. Beberapa karya yang dipublikasikan dalam tiga tahun terakhir misalnya *Dari Cultural Memory Ke Cultural Identity: Tradisi Nyekar Wong Bakaran, Juwana, Pati, Jawa Tengah* (dipublikasikan di Aceh Anthropological Journal, Vol 2 (2), 2018), *Coffee and Identity: Consume Coffee, Build Identity, Maintain Variety on Palintang Community West Java* (dipublikasikan pada Jurnal Sosiohumaniora, Vol 22 (1), 2020), *Fish species, traders, and trade in traditional market: Case study in Pasar Baru, Balikpapan City, East Kalimantan, Indonesia* (dipublikasikan pada Biodiversitas Journal of Biological Diversity, Vol 21 (1), 2020).

JUDUL ARTIKEL

(font Berlin Sans FB 16, bold, spasi 1. Judul artikel harus mencerminkan inti dari isi tulisan, bersifat spesifik, efektif, dan panjangnya maksimal 11 kata. Judul ditulis dengan huruf kapital tebal)

JUDUL ARTIKEL

*Jika **JUDUL ARTIKEL** di atas menggunakan bahasa Indonesia, **JUDUL ARTIKEL** ini menggunakan bahasa Inggris*
(font Berlin Sans FB 12, italic, spasi 1)

Penulis Pertama¹, Penulis Kedua², Penulis Ketiga³
(Times New Roman 11, Bold, spasi 1, tanpa menyebut gelar)

¹ Lembaga Afiliasi Pertama

Alamat Lembaga Afiliasi Pertama

² Lembaga Afiliasi Kedua

Alamat Lembaga Afiliasi Kedua

³ Lembaga Afiliasi Kedua

Alamat Lembaga Afiliasi Kedua

e-mail: alamat email penulis pertama, kedua, ketiga
(Times New Roman 10, spasi 1, *spacing after* 6 pt)

Abstrak (Times New Roman 10, Bold, Italic, spasi 1, before 0 pt, after 6 pt)

Abstrak diletakkan di bawah email pribadi, ditulis dengan font Times New Roman ukuran 10, italic. Abstrak dan kata kunci harus ditulis dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan Inggris). Abstrak bukan ringkasan, melainkan esensi isi keseluruhan tulisan yang di dalamnya memuat: (1) tujuan penelitian; (2) metode yang digunakan; (3) pernyataan singkat hasil yang diperoleh dari lapangan; (4) kesimpulan. Panjang abstrak antara 100 sampai 150 kata, 1 spasi, dan ditulis dalam bentuk 1 paragraf. Di bawah abstrak dituliskan kata kunci antara 3-5 kata. Kata kunci dapat berupa kata tunggal dan kata majemuk.

Kata kunci: maksimal lima kata atau frasa, diakhiri tanda titik (Times New Roman 10)

Abstract (Times New Roman 10, Bold, italic, spasi 1, before 0 pt, after 6 pt)

Abstract put under the email of author, written in Times New Roman, size 10, italic. Abstract and Keywords must be written in two languages (Indonesian and English). Abstract is a not a summary, but the essence of the entire article that contains: (1) research purposes, (2) the methods that used, (3) a brief statement of the results obtained from the field; (4) conclusion. Abstract length between 100 to 150 words, 1 space, and written in one paragraph. Under the abstract, write down keyword between 3-5 words. Keywords can be single word and compound words.

Keywords: not more than five words or phrase (Times New Roman 10)

(Body text setelah abstrak diformat dalam dua kolom dengan ketentuan lebar tiap-tiap kolom 2.66” [inci] dan jarak antarkolom 0.2” [inci])

A. PENDAHULUAN (jenis huruf permasalah, tinjauan pustaka, teori, Albertus Extra Bold ukuran 10) konsep-konsep, tujuan, dan ruang lingkup (materi dan wilayah). Tinjauan pustaka tidak sekadar menilai isi buku, tetapi apa yang membedakan artikel penulis dengan

Pendahuluan ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 11, spasi 1. Pendahuluan memuat latar belakang,

kajian terdahulu. Unsur-unsur dalam pendahuluan tersebut tidak perlu dieksplicitkan dalam subbab tersendiri. Paragraf pertama ditulis rata kiri, lurus dengan judul bab.

Paragraf berikutnya menjorok satu *tab*.

B. METODE PENELITIAN

(**Albertus Extra Bold 10**)

Metode penelitian ditulis dengan menggunakan font *Times New Roman* 11, spasi 1. Metode penelitian memuat metode yang digunakan dan proses penelitian. Metode berisi macam atau sifat penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, prosedur pengumpulan data dan analisis data. Paragraf pertama ditulis rata kiri, lurus dengan judul bab.

Paragraf berikutnya menjorok satu *tab*.

C. HASIL DAN BAHASAN

(**Albertus Extra Bold 10**)

Hasil dan Bahasan ditulis dengan menggunakan font *Times New Roman* 11, spasi 1. Hasil dan bahasan, memuat uraian data hasil lapangan dan analisisnya. Paragraf pertama ditulis rata kiri, lurus dengan judul bab.

Paragraf berikutnya menjorok satu *tab*.

1. Subbab (Albertus Extra Bold 10)

Subbab menggunakan angka: 1, 2, 3, selanjutnya sub-subbab menggunakan a, b, c, d dan seterusnya.

2. Acuan Sumber

Acuan sumber yang digunakan harus dicantumkan di dalam teks. Perujukan atau pengutipan teks menggunakan gaya APA (*American Psychological Association*), contoh (Barth, 2001). Barth (2001) mengatakan bahwa....

Pengutipan langsung dari teks sumber lebih dari tiga baris ditulis dalam paragraf sendiri. Identitation left 1 cm/satu *tab*, right 0 cm. Sumber rujukan ditulis sebagai berikut (Barth, 2001: 19-20).

Catatan kaki (*footnote*) dapat digunakan jika diperlukan untuk memberikan informasi tambahan di luar konteks yang diuraikan dalam paragraf.

3. Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung dapat berupa gambar, foto, grafik, bagan, dan tabel. Penyajian instrumen pendukung dimaksudkan sebagai sarana informasi dalam melengkapi dan mendukung deskripsi tulisan. Semua unsur dalam instrumen pendukung harus dapat terbaca dengan jelas.

a. Instrumen Foto

Untuk instrumen pendukung berupa foto, keterangan dan sumber dicantumkan di bagian bawah foto. Penulisannya menggunakan huruf kapital di awal judul, *Times New Roman* 10.

Contoh foto:



Gambar 5. *Piduduk*
Sumber: Wajidi, 2014.

b. Instrumen Tabel

Untuk instrumen pendukung berupa tabel, judul tabel dicantumkan di atas tabel dengan huruf *Times New Roman* 11. Adapun sumber tabel dicantumkan di bagian bawah tabel. Tabel hanya menggunakan garis horizontal.

Contoh Tabel:

Tabel 1. Jumlah Perusahaan Industri dan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung

Tahun	Industri Besar	
	Industri	Tenaga kerja
1984	74	10.258
1985	74	10.258
1986	76	11.925

Sumber: Bappeda Tk.I Lampung, 1992.

D. PENUTUP (Albertus Extra Bold 10, spasi 1)

Penutup ditulis dengan menggunakan font *Times New Roman* 11, spasi 1. Penutup, memuat simpulan (menjawab rumusan masalah yang dikemukakan dalam bab pendahuluan) dan saran. Paragraf pertama ditulis rata kiri, lurus dengan judul bab.

Paragraf berikutnya menjorok satu *tab*.

UCAPAN TERIMA KASIH (Albertus Extra Bold 10, spasi 1)

Ucapan terima kasih tidak wajib dicantumkan dalam teks. Ucapan terima kasih ditulis dengan menggunakan font *Times New Roman* 11, spasi 1. Ucapan terima kasih ditujukan kepada pihak atau institusi yang secara signifikan membantu penelitian. Dalam hal ini dinyatakan nama, tempat kerja, dan jenis bantuan yang diberikan. Paragraf pertama ditulis rata kiri, lurus dengan judul bab.

Paragraf berikutnya menjorok satu *tab*.

DAFTAR SUMBER

(Albertus Extra Bold 10, spasi 1)

Jumlah acuan sumber minimal sepuluh, terdiri atas 80 persen sumber primer (antara lain: jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian) dan 20 persen sumber sekunder (buku, surat kabar, majalah, website). **Wikipedia, blog pribadi**, ataupun website non-ilmiah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai sumber rujukan utama.

Penulis diwajibkan menggunakan lima sumber terbaru (sepuluh tahun terakhir). Derajat kebaruan tulisan yang diacu dengan melihat proporsi terbitan mutakhir merupakan tolok ukur mutu berkala ilmiah yang penting. Hal tersebut merupakan bagian dari *state of the art* dan kebaruan temuan bagi ilmu (*novelties, new to science*).

Penulisan daftar sumber menggunakan huruf *Times New Roman*, Ukuran 10. Daftar sumber disusun mengikuti aturan teknis *APA (American Psychological Association) Style*. Penulis dapat menggunakan program manajemen referensi seperti Mendeley, Zotero, dan EndNote.

Format penulisan:

1. **Artikel Jurnal:** Penulis. (tahun). Judul artikel. *Nama Jurnal*, volume (nomor/edisi), halaman.

Contoh:

Bardis, Panos. (1979). Social Interaction and Social Processes. *Social Science*, 54 (3), 147-167.

Bhurga, Dinesh., dan Becker, Matthew. (2005). Migration, cultural bereavement and cultural identity. *World Psychiatry*, 4 (1), 18-24.

Burawoy, Michael. (1998). The Extende Case Method. *Sociological Theory*. 16 (1), 4-33.

2. **Buku:** Penulis. (tahun). *Judul buku*. Kota/negara: Penerbit.

Contoh:

Barth. Fredrick. (2001). *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: UI Press.

Chatman, Seymour. (1980). *Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film*. United States of America: Cornell University.

Clark, Marshall. (2010). *Maskulinitas: Culture, Gender, and Politics in Indonesia*. Australia: Monash University.

3. **Bagian dari buku:** Penulis. (tahun). Judul tulisan. Dalam nama editor (Ed.), *Judul buku* (halaman). Kota/negara: Penerbit.

Contoh:

- Chapman, Rowena. (2014). *Penipu Ulung: Variasi Tema Laki-laki Baru*. Dalam Rowena Chapman dan Jonathan Rutherford (Ed.), *Male Order: Menguak Maskulinitas* (hlm. 151-165). Yogyakarta: Jalasutra.
- Hatley, B. (2008). Postkolonialitas dan perempuan dalam sastra Indonesia modern. Dalam Foulcher, K. & Day, T. (Ed.), *Sastra Indonesia modern kritik postkolonial* (hlm. 226-259). (Toer, K.S. & Soesman, M., penerjemah). (Edisi revisi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & KITLV-Jakarta. (karya asli pertama terbit tahun 2000).
4. **Prosiding:** Penulis. (tahun). Judul. Dalam nama editor (Ed.), *Judul prosiding* (halaman). Kota, Negara: Penerbit.
Contoh:
- Sungkowati, Y. (2010). *Persoalan lingkungan hidup dan urbanisasi dalam beberapa cerpen Indonesia*. Prosiding Konferensi Internasional Kesusasteraan XXI HISKI *Sastra dan Budaya Urban dalam Kajian Lintas Media*, 78-90. Surabaya: Airlangga University Press.
5. **Artikel surat kabar:** Penulis. (tahun, bulan, tanggal). Judul artikel. *Nama surat kabar*, halaman.
Contoh:
- Abdalla, Ulil Abshar (2000, Agustus). *Serat Centhini, Sinkretisme Islam dan Dunia Jawa*. Kompas, hlm. 27.
6. **Website:** Penulis. (tahun). Judul. Diakses pada tanggal, tahun, dari alamat URL.
Contoh:
- Hardjasaputra, A. Sobana. (2011). *Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi di Priangan 1870-1906*, diakses 24 April 2012, dari <http://resources.unpad.ac.id>.
7. **Makalah yang tidak diterbitkan:** Penulis. (tahun). Judul. Dalam *acara atau seminar tertentu, tanggal dan tahun*. Kota/negara.
Contoh:
- Rahayu, Ruth Indiah. (2005). *Militerisme Orde Baru dan Ideologi Koncowingking: Penguatan Ideologi Perempuan Indonesia Secara Pemaknaan Ksatria Jawa*. Makalah dalam *Konferensi Warisan Otoritarian di Indonesia*, 1-15. Yogyakarta: Sanata Dharma.
8. **Skripsi, Tesis, disertasi:** Penulis. (tahun). *Judul*. Nama Universitas.
Contoh:
- Budiman, Hary Ganjar. (2010). *Taman Kota di Bandung (1885-1945)*. Skripsi Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.
9. **Laporan penelitian:** Penulis. (tahun). Laporan penelitian: *Judul*. Kota: Instansi yang menerbitkan/penerbit.
Contoh:
- Erwantoro, Heru., Nina Merlina, Risa Nopianti, Hary Ganjar Budiman. (2016). Laporan penelitian: *Sejarah Perkembangan Masyarakat Tugu di Jakarta Utara*. Bandung: Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
10. **Wawancara:** Informan/narasumber. (tahun, tanggal). Jenis wawancara [email, telepon, wawancara langsung].
Contoh:
- Kherustika, Zuraida (26 November 2012). *Wawancara*.

Catatan yang harus diperhatikan penulis:

- Dewan redaksi Patanjala menerima artikel **hasil penelitian** dengan tema sejarah dan pelestarian budaya/nilai budaya dalam tradisi, kepercayaan, kesenian, dan film. Tema-tema tersebut terkait dengan disiplin ilmu antropologi, seni, sastra, kajian budaya, dan ilmu sejarah.
- Artikel yang dikirimkan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Artikel juga tidak sedang diajukan kepada jurnal lain, selain Patanjala.
- Judul, abstrak dan kata kunci harus ditulis dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).
- Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia **atau** bahasa Inggris dan titik 1 spasi. Artikel terdiri dari 16 halaman (termasuk daftar sumber) pada kertas

A4, dengan ketentuan sebagai berikut: jenis huruf *Times New Roman* ukuran 11, margin kiri 4 cm, margin kanan 3 cm, margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm. Jumlah halaman tersebut dalam format *template 2 column*.

- Semua ilustrasi, gambar, dan tabel ditempatkan di dalam teks sesuai dengan penjelasan dalam teks, bukan ditempatkan di akhir artikel.
- File dikirimkan dalam format dokumen Microsoft Word.
- Kutipan dan daftar sumber ditulis menurut *APA style*.
- Untuk penulisan nama-nama lokal yang belum terdaftar KBBI (upacara, permainan, kesenian, dan sebagainya) menggunakan huruf kecil dan miring.
- Penulis harus melampirkan pernyataan klirens etik yang dapat diunggah melalui menu Supplementary File. Format file klirens etik disediakan dalam web Patanjala.
- Artikel yang masuk akan diedit oleh Dewan Redaksi, khususnya terkait dengan format penulisan. Adapun substansi artikel akan ditelaah oleh Mitra Bestari, sesuai dengan kepakarannya. Dewan Redaksi berhak **menolak artikel yang formatnya tidak sesuai** dengan pedoman penulisan, gaya selingkung dan substansinya tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil telaah Mitra Bestari.
- Penulis diharapkan turut mengirimkan biodata secara terpisah ke email redaksi Patanjala dengan alamat: **mail.patanjala@gmail.com**. Adapun isi biodata terdiri dari: nama, tempat/tanggal lahir, pendidikan terakhir, jabatan fungsional dalam instansi, 3 (tiga) judul hasil penelitian dalam 3 tahun terakhir. Biodata dilengkapi pasfoto yang diserahkan dalam bentuk file.

LEMBAR ABSTRAK

DDC: 304.259 821 6

Bahagia, Fachruddin Majeri Mangunjaya, Zuzy Anna, Rimun Wibowo, Muhammad Shiddiq Ilham Noor

Kearifan Lokal Masyarakat Cipatat Kolot Menghadapi Iklim Melalui Penggunaan Benih, Pupuk Organik, dan Pengelolaan Hasil Panen

DOI: 10.30959/patanjala.v13i1.721

Patanjala Vol. 13 No 1, April 2021: 1-16

Perubahan iklim dapat diamati mulai dari musim penghujan dan musim kering yang tidak menentu, bencana banjir, dan kekeringan yang sulit untuk diprediksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kearifan lokal pada masyarakat adat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim mulai dari seleksi benih padi lokal, penggunaan pupuk organik, dan manajemen panen secara tradisional. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi. Metode ini diterapkan karena penelitian berkaitan dengan budaya dan sosial masyarakat adat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian, hasil pengumpulan data diteliti dengan cermat melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat mengatasi perubahan iklim dengan melakukan seleksi benih secara fisik dan fisiologi dan menyimpan benih sampai dengan 3 bulan agar benih kuat dalam pertumbuhannya. Disamping itu, petani adat harus memanen padi matang sehingga padi tidak mengalami pembusukan meskipun terjadi perubahan iklim. Kemudian, masyarakat menggunakan mengelola hasil panen dengan alat pengering padi tradisional sehingga hasil panen padi lebih tahan iklim. Setelah itu, masyarakat adat menggunakan pupuk organik sebagai cara untuk memperkecil produksi emisi sebagai penyebab perubahan iklim secara global.

Kata kunci: adaptasi, Iklim, pengetahuan lokal, benih lokal, Panen.

DDC: 745. 059 821 73

Risa Nopianti & Hary Ganjar Budiman

Kampung Angklung di Ciamis: Penjaga Ekosistem Budaya Angklung

DOI: 10.30959/patanjala.v13i1.731

Patanjala Vol. 13 No 1, April 2021: 17-33

Kampung Angklung merupakan perkampungan penghasil angklung yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sejak tahun 2010 angklung telah menjadi warisan budaya yang diakui dunia melalui konvensi yang digelar UNESCO di Nairobi, Kenya. Oleh Karena itulah diperlukan upaya-upaya untuk terus memajukannya melalui kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan sumberdaya kebudayaan yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Pemajuan Kebudayaan No.5 Tahun 2017. Artikel ini melihat masyarakat di Kampung Angklung dalam upaya menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan angklung yang berkelanjutan. Penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap para pengrajin angklung di Kampung angklung serta stakeholder pemerintah yang mendukungnya. Ekosistem kebudayaan angklung di Kampung Angklung yang di dalamnya terdapat berbagai subsistem seperti ekosistem tanaman bambu, pengrajin angklung, seniman angklung, sistem produksi dan distribusi, serta kelembagaan masyarakat, telah berkontribusi terhadap upaya menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan. Ekosistem kebudayaan angklung mampu menjaga kelestarian ekosistem lingkungan, pada saat yang sama mereka juga dapat mengambil manfaat ekonomis daripadanya sekaligus melestarikan kebudayaan angklung.

Kata kunci: ekosistem, kebudayaan, keberlanjutan, angklung, bambu.

Lembar Abstrak

DDC: 631.559 813

Silvia Devi & Rois Leonard Arios

**Tubo dalam Perspektif Ekologi Budaya
Petani Keramba Jaring Apung di Kawasan
Danau Maninjau Provinsi Sumatera Barat**

DOI: 10.30959/patanjala.v13i1.646

Patanjala Vol. 13 No 1, April 2021: 35-49

Tulisan ini bertujuan menggambarkan bagaimana strategi petani Keramba Jaring Apung (selanjutnya disebut KJA) di Kawasan Danau Maninjau Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi tubo yaitu peristiwa kematian ikan secara massal di Danau Maninjau akibat keracunan. Pendekatan ekologi budaya digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan penelitian. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa petani KJA menghadapi peristiwa tubo sebagai proses alam yang harus diterima sehingga mereka harus beradaptasi agar kehidupan ekonomi mereka dapat bertahan. Adaptasi petani KJA didasarkan pada pemahaman mereka terhadap lingkungan, tubo, teknologi yang ada, dan nilai-nilai religi yang mereka miliki. Dengan pendekatan ekologi budaya petani KJA mampu menghadapi perubahan alam dan teknologi sehingga mereka dapat tetap bertahan.

Kata Kunci: tubo, ekologi budaya, petani KJA, umbalan.

DDC: 959. 813

Fikrul Hanif Sufyan

**Kepanduan dan Politik:
Gerakan *Padvinders* di Padang Panjang
1926-1934**

DOI: 10.30959/patanjala.v13i1.630

Patanjala Vol. 13 No 1, April 2021: 51-70

*Gerakan kepanduan pernah meledak di Afdeling Batipuh X dan Priaman di awal abad ke-20. Tulisan ini bertujuan menganalisis hadirnya gerakan kepanduan dengan segala dinamikanya. Gerakan kepanduan ini beberapa kali melakukan gebrakan serta tuntutan Indonesia merdeka yang mereka suarakan langsung dari Padang Panjang. Mulai dari gerakan protes, hingga membentuk Pendidikan Nasional Indonesia, atau dikenal dengan istilah PNI Baru Hatta-Sjahrir. Tulisan ini disusun berdasarkan kaidah metode sejarah –dimulai dengan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. *Padvinders* di Padang Panjang telah dimulai sejak tahun 1924. Gerakan yang hadir di Padang Panjang antara lain *International Padvinders Organitatie*, *El-Hilaal*, *Hizbul Wathan*, dan *Kepanduan Indonesia Muslim (KIM)*. Masing-masing kepanduan lahir dari sekolah-sekolah yang muncul sejak awal abad ke-20, kemudian bermetamorfosis menjadi sebuah gerakan politik. Gerakan politik KIM menjadi PNI Baru, telah mengubah paradigma kepanduan –yang selama ini hanya dianggap sebagai kegiatan ekstrakurikuler sekolah.*

Kata Kunci: kepanduan, *padvinders*, Padang Panjang, gerakan politik.

DDC: 746. 662 598 21

Aziz Ali Haerulloh, Ety Saringendyanti,
Ayu Septiani

**Persebaran Industri Batik di Bandung,
Cirebon, dan Tasikmalaya 1967-1998**

DOI: 10.30959/patanjala.v13i1.662

Patanjala Vol. 13 No 1, April 2021: 71-86

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, serta menggunakan pendekatan sosial ekonomi untuk menjelaskan secara kronologis pengaruh adanya persebaran industri batik terhadap kesejahteraan masyarakat Bandung, Cirebon, dan Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan sampel dalam mencari dan mengumpulkan data. Berdasarkan hasil penelitian studi pustaka, studi lapangan, observasi, dan wawancara, menunjukkan bahwa penyebaran budaya membatik berpengaruh terhadap munculnya industri batik yang berada di Bandung, Cirebon, dan Tasikmalaya. Ketiga daerah tersebut memiliki peran dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang memiliki keahlian dalam membatik, baik tulis maupun cap. Selain itu, industri batik di tiga kota tersebut memiliki skala produksi industri rumah tangga, kecil, dan menengah. Menjadi suatu hal yang menarik melihat persebaran dan dinamika industri batik dengan cara produksi tradisional di Bandung, Cirebon, dan Tasikmalaya berkembang pada saat Indonesia mengalami masa industrialisasi selama Orde Baru. Penelitian ini menunjukkan terjadinya pasang-surut industri batik tradisional di tengah-tengah gempuran modernisasi di bidang industri, tidak terkecuali dalam tekstil lokal.

Kata Kunci: industri, batik, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya.

DDC: 091. 598 242 2

Adi Putra Surya Wardhana & Fiqih
Aisyatul Farokhah

**Politik Tubuh dalam Serat Kawruh
Sanggama Karya Raden Bratakesawa
Awal Abad XX**

DOI: 10.30959/patanjala.v13i1.699

Patanjala Vol. 13 No 1, April 2021: 87-102

Hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas selalu menarik untuk dikaji meskipun diikat oleh tabu. Pada awal abad XX, naskah-naskah soal seksualitas cukup populer, apalagi sudah dicetak dalam bentuk buku yang diperjualbelikan di lapak-lapak buku. Salah satu naskah yang memuat seksualitas adalah Serat Kawruh Sanggama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap bentuk, fungsi, dan makna politik tubuh dalam Serat Kawruh Sanggama. Metode yang digunakan adalah analisis data kualitatif-interpretatif dengan pendekatan teori politik tubuh. Hasil penelitian menunjukkan, Serat Kawruh Sanggama ditulis di Kediri dan disebarluaskan oleh penerbit Boekhandel Tan Khoen Swie Kediri. Bentuk politik tubuh berupa narasi tentang tata cara atau aturan bersenggama. Naskah ini mengandung politik tubuh yang berfungsi untuk menundukkan, mengontrol, dan mendominasi tubuh perempuan. Namun demikian, naskah ini dapat dimaknai sebagai upaya laki-laki untuk memahami misteri tubuh perempuan. Selain itu, naskah ini dimaknai pula sebagai daya perempuan, sehingga laki-laki harus berusaha untuk memahami seluk beluk tubuh perempuan.

Kata kunci: Serat Kawruh Sanggama, politik tubuh, seksualitas, perempuan.

Lembar Abstrak

DDC: 304. 598 51

Hanifah P. Utami, Aquarini Priyatna, Tisna Prabasmoro

Luh Ayu Manik Mas Sebagai Representasi Superhero Perempuan Bali dalam Komik

DOI: 10.30959/patanjala.v13i1.718

Patanjala Vol. 13 No 1, April 2021: 103-118

Penelitian ini berangkat dari minimnya penggambaran karakter beridentitas Indonesia dan maraknya marjinalisasi karakter perempuan dalam komik superhero. Salah satu komik yang mewujudkan tradisi budaya dan kearifan lokal Indonesia adalah Luh Ayu Manik Mas, yang menampilkan kebudayaan Bali. Tulisan ini membahas bagaimana Luh Ayu Manik Mas merepresentasikan perempuan Bali yang terwujud dalam karakternya sebagai superhero. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis isi terhadap empat edisi komik Luh Ayu Manik Mas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Luh Ayu Manik Mas ditampilkan memantapkan identitas lokal melalui sumber kekuatan, yang dinamakan dengan gelang Tri Datu, dan kepercayaannya pada Tri Hita Karana. Tri Datu diyakini sebagai sumber kekuatan hidup, sedangkan Tri Hita Karana diyakini sebagai prinsip hidup yang menjamin keharmonisan dalam setiap aspek kehidupan. Agama dan Budaya merupakan hal yang berbeda. Luh Ayu Manik Mas merepresentasikan superhero perempuan Bali yang dimuliakan oleh ajaran agama Hindu (sebagai agama dominan di Bali), ketika budaya Bali masih tunduk pada sistem patriarki.

Kata Kunci: Luh Ayu Manik Mas, komik superhero, identitas lokal, dan perempuan Bali.

DDC: 392. 598 53

Adinda Sanita Putri Khinari, Ni Made Yuni Sugiantari, Dania Nabila Lubis, Ni Kadek Ari Marlina, Ni Putu Indah Juliyanti, A. A. Ayu Isna Surya Dewi, Rochtri Agung Bawono

Representasi Maskulinitas dalam Ritual Etu di Kampung Adat Tutubhada Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur

DOI: 10.30959/patanjala.v13i1.677

Patanjala Vol. 13 No 1, April 2021: 119-136

Etu atau tinju tradisional yang dilaksanakan di Kabupaten Nagekeo merupakan salah satu tahapan dari ritual pasca panen (Gua Meze). Etu dipercaya sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat lokal atas berkah dalam panen musim panas dan wujud bagi kaum laki-laki untuk mempresentasikan kembali maskulinitas dirinya melalui Etu. Penelitian di Kampung Adat Tutubhada Desa Rendu Tutubhada Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana representasi maskulinitas seorang laki-laki pada ritual Etu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data disusun berdasarkan studi pustaka penelitian terdahulu, pengamatan di lapangan, wawancara, dan dokumen. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah penjelasan mengenai rangkaian, pelaku, perlengkapan, dan aturan dari Etu di Kampung Adat Tutubhada, eksistensi Etu di masa kini, serta bagaimana Etu dapat merepresentasikan maskulinitas laki-laki selaku pelaku ritual.

Kata kunci: tinju tradisional, representasi, maskulinitas, laki-laki, syukur panen

DDC: 301.759 8

Gregorius Andika Ariwibowo

**Kota dan Jaringan Kosmopolitan:
Banten pada Masa Kejayaan Jalur Rempah
Nusantara Abad XVI Hingga Abad XVII**

DOI: 10.30959/patanjala.v13i2.800

**Patanjala Vol. 13 No 3, Oktober 2021: 141-
158**

Kota kosmopolitan merupakan simpul dari jaringan-jaringan transnasional yang merupakan urat nadi dari aktivitas ekonomi dan perdagangan global. Aktivitas dan dinamika dari berbagai elemen-elemen jaringan transnasional tersebut kemudian juga turut menciptakan berbagai bentuk interaksi dan akulturasi budaya, ide, dan pengetahuan. Kehidupan kosmopolis yang tercipta di Banten telah memberikan warna dalam sejarah Jalur Rempah Nusantara. Kajian ini secara lebih dalam akan melihat seperti apakah rupa dari keberagaman yang tercipta di Banten? serta bagaimanakah mereka dapat saling menjaga keberagaman ini sehingga mampu menjadikan Banten sebagai pelabuhan kosmopolitan yang kaya pada masa tersebut? Kajian ini menggunakan metodologi sejarah dengan memanfaatkan beragam sumber, baik primer maupun sekunder, terutama dari beragam catatan harian, jurnal, dan dokumentasi yang berasal dari sekitar abad ke-16 hingga abad ke-17. Kota pelabuhan Banten telah menjadi kota perdagangan terbuka yang disinggahi oleh berbagai pedagang dari berbagai negeri di Nusantara dan Asia. Banten ketika itu merupakan kota yang memang dibangun dan dikelola untuk menjadi sebuah kota dagang yang terbuka bagi berbagai bangsa.

Kata kunci: Kesultanan Banten, Perdagangan Lada, Kosmopolitan, Jalur Rempah, Keberagaman.

DDC: 381. 159 843

Budiawati Supangkat
Rahman Latif Alfian
Johan Iskandar

**Menyelisik Budaya Pasar Tradisional
di Pasar Baru Balikpapan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur**

DOI: 10.30959/patanjala.v13i2.795

**Patanjala Vol. 13 No 2, Oktober 2021: 159-
173**

Artikel ini membahas mengenai budaya pasar yang berlangsung di Pasar Baru Kota Balikpapan. Budaya pasar sendiri merupakan keseluruhan norma dan nilai yang melingkupi kegiatan pemangku pasar tradisional dalam berkegiatan di pasar. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dalam menggali data dari para pemangku Pasar Baru yang menjadi lokus penelitian. Etnografi dipilih karena penelitian ini berusaha menjangkau data baik itu data lisan, visual maupun tertulis dari sudut pandang pengampu Pasar Baru Balikpapan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pedagang yang berdagang di Pasar Baru Balikpapan berasal dari latar budaya yang beragam. Mengingat Balikpapan merupakan salah satu wilayah strategis juga pintu masuk dan jalur perniagaan khususnya di Kalimantan Timur. Dalam melakukan aktivitas perdagangan, pedagang membawa nilai budaya masing-masing. Meskipun demikian secara perlahan tercipta pola tindakan dari para pedagang. Meskipun berasal dari latar budaya yang berbeda, secara tidak tertulis para pedagang seperti telah mencapai kesepakatan dalam berkegiatan di pasar.

Kata kunci: budaya pasar, praktik, pedagang, pasar tradisional, Balikpapan.

Lembar Abstrak

DDC: 301.759 821 6

Lia Nuralia & Iim Imadudin

**Nilai Budaya pada Lanskap Industri
Perkebunan Kina Cinyiruan Bandung
pada Masa Kolonial**

DOI: 10.30959/patanjala.v13i2.848

**Patanjala Vol. 13 No 2, Oktober 2021: 175-
192**

Perkebunan Kina Cinyiruan di Bandung telah berdiri sejak tahun 1855. Sekarang ini telah menjadi kebun afdeeling dari Perkebunan Kertamanah PTPN VIII, sejak digabungkan secara manajerial di masa kemerdekaan. Jejaknya dapat ditelusuri sebagai lanskap budaya industri perkebunan berupa area bekas kebun kina dan permukiman emplasemen, yang mengandung nilai budaya. Apa dan bagaimana nilai budaya tersebut menjadi permasalahan pokok dalam tulisan ini. Metode penelitian adalah desk research dengan pendekatan arkeologi industri serta konsep nilai budaya dan lanskap budaya. Hasil yang diperoleh adalah lanskap budaya industri Perkebunan Kina Cinyiruan memiliki tata guna lahan beragam dengan tinggalan budaya benda beraneka fungsi. Nilai budaya yang terkandung di dalamnya merupakan nilai budaya tradisional Sunda dan nilai budaya kolonial, terkait kearifan lokal dan teknologi modern barat. Kedua nilai budaya tersebut tampak pada tata letak dan arsitektur bangunan permukiman, serta tata guna lahan area kebun sebagai sistem ekonomi subsistensi dan perkebunan sebagai sistem ekonomi modern Barat yang komersial.

Kata kunci: Nilai budaya, lanskap budaya industri, perkebunan kina Cinyiruan.

DDC: 392. 598 63

Markus Deli Girik Allo
Nilma Taula'bi'
Elim Trika Sudarsi
Eka Prabawati Rum

**Nilai Budaya Ritual Bulangan Londong
Sembangan Suke Barata Masyarakat Adat
Toraja**

DOI: 10.30959/patanjala.v13i2.798

**Patanjala Vol. 13 No 2, Oktober 2021: 193-
207**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki nilai-nilai budaya dari ritual bulangan londong sembangan suke barata dari masyarakat adat Toraja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Responden penelitian ini adalah budayawan, ahli bahasa, dan komunitas Toraja. Instrumen penelitian yang digunakan adalah file dokumen, wawancara dengan subjek, dan pengamatan dengan menggunakan perekam video pada ritual bulangan londong sembangan suke barata. Teknik analisis data mencakup tiga langkah utama, pengurangan data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya yang terkandung dalam ritual bulangan londong sembangan suke barata adalah manuk yang melambangkan nilai etos kerja, ussembang suke barata yang mewakili nilai religius bambu yang ditebas oleh mina, dan kayunan londong sebagai personifikasi nilai patriotik pemimpin.

Kata kunci: nilai budaya, bulangan londong sembangan suke barata, masyarakat adat Toraja.

DDC: 791.859 821 71

Budi Gustaman

Menilik Pertunjukan Adu Domba di Priangan Pada Masa Kolonial

DOI: 10.30959/patanjala.v13i2.788

Patanjala Vol. 13 No 2, Oktober 2021: 209-223

Adu domba sangat populer di Priangan, khususnya di wilayah Garut. Popularitas adu domba (Garut) tidak bisa dilepaskan dari historisitasnya. Penelitian ini ditujukan untuk mempertanyakan kemunculan domba Garut serta pertunjukan adu domba pada awal perkembangannya. Metode yang digunakan adalah metode sejarah, dengan memanfaatkan sumber berupa buku dan koran yang diproduksi pada masa kolonial. Temuan utama penelitian ini ialah kemunculan jenis domba Garut dilatarbelakangi impor domba yang diinisiasi oleh K.F. Holle untuk tujuan budidaya wol. Kawin silang domba impor dan domba lokal menghasilkan jenis domba petarung yang lazim disebut domba Garut. Pertunjukan adu domba muncul dari kebiasaan masyarakat pribumi dalam mengadu binatang, hingga berkembang menjadi hiburan yang sering diselenggarakan pada setiap event besar. Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai domba petarung, domba Garut muncul dari 'ketidaksengajaan' hingga menjadi populer sejak akhir abad ke-19, dengan diiringi berbagai kecaman dari perspektif orang Eropa perihal esensi permainannya.

Kata kunci: Adu Domba, Domba Garut, Garut, Priangan.

DDC: 324. 598 41

Mohammad Rizak Prabowo Aman

Krisis Politik di Kalimantan Barat 1950: Suatu Proses Menuju Integrasi ke Dalam Republik Indonesia

DOI: 10.30959/patanjala.v13i2.796

Patanjala Vol. 13 No 2, Oktober 2021: 225-241

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjuangan integrasi wilayah Kalimantan Barat ke dalam Republik Indonesia (RI) pada tahun 1950 yang diwarnai krisis politik antara kubu republikan dengan pendukung Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) yang mempertahankan federalisme bersama Republik Indonesia Serikat (RIS). Penelitian menggunakan metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa krisis politik antara kedua kubu telah menyebabkan pemogokan massal pada bulan Maret 1950 di Pontianak yang berdampak luas pada bidang ekonomi se-Kalimantan Barat. Komisaris RIS dan DPR RIS datang untuk menengahi dan menyelesaikan krisis ini. Akan tetapi perubahan konstelasi politik terjadi cepat karena ditangkapnya Sultan Hamid II pada 5 April 1950. Jalannya pemerintahan DIKB yang tidak stabil mendorong penyerahan kekuasaan eksekutif kepada Pemerintah RIS pada 24 Mei 1950, dan secara resmi berintegrasi dalam RI setelah RIS dinyatakan dibubarkan pada 17 Agustus 1950.

Kata kunci: Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB), Sultan Hamid II, Republik Indonesia Serikat (RIS), Republik Indonesia (RI).

ABSTRACT SHEET

DDC: 304.259 821 6

**Bahagia, Fachruddin Majeri Mangunjaya,
Zuzy Anna, Rimun Wibowo, Muhammad
Shiddiq Ilham Noor**

*Local Knowledge of Cipatat Kolot
on The Climate Adaptation: Seed, Organic
Fertilizer, and Harvest Processing*

DOI: 10.30959/patanjala.v13i1.721

Patanjala Vol. 13 No 1, April 2021: 1-16

Climate change is characterized by several elements, namely unpredictable rainy and dry seasons, floods, and unpredictable droughts. This study aims to determine the indigenous peoples' local wisdom in adapting to climate change, which includes screening process of local paddy seeds, the use of organic fertilizers, and traditional harvest management strategies. The method used in this research is the qualitative research method combined with the ethnographic approach. This method is applied based on the consideration that the topic of this research is related to the culture and social of indigenous peoples. The data was collected by means of in-depth interviews, observation, and documentation. Informants were selected by using the purposive sampling technique. The results were scrutinized carefully by means of the triangulation process. The results of the study show the facts that the way indigenous peoples deal with climate change is by physically and physiologically selecting seeds and storing seeds for three months so that the seeds will grow stronger. In addition, they only select paddies that has reached a full state of growth, that is mature to avoid going rotten even though the climate change occurs. Then, they have the traditional rice dryers to get rice dried, thereby enabling those to be more climate-resistant. They also use the organic fertilizer to reduce the production of emissions as a cause of global climate change.

Keywords: adaptation, climate, local knowledge, local seed, harvest.

DDC: 745. 059 821 73

Risa Nopianti & Hary Ganjar Budiman

**Kampung Angklung di Ciamis:
Penjaga Ekosistem Budaya Angklung**

DOI: 10.30959/patanjala.v13i1.731

Patanjala Vol. 13 No 1, April 2021: 17-33

Kampung Angklung in Ciamis Regency, West Java is a well-known producer of angklung. Since 2010, angklung has officially become a world-recognized cultural heritage as a result of the UNESCO convention held in Nairobi, Kenya. As a consequence, further steps are needed to continue to advance angklung by providing the activities of protecting, developing, utilizing, and fostering the sustainable resource culture referring to the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2017 concerning Cultural Advancement. This article describes how the efforts of the people of Kampung Angklung to preserve and conserve the sustainable ecosystem of angklung culture. This research used the qualitative research methods, such as conducting the in-depth interviews with angklung craftsmen in Kampung Angklung, and the government stakeholders who supported the craftsmen. The ecosystem of angklung culture in Kampung Angklung, in which there are various subsystems such as bamboo plant ecosystem, angklung craftsmen, angklung artists, production and distribution systems, and community institutions, has contributed to preserve and conserve the sustainable ecosystem of angklung culture. The ecosystem of angklung culture assured to preserve the environmental ecosystem and, at the same time, to provide the economic benefits while preserving the angklung culture.

Keywords: ecosystem, culture, sustainable, angklung, bamboo.

Abstract Sheet

DDC: 631.559 813

Silvia Devi & Rois Leonard Arios

Tubo in The Cultural Ecology Perspective of The Floating Net Cage Farmer in The Lake Maninjau in West Sumatera

DOI: 10.30959/patanjala.v13i1.646

Patanjala Vol. 13 No 1, April 2021: 35-49

This work was intended to draw the strategy of the floating net cage farmers (Keramba Jaring Apung, KJA) in the Lake Maninjau in West Sumatera to deal with the 'tubo', a mass death of fish as a result of poison-laced bait. To analyze and answer the research question, therefore the research employed the cultural ecology approach. The research also used the qualitative method with the data collection by literature study, interviews, and observations. The study revealed that the farmers accepted the 'tubo' inevitably as a natural fact. As the consequence of it, they couldn't help but adapted in order to survive economically. The adaptation process is based on their understanding of the environment, the 'tubo', the existing technology, and their religious values. They were able to adapt to natural and technological changes because of the ecological and cultural approaches they applied. As a result, they were able to survive.

Keyword: tubo, cultural ecology, KJA farmers, umbalan.

DDC: 959. 813

Fikrul Hanif Sufyan

Scouting and Politic: The Scout Movement in Padang Panjang During 1926-1934

DOI: 10.30959/patanjala.v13i1.630

Patanjala Vol. 13 No 1, April 2021: 51-70

The scout movement rose to fame in the afdeling of Batipuh X and Priaman in the early 20th century. This paper is designed to analyze the presence of the scout movement and related matters. It had constituted a break with years of colonial era and pushed for an independent Indonesia, which they voiced directly from Padang Panjang. The movements they organized was from the protest movement to the formation of the Pendidikan Nasional Indonesia or more popularly known as the PNI Baru Hatta – Sjahrir. The paper is organized according to the standard historical method rules; heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The scout movement, it all started in Padang Panjang in 1924. The International Padvinders Organitatie, the El-Hilaal, the Hizbul Wathan, and the Kepanduan Indonesia Muslim (KIM) were around then. They were originally established in schools at the beginning of the 20th century who transformed into the political movement then. KIM, which turned into a political movement or known as PNI Baru, has changed the scouting paradigm, which so far has only been regarded as the extracurricular school activity.

Keywords: scouting, padvinders, Padang Panjang, political movements.

DDC: 746. 662 598 21

Aziz Ali Haerulloh, Ety Saringendyanti,
Ayu Septiani

*The Presence of The Batik Industries
in Bandung, Cirebon, and Tasikmalaya
During 1967-1998*

DOI: 10.30959/patanjala.v13i1.662

Patanjala Vol. 13 No 1, April 2021: 71-86

The study used the historical method which included a number of stages, such as heuristics, criticism, interpretation, and historiography and also applied a socio-economic approach to explain chronologically the effect of the distribution of the batik industry on the welfare of the people of Bandung, Cirebon, and Tasikmalaya. The sample is used in this study to find and collect data. The results of literature study, field studies, observations, and interviews have revealed that the spread of batik culture has had a significant effect on the emergence of the batik industries in Bandung, Cirebon, and Tasikmalaya. The batik industries in the three regions has played an important role in creating jobs for local communities who have the expertise in doing the batik work, both the 'batik tulis' and the 'batik cap'. In addition, the batik industry in the three cities also has the industrial productions which includes either the household or small to medium scale. It is an interesting fact to see the distribution and the dynamics of the batik industry were produced through traditional production methods in Bandung, Cirebon and Tasikmalaya when Indonesia was experiencing a period of industrialization during the New Order. The research has shown that there have been ups and downs in the traditional batik industry amidst the threat of modernization in the industrial sector, including local textiles.

Keywords: industry, batik, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya.

DDC: 091. 598 242 2

Adi Putra Surya Wardhana & Fiqih
Aisyatul Farokhah

*Politics of The Body in The Serat Kawruh
Sanggama by Raden Bratakesawa in The
Early 20th Century*

DOI: 10.30959/patanjala.v13i1.699

Patanjala Vol. 13 No 1, April 2021: 87-102

Despite a taboo subject amongst society, the matters related to sexuality are always interesting to study. In the early twentieth century, texts on sexuality were quite popular and had even been printed in the form of books that were sold in the book stalls. One of those was Serat Kawruh Sanggama. The purpose of this study was to analyze the form, the function, and the meaning of the politics of the body in the Serat Kawruh Sanggama. The method used in the research was the qualitative-interpretative data analysis combined with the approach of the Politics of the Body. The results of the study have shown that Serat Kawruh Sanggama was written in Kediri and then disseminated by the publisher of the Boekhandel Tan Khoen Swie Kediri. The elements of the Politics of the Body revealed in the text are in the form of narratives related to the procedures or rules of sexual intercourse. It is evident that the elements of the Politics of the Body found on the text served as an instrument of subjugating, controlling, and dominating the female body. This text can be interpreted as an attempt by men to understand the mystery of the female body. However, on the other hand, the text can also be interpreted as an attempt by men to understand the mystery of the female body. In addition, it represented woman's power that encourages men to understand the ins and outs of the female body.

Keywords: Serat Kawruh Sanggama, politics of the body, sexuality, women.

Abstract Sheet

DDC: 304. 598 51

Hanifah P. Utami, Aquarini Priyatna, Tisna Prabasmoro

Luh Ayu Manik Mas as The Representation of a Balinese Female Superhero in Comics

DOI: 10.30959/patanjala.v13i1.718

Patanjala Vol. 13 No 1, April 2021: 103-118

This research is motivated by two reasons, namely the lack of the presence of characters with the Indonesian identities, and the marginalization of female characters in superhero comics. One of the comics that is quite representative of presenting Indonesia's cultural traditions and local wisdom is Luh Ayu Manik Mas, which contains the Balinese culture. This paper discusses how Luh Ayu Manik Mas has represented the Balinese women through her character as a superhero. The research is carried out using the content analysis method on the four comic editions of Luh Ayu Manik Mas. The results of this study have shown that Luh Ayu Manik Mas was designed to appear to be a manifestation of local identity, such as a source of strength from the Tri Datu bracelet, and the belief in the Tri Hita Karana. Tri Datu is believed to be the source of life force and Tri Hita Karana as the principle of life that ensures harmony in every aspect of life. Religion and culture are two different things. Luh Ayu Manik Mas, represents the figure of a Balinese female superhero who is glorified by the teachings of Hinduism as the dominant religion in Bali, is in contrast to Balinese culture which is still subject to the patriarchal system.

Keywords: *Luh Ayu Manik Mas, superhero comic, local identity, Balinese women.*

DDC: 392. 598 53

Adinda Sanita Putri Khinari, Ni Made Yuni Sugiantari, Dania Nabila Lubis, Ni Kadek Ari Marlina, Ni Putu Indah Juliyanti, A. A. Ayu Isna Surya Dewi, Rochtri Agung Bawono

The Representation of The Masculinity in The Rituals of 'Etu' in Kampung Adat Tutubhada in Nagekeo Regency, East Nusa Tenggara

DOI: 10.30959/patanjala.v13i1.677

Patanjala Vol. 13 No 1, April 2021: 119-136

'Etu', which is a traditional form of ceremonial boxing practiced in Nagekeo Regency, is one stage of the post-harvest rituals Gua Meze. 'Etu' is believed to be a form of expression of gratitude offered by the local community for the blessings that have been received in the harvest and at the same time also serves as a form to represent the masculinity. The research which has been conducted in Kampung Adat Tutubhada - which is situated in the village of Rendu Tutubhada in South Aesesa District, Nagekeo Regency - aims to reveal how the masculinity is represented in 'Etu'. The research used the descriptive qualitative method. Sources of data in the research were compiled based on the literature study of previous research, field observations, interviews, and documents. The results achieved in this study explain in detail 'Etu' in Kampung Adat Tutubhada that includes a sequence of activities, performers, equipment, and rules, the current existence of 'Etu' as well as to draw how 'Etu' can represent the masculinity of men as the ritual performers.

Keywords: *traditional boxing, men, identity, existence, harvest festival.*

DDC: 301.759 8

Gregorius Andika Ariwibowo

City and Cosmopolitan Networks: Banten During The Nusantara Spice Route Between The 16th To 17th Century

DOI: 10.30959/patanjala.v13i2.800

Patanjala Vol. 13 No 3, Oktober 2021: 141-158

The cosmopolitan city served as the center of transnational networks. As a result, it is the lifeblood of global economic activity and trade. The activities and dynamics of the various elements related to the transnational network have also created various forms of interaction and acculturation not only to culture but also to ideas and knowledge. The cosmopolitan life created in Banten has had an impact on the history of the Nusantara Spice Route. The study reveals the diversity formed in the past of Banten, and how could they maintain the diversity to make Banten as a prosperous cosmopolitan port at that time. Beside that, the study explores deeper into the form of diversity created in Banten and the efforts to maintain the diversity so as to make Banten a rich cosmopolitan port at that time. The study uses a historical methodology with a variety of sources, both primary and secondary, mainly from various diaries, journals, and documentation dating from around the 16th century to the 17th century. Banten as a port city at that time had become an open trading city that was often visited by various traders not only from various countries in the Nusantara but also from the other Asian regions. On the other hand, the image of Banten as an open port at that time could not be separated from the facts that Banten was deliberately built and managed to become an open trading city for various nations in the world.

Keywords: banten sultanate, pepper trade, cosmopolitan, spice route, diversity.

DDC: 381. 159 843

Budiawati Supangkat
Rahman Latif Alfian
Johan Iskandar

The Reveal of Market Culture in The Traditional Market of Pasar Baru in Balikpapan City, East Kalimantan

DOI: 10.30959/patanjala.v13i2.795

Patanjala Vol. 13 No 2, Oktober 2021: 159-173

This article discusses the market culture at Pasar Baru in Balikpapan City. The market culture in this study can be defined as the overall norms and values adopted by traditional market stakeholders in their daily activities in the market. This study uses ethnographic methods to collect data from the stakeholders of Pasar Baru as the research locus. Ethnography was chosen based on the consideration that this research seeks to collect data, both oral, visual and written data from the point of view of the Pasar Baru supervisor in Balikpapan. The results show that the traders who trade at Pasar Baru in Balikpapan originate from the diverse cultural backgrounds. It is a consequence of the City of Balikpapan as one of the strategic areas as well as the entrance and route of commerce, especially in East Kalimantan. In their trading activities, the traders bring their respective cultural values. It slowly encourages the creation of new patterns in the behavior of traders. They seem to have reached an agreement in their activities in the market.

Keywords: market culture, practice, traders, traditional market, Balikpapan.

Abstract Sheet

DDC: 301.759 821 6

Lia Nuralia & Iim Imadudin

The Cultural Value in The Landscape of The Cinyiruan Quinine Plantation Industry in Bandung During The Colonial Period

DOI: 10.30959/patanjala.v13i2.848

Patanjala Vol. 13 No 2, Oktober 2021: 175-192

The Cinyiruan quinine plantation in Bandung has been established since 1855. After the managerial merger during the independence of Indonesia, it is now the government-owned plantation of PTPN VIII Kertamanah. The existence of the plantation can be traced as a cultural landscape of the plantation industry. It includes the area of the former quinine plantation and the emplacement settlement. Both contain cultural values. The main problem in this paper comprise what and how the values are. The research method used is the desk research with an industrial archeology approach and the concept of cultural values and cultural landscapes. The results obtained indicate that the cultural landscape of the Cinyiruan quinine plantation industry has a variety of land uses with cultural relics of various functions. The cultural values contained are the Sundanese traditional cultural values and colonial cultural values which relate to the local wisdom and western modern technology. These two cultural values are traceable in the layout and architecture of residential buildings as well as the land use of the garden area as a subsistence economic system and the plantations as a modern commercial Western economic system.

Keywords: cultural values, industrial cultural landscape, Cinyiruan quinine plantation.

DDC: 392. 598 63

Markus Deli Girik Allo

Nilma Taula'bi'

Elim Trika Sudarsi

Eka Prabawati Rum

The Cultural Values of The Bulangan Londong Sembangan Suke Barata Ritual of The Indigenous People of Toraja

DOI: 10.30959/patanjala.v13i2.798

Patanjala Vol. 13 No 2, Oktober 2021: 193-207

The purpose of this study was to investigate the cultural values in the ritual of Bulangan Londong Sembangan Suke Barata as part of the Toraja indigenous people life. The research method used in this study is a qualitative method. Meanwhile, the respondents involved in this study include culturist, linguists, and the Toraja community. The research instruments used in this study were document files, interviews with the subjects, and observations using a video recorder that recorded the ritual process of Bulangan Londong Sembangan Suke Barata. The data analysis technique in this study includes three main steps, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the cultural values contained in the rituals of the Bulang Londong Sembangan Suke Barata were 'Manuk' which symbolized the value of the work ethic, 'Ussembang Suke Barata' which represented the religious value of bamboo slashed by 'Mina', and 'Kayunan Londong' which personifies the leader's patriotic value.

Keywords: cultural values, bulangan londong sembangan suke barata ritual, indigenous people of Toraja.

DDC: 791.859 821 71

Budi Gustaman

The Fighting Sheep Show in Priangan During The Colonial Period

DOI: 10.30959/patanjala.v13i2.788

Patanjala Vol. 13 No 2, Oktober 2021: 209-223

Fighting sheep is very popular in Priangan, especially in the Garut region. The popularity of fighting sheep can't be separated from the history that lies behind it. This research is intended to answer the questions about the emergence of Garut sheep and sheep fighting show at the beginning of its development. The method used in this research is the historical method by utilizing sources of books and newspapers produced during the colonial period. The main finding of this study is that the emergence of the Garut sheep breed was motivated by the import of sheep initiated by K.F. Holle for wool cultivation purposes. The crossbreeding of imported sheep and local sheep has resulted in the type of fighting sheep which is now commonly referred to as Garut sheep. The fighting sheep show itself emerged from the indigenous people's habit of fighting animals which later developed into an entertainment that was often held at every major event. The conclusion of this study is that Garut sheep as fighting sheep emerged from an 'accidental habits' and then became popular since the late 19th century. On the other hand, it has also drawn criticism from the perspective of Europeans who are concerned about the essence of the fighting sheep.

Keywords: *fighting sheep, Garut sheep, Garut, Priangan.*

DDC: 324. 598 41

Mohammad Rikaz Prabowo Aman

The 1950 Political Crisis in West Kalimantan: A Process Towards The Integration Into The Republic of Indonesia

DOI: 10.30959/patanjala.v13i2.796

Patanjala Vol. 13 No 2, Oktober 2021: 225-241

The study aims to explore the struggle for integration of the West Kalimantan region into the Republic of Indonesia (RI) in 1950. The integration was marked by a political crisis between the republicans and the supporters of the Special Region of West Kalimantan (DIKB) who defended federalism with the United States of Indonesia (RIS). The study uses the historical method through the stages of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of the study indicate the fact that the political crisis between the two parts led to a mass strike in March 1950 in Pontianak. The strike had a wide impact on the economy throughout West Kalimantan. The Commissioners of the United States of Indonesia and the House of Representatives from the United States of Indonesia managed to mediate and resolve the crisis. However, changes in the political constellation occurred quickly due to the arrest of Sultan Hamid II on April 5, 1950. The unstable run of the Special Region of West Kalimantan government prompted the handover of executive power to the United States of Indonesia Government on May 24, 1950, and officially integrated into the Republic of Indonesia after the United States of Indonesia was declared disbanded on August 17, 1950.

Keywords: *Special Region of West Kalimantan, Sultan Hamid II, United States of Indonesia, Republic of Indonesia.*

INDEKS PENULIS JURNAL PATANJALA VOLUME 13, TAHUN 2021

- Allo, Markus Deli Girik., Nilma Taula'bi', Elim Trika Sudarsi, Eka Prabawati Rum.** "Nilai Budaya Ritual Bulangan Londong Sembangan Suke Barata Masyarakat Adat Toraja", 13(2): 193-207.
- Ariwibowo, Gregorius Andika.** "Kota dan Jaringan Kosmopolitan: Banten pada Masa Kejayaan Jalur Rempah Nusantara Abad XVI Hingga Abad XVII", 13(2): 141-158.
- Bahagia., Fachruddin Majeri Mangunjaya, Zuzy Anna, Rimun Wibowo, Muhammad Shiddiq Ilham Noor.** "Local Knowledge of Cipatat Kolot on The Climate Adaptation: Seed, Organic Fertilizer, and Harvest Processing", 13(1): 1-16.
- Devi, Silvia & Rois Leonard Arios.** "*Tabo* dalam Perspektif Ekologi Budaya Petani Keramba Jaring Apung di Kawasan Danau Maninjau Provinsi Sumatera Barat", 13(1): 35-49.
- Gustaman, Budi.** "Menilik Pertunjukan Adu Domba di Priangan Pada Masa Kolonial", 13(2): 209-223.
- Haerulloh, Aziz Ali., Ety Saringendyanti, Ayu Septiani.** "Persebaran Industri Batik di Bandung, Cirebon, dan Tasikmalaya 1967-1998", 13(1): 71-86.
- Khinari, Adinda Sanita Putri., Ni Made Yuni Sugiantari, Dania Nabila Lubis, Ni Kadek Ari Marlina, Ni Putu Indah Juliyanti, A. A. Ayu Isna Surya Dewi, Rochtri Agung Bawono.** "Representasi Maskulinitas dalam Ritual *Etu* di Kampung Adat Tutubhada Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur", 13 (1): 119-136.
- Nopianti, Risa & Hary Ganjar Budiman.** "Kampung Angklung di Ciamis: Penjaga Ekosistem Budaya Angklung", 13(1): 17-33.
- Nuralia, Lia., Iim Imadudin.** "Nilai Budaya pada Lanskap Industri Perkebunan Kina Cinyuruan Bandung pada Masa Kolonial", 13(2): 175-192.
- Prabowo, Mohammad Rikaz., Aman.** "Krisis Politik di Kalimantan Barat 1950: Suatu Proses Menuju Integrasi ke Dalam Republik Indonesia", 13(1): 225-241.
- Sufyan, Fikrul Hanif.** "Kepanduan dan Politik: Gerakan *Padvinders* di Padang Panjang 1926-1934", 13(1): 51-70.
- Supangkat, Budiawati., Rahman Latif Alfian, Johan Iskandar.** "Menyelisik Budaya Pasar Tradisional di Pasar Baru Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur", 13(2): 159-173.
- Utami, Hanifah P., Aquarini Priyatna, Tisna Prabasmoro.** "Luh Ayu Manik Mas Sebagai Representasi *Superhero* Perempuan Bali dalam Komik", 13(1): 103-118.
- Wardhana, Adi Putra Surya & Fiqih Aisyatul Farokhah.** "Politik Tubuh dalam Serat Kawruh Sanggama Karya Raden Bratakesawa Awal Abad XX", 13(1): 87-102.

INDEKS KUMULATIF SUBJEK JURNAL PATANJALA VOLUME 13, TAHUN 2021

A

Abdi dalem bedhaya, 92
Abdul Rivai, 6
Adipati Ukur, 76
Adipati Juminah, 76
Afdeling, 5,6
Afdeling Batipuh X, 1, 2
Afdeeling Cinyuruan, 9
Alas-alasan, 74
Alimudin, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Aluk, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 205
Amba, 73
Ambu handap, 11
Ambu tengah, 11
Ambu lulur, 11
Anyam cayut, 75
Angklung Buncis, 18
Angklung Gubrag, 18
Animal baiting, 219
APRIS, 231, 232, 233, 234, 237
Asia, 1, 3, 5, 12, 16
Asia Selatan, 3, 5, 10, 14, 16
Asia Tenggara, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16
Asia Timur, 3, 5
Asmara cipta, 97
Asmara gama, 97
Asmara sabda, 97
Asmara tantra, 97, 98
Asmara wanita, 97
Atap jolong 7, 10, 12
Atap julang ngapak, 10, 12
Atap parahu kemereb, 7, 10, 12
A hideung, 23
Awi tali, 23
Awi temen, 23

B

Babancong, 216
Bandung, 1, 7, 71, 72, 73, 75, 78, 78, 80, 81, 84, 85
Bandung Selatan, 4, 5
Banten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 73, 81, 92
Banyumas, 82
Batavia, 75
Batipuh, 4
Batipuh X Koto, 5
Bekasi, 84

Bemgar, 9
Bhuta Kala, 110, 111
Biduak, 7
Blambangan, 75
Bogor, 4,5, 84
Bojonegoro, 94
Bouroq, 81
Boyolali, 91
Bukit Barisan, 2
Bulangan londong, 193, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205
Bulu domba, 212, 213, 214
Bunian baralek, 7
Bupati Suryakartalegawa, 211

C

Cacah. 74
Caru, 110
Catur brata, 97
Cecempaan, 75
Ciamis, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 72, 73
Cianjur, 79
Cilacap, 94
Cipatat Kolot, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Cirebon, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 84, 85
Cisantana, 11
Connecting door, 14
Cut and fill, 8

D

Daeng Sutigna, 18
Danau Maninjau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13
Depok, 84
Desa Cimareme, 216
Desa Panyingkiran, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30
Dogdog Lojor, 18
Domba Garut, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 219
Domba Priangan, 212
Dongeng, 211, 212, 214, 215

E

Eling, 97
Emmahaven, 6
Eneng, 97
Ening, 97
Etu co'o, 123, 125, 126, 127, 131, 132
Etu meze, 123, 126, 127, 132

F

Form follows function, 11

G

Gagang senggang, 75

Galeger, 25, 26,

Garut, 75, 73

Goah, 11

Gua Meze, 119, 123, 124, 131, 133

Gujarat, 5

H

Haka, 7

Harapat, 5

Hasanudin, 72, 79

Hihinggulan, 74

Hujan riris, 75

H.W. Daendels, 76

I

India, 6, 13

Indische Empire *Stiljl*, 14

Indramayu, 71, 72, 73, 75, 76, 80, 81

Industri Batik, 76, 78, 879. 80, 82, 84, 85

J

Jakarta, 73, 76, 85

Jalur Rempah, 1, 2, 3

Jawa Barat, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 73, 75, 78, 79, 81, 84, 85

Jawa Tengah, 26, 80, 82

K

Kabupaten Agam, 2

Kabupaten Nagekeo, 119, 120, 122, 123, 126, 132, 135, 136

Kahin, 2, 7

Kalimantan Timur, 1, 2, 3

Kampung Angklung, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Kampung Nempel, 20, 21, 23, 28, 31

Kampung Urug, 4

Kangkungan, 81

Karawang, 73, 84

Kasepuhan Banten Kidul, 18

Kebun kina Cinyiruan, 1, 2, 4, 6

Kecamatan Tanjung Raya, 2, 4, 5

Kediri, 87, 93

Kekembangan, 74

Kelarasan, 4, 5

Kelarasan IV Koto, 4, 5

Kelurahan Kelandasan Ilir, 2

Kembang terate, 75

Kenya, 92

Kepo, 128, 130, 132, 134

K.F. Holle, 209, 211, 212, 213, 221

Kiai Rangga, 75

Kiara Sari, 4

Kidang, 3

Kiriana, 112, 118

KNKB, 226, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238

Komplek *jejer sepuluh*, 11, 12

Konferensi Asia Afrika, 22, 27, 28

Kota Balikpapan, 1, 2, 5, 6, 9

Kotaraja, 7

Kuminih, 7, 8, 18

Kuningan, 73, 81, 82

L

Lai, 12

Lampung, 4

Lantayan, 5, 7, 9, 10, 12

Lanskap Industri Perkebunan, 1, 2, 8

Lapangan Kebun Sayur, 229, 234

Lasem, 75, 80

Lembah Anai, 6

Leon Salim, 8, 9, 10, 15

Leuit, 6, 7, 9

Lingga Manik, 20

Lumajang, 94

Loods, 5

M

Madura, 75

Majalengka, 73, 81, 82

Makassar, 81

Malang, 85

Malaya, 5

Mamukek, 7

Manatak, 3

Mandirik, 3

Manga, 105

Mangin haris, 75

Manggisan, 81

Maninjau, 5

Mantra asmaragama, 89, 94, 95, 96

Manuk londong, 199, 205

Manundo kapa naik haji, 8

Mapalus, 3

Maskulinitas, 119, 120, 121, 133, 134

Megamendung, 81

Memetahan, 75

Menak, 74

Merti Deso, 3

Minangkabau, 2, 5, 6

Mohammad Hatta, 77

Mr. Lukman Wiriadinata, 235

M. Yanis, 228

N

Nagari Koto Laweh, 5

Ninik Mamak, 14

IndeksKumulatif

Ngawi, 94
Ngeu, 128, 129, 134
Nusantara, 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16
Nyai Tumenggung Adisara, 98

O

P

Padang, 6
Padang Panjang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17
Padvinders, 1, 2, 3, 4, 8, 13, 18
Pai, 127, 128, 134
Pakem, 74
Paksi nagaliman, 81
Pakubuwana X, 92, 93, 97
Palupuh, 10
Pamali, 4
Panca Mahabhuta, 114
Pandanan, 81
Pangalengan, 2, 5, 10
Pangeran Cakrabuana, 81
Pangeran Mandurareja, 76
Pantai Barat Sumatra, 2, 5
Papanjengan, 74
Parigi Nyengsoh, 75
Parijs van Java, 79
Parindra, 226
Pasar Baru Balikpapan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
Pasuruan, 75, 92
Patriarki, 103, 113
Patriarkis, 113, 117
Pawon, 11
Pekalongan, 76, 79, 80, 83
Pelabuhan Emmahaven, 6
Pemali, 194, 196, 197, 204
Perkebunan Cinyuruan, 5, 13
Perkebunan kina Cinyuruan, 1, 2, 4, 6
Polombangkeng, 234
Poma Aaduhunu, 3
Prabu Guru Darmasiksa, 75
Priaman, 1
Pribumi, 209, 211, 215, 217, 219, 220, 221
Probolinggo, 92
Purwokerto, 82
Puya, 200, 201, 202, 205

Q

R

Raden Bratakesawa, 87, 93
Raja Wesi, 5, 7
Rapasan, 194, 198, 199, 202, 204
rereng barong, 24, 30
Rinuak, 7, 11
Ritual Gedho Peko, 124, 125, 133

Rotual Lo Pene, 126
Ritual Maki, 124, 133, 134
Ritual Naka Api, 125, 133
Ritual pangrupukan, 110
Ritual Pedhe Pene, 125

S

Sada Etu, 129, 134
Sagu Alu, 125, 126, 132, 134
Samudra Hindia, 6
Sanghyang Siksa Kandang Karesian, 74, 75
Sawahlunto, 2
Semarang, 93
Sembah Berniaga, 9
Sembah Datang, 9
Sinder afdeeling, 7
Serat awi, 75
Serat Centhini, 89, 90
Serat Kawruh Sanggama, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Serat Nitimani, 89, 90
Singkawang, 227, 237, 240
Sisirangan, 75
Sri Kuning, 5, 7
Sri Nyi Pohaci, 18
Staatsblad, 5
Suharto, 77
Sukabumi, 73
Sukadana, 75
Sukajaya, 4
Suku Rendu, 120, 127
Sultan Agung Senopati Ing Ngalaga, 75
Sultan Hamid II, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241
Sumatera, 5
Sumatra Barat, 2, 5, 6, 16, 18
Sumedang, 75
Sunan Gunung Jati, 75, 81
Surabaya, 75, 93, 94
Surakarta, 76, 80, 91, 92, 93, 101, 102

T

Tan Khoen Swie, 93
Tanguak, 7
Taruk hata, 75
Tasikmalaya, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 83, 84
Tegal, 80
Teluk Persia, 6
Tengah imah, 11
Tepas, 11
Tim Basabali Wiki, 105, 107, 111, 113
Tiongkok, 6, 11, 14
Titik, 73
Toke, 6, 7, 11, 13
Tongkonan, 199, 201, 203,
Toraja, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205

Tri Datu, 103, 106, 108, 111, 114, 115, 116, 117,
118

Tri Hita Karana, 103, 108, 109, 110, 111, 114, 116,
117, 118

Tri Kaya Parishuda, 108

Tri Tangtu, 10

Tuanku Lareh, 5

Tuanku Mansiangan, 5

Tuban, 80,

Tubo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Tubo Siareh, 7

Tumenggung Bahurekso, 76

U

Umbalan, 1, 2, 8

Upwealing, 2, 8

Urang-urangan, 75

V

Veldpolite, 9

W

Wadasan, 81

Wadasari, 81

Wayah Maimbul, 3

Wayah Malacak, 3

Wayah Manunggal, 3

Wiranatakusumah VI, 78

Wonogiri, 91, 93

Y

Yogyakarta, 76, 84, 85, 86, 92

Z



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI JAWA BARAT
Jln. Cinambo No. 136. Ujungberung, Bandung 40294
No.Telepon/Faksimile (022) 7804942